

Keuangan Berkelanjutan: Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDGs

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang membahas konsep keuangan berkelanjutan dari berbagai perspektif, termasuk lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dibuka dengan dasar-dasar keuangan berkelanjutan dan keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), buku ini mengeksplorasi peran instrumen keuangan seperti obligasi hijau, sukuk hijau, dan sosial bonds dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Buku ini membahas tantangan dan peluang implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk regulasi, inovasi teknologi, serta peran industri keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam investasi, serta pengukuran dampak keuangan berkelanjutan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Ditutup dengan perspektif sumber daya manusia, buku ini menekankan perlunya pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung praktik keuangan berkelanjutan. Dengan studi kasus dari dalam dan luar negeri, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi keuangan, regulator, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam mencapai masa depan yang lebih hijau dan inklusif.



Uhamka Press

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
e-mail: press@uhamka.ac.id



ORCID: 62-4371-
3251-111

Keuangan Berkelanjutan: Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDGs



KEUANGAN BERKELANJUTAN

Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDGs

Pengantar
Prof. Dr. Zulpahmi, SE., M.Si. (Dekan FEB Uhamka)

Editor
Ummu Salma Al Azizah, Sumardi



Deni Adha Akbari, Dewi Pudji Rahayu, Melita Larasati, Faizal Ridwan Zamzany, Mila Indriastuti, Asep Sutarmam, Yurianto, Nuryadi Wijiharjono, Bambang Tutuko, Dicky Chandra, Nur Hadiyazid Rachman, Edi Setiawan, Faozan Amar, Ani Silvia, Novita Kusuma Maharani, Diah Ayu Legowati, Hilya Najmi Tsaqib, Ikha Syahrani



KEUANGAN BERKELANJUTAN

Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDGs

Pengantar:

Prof. Dr. Zulpahmi, SE., M.Si (Dekan FEB Uhamka)

Penulis:

Deni Adha Akbari, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati, Faizal
Ridwan Zamzany, Mila Indriastuti, Asep Sutarman, Yurianto,
Nuryadi Wijiharjono, Bambang Tutuko, Dicky Chandra, dan Nur
Hadiyazid Rachman, Edi Setiawan, Faozan Amar, Ani Silvia,
Novita Kusuma Maharani, Diah Ayu Legowati, Hilya Najmi Tsaqib,
Ikha Syahrani



UHAMKA PRESS

KEUANGAN BERKELANJUTAN

Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDG's

Penulis:

Deni Adha Akbari, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati, Faizal Ridwan Zamzany, Mila Indriastuti, Asep Sutarman, Yurianto, Nuryadi Wijiharjono, Bambang Tutuko, Dicky Chandra, dan Nur Hadiyazid Rachman, Edi Setiawan, Faozan Amar, Ani Silvia, Novita Kusuma Maharani, Diah Ayu Legowati, Hilya Najmi Tsaqib, Ikha Syahrani

Editor: Ummu Salma Al Azizah, Sumardi

Layout: Durri Yatul Lumah

Desain Sampul: Jaenudin

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Tebal: vi + 336 halaman

Penerbit: UHAMKA PRESS

Redaksi:

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email: press@uhamka.ac.id

Anggota IKAPI: 493/DKI/VII2014



Cetakan ke-I, April 2026

QRCBN. 62-4371-3251-111

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PENGANTAR TOKOH

Prof. Dr. Zulpahmi, SE., M.Si (Dekan FEB Uhamka)

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya umpulan tulisan berjudul "Keuangan Berkelanjutan: Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDGs" dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani teori dan praktik keuangan berkelanjutan, sekaligus memberikan panduan yang aplikatif bagi akademisi, praktisi, regulator, maupun masyarakat luas yang ingin memahami dan berkontribusi dalam pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan nyata melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam setiap keputusan investasi. Buku ini mencoba menjelaskan konsep dasar, instrumen keuangan modern, tantangan regulasi, inovasi teknologi, manajemen risiko, hingga pengukuran dampak secara komprehensif. Harapannya, pembaca tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diterapkan di berbagai konteks, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Penyusunan buku ini Pelepas dahaya keilmuan yang perlu didukung dari banyak pihak, mulai dari rekan-rekan akademisi, praktisi keuangan, hingga berbagai lembaga yang telah memberikan masukan dan data penting. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, membuka diskusi lebih luas, dan mendorong lahirnya inovasi serta strategi baru dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan. Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi nyata bagi perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia maupun di dunia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Keuangan Berkelanjutan: Integrasi ESG, Inovasi, dan Strategi untuk Mencapai SDG's. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran sektor keuangan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam perkembangan global saat ini, konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi perhatian dalam praktik keuangan modern. Integrasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial serta keberlanjutan lingkungan.

Melalui buku ini, penulis menguraikan berbagai konsep, inovasi, dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu keuangan berkelanjutan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya literatur dan mendorong praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab di masa depan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR TOKOH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAGIAN 1.....	 1
PENDAHULUAN DAN DASAR-DASAR KEUANGAN	
BERKELANJUTAN	1
BAB 1 Konsep Keuangan Berkelanjutan dan Keterkaitannya dengan SDGs.....	2
BAB 2 Keuangan Berkelanjutan dalam Konteks Global	23
BAB 3 Industri Keuangan dalam Mendukung Pembangunan.....	53
 BAGIAN 2.....	 71
PERSPEKTIF KEUANGAN DAN INVESTASI	71
BAB 4 Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Investasi	72
Bab 5 Pengukuran Dampak Keuangan Berkelanjutan	78
 BAGIAN 3.....	 94
PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUSIA	94
BAB 6 Pengembangan Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Keuangan Berkelanjutan	95
BAB 7 Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Organisasi: Perspektif Sumber Daya Manusia.....	125
BAB 8 Kesejahteraan Karyawan dan Keuangan Berkelanjutan: Pendekatan Realisme Kritis dalam Perspektif MSDM.....	164

BAGIAN 4193
PERSPEKTIF PEMASARAN DAN KOMUNIKASI193
BAB 9 | Pemasaran Produk Keuangan Berkelanjutan194
BAB 10 | Strategi Branding Berbasis Keberlanjutan.....204

BAGIAN 5232
PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM ATAU EKONOMI ISLAM.....232
BAB 11 | Keuangan Islam dan kontribusinya terhadap
SDGs.....233
BAB 12 | Sukuk Hijau & Instrumen Keuangan Syariah249
BAB 13 | Wakaf Produktif untuk Pembangunan
Berkelanjutan.....267

DAFTAR PUSTAKA287



BAGIAN 1

PENDAHULUAN DAN DASAR-DASAR

KEUANGAN BERKELANJUTAN



BAB 1 | Konsep Keuangan Berkelanjutan dan Keterkaitannya dengan SDGs

Deni Adha Akbari

Keuangan berkelanjutan telah menjadi elemen krusial dalam upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep ini mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG (Environmental, social, and governance) ke dalam keputusan investasi dan bisnis, dengan tujuan mendukung pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan (Ghunashvili, 2024). Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2014, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pertama yang mengadopsi pendekatan komprehensif ini (Setyowati, 2020). Roadmap tersebut bertujuan untuk meningkatkan skala keuangan berkelanjutan guna mendukung ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui penerbitan instrumen keuangan inovatif seperti green sukuk. Sejak penerbitan green sukuk pertama di dunia pada tahun 2018, Indonesia telah menjadi penerbit terbesar secara global, dengan nilai kumulatif mencapai USD 6,9 miliar pada tahun 2023 (Herbert, 2024). Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mengarahkan investasi ke proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Bank Indonesia telah memperkenalkan insentif makroprudensial untuk mendorong bank-bank menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor hijau, meskipun dampaknya masih terbatas karena penerapannya yang juga mencakup sektor-sektor yang mencemari lingkungan (Herbert, 2024).

Keterkaitan antara keuangan berkelanjutan dan SDGs sangat erat, mengingat pencapaian SDGs membutuhkan investasi tahunan sebesar USD 5,4 triliun hingga USD 6,4 triliun, dengan tambahan USD 7 triliun diperlukan untuk mendukung negara-negara berkembang (Scheichet, 2024). Keuangan berkelanjutan berperan penting dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan ini dengan menyelaraskan investasi korporasi dengan SDGs, menciptakan peluang pasar senilai hingga USD 12 triliun. Melalui integrasi faktor ESG dalam pengambilan keputusan keuangan, keuangan berkelanjutan membantu mengelola risiko jangka panjang terkait perubahan iklim dan gejolak sosial, sehingga mendorong terciptanya ekonomi global yang lebih tangguh (Ghunashvili, 2024).

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan keuangan berkelanjutan dengan SDGs telah menghasilkan beberapa inisiatif penting. Salah satunya adalah pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang mendukung pencapaian SDGs, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem, serta transisi menuju ekonomi sirkular. TKBI dirancang untuk memandu alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan guna mendukung target net zero emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih awal. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyelaraskan sistem keuangannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Namun, implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa lebih dari 90% obligasi berkelanjutan yang diterbitkan oleh entitas Indonesia berdenominasi mata uang asing (Lestor et al., 2023). Hal ini kontras dengan negara-negara ASEAN lainnya, di mana obligasi berkelanjutan sebagian besar diterbitkan dalam mata uang lokal. Selain itu, regulasi obligasi hijau di Indonesia menerapkan persyaratan yang ketat, seperti tinjauan eksternal

wajib dan pembelian kembali, yang dapat menghambat penerbit untuk memilih obligasi hijau di dalam negeri (Lestor et al., 2023). Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan dan peningkatan kapasitas pasar keuangan lokal untuk mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan yang lebih robust.

Guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mempercepat integrasi keuangan berkelanjutan dengan upaya pencapaian SDGs, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah melalui kerjasama dengan mitra pembangunan internasional. Asian Development Bank (ADB), misalnya, mendukung SDG Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), sebuah platform investasi infrastruktur yang bertujuan membantu Indonesia mencapai target-targetnya di bawah Perjanjian Paris dan SDGs (ADB, 2022b). ADB telah menyediakan pinjaman intermediasi keuangan senilai USD 150 juta untuk jangka waktu 20 tahun guna mendukung proyek-proyek yang berfokus pada pemulihan hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga telah mengumumkan rencana untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2060, yang mencakup pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara sebelum akhir siklus hidupnya (Lestor et al., 2023). Transisi ini didukung oleh mekanisme transisi energi, yang merupakan bagian dari inisiatif keuangan berkelanjutan yang lebih luas. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana keuangan berkelanjutan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong transformasi sektor-sektor kunci dalam ekonomi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan SDGs.

Peran keuangan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia juga tercermin dalam pengembangan instrumen keuangan inovatif seperti Kerangka Obligasi SDG. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan instrumen ini untuk mendanai proyek-proyek yang berdampak langsung pada sektor-sektor kritis

seperti kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi (PII, 2024). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memobilisasi sumber daya bagi pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa pembiayaan selaras dengan SDGs.

Meskipun kemajuan yang signifikan telah dicapai, masih ada ruang untuk peningkatan dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Disparitas regional dalam pembangunan, degradasi lingkungan, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengalihkan pembiayaan dari sektor-sektor yang mencemari lingkungan tetap menjadi isu-isu mendesak yang perlu ditangani. Namun, komitmen Indonesia untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil pada tahun 2050 dan upayanya untuk meningkatkan kerjasama internasional memberikan jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dengan terus menyempurnakan kebijakan dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia berpotensi menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan dan bahkan di tingkat global. Integrasi yang efektif antara keuangan berkelanjutan dan upaya pencapaian SDGs tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga akan memastikan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat memaksimalkan potensi keuangan berkelanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh warganya, sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs secara global.

A. Pengertian dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan merupakan konsep yang semakin penting dalam dunia keuangan modern. Konsep ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) ke dalam keputusan investasi, pembiayaan, dan kebijakan keuangan. Tujuan utamanya

adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Phiri, 2021). Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam setiap keputusan keuangan.

Prinsip-prinsip dasar keuangan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam implementasinya. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama, di mana informasi mengenai faktor ESG harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mencegah praktik greenwashing dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik (Sustainability Directory, 2024). Regulasi seperti Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) di Uni Eropa menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan ESG yang terstandarisasi dari pelaku pasar keuangan (IRIS Carbon, 2023).

Akuntabilitas juga menjadi prinsip kunci dalam keuangan berkelanjutan. Lembaga keuangan dan perusahaan harus bertanggung jawab atas komitmen keberlanjutan yang mereka buat. Prinsip ini didukung oleh transparansi, karena informasi yang tersedia memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengawasi dan mempengaruhi perilaku perusahaan. Akuntabilitas tidak hanya tentang kepatuhan, tetapi juga mendorong budaya tanggung jawab dan perbaikan berkelanjutan (Sustainability Directory, 2024). Sebagai contoh, SFDR mengharuskan entitas keuangan untuk mengungkapkan bagaimana mereka memasukkan faktor ESG ke dalam keputusan investasi mereka, sehingga memastikan akuntabilitas atas klaim keberlanjutan yang mereka buat.

Fokus pada dampak jangka panjang menjadi prinsip sentral dalam keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya investasi yang mempertimbangkan konsekuensi masa depan daripada keuntungan jangka pendek. Prinsip ini mengakui keterkaitan antara sistem ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana keputusan di satu area dapat berdampak signifikan pada area lainnya. Keuangan berkelanjutan mendorong investasi yang mengatasi tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, dengan memahami bahwa masalah-masalah ini dapat berubah menjadi risiko keuangan seiring berjalannya waktu (Sustainability Directory, 2024).

Peran keuangan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi hijau dan inklusif sangat penting. Dengan mengarahkan modal ke proyek dan perusahaan yang berkelanjutan, keuangan berkelanjutan membantu mendorong transisi menuju model ekonomi rendah karbon dan inklusif secara sosial (NBS, 2022). Hal ini sangat penting dalam konteks upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang membutuhkan investasi keuangan yang signifikan (Kumar et al., 2022).

Integrasi faktor ESG menjadi inti dari keuangan berkelanjutan. Faktor lingkungan melibatkan penilaian dampak perusahaan terhadap lingkungan alam, termasuk emisi karbon, pengelolaan sumber daya, dan praktik pengelolaan limbah. Perusahaan semakin dituntut bertanggung jawab atas jejak lingkungan mereka, dan upaya mereka untuk mengurangi perubahan iklim sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang (Sorensen, 2025). Pertimbangan lingkungan menjadi pusat pengambilan keputusan keuangan karena dapat secara signifikan mempengaruhi nilai aset dan stabilitas ekonomi.

Faktor sosial dalam keuangan berkelanjutan memeriksa bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Ini mencakup praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan yang memprioritaskan tanggung jawab sosial cenderung membangun hubungan pemangku kepentingan yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan reputasi mereka dan mengurangi kewajiban hukum. Faktor sosial terkait dengan kinerja keuangan, karena perusahaan yang mengabaikan masalah sosial dapat menghadapi kerusakan reputasi dan hilangnya loyalitas pelanggan (FRC, 2024).

Faktor tata kelola dalam keuangan berkelanjutan melibatkan sistem internal kontrol, akuntabilitas, dan transparansi dalam perusahaan. Praktik tata kelola yang baik memastikan operasi yang etis dan selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Ini mencakup keragaman dewan, kompensasi eksekutif, dan transparansi perusahaan (Sorensen, 2025). Tata kelola yang kuat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan investor dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang selaras dengan kepentingan semua pemangku kepentingan (FRC, 2024).

Integrasi faktor ESG ke dalam pengambilan keputusan keuangan tidak hanya tentang manajemen risiko tetapi juga tentang mengidentifikasi peluang untuk penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan yang berkinerja baik pada kriteria ESG sering dianggap lebih tangguh dan lebih baik dalam memanfaatkan tren yang muncul, seperti transisi ke ekonomi rendah karbon. Selain itu, investasi ESG telah mendapatkan daya tarik karena selaras dengan permintaan yang berkembang untuk opsi investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Sorensen, 2025; FRC, 2024).

Kuangan berkelanjutan juga berperan penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan mengarahkan sumber daya keuangan ke proyek dan inisiatif yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial, dan tata kelola yang baik, keuangan berkelanjutan membantu menjembatani kesenjangan pendanaan yang signifikan untuk mencapai SDGs. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan model keuangan berkelanjutan cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam hal SDGs (Ziolo et al., 2020). Ini karena keuangan berkelanjutan mendorong investasi dalam proyek yang selaras dengan tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Kesenjangan keuangan untuk mencapai SDGs memang signifikan, dengan perkiraan menunjukkan bahwa pendanaan tahunan sebesar \$5,4 triliun hingga \$6,4 triliun diperlukan, ditambah \$7 triliun tambahan untuk menutupi kebutuhan terkait lainnya (Scheichet, 2024). Meskipun tantangan ini besar, keuangan berkelanjutan dilihat sebagai pengungkit penting untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Keuangan berkelanjutan mendorong aliran modal menuju industri dan proyek yang berkelanjutan, sehingga mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif

Kuangan hijau, sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan, telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap pencapaian beberapa SDGs, terutama yang terkait dengan energi terjangkau dan bersih, aksi iklim, serta kota dan komunitas yang berkelanjutan (Yadav et al., 2024). Dengan berfokus pada investasi yang ramah lingkungan,

keuangan hijau membantu mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, keuangan berkelanjutan mendorong inklusi keuangan dan transisi energi, yang sangat penting untuk mencapai SDGs. Inklusi keuangan memastikan lebih banyak orang memiliki akses ke layanan keuangan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan (Xiao et al., 2024). Dengan demikian, keuangan berkelanjutan tidak hanya menyediakan pendanaan yang diperlukan, tetapi juga menyelaraskan praktik keuangan dengan tujuan keberlanjutan yang lebih luas, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dengan mengorbankan lingkungan atau kesetaraan sosial.

B. Keuangan Berkelanjutan dan SDGs

Keuangan berkelanjutan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Praktik keuangan ini mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam keputusan investasi, menyelaraskan sistem keuangan dan investasi dengan SDGs (UN, 2025; EU, 2024). Pendekatan ini sangat penting untuk mentransformasi ekonomi agar memberikan manfaat bagi alam dan masyarakat, serta mendukung investasi berkelanjutan pada skala dan kecepatan yang diperlukan untuk memenuhi SDGs dan Perjanjian Paris (Scheichet, 2024). Keuangan berkelanjutan membantu menyalurkan sumber daya keuangan ke proyek-proyek yang mendorong pembangunan berkelanjutan, seperti yang berfokus pada energi bersih, aksi iklim, dan pengentasan kemiskinan. Dengan menyelaraskan arus keuangan dengan tujuan keberlanjutan, keuangan berkelanjutan dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan membangun ekonomi global yang lebih tangguh (CBI, 2023).

Lembaga keuangan dan investor memiliki peran kunci dalam proses ini dengan mengintegrasikan target SDGs ke dalam strategi dan portofolio investasi mereka. Integrasi ini tidak hanya membantu mencapai SDGs tetapi juga membuka peluang investasi dan bisnis baru (Dawson, 2017). Industri jasa keuangan, dengan mendanai SDGs, dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (IDB, 2020). Salah satu pendekatan untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi investasi adalah melalui pemetaan kepemilikan investasi ke target SDG tertentu. Misalnya, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) telah mengembangkan metode untuk menyelaraskan strategi investasi dengan sub-target SDG. Ini melibatkan penggunaan data dari penyedia data SDG untuk memetakan setiap kepemilikan investasi ke target SDG yang relevan (Matthews, 2024).

Namun, implementasi praktik keuangan berkelanjutan yang selaras dengan SDGs menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs, yang membutuhkan solusi keuangan inovatif dan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Selain itu, ada kebutuhan akan data dan metrik yang lebih komprehensif untuk secara efektif mengukur dampak keuangan berkelanjutan terhadap pencapaian SDG. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengumpulan dan pengelolaan data. Lembaga keuangan dan investor perlu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan berbagai data dari klien mereka untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar keuangan berkelanjutan seperti EU Taxonomy dan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Proses ini memerlukan investasi signifikan dalam teknologi dan

manajemen data, serta pengembangan kebijakan dan prosedur internal yang tepat.

Meskipun ada tantangan, studi kasus dan contoh keuangan berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDG menunjukkan potensinya. Misalnya, inisiatif keuangan hijau telah berhasil memobilisasi sumber daya keuangan untuk proyek-proyek yang berkelanjutan secara lingkungan, mendemonstrasikan efektivitas keuangan berkelanjutan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Boubaker & Le, 2024). Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan Obligasi Dampak Sosial (social impact bonds/SIB), yang merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan hasil sosial dan lingkungan. Obligasi ini disusun agar sepenuhnya sesuai dengan struktur kemitraan keuangan berbasis SDG, menunjukkan bagaimana produk keuangan inovatif dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Rizzello & Kabli, 2020).

Di Indonesia, keadaan keuangan berkelanjutan saat ini sedang berkembang, dengan upaya yang semakin meningkat untuk menyelaraskan praktik keuangan dengan tujuan keberlanjutan. Ini termasuk inisiatif untuk mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan dan mempromosikan investasi di sektor-sektor yang berkontribusi pada SDGs. Salah satu inisiatif utama dalam mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah penerbitan sukuk hijau, yang merupakan instrumen keuangan Islam yang mirip dengan obligasi, tetapi sesuai dengan hukum syariah. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, menjadikannya sebagai penerbit sukuk hijau terbesar di dunia dengan total

nilai penerbitan mencapai USD 6,9 miliar pada tahun 2023 (Moegiarso, 2023).

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan lokal tentang obligasi hijau dan sukuk, yang mengakibatkan sebagian besar obligasi berkelanjutan diterbitkan dalam mata uang asing di luar negeri. Regulasi yang ketat dan persyaratan tambahan untuk penerbitan obligasi hijau di Indonesia juga menjadi hambatan bagi penerbit lokal, yang lebih memilih menerbitkan obligasi konvensional atau berkelanjutan di luar negeri. Selain itu, meskipun ada insentif makroprudensial untuk mendorong pemberian pinjaman hijau, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena juga diterapkan pada sektor-sektor yang sangat mencemari, seperti pertambangan dan transportasi.

Secara keseluruhan, keuangan berkelanjutan adalah alat vital untuk mengelola risiko keberlanjutan dan memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat untuk ekonomi yang lebih berkelanjutan (OECD, 2024). Dengan menyelaraskan sistem keuangan dengan SDGs, keuangan berkelanjutan tidak hanya mendukung pencapaian tujuan global ini tetapi juga mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Beberapa SDG yang paling erat terkait dengan praktik keuangan berkelanjutan termasuk SDG1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat) (UNDP, 2015; SE for All, 2024; UN, 2023; Bonnedahl et al., 2022).

Guna mengatasi tantangan dalam implementasi keuangan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam industri keuangan, termasuk bank, investor, dan regulator. Kolaborasi industri keuangan dapat membantu dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif. Selain itu, pengembangan tata kelola yang didedikasikan untuk topik ini serta proses dan sistem baru untuk pengumpulan data, kepatuhan, dan pelaporan dapat membantu lembaga keuangan memaksimalkan manfaat dari standar pelaporan keuangan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga keuangan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian SDGs, memastikan bahwa investasi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

C. Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Instrumen keuangan berkelanjutan telah menjadi komponen penting dalam upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Obligasi hijau, obligasi sosial, dan obligasi berkelanjutan merupakan tiga jenis instrumen utama yang saat ini tersedia di pasar keuangan untuk mendukung proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Obligasi hijau dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi bersih, dan adaptasi perubahan iklim (PIMCO, 2025). Mekanisme obligasi hijau melibatkan penerbitan surat utang yang dananya dikhususkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dengan panduan dari Prinsip Obligasi Hijau (Green Bond Principles) yang ditetapkan oleh International Capital Market Association (ICMA) (PIMCO, 2025). Prinsip-

prinsip ini mempromosikan transparansi dan standarisasi pelaporan mengenai tujuan dan dampak lingkungan dari obligasi tersebut, sehingga memungkinkan investor untuk mengevaluasi kontribusi investasi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, obligasi sosial berfokus pada pembiayaan proyek-proyek yang menghasilkan dampak sosial positif. Proyek-proyek ini seringkali ditujukan untuk populasi tertentu seperti masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, komunitas terpinggirkan, migran, dan penyandang disabilitas (PIMCO, 2025). Prinsip Obligasi Sosial (Social Bond Principles) yang juga dikembangkan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA), memberikan pedoman untuk memastikan transparansi dan pengungkapan dalam pasar obligasi sosial, membantu investor mengevaluasi dampak sosial dari investasi mereka (PIMCO, 2025). Perkembangan terbaru telah melihat munculnya obligasi sosial terkait COVID-19 yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang diperparah oleh pandemi, menunjukkan fleksibilitas instrumen ini dalam merespons tantangan global yang mendesak (PIMCO, 2025).

Obligasi berkelanjutan merupakan hibrida dari obligasi hijau dan sosial, di mana dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kombinasi proyek hijau dan sosial. Obligasi ini mematuhi Pedoman Obligasi Berkelanjutan dari ICMA, yang selaras dengan Prinsip Obligasi Hijau dan Prinsip Obligasi Sosial, memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria untuk dampak lingkungan dan sosial (PIMCO, 2025). Fokus ganda ini memungkinkan penerbit untuk mengatasi berbagai tantangan keberlanjutan melalui satu instrumen keuangan, menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme dan kriteria seleksi untuk ketiga jenis obligasi ini melibatkan proses penilaian yang ketat untuk memastikan bahwa proyek yang didanai memenuhi kriteria keberlanjutan tertentu. Proses ini biasanya melibatkan evaluasi potensi dampak proyek terhadap SDGs dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan hasil. Pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang terstandarisasi, seperti Prinsip Obligasi Hijau dan Prinsip Obligasi Sosial, telah sangat membantu dalam memberikan kejelasan dan konsistensi di pasar, sehingga meningkatkan kepercayaan investor (UNEPFI, 2022).

Di Indonesia, keuangan berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian, dengan pemerintah dan lembaga keuangan secara aktif mempromosikan pengembangan obligasi hijau dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sistem keuangan dan mendukung komitmen negara terhadap SDGs. Pasar Indonesia melihat peningkatan penerbitan obligasi-obligasi ini, mencerminkan tren global menuju praktik investasi berkelanjutan (Arora & Sarker, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang keuangan berkelanjutan, yang sangat penting untuk memahami terminologi dan kerangka kerja resmi yang digunakan di Indonesia (Abubakar, 2021).

Studi kasus menunjukkan dampak instrumen keuangan ini di berbagai sektor. Misalnya, penerbitan obligasi hijau telah berkontribusi secara signifikan terhadap ekspansi proyek energi terbarukan, yang sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan solusi energi berkelanjutan. Demikian pula, obligasi sosial telah digunakan untuk membiayai proyek perumahan terjangkau, meningkatkan kondisi hidup keluarga berpenghasilan

rendah dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan (Rizzello & Kabli, 2020). Di sektor transportasi, program bantuan teknis berbasis hibah telah memfasilitasi transisi ke bus listrik di Kolkata, India, mengurangi emisi CO₂ dan meningkatkan kualitas udara. Kasus ini menyoroti pentingnya model pembiayaan inovatif dalam mengatasi hambatan keuangan untuk adopsi teknologi bersih (CAF, 2023).

Tren saat ini menunjukkan minat yang semakin besar terhadap keuangan berkelanjutan, dengan semakin banyak investor yang berusaha menyelaraskan portofolio mereka dengan SDGs. Pergeseran ini didorong oleh pengakuan akan nilai jangka panjang dan ketahanan yang dapat ditawarkan oleh investasi berkelanjutan, serta tekanan regulasi dan sosial yang semakin besar untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial (Zhan & Santos-Paulino, 2021). Pasar untuk obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan telah tumbuh secara signifikan, dengan berbagai penerbit termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan (Moore & Gimber, 2024).

Namun, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan keuangan berkelanjutan sepenuhnya ke dalam sistem keuangan arus utama. Masalah seperti menyelaraskan Taksonomi Indonesia yang baru dengan kepentingan nasional dan memastikan viabilitas jangka panjangnya merupakan area yang menjadi perhatian. Selain itu, ada kebutuhan akan data yang konsisten dan otoritatif tentang manajemen risiko ESG untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi (IFC, 2022). Ke depan, fokus kemungkinan akan diarahkan pada memperluas cakupan keuangan berkelanjutan untuk mencakup produk keuangan yang lebih beragam dan meningkatkan partisipasi berbagai sektor dalam inisiatif keberlanjutan.

Kolaborasi antara organisasi internasional, seperti Asian Development Bank dan Climate Bonds Initiative, diharapkan dapat lebih memperkuat pertumbuhan pasar keuangan hijau di Indonesia (ADB, 2022a). Pengembangan berkelanjutan dari instrumen keuangan ini tidak hanya mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan instrumen keuangan berkelanjutan, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam keuangan berkelanjutan, mendorong inovasi dan investasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang negara.

D. Tantangan dan Peluang dalam Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kerangka regulasi yang belum sepenuhnya matang. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan untuk membimbing lembaga keuangan dalam menerapkan praktik berkelanjutan, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memberikan panduan yang jelas dan insentif bagi perusahaan (Meutia et al., 2020). Ketidakpastian regulasi ini dapat menghambat investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, terutama di pasar yang kurang berkembang di mana data dan informasi yang diperlukan untuk menilai risiko sering kali tidak memadai.

Kesenjangan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di kalangan pelaku pasar dan masyarakat umum juga menjadi hambatan signifikan. Banyak perusahaan dan investor belum sepenuhnya memahami pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam keputusan bisnis dan investasi mereka. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat adopsi praktik keuangan berkelanjutan dan mengurangi potensi dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Meutia et al., 2020). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang ESG dan manfaatnya bagi bisnis dan masyarakat.

Risiko investasi juga menjadi perhatian utama dalam keuangan berkelanjutan. Risiko-risiko ini sering kali baru dan sulit untuk diukur, membuat manajer investasi, bank, dan perusahaan sekuritas menghadapi tantangan dalam mengelola portofolio mereka. Ketidakpastian ini dapat menghalangi investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, terutama di sektor-sektor yang memerlukan inovasi teknologi tinggi seperti energi terbarukan atau transportasi bersih. Pengembangan alat dan metodologi baru untuk mengukur dan mengelola risiko ESG dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih informasi dan mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan investasi berkelanjutan.

Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, keuangan berkelanjutan juga menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Inovasi keuangan telah mendorong pengembangan instrumen baru seperti obligasi hijau dan sukuk hijau, yang telah memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN (CDP, 2021). Penerbitan obligasi SDG pertama di Asia

Tenggara oleh Indonesia, yang berhasil mengumpulkan EUR 500 juta untuk membiayai proyek-proyek sosial dan lingkungan, menunjukkan komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemampuannya untuk menarik investasi internasional (JSDGF, 2021).

Potensi pertumbuhan pasar untuk keuangan berkelanjutan di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya permintaan global untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan, perusahaan Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing internasional. Sektor-sektor seperti energi terbarukan dan transportasi bersih dianggap sebagai area yang menjanjikan untuk investasi, dengan minat yang kuat dari investor institusional lokal terhadap obligasi hijau (Lestor et al., 2023).

Manfaat reputasi bagi perusahaan yang proaktif dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan juga signifikan. Perusahaan yang menyelaraskan operasi mereka dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan dengan konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas merek, karena konsumen cenderung mendukung perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial (ZCT, 2024). Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang ketat dan standar pelaporan keberlanjutan dapat mengurangi risiko dan mendorong inovasi, terutama dalam teknologi hijau.

Guna memanfaatkan peluang-peluang ini sekaligus mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pengembangan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif dapat memberikan panduan

yang diperlukan bagi pelaku pasar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memperluas kerangka regulasinya untuk mencakup jenis obligasi berkelanjutan lainnya, seperti obligasi sosial dan obligasi keberlanjutan, yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan dana (Lestor et al., 2023).

Peningkatan kapasitas lokal melalui bantuan teknis dan inisiatif pengembangan kapasitas juga sangat penting untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan (Lestor et al., 2023). Hal ini dapat mencakup pelatihan untuk profesional keuangan tentang penilaian risiko ESG, pengembangan produk keuangan berkelanjutan, dan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memainkan peran kunci dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inisiatif keuangan berkelanjutan.

Integrasi teknologi juga menawarkan peluang signifikan untuk mengatasi tantangan dalam keuangan berkelanjutan. Penggunaan analitik data yang canggih dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi penilaian metrik ESG, memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memastikan transparansi dalam investasi berkelanjutan (Gul, 2024). Teknologi ini juga dapat memfasilitasi pengembangan produk dan layanan keuangan baru yang selaras dengan tujuan keberlanjutan, sehingga memperluas cakupan keuangan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam keuangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi

secara signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui inovasi keuangan, pengembangan pasar yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, Indonesia dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan lingkungan dan sosial jangka panjang.

BAB 2 | Keuangan Berkelanjutan dalam Konteks Global

Dewi Pudji Rahayu

Keuangan berkelanjutan dalam konteks global adalah kunci untuk mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan internasional, regulasi, dan instrumen keuangan yang mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya finansial untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin mendesak di seluruh dunia. Keuangan Berkelanjutan dalam Konteks Global mengacu pada pendekatan keuangan yang mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi dan bisnis. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi aliran dana ke proyek dan sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (UNEP, 2021).

Secara global, keuangan berkelanjutan telah berkembang menjadi agenda yang penting di seluruh dunia, hal dipengaruhi oleh kebijakan internasional, perubahan iklim, dan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Adapun beberapa hal penting yang ada pada keberlanjutan keuangan global diantaranya adalah:

1. Elemen Utama Keuangan Berkelanjutan Global. Investasi dengan Prinsip ESG: Keuangan berkelanjutan mengarah pada pembiayaan yang memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola. Prinsip ESG ini mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa perusahaan dan proyek yang didanai tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi

juga memberikan manfaat positif terhadap masyarakat dan lingkungan (finance.ec.europa.eu).

2. Peran Pemerintah dan Lembaga Internasional: Banyak negara dan lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan Uni Eropa, telah mengembangkan kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Contohnya, European Union Action Plan on Sustainable Finance (2018) dan Paris Agreement on Climate Change (2015), yang berfokus pada transisi menuju ekonomi rendah karbon.
3. Pengembangan Instrumen Keuangan Berkelanjutan: Instrumen seperti Green Bonds, Sukuk Hijau, Social Bonds, dan Sustainability-Linked Bonds telah diperkenalkan untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Misalnya, Green Bonds digunakan untuk mendanai proyek yang berfokus pada energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan efisiensi energi (World Bank, 2020).
4. Regulasi dan Standar Global: Berbagai standar dan kerangka kerja global telah dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan berkelanjutan. Beberapa contoh termasuk: GRI, PRI, TCFD, dan EU Taxonomy for Sustainable Activities.
5. Pengalihan Modal ke Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan: Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mempercepat aliran dana ke sektor-sektor yang dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan sektor-sektor lain yang mendukung pengurangan emisi karbon (OECD, 2020).
6. Dampak Perubahan Iklim: Perubahan iklim adalah tantangan besar bagi sistem keuangan global. Oleh karena itu, banyak negara dan perusahaan yang berupaya untuk menilai dan mengelola risiko perubahan iklim dalam portofolio mereka, termasuk dengan memperkenalkan peraturan seperti EU Taxonomy for Sustainable Activities

yang mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan.

7. Peran Pasar Keuangan Global: Pasar keuangan global, termasuk bank, investor, dan perusahaan asuransi, memainkan peran penting dalam pengalihan dana ke sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi di sektor-sektor ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, tetapi juga untuk mengurangi risiko terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan (NGFS, 2021).

Arti pembangunan keuangan berkelanjutan dan organisasi global keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

A. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)

SDG's sebagai program global yang diinisiasi oleh PBB untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di muka bumi. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan global diantaranya kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim dan memastikan adanya ketersediaan pendidikan, kesehatan dan air bersih (BAPPENAS, 2020). Tujuh belas tujuan itu diantaranya:

1. Tanpa Kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun)
2. Tanpa Kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua.
4. Pendidikan Berkualitas, menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat.
5. Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau, Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, dan produktif.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi inklusif, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara)
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, mewujudkan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan)
13. Penanganan Perubahan Iklim, mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem Lautan, melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan, melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat, mendorong masyarakat damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, menguatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. (UN, 2015)

Konteks pembangunan berkelanjutan dalam SDG's diartikan sebagai:

- a. Usaha mengurangi kemiskinan (SDG No 1) contohnya kemudahan akses layanan keuangan seperti peminjaman, tabungan dan asuransi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengelola keuangan yang pada akhirnya diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, Menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG No.8), contoh peningkatan literasi keuangan sehingga mendorong banyak individu dan masyarakat menggunakan fasilitas ekonomi digital yang memudahkan dalam mengakses permodalan dan fasilitas pertumbuhan usaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pembiayaan inovatif dibutuhkan dalam menyerap investasi khusus peningkatan infrastruktur dan energi terbarukan. UMKM sebagai bagian usaha masyarakat perlu mendapatkan perhatian juga baik dalam mendapatkan akses permodalan dan peningkatan kemampuan pelaporan dan pencatatan serta memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga UMKM naik kelas menjadi bagian dari kontributor pembangunan supaya ekonomi bangsa ekonomi berdaya. Menurut Aust et. Al. (2020) ada hubungan antara kontribusi investasi terhadap pencapaian SDG's.
- b. Mengurangi kesenjangan (SDG No 10), Contoh dengan pembangunan infrastruktur keuangan yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi utamanya di daerah yang tertinggal dan perbatasan yang masih susah mengakses fasilitas keuangan. Contoh lainnya

adalah peningkatan dan memajukan keuangan syariah sehingga mampu berkontribusi dalam inklusi keuangan, usaha mengurangi jumlah kemiskinan dan peningkatan ekonomi yang inklusif, ekonomi inklusif menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) diartikan sebagai pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan akses dan kesempatan terhadap semua kelompok masyarakat dan berkeadilan meliputi seluruh wilayah NKRI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2020). Dengan melakukan 3 pilar diantaranya Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan jumlah kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan dalam ekonomi (Alamisharia.co.id)

- c. Membangun masyarakat yang inklusif dan damai (SDG 16). Contohnya adanya pembangunan keuangan yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan mampu menciptakan perdamaian dan keadilan yang lebih baik. (Departemen Ekonomi dan Bisnis UGM., 2024)

B. Menurut WEF (World Economic Forum)

Sustainable Finance diartikan penyelarasan sistem ekonomi dalam hal sistem keuangan dengan dukungan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam konteks peningkatan pembangunan (OJK, 2021). Lembaga ini bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan mengurangi dampak dan resiko pada lingkungan dan masyarakat. Peran forum WEF yang diikuti oleh para pemimpin bisnis dan pemerintah dan masyarakat global yang aktif mengangkat isu keuangan keberlanjutan secara global, kemudian mengembangkan platform kolaborasi, memberikan solusi dan kebijakan yang

mendukung keuangan keberlanjutan, serta mengembangkan standar dan kerangka kerja sebagaimana adanya ekonomi hijau dan terakhir berusaha meningkatkan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan dan manfaat untuk masyarakat, ekonomi dan lingkungan (World Economic Forum., 2023). Pada pertemuan tahunan 2025 di Swiss menekankan pada sinergisitas global keuangan berkelanjutan (World Economic Forum, 2025). Pada kesempatan WEF itu, Indonesia membuat Paviliun sebagai pusat ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada sektor hilirisasi industri, energi terbarukan, pertanian dan industri makanan, farmasi dan alat kesehatan, ekonomi digital, ekosistem semikonduktor, IKM dan industri Manufaktur berorientasi ekspor (Ekon.go.id., 2025).

C. Menurut World Bank

Pembangunan keuangan berkelanjutan menurut World Bank (Kumajas dkk, 2022) merupakan pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ESG (Environment, Social and Governance) Kumajas Et.al, 2022). Sistem kerja Bank dunia dalam hal ini adalah menggunakan CPF (Country Partnership Framework (CPF) yaitu berbagai negara yang mendukung penguatan daya saing ekonomi, peningkatan infrastruktur dan ketahanan. Peran Bank Dunia diantaranya yaitu mendukung pembangunan untuk menyediakan sumber daya keuangan, keahlian teknis dan saran kebijakan di beberapa sektor utama diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur (World Bank, 2020). Evaluasi yang dilakukan oleh India terhadap peran bank dunia dalam menangani kemiskinan, keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim, pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur membawa dampak yang besar diantaranya adanya infrastruktur desa yang meliputi

jalan, irigasi dan akses air bersih, adanya prakarsa energi terbarukan adanya dana adaptasi nasional untuk perubahan iklim, adanya reformasi bidang kesehatan terkait penyediaan pelayanan kesehatan, pembangunan tol dan adanya konservasi air, dari program tersebut tantangan terbesar adalah implementasi proyek dan keberlanjutan utang. (uppc magazine.com).

Inisiatif global yang telah dilakukan Bank Dunia (World Bank.com) diantaranya:

- a) Program Penasihat Keuangan berkelanjutan. Bank dunia memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang seperti pengembangan pasar obligasi hijau, biru dan sosial, baik proses sebelum dan sesudah penerbitan obligasi dan membantu membangun infrastruktur pasar modal.
- b) Pembiayaan UMKM yang berkelanjutan. Demi meningkatkan akses UMKM dalam pembiayaan yang mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan, contohnya pemberian modal pada UMKM di Republik Kirgizstan.
- c) Kebijakan Pembiayaan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Finance Policy/SDFP). Bank dunia mendorong negara-negara yang menerima bantuan untuk mengadopsi proyek transparan dan berkelanjutan dengan memfasilitasi koordinasi antara bank dunia dan kreditor.
- d) Program Global Berkelanjutan (Global Program on Sustainability/GPS). Program ini membantu negara dalam mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, dengan menyediakan data berkualitas terkait sumber daya alam dan layanan ekosistem, serta menganalisis resiko dan peluang keuangan berkelanjutan.

- e) Obligasi Pembangunan Berkelanjutan, Bank Dunia menerbitkan obligasi Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi sumber pembiayaan proyek dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif.
- f) Pusat Pengetahuan Keuangan Berkelanjutan untuk Afrika Francophone. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dalam keuangan berkelanjutan.

D. United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI)

Lembaga ini memiliki kemitraan global antara Program Lingkungan Hidup (UNEP) dan sektor keuangan internasional. Inisiatif ini dilakukan untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Berikut adalah tujuan UNEP FI diantaranya adalah

1. Mendorong praktek keuanganyang bertanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan.
2. Membantu memahami dan pengelolaan resiko terkait isu lingkungan dan sosial pada lembaga keuangan.
3. Mendorong kebijakan publik utama terkait ekonomi hijau dan inklusif (UNEPFI.org).

Berikut adalah kegiatan UNEP FI:

- a. Menyusun panduan dan standar terkait keuangan berkelanjutan secara internasional
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop terkait keuangan berkelanjutan, diantaranya tentang Mengelola risiko lingkungan dan sosial, Mengintegrasikan faktor ESG (Environmental, Social, Governance) dan memahami skenario perubahan iklim dan dampaknya terhadap keuangan.

- c. Menyediakan riset dan publikasi terkait berbagai laporan, panduan teknis serta studi kasus mengenai pembiayaan iklim dan transisi energi, resiko dan transisi perubahan iklim, dan dampak sosial dari kebijakan keuangan yang dihasilkan.
- d. Membuat inisiatif diantaranya:
 - Principles for Responsible Banking (PRB)
 - Principles for Sustainable Insurance (PSI)
 - Net-Zero Banking Alliance (NZBA)
 - Principles for Responsible Investment (PRI) (bersama dengan PRI Association)
- e. Membafasilitasi kolaborasi global, berupa paltform kolaborasi baik berupa forum tahunan, working group maupun kemitraan publik.
- f. Advokasi dalam kebijakan publik, dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan regulator terkait kebijakan dalam pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan, adopsi kerangka kerja ESG dan mengembangkan ekonomi hijau.

UNEP FI akan meminta bank atau asuransi yang tergabung untuk menandatangani prinsip-prinsip tanggungjawab lingkungan dan sosial (Unepfi.org).

E. International Finance Corporation (IFC) – bagian dari World Bank Group

IFC didirikan untuk mendukung sektor swasta di negara-negara berkembang. Didirikan pada tahun 1956, tujuan utama lembaga ini mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor swasta (IFC, org), lembaga ini berbeda dengan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association).

Tabel 1. Perbedaan Organisasi IBRD IDA dan IFC

Aspek	IBRD	IDA	IFC
Kepanjangan	International Bank for Reconstruction and Development	International Development Association	International Finance Corporation
Fokus utama	Pinjaman untuk negara berkembang menengah (middle-income countries)	Bantuan untuk negara termiskin (low-income countries)	Investasi di sektor swasta (perusahaan, bisnis) di negara berkembang
Jenis pembiayaan	Pinjaman dengan suku bunga relatif rendah	Pinjaman tanpa bunga (grant/soft loans)	Investasi ekuitas, pinjaman ke perusahaan swasta, layanan penasihat
Target	Pemerintah nasional	Pemerintah nasional	Perusahaan dan sektor swasta
Tujuan	Pembangunan ekonomi negara, infrastruktur, reformasi kebijakan	Membantu negara miskin mengatasi kemiskinan ekstrem	Memperkuat sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
Didirikan	1944	1960	1956

Sumber: Worldbank.org. dan Ifc.org

Beberapa debut IFC terhadap keuangan berkelanjutan global diantaranya yaitu:

1. Adanya Green Bond Pertama IFC, Green Bond (obligasi hijau) mendanai proyek-proyek ramah lingkungan diantaranya proyek energi terbarukan, efisiensi energi dan pengelolaan air bersih. Penerbitan green bond ini menjadi rujukan yang berstandar tinggi dan ikutb mensukseskan pertumbuhan pasar green bond dunia.
2. IFC Performance Standards (2006, diperbarui 2012), yaitu pedoman wajib untuk semua klien IFC, mencakup perlindungan hak asasi manusia, konservasi lingkungan, dan tanggung jawab sosial. IFC mengembangkan Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Standar diadopsi secara luas oleh sektor keuangan, termasuk bank-bank global melalui Equator Principles.
3. Sustainability Framework IFC, adalah mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam seluruh siklus investasi mereka, bukan sekadar produk tambahan, meliputi screening, monitoring, dan penilaian dampak setiap investasi.
4. Investasi pada Energi Terbarukan dan Green Infrastructure. IFC aktif berinvestasi dalam proyek-proyek energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan proyek infrastruktur hijau di negara berkembang.
5. Pembentukan 'Operating Principles for Impact Management' (2019), IFC memimpin peluncuran prinsip-prinsip ini untuk membantu investor mengelola investasi berdampak (impact investing) secara transparan dan akuntabel.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran IFC adalah mendorong keuangan berkelanjutan, dari standar investasi bertanggung jawab, penerbitan green bonds,

hingga membangun ekosistem keuangan yang lebih memperhatikan sosial dan lingkungan. (IFC, 2012, 2019)

F. European Union (EU)

European Union (EU) atau Uni Eropa adalah organisasi bidang politik dan ekonomi yang beranggotakan 27 negara ada di Eropa, yang bekerja sama dalam berbagai bidang diantaranya adalah bidang ekonomi, perdagangan, hukum, lingkungan, dan bahkan keamanan. Salah satu tujuan EU adalah menghadapi tantangan global baik terkait perubahan iklim, lingkungan dan migrasi. (Europa.union).

Keuangan berkelanjutan di Uni Eropa memiliki arti sebagai tindakan mengalihkan arus uang (investasi, pembiayaan, dana) ke proyek atau perusahaan yang ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG: Environmental, Social, Governance) (European Commision). Tujuan keuangan berkelanjutan adalah

1. Mendukung adanya transisi keuangan hijau
2. Mengatasi perubahan iklim dunia khususnya di Eropa
3. Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi jangka Panjang

Keuangan berkelanjutan di Uni Eropa bukan lagi opsional akan tetapi wajib dan sudah jadi bagian inti dari ekonomi di Eropa. Uni Eropa bahkan ingin jadi pemimpin global dalam keuangan hijau. Adapun langkah-langkah yang dilakukan EU dalam keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. EU Action Plan on Sustainable Finance (2018), rencana besar Uni Eropa untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sistem keuangan mereka. Contoh saat ini bank-bank yang ada di Eropa wajib mengevaluasi dampak lingkungan dari dan proyek yang akan didanai.

2. EU Taxonomy for Sustainable Activities (2020), aktifitas ini adalah "kamus resmi" kegiatan ekonomi yang dianggap ramah lingkungan, misal: energi matahari, bangunan hijau, kendaraan listrik, dll.)
3. SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (2021), mengharuskan perusahaan keuangan dan investor di Eropa melaporkan bagaimana investasi mereka berdampak terhadap keberlanjutan. Di Eropa dana pensiun dialokasikan sebagai aset ke investasi berkelanjutan. (EC, 2021)
4. Green Bond Standard (sedang dikembangkan), membuat standar baku bagi obligasi hijau di Eropa supaya lebih terpercaya dan transparan. Uni Eropa meluncurkan Next Generation sebagai paket stimulus terbesar dalam sejarah Eropa.
European Green Deal (2019), target besar Uni Eropa: menjadi netral karbon pada tahun 2050. Keuangan berkelanjutan adalah salah satu motor pendukung utamanya.

G. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adalah kelompok kerja internasional yang dibentuk oleh Financial Stability Board (FSB) pada tahun 2015, atas permintaan negara-negara G20. Banyak negara (termasuk Inggris, Jepang, Uni Eropa) sudah mewajibkan atau mendorong pelaporan berbasis TCFD. Bahkan IFRS Foundation (standar akuntansi global) menggunakan TCFD sebagai dasar pembentukan ISSB (International Sustainability Standards Board). Fokus kerja TCFD diantaranya memperbaiki tata kelola, strategi, manajemen risiko dan pengukuran iklim.

Tujuannya TCFD adalah

1. Membuat standar supaya perusahaan mampu mengungkapkan risiko dan peluang terkait bagaimana perubahan iklim dan laporan keuangan.
2. Bagaimana investor mampu memberikan pinjaman dan pemangku kepentingan terkait isu iklim sehingga lebih terinformasikan.

TCFD menjadi pilar penting terhadap pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Krisis iklim memiliki dampak terhadap nilai perusahaan contohnya adalah resiko fisik terhadap banjir atau dampak resiko transisi perubahan regulasi karbon.
2. Aturan sudah ada, tetapi banyak perusahaan yang tidak melaporkan dampak iklim secara jelas.
3. TCFD membuat kerangka kerja standar untuk pelaporan terkait resiko iklim pada pasar keuangan.

Banyak negara (termasuk Inggris, Jepang, Uni Eropa) sudah mewajibkan atau mendorong pelaporan berbasis TCFD. Bahkan IFRS Foundation (standar akuntansi global) menggunakan TCFD sebagai dasar pembentukan ISSB (International Sustainability Standards Board).

Keberlanjutan keuangan menurut Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) merujuk pada penerapan prinsip-prinsip transparansi terkait dampak perubahan iklim terhadap sektor keuangan. TCFD mengembangkan rekomendasi untuk membantu perusahaan dalam mengungkapkan risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi kondisi finansial mereka (TCFD, 2017).

Empat pilar utama yang disarankan oleh TCFD untuk mencapai keberlanjutan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Governance: Perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan bagaimana pemerintahan perusahaan menangani risiko dan peluang terkait perubahan iklim dalam proses pengambilan keputusan.
2. Strategy: Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi strategi jangka panjang mereka, baik dalam hal risiko fisik (seperti bencana alam) atau risiko transisi (seperti kebijakan perubahan iklim atau perubahan teknologi).
3. Risk Management: Organisasi perlu mengungkapkan bagaimana mereka mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan iklim dalam proses manajemen risiko mereka.
4. Metrics and Targets: Perusahaan diminta untuk menggunakan metrik dan target yang relevan untuk mengukur dan mengungkapkan kinerja mereka dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk emisi gas rumah kaca (GHG), penggunaan energi, dan target pengurangan karbon.

Lebih lanjut dalam laporan final TCFD keberlanjutan keuangan diantaranya adalah

1. Meningkatkan Transparansi Risiko Iklim, sebelum ada TCFD, banyak perusahaan tidak melaporkan risiko perubahan iklim dengan jelas atau bahkan mengabaikannya. TCFD mendorong perusahaan mengungkapkan bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi keuangan dan strategi bisnis mereka. Investor jadi bisa melihat: "Apakah perusahaan ini siap menghadapi krisis iklim?"

2. Membantu Investor dan Lembaga Keuangan Mengambil Keputusan Lebih Baik, dengan laporan berbasis TCFD, bank, investor, asuransi bisa menilai risiko iklim dari portofolio mereka. Ini membantu mengalihkan investasi ke bisnis yang lebih tahan iklim (climate-resilient businesses) dan menghindari aset yang berisiko tinggi (seperti batu bara, minyak).
3. Mempercepat Aliran Modal ke Proyek Berkelanjutan, ketika risiko dan peluang iklim diungkapkan secara terbuka, modal (investasi) lebih mudah mengalir ke sektor energi bersih, teknologi hijau, dan infrastruktur hijau. Ini mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon.
4. Menstandarkan Pelaporan Keuangan Terkait Iklim Secara Global, TCFD memberi kerangka baku: empat pilar yang seragam (Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Targets). Ini menghindari laporan "greenwashing" yang tidak terstandar dan sulit dibandingkan.
5. Meningkatkan Ketahanan Sistem Keuangan Global, dengan memahami risiko iklim sejak awal, sistem keuangan dunia (bank, pasar modal) bisa mengantisipasi guncangan ekonomi dari perubahan iklim (seperti bencana alam besar atau perubahan kebijakan iklim tiba-tiba).

H. Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) dan International Sustainability Standards Board (ISSB)

1. CDSB adalah organisasi internasional yang menyediakan kerangka kerja pelaporan (reporting framework) untuk membantu perusahaan menyampaikan informasi iklim dan lingkungan ke

dalam laporan keuangan utama mereka, secara relevan bagi investor. Pada tahun 2022, CDSB bergabung dengan IFRS Foundation dan menjadi bagian dari kerja ISSB (International Sustainability Standards Board). Kerangka kerja dan prinsip CDSB membantu membentuk standar baru seperti IFRS S1 dan IFRS S2 (cdsb.net, 2021).

Tujuan Utama CDSB:

- a. Mengintegrasikan informasi iklim, lingkungan, dan keberlanjutan ke dalam laporan keuangan perusahaan yang sudah ada (bukan membuat laporan terpisah).
- b. Meningkatkan keterbandingan, konsistensi, dan keandalan informasi ESG untuk pengambilan keputusan investasi.

Fokus CDSB:

- a. Perubahan iklim
- b. Risiko dan peluang lingkungan
- c. Ketahanan bisnis terhadap transisi ke ekonomi rendah karbon

Contoh Kontribusi:

- a. CDSB Framework: Panduan bagi perusahaan untuk mengungkapkan risiko iklim dalam laporan tahunan.
- b. Mendorong adopsi TCFD recommendations (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

2. SASB adalah singkatan dari Sustainability Accounting Standards Board.

Ini adalah sebuah lembaga independen yang menetapkan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting standards) yang relevan

secara finansial untuk perusahaan-perusahaan. Pada tahun 2021, SASB bergabung ke dalam IFRS Foundation dan kini menjadi bagian dari kerja ISSB (International Sustainability Standards Board). ISSB menggunakan fondasi SASB dalam menyusun standar pelaporan keberlanjutan global seperti IFRS S1 (Sasb.org, 2021).

Tujuan SASB Adalah untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan yang material (penting secara ekonomi) kepada investor. Fokus utama SASB adalah faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang bisa memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan;

Ciri Khas SASB:

- a. Spesifik industri: SASB mengembangkan standar untuk 77 sektor industri berbeda. Karena risiko dan peluang ESG bisa sangat berbeda antar industri.
- b. Fokus investor: Berbeda dari GRI yang berfokus pada dampak sosial/lingkungan secara luas, SASB berorientasi pada pengungkapan informasi yang relevan bagi investor dan pasar modal.

Misalnya, untuk perusahaan di industri pertambangan, standar SASB mungkin meminta informasi tentang:

- Dampak lingkungan dari penambangan
- Hubungan dengan masyarakat local
- Keamanan tenaga kerja

3. International Sustainability Standards Board (ISSB)

ISSB adalah badan standar internasional yang dibentuk untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan global yang terintegrasi, konsisten, dan komparatif, terutama untuk kebutuhan pasar keuangan.

ISSB dibentuk oleh IFRS Foundation pada tahun 2021, sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan global akan pelaporan keberlanjutan yang dapat diandalkan dan selaras secara internasional, khususnya dari investor dan pasar modal.

Tujuan utama ISSB:

- a. Membuat standar pelaporan keberlanjutan global yang berkualitas tinggi, agar perusahaan dapat mengungkapkan informasi penting terkait risiko dan peluang keberlanjutan (seperti perubahan iklim) yang berdampak terhadap nilai perusahaan.
- b. Memfasilitasi keputusan investasi yang lebih baik dengan menyediakan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat diperbandingkan lintas negara dan sektor.
- c. Menyatukan berbagai kerangka kerja dan standar keberlanjutan yang telah ada, seperti TCFD, SASB, CDSB, dan Integrated Reporting.

Standar pertama yang diterbitkan:

- IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
- IFRS S2 – Climate-related Disclosures, yang selaras dengan rekomendasi TCFD. (IFRS.org)

Peran ISSB (International Sustainability Standards Board) dalam keberlanjutan keuangan sangat penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar terhadap informasi keberlanjutan perusahaan. Berikut adalah peran utamanya:

1. Menstandarkan Pelaporan Keberlanjutan Secara Global

ISSB menyusun standar internasional tunggal untuk pelaporan keberlanjutan, khususnya informasi yang relevan secara finansial. Ini mengurangi fragmentasi dari banyaknya standar sebelumnya (seperti GRI, SASB, TCFD), dan membantu menciptakan konsistensi dan komparabilitas antarperusahaan dan negara.

2. Meningkatkan Transparansi Risiko Keberlanjutan

Dengan adanya standar seperti IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan didorong untuk secara sistematis mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim, yang dapat memengaruhi nilai jangka panjang perusahaan.

3. Mendukung Pengambilan Keputusan Investor

Investor global semakin memperhatikan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). ISSB membantu investor menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara objektif sehingga keputusan investasi menjadi lebih baik dan berorientasi jangka panjang.

4. Mempercepat Arus Modal ke Aset Berkelanjutan

Standar ISSB membantu menyaring informasi proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial, yang pada gilirannya memfasilitasi penyaluran investasi ke arah proyek yang mendukung ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim.

5. Mendukung Integrasi ESG ke dalam Sistem Keuangan

Dengan kerangka kerja ISSB, keberlanjutan bukan lagi pelengkap laporan keuangan, melainkan bagian inti dari strategi bisnis dan pelaporan keuangan perusahaan. Ini menjadikan ESG sebagai pertimbangan utama dalam sistem keuangan global. (IFRS Foundation, 2023).

I. Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting standards) paling banyak digunakan di dunia. Tujuan GRI adalah untuk membantu organisasi – perusahaan, pemerintah, dan LSM – mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka secara transparan dan akuntabel kepada publik dan pemangku kepentingan. Adapun Ciri Khas GRI:

- Berbasis dampak yang mana GRI menekankan pelaporan tentang dampak riil organisasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.
- GRI dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik besar maupun kecil.

- GRI berfokus pada akuntabilitas eksternal (kepada masyarakat dan pemangku kepentingan), bukan hanya investor.

Standar Utama:

- GRI Standards merupakan sistem modular dan global yang terdiri dari:
- Universal Standards (misal: GRI 1: Foundation)
- Topic-specific Standards (misal: GRI 305 untuk emisi)
- Sector Standards (misal: untuk sektor pertambangan, energi, dll.)

Contoh aspek yang dilaporkan dalam GRI diantaranya adalah:

- Emisi gas rumah kaca
- Limbah dan air
- Kesejahteraan tenaga kerja
- Rantai pasok dan hak asasi manusia
- Anti korupsi
- Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal

Keberlanjutan keuangan menurut Global Reporting Initiative (GRI) merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan keuangan dan bisnis, serta pelaporan terkait. GRI bertujuan untuk memberikan standar pelaporan yang transparan dan dapat diandalkan bagi perusahaan untuk mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan mereka, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks keberlanjutan keuangan.

Peran Global Reporting Initiative (GRI) dalam keberlanjutan keuangan sangat penting karena GRI membantu perusahaan dan organisasi lain untuk mengungkapkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi

mereka secara transparan, yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Hal ini mendukung keputusan keuangan yang lebih cerdas dan berbasis pada pertimbangan keberlanjutan jangka panjang. Dengan menyediakan kerangka pelaporan yang jelas dan dapat diterima secara internasional, GRI memainkan peran utama dalam memperkuat keberlanjutan keuangan dan mengarah pada ekonomi yang lebih berkelanjutan secara global (globalreporting.org, 2021).

Berikut adalah beberapa peran utama GRI dalam keberlanjutan keuangan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

GRI menyediakan standar pelaporan yang jelas mengenai dampak keberlanjutan perusahaan, yang mencakup faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Ini memberikan informasi yang dibutuhkan investor untuk menilai apakah perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang penting dalam keputusan investasi jangka panjang.

2. **Meningkatkan Keterbandingan dan Konsistensi**

Dengan menggunakan standar pelaporan GRI, perusahaan dapat melaporkan kinerja mereka secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau di seluruh dunia. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko ESG dan bagaimana itu dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka di masa depan.

3. Mendorong Investasi Berkelanjutan

Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki praktek bisnis berkelanjutan. GRI membantu memberikan bukti konkrit dan data terukur tentang bagaimana perusahaan mengelola faktor-faktor keberlanjutan. Hal ini mendorong lebih banyak investasi dalam sektor yang mendukung ekonomi hijau dan teknologi berkelanjutan.

4. Membantu Pengelolaan Risiko ESG

Dengan laporan yang mengikuti standar GRI, perusahaan lebih mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG). Ini memungkinkan mereka untuk menghindari potensi kerugian yang timbul dari risiko-risiko ini dan beradaptasi dengan perubahan regulasi atau harapan sosial yang berfokus pada keberlanjutan.

5. Mendukung Keputusan Keuangan yang Lebih Baik

Dengan menyediakan data yang transparan dan terstruktur mengenai dampak keberlanjutan perusahaan, GRI memungkinkan investor, analis, dan lembaga keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih terinformasi, yang tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

6. Memfasilitasi Integrasi ESG dalam Keputusan Keuangan

Perusahaan yang melaporkan berdasarkan GRI dapat lebih mudah mengintegrasikan prinsip ESG dalam strategi keuangan mereka, yang dapat mencakup pembiayaan berkelanjutan, pengelolaan portofolio investasi yang bertanggung jawab, serta

pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan.

J. Sustainable Finance Indonesia

Sustainable Finance Indonesia merujuk pada pendekatan keuangan yang mendukung pembiayaan untuk kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance - ESG). Di Indonesia, Sustainable Finance juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari Sustainable Finance Indonesia (sustainablefinanceid.org):

1. Tujuan dan Definisi

Sustainable Finance di Indonesia adalah ekosistem keuangan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dengan mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas pembiayaan. Sustainable Finance diartikan sebagai adanya ekosistem dengan didukung oleh berbagai kebijakan, regulasi, sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuannya adalah untuk:

- Mengarahkan aliran dana ke proyek atau kegiatan yang ramah lingkungan.

- Menjamin bahwa kebijakan, regulasi, produk, transaksi, dan layanan keuangan yang ada dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan lingkungan hidup dan sosial dalam pembiayaan berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Kebijakan dan Regulasi

Beberapa kebijakan dan regulasi di Indonesia yang mendukung Sustainable Finance antara lain:

- Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan): OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang mendorong lembaga keuangan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan pembiayaan dan investasi.
- Green Bond: Indonesia juga mengembangkan green bonds atau obligasi hijau sebagai instrumen untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. (ojk, 2017)

3. Tujuan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sustainable Finance Indonesia berperan dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi yang berkelanjutan dalam sistem keuangan dengan mendukung:

- Pembangunan Infrastruktur Hijau: Proyek-proyek pembangunan yang ramah lingkungan

seperti pembangunan energi terbarukan dan infrastruktur yang mendukung ketahanan iklim.

- Pengurangan Emisi Karbon: Pembiayaan untuk sektor-sektor yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
- Peningkatan Inklusi Sosial dan Ekonomi: Menjamin bahwa akses ke layanan keuangan tidak terbatas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Inisiatif dan Kolaborasi

- Indonesia Green Bond and Green Sukuk: Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengeluarkan green sukuk atau sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mendanai proyek yang mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan.
- Kolaborasi antar sektor: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan.

5. Tantangan dan Peluang

Tantangan terbesar dalam pengembangan Sustainable Finance Indonesia termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam sektor keuangan, menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan secara lebih holistik, serta mengatasi keterbatasan data terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai. Namun, dengan adanya dorongan kebijakan dan peningkatan kapasitas pasar keuangan,

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta menarik investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Sustainable Finance Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jadi jika ditarik dalam skop global maka Tantangan dalam Keuangan Berkelanjutan Global Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi keuangan berkelanjutan secara global antara lain: 1) Kurangnya Standar yang Konsisten: Meskipun ada berbagai inisiatif dan kerangka kerja, standar yang konsisten di seluruh dunia masih terbatas, yang bisa membingungkan investor dan lembaga keuangan. 2) Greenwashing: Beberapa perusahaan atau lembaga keuangan mungkin mengklaim diri mereka berkelanjutan padahal tidak sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan. 3) Keterbatasan Data: Perusahaan sering kesulitan untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, yang menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data. 4). Aksesibilitas dan Inklusi: Di beberapa negara berkembang, akses terhadap pembiayaan berkelanjutan masih terbatas, yang menghalangi peluang untuk transisi ekonomi hijau (globalreportingstandar.org, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fonseca Et. Al. (2014) pandangan bahwa pengungkapan standar yang bermakna dan dapat diandalkan tentang kontribusi terhadap keberlanjutan tidak mungkin muncul dalam waktu dekat. Hal ini membutuhkan proses dan kontekstualisasi evaluasi keberlanjutan memiliki jalan yang masih panjang. Akan tetapi penelitian tersebut dibantah oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh banyak negara terkait penerapan standar keberlanjutan keuangan. Termasuk di Indonesia.

BAB 3 | Industri Keuangan dalam Mendukung Pembangunan

Meita Larasati

Pembangunan nasional merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah negara terutama di bidang perekonomian. Industri keuangan yang sehat menjadikan salah satu faktor yang krusial dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi nasional. Sebagai pihak yang penting, sektor keuangan berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga yang bergerak di bidang industri keuangan seperti otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank yang mana bukan saja sebagai penggerak roda ekonomi, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terlaksananya program pembangunan yang lebih luas (Ginting et al., 2019: 13).

Secara global, industri keuangan memiliki keterikatan langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh negara-negara anggota PBB dengan tujuan membuat negara di dunia dapat menikmati perdamaian dan kesejahteraan pada tahun 2030 (Aji & Kartono, 2022). Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, perlu didukung oleh sumber daya keuangan yang mumpuni. Dengan adanya industri keuangan, program pembangunan berkelanjutan berskala global tersebut dapat dijangkau dengan luas. Tanpa adanya peran industri keuangan, sangat kecil kemungkinan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut tercapai di tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah negara harus menerapkan industri keuangan yang sehat. Hal ini dikarenakan membutuhkan dana yang banyak untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, saat ini urgensi transformasi keuangan keberlanjutan

tidak bisa ditunda lagi karena seiring meningkatnya kesadaran akan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Transformasi ini berarti industri keuangan diharuskan untuk mengubah cara kerja dengan mengalihkan pendanaan dari aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan menjadi ramah lingkungan dan dapat diakses oleh semua masyarakat untuk mengembangkan usaha-usahanya. Kepedulian industri keuangan terhadap lingkungan dan sosial bukan untuk menaati peraturan saja, karena efek positif dan negatifnya juga akan dirasakan oleh industri keuangan (Maftuchah & Muliaman, 2015 : 101-102).

Secara teori, industri keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan global melalui beberapa cara, seperti menjadi fasilitator untuk menjaga atau melindungi aset dan aktivitas ekonomi masyarakat, sebagai penggerak dana masyarakat untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif ekonomi negara, serta penyedia sistem pembayaran yang mudah dan aman untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan begitu, transformasi industri keuangan menuju pembangunan berkelanjutan bukan lagi menjadi mimpi, melainkan keharusan untuk memastikan ekonomi dunia konsisten dan keberlanjutan sistem ekonomi di masa depan. Komitmen ini perlu diwujudkan melalui aksi nyata, baik sistem yang mengendalikan, pelaku usaha, maupun masyarakat.

A. Peran Industri Keuangan dalam Pembangunan

Dalam sebuah ekonomi suatu negara, industri keuangan menjadi sebuah fondasi fundamental yang bisa menopang pembangunan ekonomi negara tersebut. Berbagai institusi keuangan sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, seperti otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank secara bersama membangun perekonomian modern (Santoso & Hartanto, 2020 : 4). Fungsi utama dari industri keuangan ini yaitu sebagai penengah ataupun sebagai

penyalur dari pihak yang surplus dana ke pihak yang memerlukan pembiayaan, sehingga roda perekonomian negara akan terus berputar dan terjadinya aktivitas investasi serta peningkatan produksi secara nasional (Wardhono et al., 2018: 53). Sistem keuangan memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya, mengurangi risiko, memobilisasi tabungan, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa (Levine, 2005). Selain itu, industri keuangan juga berperan dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan dengan bertransformasi menjadi lebih modern. Sehingga, perusahaan modern tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat menjadi mesin untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktiknya, industri keuangan berkontribusi pengumpulan dan mengalokasikan modal secara efisien. Bank dan lembaga lainnya bertugas untuk mengumpulkan menghimpun dana masyarakat yang dianggap sebagai modal yang kemudian di alokasikan ke perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang ingin mencoba untuk berbisnis. Perusahaan yang menerima pembiayaan tersebut, bisa diperuntukkan untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan jumlah produksi yang akan berdampak langsung adanya lapangan pekerjaan yang tercipta dan meningkatkan produksi nasional. Dalam konteks yang sama, masyarakat yang ingin memulai bisnis, akan menambahkan modal mereka yang mana bisa membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan ekonominya sendiri.

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pelaku usaha besar maupun kecil, dapat diartikan bahwa industri keuangan sangat vital dalam memberantas kemiskinan di masyarakat. Hal ini dikarenakan industri keuangan sudah dapat dijangkau karena adanya perluasan inklusi keuangan. Ketika masyarakat kelas rendah

mendapatkan akses industri keuangan, seperti rekening tabungan, pembiayaan mikro, dan produk asuransi. Dengan adanya akses tersebut, masyarakat ekonomi rendah akan mendapatkan kesempatan untuk mengelola pendapatan, mengumpulkan modal, serta meningkatkan taraf hidupnya.

Selain lembaga sistem perbankan, terdapat juga Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) yang mana juga membantu pembangunan nasional. Lembaga keuangan nonbank berperan untuk memperbaiki akses keuangan ke seluruh sektor agar dapat mempermudah investasi seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang tersedia untuk masyarakat secara keseluruhan secara efisien dan efektif ke arah peningkatan taraf hidup (Ginting et al., 2019: 16). Perkembangan lembaga keuangan nonbank diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Ginting et al. (2019: 19–20) dalam bukunya, terdapat jenis lembaga keuangan nonbank, antara lain:

1. Sewa guna usaha, merupakan mendapatkan modal yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan dengan sistem pembayaran secara berkala dalam jangka waktu menengah atau lama.
2. Modal ventura, merupakan penambahan modal yang dilakukan oleh badan usaha kecil dari perusahaan modal ventura dengan sistem bagi hasil jika perusahaan yang dibiayai mendapatkan keuntungan dan berbagi ketika merugi.
3. Anjak piutang, merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek dalam perdagangan dalam atau luar negeri.
4. Asuransi, merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mendapatkan penggantian karena kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

5. Dana pensiun, merupakan badan hukum yang dapat menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, seperti dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.
6. Pegadaian, merupakan lembaga yang memberikan pinjaman atas barang bergerak, yang diserahkan ke lembaga peminjam. Apabila tidak bisa dilunaskan, maka barang akan dilelang barang tersebut.

Melalui produk seperti asuransi dan kredit, industri keuangan dapat berperan sebagai pelindung perekonomian dengan membantu masyarakat menghadapi risiko dalam industri keuangan. Sebelum memberikan pinjaman, lembaga seperti bank menilai risikonya terlebih dahulu, sementara lembaga pengawas seperti OJK dan BI memastikan kestabilan ekonomi melalui kebijakan yang tepat saat menghadapi krisis. Dengan pengelolaan risiko yang baik dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

B. Dukungan terhadap Agenda SDGs melalui Pembiayaan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di tahun 2030. Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan panduan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat internasional (Riananda & Fasa, 2025). Untuk menciptakan tujuan tersebut, tentunya membutuhkan pendanaan yang substansial. Industri keuangan sangat berperan dalam menjembatani pembiayaan yang dibutuhkan melalui inovasi yang menyelaraskan kepentingan bisnis dengan tujuan

pembangunan global. Berbagai skema pembiayaan inovatif yang sudah dikembangkan untuk mengalirkan dana dan modal ke proyek-proyek yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut beberapa contoh instrumen keuangan yang dilakukan untuk mengalirkan dana dan modal ke Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya:

1. Green finance

Green finance telah muncul dalam komponen lingkungan untuk pembiayaan berkelanjutan. Instrumen ini menyalurkan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, meminimalkan karbon, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (Amaliyah et al., 2025: 120-121). Menurut Nagari et al. (2024: 161), praktik dari green finance di antaranya :

- a. Proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya angin.
- b. Proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti transportasi yang berkelanjutan.
- c. Adanya pinjaman atau investasi untuk perusahaan yang menerapkan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Proyek-proyek lingkungan, seperti obligasi hijau (green bonds).

2. Green bonds

Green bonds merupakan salah satu instrumen keuangan dari penerbitan obligasi hijau yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada masa depan hijau

(Suripno, 2025: 216). Green bonds bertujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) (Deni et al., 2024: 229). Studi menunjukkan bahwa green bonds dapat mengurangi risiko finansial dan membantu dalam mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan (Lubis et al., 2024: 155).

3. Social Bonds

Social bonds merupakan instrumen keuangan yang ditujukan untuk proyek-proyek dengan dampak sosial yang positif (Deni et al., 2024: 229). Dana yang dihimpun melalui social bonds dialokasikan untuk membiayai lingkungan sosial seperti perumahan terjangkau, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Instrumen ini membantu mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) apabila tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan transparansi dalam mengelola agar dapat mengetahui penggunaan dana dan dampaknya bagi masyarakat (Suripno, 2025: 216).

4. Sustainability-linked bonds

Sustainability-linked bonds yaitu inovasi terbaru berbentuk obligasi dalam pembiayaan berkelanjutan, di mana tingkat bunga dikaitkan dengan pencapaian target (Suripno, 2025 : 216). Jika berhasil mencapai target yang ditetapkan, maka akan mendapatkan keuntungan berupa penurunan suku bunga, namun jika tidak tercapai, maka suku bunga akan meningkat. Mekanisme ini menciptakan insentif finansial bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja

berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

5. Blended finance

Blended finance merupakan pendekatan yang sangat berpotensi untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan, dengan menggabungkan dana dari berbagai sumber pemerintah maupun swasta dengan harapan menghasilkan pembangunan yang lebih besar (Deni et al., 2024: 230). Konsep ini menggunakan dana publik untuk menarik investasi swasta ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang terlalu berisiko.

C. Inovasi Keuangan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Industri keuangan terus mengalami perubahan melalui teknologi yang membuka peluang baru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya mengubah bisnis model dari tradisional menjadi lebih modern. Fintech telah muncul sebagai kekuatan pendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Inovasi-inovasi ini bukan saja meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga memperluas jangkauan, sehingga mendukung pencapaian berbagai tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Finansial Technology (fintech) merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan stabilitas sistem keuangan (Liana et al., 2024 :1). Salah satu pendorong utama adanya fintech karena

adanya inklusi keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan ke seluruh dunia (Litamahuputty et al., 2024 : 25). Inklusi keuangan yang baik, akan memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor ekonomi. Fintech telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Fintech memungkinkan jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan transaksi keuangan, menabung, dan mengelola keuangan mereka dengan mudah dan biaya rendah.

Berikut merupakan beberapa teknologi karena adanya fintech, di antaranya :

1. Digital banking, merupakan perluasan konsep perbankan tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan perbankan yang inklusif dan efisien. Bank-bank yang menggunakan teknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional, diubah menjadi biaya layanan yang lebih rendah bagi nasabah. Hal ini memungkinkan penyediaan layanan perbankan di daerah terpencil yang secara biaya tidak memungkinkan untuk dibangun cabang bank tersebut. Digital banking dapat digunakan untuk mengelola rekening, melakukan transfer uang, membayar tagihan, ataupun melakukan investasi melalui perangkat seluler masing-masing masyarakat (Litamahuputty et al., 2024: 26).
2. Microfinance, yaitu lembaga yang menyediakan jasa pinjaman, transaksi, serta penyimpanan yang ditujukan ke pengusaha kecil dan masyarakat miskin (Aziz et al., 2024: 243). Microfinance bertujuan untuk membantu melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil agar mendapatkan dana tambahan dalam menjalankan bisnisnya (Purnamasari & Rismala, 2024). Dengan

menyediakan pinjaman, tabungan, hingga layanan lainnya, microfinance membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Teknologi dalam layanan keuangan menjadi pendorong inklusi keuangan yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi. Inklusi keuangan merupakan kondisi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara efektif, efisien, dan berkualitas (Amaliyah et al.,2025: 119). Akses layanan keuangan membantu kelompok berpenghasilan rendah dapat menabung, mengelola risiko untuk memanfaatkan produk asuransi, serta membiayai kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif. UMKM juga dibantu dalam memperluas usaha, memperoleh modal, dan menciptakan lapangan kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pengurangan kemiskinan.

Inovasi keuangan membuka peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan, namun tetap ada tantangannya seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan, dan masalah keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar transformasi keuangan digital ini dapat diakses secara merata. Melalui strategi yang inklusif dan berkelanjutan, inovasi keuangan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

D. Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Regulasi, Peran Industri Keuangan, dan Tantangan Greenwashing dalam Mencapai SDGs

Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kebijakan dan regulasi keuangan berkelanjutan di berbagai sektor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengarahkan sektor jasa keuangan agar mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan keuangan.

Salah satu kebijakan utama adalah POJK 51/2017 yang mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan. Meski tren pelaporan semakin meningkat, tantangan masih muncul karena sebagian besar regulasi ini hanya menyangkut perusahaan besar, sementara pemahaman substansial terhadap keberlanjutan masih terbatas.

Dalam upaya pendanaan hijau, Indonesia menjadi pionir dengan menerbitkan green sukuk, instrumen syariah untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan. Selain itu, instrumen inovatif seperti sustainability-linked loans dan dana investasi hijau mulai berkembang untuk memperluas sumber pembiayaan.

Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk kurangnya kesadaran ESG di kalangan pelaku keuangan dan keterbatasan dalam menilai risiko lingkungan dan sosial. Dibutuhkan pelatihan, kampanye edukasi, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas sektor keuangan.

Upaya keuangan berkelanjutan ini juga sejalan dengan agenda nasional, seperti pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif, insentif fiskal, dan koordinasi lintas sektor sangat penting agar sektor keuangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Industri keuangan memainkan peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengalokasikan modal ke proyek dan inisiatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, upaya ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan akan standar keuangan hijau yang kuat, risiko greenwashing, serta kompleksitas dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dan sosial. Keuangan hijau mencakup investasi yang bertujuan mengurangi degradasi lingkungan, menangani perubahan iklim, mengurangi polusi udara, dan memberikan manfaat sosial sambil tetap menghasilkan imbal hasil keuangan yang memadai.

Pencapaian keberlanjutan membutuhkan pendekatan pembiayaan yang inovatif serta kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko keuangan yang muncul bagi para investor. Sektor keuangan, dengan fokus pada keuangan hijau, harus memimpin transformasi hijau ekonomi karena dampak perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya semakin nyata. Bank mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai elemen utama operasional mereka, dengan menyempurnakan metrik seperti Green Asset Ratios untuk menilai proporsi aset berkelanjutan dalam portofolio mereka (Lapinskiene et al., 2025). Lembaga keuangan juga mulai menghindari

perusahaan yang tidak berkelanjutan dan beralih berinvestasi pada perusahaan serta proyek yang berkelanjutan guna menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat. Pengembangan keuangan hijau juga perlu berfokus pada peningkatan kesadaran publik, pembentukan kriteria evaluasi, dan penciptaan mekanisme untuk mencegah greenwashing (Sreenu & Mishra, 2023).

Salah satu hambatan terbesar dalam mempromosikan keuangan hijau adalah potensi greenwashing, yaitu ketika organisasi melebih-lebihkan atau memberikan klaim palsu atas manfaat lingkungan dari produk, layanan, atau investasinya (Sreenu & Mishra, 2023). Regulator telah memperkenalkan standar hijau, metode penghitungan manfaat lingkungan, dan standar pengungkapan manfaat lingkungan dalam area seperti kredit hijau dan obligasi hijau untuk melawan praktik ini (Mansour, 2023). Melawan greenwashing membutuhkan kewaspadaan, transparansi, dan akuntabilitas (Dempere et al., 2024). Greenwashing dapat mengikis kepercayaan investor, mendistorsi sinyal pasar, dan pada akhirnya merusak kredibilitas inisiatif keuangan hijau. Untuk mengatasi tantangan ini, industri keuangan harus mengembangkan standar yang jelas dan konsisten untuk investasi hijau, meningkatkan proses due diligence, serta memperbaiki pemantauan dan pelaporan kinerja lingkungan (Mansour, 2023). Selain itu, mekanisme verifikasi dan sertifikasi independen dapat membantu memastikan bahwa klaim hijau benar-benar dapat dibuktikan dan didukung oleh data.

Keuangan hijau bertujuan menyediakan dukungan finansial bagi proyek ramah lingkungan dengan perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama, termasuk pembiayaan sumber daya, keuangan karbon, dan pendanaan operasional. Sistem keuangan memerlukan

standarisasi dalam evaluasi pengurangan emisi karbon dan sistem regulasi yang kuat agar instrumen keuangan hijau dapat berjalan efektif (Ma & Fei, 2024). Pengungkapan keuangan serta peran regulator dan investor sangat penting untuk memperkuat skema keuangan hijau (Bhattacharyya, 2021).

Meskipun berbagai tantangan tersebut masih ada, industri keuangan memiliki peluang unik untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian SDGs. Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan membutuhkan investasi yang besar dari sektor keuangan swasta (Haas & Popov, 2019). Keuangan hijau dapat mempercepat pergeseran menuju ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan kondisi yang setara antara aktivitas ekonomi tradisional dan aktivitas ekonomi hijau (Falcone, 2020). Selain itu, perusahaan yang tunduk pada regulasi lingkungan yang ketat mendapatkan lebih banyak manfaat dari keuangan hijau. Beberapa negara kini tengah berusaha penuh untuk bergerak ke arah model ekonomi berkualitas tinggi di mana perlindungan ekologi menjadi fokus utama. Keuangan hijau juga dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan, mengarahkan modal ke aktivitas yang memberikan dampak lingkungan dan sosial yang positif.

E. Konvergensi Praktik Keuangan Berkelanjutan dan Peran Strategis Industri Keuangan dalam Pencapaian SDGs

Integrasi prinsip keuangan berkelanjutan semakin menjadi arus utama dalam sektor keuangan global. Berbagai institusi mulai mengadopsi pendekatan ini melalui inovasi produk, penerapan indikator ESG (Environmental, Social, Governance), serta penggabungan pertimbangan

keberlanjutan dalam manajemen risiko dan strategi investasi.

1. Praktik dalam Lembaga Keuangan Konvensional

- Perbankan

Bank menjadi pelopor dalam penyediaan produk pembiayaan hijau dan inklusif. Contohnya, beberapa bank telah menerapkan green asset ratio untuk menilai eksposur portofolio terhadap sektor berkelanjutan serta menyalurkan kredit kepada sektor UMKM berbasis lingkungan (Lapinskienė et al., 2025).

- Pasar Modal

Bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia, memfasilitasi penerbitan obligasi hijau dan menyediakan indeks ESG seperti SRI-KEHATI untuk mendorong investasi berkelanjutan (Riyanti & Murwaningsari, 2023).

- Asuransi

Perusahaan asuransi secara bertahap mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan risiko dan investasi jangka panjang, menunjukkan kesadaran terhadap keterkaitan antara stabilitas keuangan dan keberlanjutan lingkungan dan sosial (Budiasa, 2020).

2. Praktik dalam Lingkup Internasional

Beberapa studi kasus global memperlihatkan praktik keuangan berkelanjutan yang berhasil:

- Triodos Bank (Belanda): Berfokus penuh pada pembiayaan proyek sosial dan lingkungan, menjadi model bisnis berbasis keberlanjutan.

- DBS Bank (Singapura): Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke seluruh proses bisnis dan strategi kreditnya.

3. Instrumen Keuangan Hijau yang Mendukung SDGs

- Obligasi dan Sukuk Hijau
Digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung transisi rendah karbon, ketahanan iklim, dan pelestarian lingkungan (Fitrah & Soemitra, 2022).
- Produk Keuangan Berbasis ESG
Memberikan insentif pasar kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan (Rossolini et al., 2021).
- Green Human Resource Management (GHRM)
Diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam agenda keberlanjutan institusi (Noor et al., 2023).

Sektor keuangan memiliki posisi strategis dalam mengarahkan arus modal ke arah ekonomi berkelanjutan. Melalui integrasi ESG, digitalisasi, dan penguatan regulasi, lembaga keuangan dapat memimpin transformasi hijau menuju pencapaian SDGs. Namun, diperlukan sinergi antara pelaku pasar, regulator, dan inovator teknologi agar keuangan berkelanjutan tidak hanya menjadi jargon, tetapi praktik nyata yang berdampak.

Industri keuangan memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam operasional dan strategi bisnis. Transformasi ini tercermin melalui peningkatan kesadaran institusi keuangan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta dorongan untuk menyesuaikan aktivitas keuangan dengan tujuan global seperti SDGs. Integrasi ESG mencerminkan pergeseran struktural

dalam lanskap keuangan global, yang dipicu oleh regulasi baru, tekanan pasar, serta kebutuhan akan manajemen risiko yang lebih tangguh dan berkelanjutan (Liu et al., 2024).

Peran negara menjadi sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum dan insentif yang mendorong investasi hijau, baik melalui perumusan regulasi yang tegas terhadap praktik tidak berkelanjutan maupun penyediaan insentif fiskal untuk proyek-proyek ramah lingkungan (Sreenu & Mishra, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan publik harus diarahkan untuk menyelaraskan insentif ekonomi dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi ESG di sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam memastikan pemahaman dan penerapan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan riset dapat memperluas kompetensi profesional keuangan dalam menilai dan mengelola risiko keberlanjutan. Di sisi lain, ketersediaan data ESG yang akurat dan terstandarisasi menjadi penopang transparansi dan akuntabilitas. Standardisasi metrik ESG dan dukungan infrastruktur data akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi dan membantu mencegah praktik greenwashing (Lapinskienė et al., 2025).

Teknologi digital juga membuka peluang baru bagi keuangan berkelanjutan. Inovasi berbasis fintech, kecerdasan buatan, dan blockchain mendukung efisiensi, transparansi, serta perluasan akses pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Teknologi ini memungkinkan penyaluran modal yang lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagai penutup, keberhasilan sektor keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan regulasi, pembangunan kapasitas, standardisasi data ESG, dan adopsi inovasi digital. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan

yang konsisten akan memperkuat peran institusi keuangan sebagai katalis transformasi menuju masa depan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan (Liu et al., 2024).



BAGIAN 2

PERSPEKTIF KEUANGAN DAN INVESTASI



BAB 4 | Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Investasi

Faizal Ridwan Zamzany

Investasi modern tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek finansial, melainkan juga semakin memperhatikan risiko sosial dan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam konteks investasi, dengan mengintegrasikan perspektif teori kontemporer. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana pemahaman dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan dapat memengaruhi keputusan investasi, kinerja portofolio, dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, tulisan ini akan mengkaji tren dan tantangan terkini dalam implementasi manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam praktik investasi global.

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi telah meningkat secara signifikan. Investor semakin menyadari bahwa risiko sosial dan lingkungan tidak hanya dapat memengaruhi reputasi dan operasional perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi finansial yang material (Weber, 2014). Bencana lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya dapat menyebabkan kerugian finansial langsung, gangguan rantai pasok, tuntutan hukum, dan penurunan nilai merek. Oleh karena itu, manajemen risiko sosial dan lingkungan telah menjadi komponen krusial dalam pengambilan keputusan investasi.

Tulisan ini berargumen bahwa integrasi manajemen risiko sosial dan lingkungan ke dalam proses investasi bukan hanya merupakan praktik etis, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas secara finansial. Dengan

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko sosial dan lingkungan secara efektif, investor dapat melindungi portofolio mereka dari potensi kerugian dan sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

B. Kerangka Teori Kontemporer dalam Manajemen Risiko Sosial dan Lingkungan

Beberapa teori relevan dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam investasi:

1. Stakeholder Theory

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan lingkungan (Freeman, 2010). Dalam konteks investasi, teori ini menekankan pentingnya investor untuk mempertimbangkan dampak investasi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan kelompok-kelompok ini. Investor yang mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan berpotensi menghadapi resistensi, boikot, dan risiko reputasi yang dapat merugikan investasi mereka.

2. Institutional Theory

Teori ini menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan regulasi dalam lingkungan kelembagaan yang lebih luas memengaruhi praktik organisasi, termasuk praktik investasi terkait risiko sosial dan lingkungan (North, 1990). Investor sering kali dipengaruhi oleh tekanan isomorfik, yaitu kecenderungan untuk meniru praktik yang dianggap legitim dan efektif oleh institusi lain, seperti dana pensiun besar atau lembaga keuangan internasional yang telah mengadopsi

standar manajemen risiko sosial dan lingkungan yang ketat. Perkembangan regulasi terkait lingkungan dan sosial, serta inisiatif sukarela seperti Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab , juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam investasi.

3. Resource Based View Theory

Dalam konteks manajemen risiko sosial dan lingkungan, Resource Based View Theory menyoroti bahwa kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan secara efektif dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berharga (Barney, 1991). Perusahaan yang memiliki kapabilitas unik dalam mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan peluang terkait keberlanjutan, cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Investor yang mampu mengidentifikasi dan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan dengan kapabilitas manajemen risiko sosial dan lingkungan yang unggul dapat memperoleh keuntungan kompetitif.

4. Sustainable Finance Theory

Teori ini secara eksplisit mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam teori dan praktik keuangan (Clark et al., 2015). Teori ini berpendapat bahwa faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak hanya merupakan pertimbangan etis, tetapi juga merupakan faktor material yang memengaruhi risiko dan pengembalian investasi. Oleh karena itu, analisis lingkungan, sosial, dan tata kelola dan integrasinya ke dalam proses pengambilan keputusan investasi merupakan hal yang rasional dan

diperlukan untuk mencapai hasil investasi yang berkelanjutan dan optimal.

C. Implementasi Manajemen Risiko Sosial dan Lingkungan dalam Investasi

Implementasi MRSL dalam investasi melibatkan serangkaian tahapan, termasuk:

1. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko sosial dan lingkungan yang relevan dengan aset investasi. Ini dapat mencakup risiko operasional (misalnya, polusi), risiko rantai pasok (misalnya, praktik tenaga kerja yang tidak adil), risiko produk (misalnya, dampak kesehatan dan keselamatan), dan risiko reputasi (misalnya, keterlibatan dalam kontroversi sosial atau lingkungan).

2. Evaluasi Risiko

Menilai probabilitas dan dampak potensial dari risiko-risiko yang teridentifikasi. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan metodologi, termasuk analisis kuantitatif dan kualitatif, serta konsultasi dengan para ahli.

3. Mitigasi Risiko

Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang signifikan. Ini dapat mencakup tindakan preventif, seperti penerapan standar lingkungan dan sosial yang ketat, serta tindakan korektif, seperti rencana tanggap darurat dan mekanisme kompensasi.

4. Pemantauan dan Pelaporan

Memantau efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko dan melaporkan kinerja terkait RSL kepada para pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan RSL semakin menjadi harapan investor dan regulator.

D. Tren dan Tantangan Terkini

Peningkatan perubahan iklim menjadi perhatian utama bagi investor, mendorong pengembangan metodologi untuk mengukur dan mengelola risiko iklim dalam portofolio investasi (IPCC, 2021).

1. Data dan Metodologi ESG

Ketersediaan dan kualitas data ESG yang relevan dan andal masih menjadi tantangan. Pengembangan metodologi penilaian risiko sosial dan lingkungan yang lebih komprehensif dan terstandarisasi sangat dibutuhkan.

2. Integrasi ESG

Mengintegrasikan faktor-faktor ESG secara efektif ke dalam seluruh proses investasi, dari analisis fundamental hingga pembangunan portofolio, memerlukan perubahan budaya dan keahlian di kalangan investor.

3. Greenwashing

Risiko greenwashing, yaitu praktik memberikan informasi yang menyesatkan tentang kinerja keberlanjutan suatu investasi, menjadi perhatian regulator dan investor yang semakin waspada.

4. Regulasi dan Standar

Perkembangan regulasi terkait pelaporan dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan semakin meningkat di berbagai negara, menciptakan tantangan dan peluang bagi investor global.

E. Penutup

Manajemen risiko sosial dan lingkungan bukan lagi sekadar pertimbangan etis dalam investasi, melainkan merupakan elemen fundamental dalam strategi investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perspektif teori kontemporer, seperti teori pemangku kepentingan, teori kelembagaan, RBV, dan teori keuangan berkelanjutan, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami pentingnya integrasi MRSL dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan komprehensif terhadap MRSL, investor dapat melindungi nilai investasi mereka, meningkatkan kinerja portofolio jangka panjang, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Bab 5 | Pengukuran Dampak Keuangan Berkelanjutan

Mila Indriastuti

Konsep keberlanjutan secara umum dan teoritis dikenal sebagai konsep yang multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial serta lingkungan, selanjutnya disebut sebagai Environment, social and governance (ESG) (Giovannoni & Fabietti, 2013). Konsep ini menekankan bahwa dunia usaha seharusnya menjalankan bisnisnya agar memenuhi semua unsur ESG tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang akan datang (Indriastuti, 2024; Indriastuti et al., 2025; Wardana et al., 2022).

Namun dalam praktiknya, konsep ini telah memunculkan berbagai wacana yang berbeda dari waktu ke waktu sehingga seringkali diperlakukan secara terpisah (Indriastuti et al., 2025). Di Indonesia misalnya, berdasarkan penelitian Indriastuti et al. (2025) bahwa pemerintah belum memiliki pengukuran ESG yang terstandar bagi perusahaan yang memiliki dampak negative besar bagi lingkungan, seperti perusahaan tambang, tekstil dll.

Perusahaan seharusnya menanamkan ESG ke dalam strategi, operasi serta pelaporan secara transparan. Kemudian melakukan penetapan target dan KPI yang jelas serta mengembangkan road map guna penetapan target dan kemajuan pelaporan (PWC, 2025). Penggunaan konsep ESG secara holistic diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan serta menambah added value bagi stakeholders dengan meningkatkan kinerja melalui berbagai kegiatan investasi yang efisien (Maiyarni et al., 2024).

Impact yang luar biasa ini tentunya dapat berhasil jika semua data yang ada di laporan ESG dapat terlacak dan diukur dengan baik. Namun mengevaluasi kinerja ESG dapat menjadi tantangan ketika kualitas ESG tidak konsisten. Oleh karena itu pemerintah

seharusnya menerapkan standar pelaporan ESG serta memberikan tolok ukur yang jelas sehingga pengaplikasian ESG dapat optimal.

Bab ini akan mengulas secara komprehensif pengukuran ESG yang dimulai dengan kerangka konseptual pengukuran dampak keuangan berkelanjutan kemudian pendekatan dan metodologi penelitian yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Sebagai penutup, penulis akan menjabarkan studi kasus dan Good governance baik di lingkup nasional maupun internasional.

A. Kerangka Konseptual Pengukuran Dampak Keuangan Berkelanjutan

1. Keuangan Berkelanjutan dan Pengukuran Dampak

Keberlanjutan bukan sekedar slogan, melainkan sudah menjadi tujuan utama manajemen. Keberlanjutan keuangan merujuk pada perusahaan harus fokus pada keamanan keuangan dalam jangka Panjang (Gleißner et al., 2022). Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mencapai kesuksesan finansial saat ini tanpa mengorbankan keberhasilan finansial di masa depan (Gleißner et al., 2022). Untuk mencapai target ini dan menciptakan nilai jangka Panjang secara ESG, maka proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor ESG secara komprehensif. Praktik baik yang biasanya dilakukan perusahaan salah satunya adalah melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon serta memilih investasi yang memiliki dampak positif terhadap ESG.

Oleh karena itu, pengukuran dampak yang tepat diperlukan guna memastikan bahwa keputusan financial (investasi, pendanaan serta kebijakan dividen) tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan kontribusi terhadap program keberlanjutan.

2. Pilar ESG dan Kaitan dengan Pengukuran Dampak

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka semakin banyak masalah lingkungan yang terjadi termasuk perubahan iklim, eksploitasi hutan dan satwa di dalamnya serta eksploitasi sumber daya alam. Perilaku pasar (investor, institusi, pemerintah serta swasta) mulai berubah ketika muncul istilah “pembangunan berkelanjutan”. Keputusan investasi bergeser dan mempertimbangkan dampak terhadap keberlanjutan. Sehingga, para analis mengidentifikasi tiga pilar ESG yang dapat berdampak secara signifikan terhadap keuangan, sebagai berikut (7):

a. Pilar Lingkungan (Environmental)

Pilar E merupakan pilar pertama yang menerima banyak perhatian dari para analis karena menilai bagaimana operasional perusahaan dan industri berdampak terhadap lingkungan (Senadheera et al., 2021). Isu-isu penting yang diukur pada poin ini adalah apakah industri memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, bagaimana pengelolaan air, pembuangan limbah berbahaya, tingkat polusi serta jejak karbon yang dihasilkan dalam proses produksinya. Selain dampak, pengukuran juga ditujukan untuk menganalisis bagaimana industri melakukan efisiensi energi dengan cara beralih ke sumber energi terbarukan, memanfaatkan proses yang dapat menghemat sumber daya, meminimalkan polusi serta mengurangi jejak karbon serta melakukan konservasi sumber daya alam. Akhir dari proses ini adalah, pilar E menegaskan bahwa industri akan menghasilkan keunggulan kompetitif berupa

produk dan layanan yang ramah lingkungan (Senadheera et al., 2021).

b. Pilar Sosial (Social)

Pilar ini mencakup isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan, seperti halnya pendidikan, kesehatan, diversitas dan inklusivitas serta keterlibatan masyarakat. Inti dari pilar ini adalah apakah perusahaan/industri sudah menjalankan kegiatan operasionalnya secara seimbang, memiliki hubungan yang baik dan setara antara perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Seperti halnya masyarakat sekitar, komunitas dan karyawannya (Senadheera et al., 2021).

c. Pilar Tata Kelola (Governance)

Pilar ini mencakup kebijakan, aturan, etika bisnis serta praktik perusahaan mulai dari manajemen risiko sampai dengan bagaimana perusahaan menjaga integritasnya. Hal spesifik yang diukur dalam pilar ini contohnya adalah bagaimana perusahaan menggunakan metode akuntansinya secara konsisten, akurat dan transparan. Selain itu, apakah ada aturan yang dapat menegakkan kesetaraan untuk memilih pimpinan secara adil dan terbuka serta kebijakan terkait pemenuhan hak pemegang saham. Berbagai kebijakan dan aturan yang komprehensif dalam perusahaan tersebut digunakan untuk memastikan industri dan perusahaan harus menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip good corporate governance sehingga tercapai

keberlangsungan usaha (Senadheera et al., 2021).

B. Pendekatan dan Metodologi Pengukuran

Pengukuran dampak keuangan berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan sesuai konteks. Karena sifat dampak yang sering kali kompleks dan multidimensi, pendekatan pengukuran harus mencakup baik dimensi kuantitatif maupun kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh.

1. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

a. Pendekatan Kuantitatif

Secara kontekstual, penelitian menyebutkan bahwa financial sustainability terbagi menjadi dua dimensi, yang disebut sebagai value dan continuity. Value diukur dengan cara membagi antara net profit dengan equity, total asset dibagi dengan current asset, harga saham dibagi dengan book value, revenue dibagi dengan total assets. Sementara continuity diukur dengan membagi current assets/current liabilities, total liabilities dibagi total assets, laba ditahan dibagi revenue dan biaya bunga dibagi dengan EBIT (Gleißner et al., 2022; Zabolotnyy & Wasilewski, 2019).

Sementara (Henock, 2019) menemukan bahwa donasi, debt to equity ratio, efisiensi operational, return on asset serta deposit mobilisasi tabungan/simpanan dikaitkan dengan ukuran keberlanjutan keuangan yang dipilih. Artinya pendekatan kuantitatif mengacu pada angka dan menggunakan data numerik guna mengukur perubahan keuangan. Secara praktik, maka contoh yang biasa digunakan

dalam perusahaan adalah dengan menghitung biaya lingkungan, berapa jumlah pengurangan emisi karbon dalam operasional perusahaan, berapa jumlah komunitas yang mendapat akses pendidikan. Selain itu, (Shmatov & Castelli, 2022) dalam bukunya yang berjudul *quantitative method for ESG finance* memberikan saran untuk menambahkan Agent Based Modelling for ESG finance (ABM for ESG Finance) guna menyempurnakan hasil. Model ini dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan dalam kinerja ESG serta menguji strategi mana yang dapat meningkatkan kinerja.

b. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif penting digunakan untuk melengkapi keterbatasan dalam menggunakan metode kuantitatif. Sebagaimana dalam penelitian (Kotsantonis & Serafeim, 2019) metode kualitatif digunakan untuk mengkonfirmasi data terkait dengan bagaimana suatu perusahaan melaporkan isu kesehatan dan keselamatan karyawan, bagaimana mereka mendefinisikan suatu terminology untuk pengukuran selanjutnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana dampak perubahan sosial, peningkatan kualitas hidup atas berdirinya perusahaan di suatu daerah. Artinya, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari metode kuantitatif.

Kombinasi kedua pendekatan ini—sering disebut sebagai *mixed methods*—membantu menciptakan pengukuran yang lebih holistik dan kontekstual.

2. Indikator Pengukuran Dampak

Dalam buku (Shmatov & Castelli, 2022) menggunakan pengukuran dampak secara spesifik dan terukur sebagai berikut:

a. Aspek Environmental (Lingkungan)

Isu lingkungan dalam ESG berfokus pada bagaimana aktivitas perusahaan dapat mempengaruhi alam dan sumber daya alam. Beberapa aspek utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi adalah:

1) Emisi karbon dan perubahan iklim

Pengukurannya difokuskan untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca dan upaya mitigasinya. Contohnya, dapat menggunakan seberapa banyak ton CO₂ yang dihasilkan serta bagaimana perusahaan menggunakan energi terbarukan

2) Pengelolaan sumber daya alam

Pengukuran difokuskan untuk mengevaluasi penggunaan energi, air, dan bahan baku lainnya, serta bagaimana perusahaan mengelola dan mengurangi dampak negatifnya.

3) Limbah dan polusi

Menilai bagaimana perusahaan mengelola limbah, polusi udara dan air, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh perusahaan dapat mengolah limbah anorganik menjadi bahan bangunan/produk daur ulang, sementara produk organik dapat diolah menjadi kompos/pakan magot

4) Punahnya keanekaragaman hayati dan konservasi

Evaluasi berapa jumlah ekosistem dan spesies langka yang punah akibat aktivitas operasi perusahaan serta upaya konservasi yang dilakukan.

5) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan

Menilai sejauh mana perusahaan mematuhi aturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah serta menghitung berapa denda dan insentif yang ditimbulkan akibat aktivitas operasi perusahaan.

b. Aspek Sosial

Isu sosial dalam ESG berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut pengukuran dampak yang digunakan untuk mengevaluasi isu sosial :

1) Hak Asasi Manusia dan Standar Tenaga Kerja

Pengukuran difokuskan untuk menilai kepatuhan standar hak asasi manusia dan tenaga kerja. Contohnya, apakah upah yang diberikan sudah sesuai dengan UMR, apakah karyawan sudah diberikan jaminan kerja dan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang.

2) Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

Evaluasi terhadap kebijakan dan praktik perusahaan dalam mempromosikan keberagaman dan inklusi di tempat kerja, serta memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua karyawan.

3) Kesejahteraan Karyawan

Menilai bagaimana perusahaan mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan, termasuk program kesehatan, keseimbangan kerja-hidup, dan dukungan lainnya.

4) Hubungan dengan Komunitas

Evaluasi terhadap bagaimana perusahaan berinteraksi dengan dan mendukung komunitas lokal, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi dalam pembangunan komunitas.

5) Transparansi dan Etika Rantai Pasokan

Menilai sejauh mana perusahaan memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis mereka mematuhi standar sosial

yang tinggi, termasuk dalam hal hak asasi manusia dan kondisi kerja.

3. Isu Tata Kelola Perusahaan dalam ESG

Isu tata kelola perusahaan dalam ESG berfokus pada bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi, serta bagaimana keputusan-keputusan diambil untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa aspek utama yang dapat digunakan untuk mengukur pada area tata Kelola perusahaan adalah sebagai berikut (Shmatov & Castelli, 2022):

a. Komposisi dan Independensi Dewan Direksi

Pengukuran pada area ini dititik beratkan pada apakah dewan direksi memiliki keberagaman keahlian, independensi, dan representasi yang memadai untuk mengawasi manajemen. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur dan memastikan apakah CEO dan direktur perusahaan memiliki peran yang terpisah, hal ini digunakan untuk mencegah kekuasaan yang terpusat di satu orang.

b. Kompensasi Eksekutif dan Insentif

Evaluasi terhadap struktur kompensasi eksekutif untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan sejalan dengan kinerja jangka panjang perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Contoh teknik yang digunakan untuk mengukur adalah mengkonfirmasi perusahaan terkait dengan persentasi tingkat bonus yang dibayarkan serta tingkat remunerasi tertinggi pada level eksekutif.

c. **Transparansi dan Pelaporan Keuangan**

Menilai sejauh mana perusahaan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja keuangan dan non-keuangan mereka, termasuk praktik pelaporan ESG.

d. **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika Bisnis**

Evaluasi terhadap sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang etis, termasuk dalam hal anti-korupsi dan penghindaran konflik kepentingan.

e. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Menilai bagaimana perusahaan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat, serta bagaimana mereka mempertimbangkan kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan.

4. **Kerangka Kerja dan Standar Global**

Beberapa kerangka kerja telah dikembangkan secara global untuk memandu lembaga keuangan dan investor dalam mengukur dampak secara konsisten dan transparan:

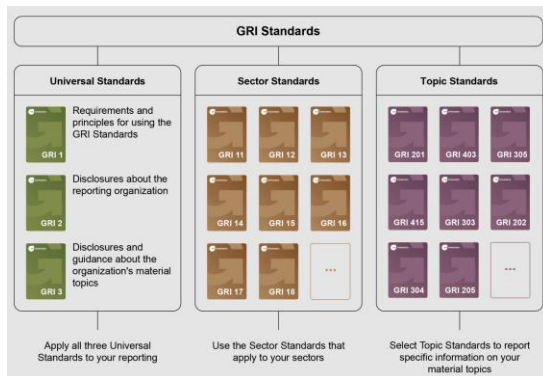
a. **IRIS+ (Impact Reporting and Investment Standards)**

IRIS merupakan katalog metrik kinerja yang diterima secara umum dan digunakan oleh para investor berdampak terkemuka guna mengukur keberhasilan sosial, lingkungan, dan keuangan. Metrik ini berfungsi untuk

mengevaluasi transaksi, serta menumbuhkan kredibilitas industry investasi berdampak.

b. GRI (Global Reporting Initiative)

Standar ini merupakan salah satu standar ESG yang paling banyak digunakan di dunia dan digunakan untuk pelaporan publik. Tujuan utama penggunaan standar ini fokus untuk mengukur dampak ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan. Standar ini merupakan system modular yang terdiri dari tiga rangkaian standar yang akan digunakan bersama sebagaimana tercermin dalam bagan berikut (GRI, 2025):



Gambar 6.1: Global Reporting Initiative (Sumber: globalreporting.org)

c. SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

SASB Standard menyediakan standar khusus terkait keberlanjutan yang paling relevan dengan pengambilan keputusan investot di 77 industri. Standar ini dikembangkan menggunakan penetapan

standar yang ketat dan transparan yang mencakup, pertama penelitian berbasis bukti, kedua partisipasi yang luas dan seimbang dari perusahaan, investor serta para ahli, terakhir pengawasan dan persetujuan dari dewan standar SASB yang independen (SASB Standards Boards, 2025).

d. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures):

The financial stability board (FSB) membuat TCFD guna mengembangkan rekomendasi tentang jenis informasi yang harus diungkapkan perusahaan guna mendukung investor, kreditor dalam menilai dan menentukan risiko, terutama risiko yang berhubungan dengan perubahan iklim. Terdapat empat rekomendasi pengungkapan yang disusun secara tematik sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2025):



Gambar 6.2: Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(Sumber: fsb-tcfd.org)

5. Integrasi Pengukuran Dampak dalam Proses Keputusan

Pengukuran dampak tidak boleh menjadi proses yang berdiri sendiri. Idealnya, hasil pengukuran menjadi masukan penting dalam proses:

- a. Penilaian risiko dan peluang ESG
- b. Penentuan alokasi modal
- c. Penilaian kinerja investasi
- d. Laporan kinerja dan komunikasi kepada pemangku kepentingan

Dengan demikian, dampak menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan bukan hanya aktivitas pelaporan tambahan.

C. Keterbatasan Terhadap Pengukuran ESG Reporting

Tujuan dasar penggunaan metrics ESG adalah untuk mengukur seakurat mungkin kinerja suatu perusahaan dalam isu-isu tertentu. Sehingga, para pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian secara tepat terhadap operasi bisnis perusahaan.

Bagi investor, hasil ini digunakan untuk menilai tanggung jawab perusahaan terhadap kinerja ESG mereka serta memasukkan data dalam analisis bisnis. Bagi perusahaan sendiri data yang akurat ini digunakan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan telah berhasil serta bagaimana mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam proses operasional, strategi bisnis serta kompensasi eksekutif. Sementara bagi konsumen digunakan untuk membuat keputusan pembelian, regulator berguna untuk melakukan pengawasan dan pemberian insentif atau sanksi.

Meskipun perusahaan meng-klaim bahwa mereka telah mengukur dan menggunakan metrics ESG secara tepat, dengan menggunakan gambaran distribusi normal, yang

artinya rata-rata perusahaan berada pada nilai rata-rata, ditemukan terdapat empat keterbatasan (Kotsantonis & Serafeim, 2019). Pertama, terdapat ketidakkonsistenan data antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. melakukan uji data dengan cara memilih acak 50 perusahaan (dari daftar fortune 500) yang terdaftar di bursa dan berasal dari berbagai sektor. (Kotsantonis & Serafeim, 2019) melakukan uji manual bagaimana mereka melaporkan isu kesehatan dan keselamatan karyawan dalam sustainability reporting mereka. (Kotsantonis & Serafeim, 2019) menemukan bahwa lebih dari 20 cara berbeda dalam melaporkan data tersebut, terlebih mereka juga menggunakan satuan pengukuran yang berbeda-beda.

Kedua, proses benchmarking dapat menimbulkan bias. Hal ini karena cara memilih kelompok pembanding sangat berpengaruh. Ketiga, pengisian data ESG yang hilang dapat menjadi masalah. Hal ini karena tidak semua model pengisian dibuat dengan kualitas yang sama. Terakhir, penyedia data ESG, dalam hal ini internal perusahaan enggan menampilkan semua data secara komprehensif ke public.

D. Penutup

Pengukuran dampak keuangan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa prinsip ESG tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar terintegrasi dalam strategi, proses operasional, dan pengambilan keputusan perusahaan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kerangka konseptual, pendekatan metodologis—baik kuantitatif maupun kualitatif—serta pemanfaatan indikator dan standar global seperti IRIS+, GRI, SASB, dan TCFD, perusahaan dapat mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak keberlanjutan secara lebih akurat dan bertanggung jawab.

Meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti ketidakkonsistenan data, keterbatasan benchmarking, serta keterbukaan informasi yang masih rendah, integrasi ESG dalam proses bisnis tetap merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Standar pelaporan yang lebih seragam dan dukungan kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem keberlanjutan yang inklusif dan akuntabel.

BAGIAN 3

PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUSIA

BAB 6 | Pengembangan Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) untuk Keuangan Berkelanjutan

Asep Sutarman

Dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah, perusahaan modern dituntut untuk mampu bertahan sekaligus bersaing secara efektif. Manajemen kompetensi hadir sebagai strategi kunci dengan menitikberatkan pada pengembangan, pengenalan, dan pemanfaatan keterampilan, pengetahuan, serta kualifikasi yang relevan guna mendukung kinerja optimal sumber daya manusia.

Kompetensi komunikasi lintas budaya penting untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang nyata antara pengirim dan penerima informasi, terutama sejalan dengan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang budaya sebagai agen pembangunan berkelanjutan (Stella Aririguzoh, at.al.2022).

Kompetensi ialah gabungan keterampilan, pengetahuan, landasan berpikir, serta nilai-nilai yang dimiliki individu dan berakar dari kemampuan untuk berpikir secara jernih dan konsisten. Dengan demikian, kompetensi tidak hanya mencerminkan apa yang diketahui atau dikuasai seseorang, tetapi juga mencerminkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas secara efektif untuk menghasilkan kontribusi nyata.

Sumber daya Manusia harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk merespon keuangan yang berkelanjutan, dimana seorang yang ahli di bidang keuangan dalam setiap gerak dan langkah perlu memperhatikan aspek aspek yang terkait dengan lingkungan bersih, produksi yang menggunakan bahan baku yang tidak mengganggu ekosistem lingkungan dan mengevaluasi seluruh aktivitas industri yang terus menjaga kelestarian

lingkungan, dan masyarakat terbebas dari limbah industri dan pencemaran lingkungan.

A. Sumber Daya Manusia Dan Kompetensi

1. Manajemen Kompetensi dan Kompetensi

Manajemen kompetensi bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi dengan menitikberatkan pada pengembangan dan pemeliharaan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang dibutuhkan agar individu dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini memastikan bahwa setiap anggota tim dibekali kompetensi yang relevan untuk melaksanakan tugas secara efisien, sehingga organisasi mampu meningkatkan produktivitas dan beradaptasi secara responsif terhadap dinamika lingkungan yang terus berkembang.

Tujuan utama dari manajemen kompetensi ialah mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap setiap individu dalam organisasi. Penerapan manajemen kompetensi menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kapasitas karyawan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.

Alasan pentingnya manajemen kompetensi bagi perusahaan ialah:

- a. Meningkatkan Kinerja Karyawan
- b. Adaptasi Terhadap Perubahan
- c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- d. Perekrutan dan Seleksi yang Lebih Tepat Sasaran

- e. Pengembangan Karyawan dan Motivasi
- f. Pengelolaan Kinerja yang Lebih Baik
- g. Keberlanjutan Organisasi
- h. Daya Saing di Pasar
- i. Peningkatan Inovasi
- j. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Secara umum, kompetensi merujuk pada kombinasi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas secara optimal dan penuh tanggung jawab. Kompetensi juga sering dikaitkan dengan posisi atau peran seseorang dalam suatu organisasi, mencerminkan sejauh mana individu tersebut mampu memenuhi tuntutan jabatan yang diembannya.

Misalnya kompetensi seorang karyawan yang berkenaan dengan keterampilan, kedisiplinan, etos kerja, dan sebagainya.

Para ahli memberikan pengertian yang beragam tentang kompetensi, berikut ini definisi Kompetensi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

- Menurut Stephen Robbin (2007:38), Kompetensi dapat diartikan sebagai kapasitas atau kecakapan individu dalam menyelesaikan berbagai tugas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan tertentu. Kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor intelektual dan fisik, yang bersama-sama menentukan sejauh mana seseorang mampu menjalankan perannya secara efektif.

- Menurut Van Looy, Van Dierdonck, dan Gemmell (1998), Esensi kompetensi terletak pada kualitas individu yang secara langsung berkorelasi dengan efektivitas kinerja, dan tercermin melalui tindakan, perilaku, serta sikap yang dapat diamati dalam konteks kerja.
- Menurut Sedarmayanti (2018), Kompetensi merupakan karakteristik individu yang menjadi pembeda dan berperan penting dalam menentukan tingkat efektivitas serta produktivitas seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.
- Menurut Wibowo (2013) kompetensi mencerminkan tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kematangan individu dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam suatu organisasi.

Dari pendapat ahli tersebut diatas kita dapat membuat sintesis bahwa Kompetensi ialah tingkat keahlian, kemampuan serta nilai nilai dasar yang dimiliki oleh seorang karyawan untuk menjalankan tugas pekerjaan, agar menghasilkan kinerja yang optimum.

2. Faktor faktor Yang mempengaruhi Kompetensi.
Terdapat delapan faktor yang mempengaruhi Kompetensi ialah:
 - a. Keyakinan dan nilai-nilai
Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang dimilikinya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Apabila karyawan meragukan kemampuan kreatif dan inovatif yang mereka miliki, mereka cenderung

kesulitan untuk mengembangkan ide-ide baru atau menemukan pendekatan alternatif dalam melaksanakan tugas.

b. Keterampilan

Keterampilan fungsional, seperti yang ditunjukkan oleh seorang Staf Akuntansi, merujuk pada kompetensi yang dapat dipelajari, diaplikasikan, dan dikembangkan untuk menunaikan beragam tugas. Sebagai contoh, keahlian dalam mencatat transaksi finansial, menyusun jurnal akuntansi, hingga menghasilkan laporan keuangan merupakan manifestasi dari keterampilan ini.

c. Pengalaman

Di samping itu, konstruksi kompetensi juga meliputi serangkaian soft skills esensial, termasuk kemampuan pengelolaan personel, komunikasi multi-arah yang efektif, elaborasi solusi problematik, dan penguasaan teknis dalam penyusunan laporan finansial. Secara inheren, praktik rekrutmen yang optimal berorientasi pada identifikasi kandidat yang memiliki validitas pengalaman kerja selama beberapa tahun.

d. Karakteristik Kepribadian

Interaksi kompleks antara atribut internal individu dan variabel kontekstual eksternal memegang peranan signifikan dalam memodulasi formasi karakteristik personal, termasuk dimensi fundamental kepribadian. Konstelasi karakteristik ini terwujud dalam pola habituasi, kapasitas volisional, tingkat pendidikan formal, serta pengaruh sosio-

kultural yang bersumber dari lingkungan komunal dan kelompok referensi.

e. Motivasi

Motivasi merupakan variabel yang dapat dipengaruhi secara konstruktif melalui implementasi prinsip-prinsip penguatan positif. Tindakan manajerial seperti pemberian reinforcement verbal, apresiasi kontribusi kerja, pemberian penghargaan formal, serta demonstrasi perhatian individual oleh pimpinan berpotensi mengoptimalkan tingkat motivasi anggota tim.

f. Isu Emosional

Hambatan bersifat emosional dapat menjadi faktor pembatas dalam penguasaan kompetensi profesional. Ketidakpastian atau keragu-raguan yang dialami individu cenderung menghambat tingkat motivasi, inisiatif, serta kondisi mental yang optimal. Mengingat kompleksitas tantangan yang terus meningkat, pekerja saat ini diharuskan tidak hanya menunjukkan produktivitas yang tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan keseimbangan psikologis secara efektif.

g. Kemampuan Intelektual.

Kompetensi individu turut berperan dalam proses pembelajaran kognitif, termasuk di dalamnya pembelajaran yang bersifat konseptual dan analitis. Oleh karena itu, setiap karyawan diharapkan memiliki kapasitas intelektual yang memadai guna melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efektif.

Kemampuan pribadi yang ada yang mendukung kegiatan mental, emosional, dan pemecahan masalah.

h. Budaya Organisasi

Kemampuan sumber daya manusia dalam tugas-tugas seperti perekrutan dan pemilihan karyawan, prosedur pengambilan keputusan, dan sebagainya dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi dibangun dari norma norma, nilai nilai yang sepakati bersama dan menjadi komitmen bersama untuk kemajuan perusahaan.

3. Jenis jenis Kompetensi.

Menurut Palan (dalam Kaswan, 2017) mengatakan ada 4 jenis kompetensi, ialah sebagai berikut:

a. Kompetensi Inti (Core Competency)

Kemampuan ini hadir di tingkat organisasi, di mana perusahaan menginginkan agar keyakinan dan kemampuan dasarnya dimiliki oleh semua karyawan. Dalam organisasi bisnis, kompetensi inti dapat menjadi dasar untuk membangun keunggulan kompetitif. Perusahaan yang berbeda mungkin memiliki kompetensi inti yang berbeda berdasarkan sektor, penekanan strategis, dan ciri khas mereka.

Jenis-Jenis Kompetensi Inti antara lain; Keterampilan Teknis, Keterampilan Komunikasi, Kepemimpinan dan Manajemen, Analisis dan Problem Solving. Menurut Ching-Chi Hsu. (2022), Kompetensi inti, antara lain terdiri dari kepemimpinan, pengawasan,

keterampilan komunikasi, dan evaluasi kinerja. Dengan berbagi kompetensi inti, organisasi dapat meningkatkan produksi mereka dan dengan demikian meningkatkan tingkat pekerjaan, meningkatkan tingkat pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

b. Kompetensi Fungsional

Kompetensi yang menggambarkan aktivitas dan hasil kerja, seperti pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kompetensi ini terkait dengan keterampilan yang mendukung pekerjaan berdasarkan fungsi tertentu dalam perusahaan. Misalnya, dalam fungsi pemasaran, kompetensi meliputi kemampuan merancang strategi promosi atau menganalisis perilaku konsumen.

Di bidang keuangan, kompetensi fungsional bisa berupa pengelolaan anggaran atau analisis laporan keuangan. Kompetensi fungsional memastikan bahwa individu memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran spesifik dalam struktur organisasi.

c. Kompetensi Perilaku

Kompetensi perilaku merupakan keterampilan dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kompetensi ini dapat diidentifikasi pada tingkat individu melalui penerapan teknik wawancara berbasis perilaku atau dengan memanfaatkan basis data kompetensi yang bersifat umum.

Kompetensi ini melibatkan kemampuan interpersonal dan emosional yang mendukung interaksi dan kerja sama dalam tim. Contohnya meliputi keterampilan komunikasi, kolaborasi, manajemen konflik, dan kemampuan beradaptasi.

Kompetensi perilaku sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, membangun hubungan baik, dan memecahkan masalah secara kreatif.

d. Kompetensi Peran

Kompetensi yang berhubungan dengan tingkat jabatan seseorang, dimana kompetensi ini didasarkan pada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kurun waktu tertentu.

Seorang manajer harus memiliki kemampuan dan keterampilan peran sebagai manajer, misalnya memimpin rapat dengan para supervisor dan Staf, mengarahkan dan memotivasi karyawan di lapangan, membangun tim kerja yang solid.

B. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia, ialah Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis kompetensi, oleh karena itu sedikit akan kita singgung tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Setiap bisnis bercita-cita untuk memiliki pekerja terbaik. Tujuan perusahaan adalah agar para pelamar memiliki kualitas yang tinggi ketika mereka diterima.

Tujuan Pengembangan SDM ialah untuk meningkatkan kualitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan, dengan demikian tujuan-tujuan pengembangan SDM ialah sebagai berikut :

- Meningkatkan Produktivitas karyawan.
- Mengurangi Kerusakan Produk
- Memastikan semua berjalan Efisien
- Meningkatkan Sikap Kepemimpinan
- Meningkatkan Moral Karyawan
- Menaikkan Kompensasi

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar dapat mengerjakan tugas pekerjaannya dengan mudah cepat dan akurat, serta menghasilkan kinerja atau output yang bagus dan unggul.

Peran SDM dalam mencapai keberlanjutan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada praktik SDM. Berdasarkan temuan dan isu-isu yang kurang berkembang terkait SDGs dan SDM, dengan fokus pada kesehatan mental (SDG3), kualitas gender (SDG5), kolaborasi menuju aksi iklim dan produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab (SDGs12&13), dan lebih menekankan pada SDG1 terkait keberlanjutan sosial organisasi. (Salgado, at.al. 2023).

Setiap profesi membutuhkan seperangkat keterampilan dan kemampuan tertentu agar dapat dilakukan secara efektif, dan individu yang akan melakukan pekerjaan tersebut harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kunci dari kemampuan setiap organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar adalah tenaga kerja yang terampil.

Menurut Gordon (1988), aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (Knowledge)
- b. Pemahaman (Understanding)
- c. Kemampuan (skill)
- d. Nilai (value)
- e. Sikap (attitude)
- f. Minat (interest)



Gambar Kompetensi, menurut Gordon (1988)

2. Model Kompetensi

Model kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara tepat dalam konteks tertentu, seperti jabatan, posisi, atau organisasi. Model ini terdiri atas kumpulan kemampuan yang secara kolektif mencerminkan kinerja efektif pada situasi kerja tertentu. Model kompetensi juga menjadi dasar bagi berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia, termasuk manajemen kinerja, pelatihan dan

pengembangan, penempatan, serta proses rekrutmen. Oleh karena itu, model kompetensi dapat dirancang untuk suatu jabatan, kelompok jabatan, organisasi, maupun sektor industri tertentu.

Selain itu, model kompetensi dapat bervariasi tergantung pada posisi dalam struktur organisasi atau sektor industri, dan dapat diadaptasi dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan.

Secara umum, kompetensi model-model yang disebutkan di atas mencakup unsur-unsur berikut:

a. Nama kompetensi

Berikan nama yang tepat untuk kompetensi tersebut. Misalnya, model kompetensi dalam kerja kelompok, atau "Kerja Tim," memerlukan pembinaan hubungan interpersonal yang positif dan harmonis, berusaha mencapai konsensus dan berkompromi dengan orang lain, mematuhi dan mendukung keputusan kelompok, mendorong interaksi tim, dan secara konsisten berfokus pada tujuan kelompok.

b. Deskripsi tindakan

Deskripsi tindakan adalah praktik yang terkait dengan semua keterampilan. Sebagai contoh, kinerja berikut ini dapat dikaitkan dengan kompetensi "kerja tim".

Ketika bekerja dengan rekan kerja, berhasil menyelesaikan perbedaan dalam metode kerja, meramalkan konflik dan menyelesaikannya secara damai, dan menunjukkan dedikasi pribadi untuk tujuan kelompok.

Tipe-tipe Model Kompetensi

Empat (4) Model Kompetensi yang dapat diukur dan dievaluasi adalah sebagai berikut, menurut Matthew Schieltz, lulusan Departemen Psikologi Klinis Wright State University di Dayton, Ohio, dan kontributor independen untuk berbagai situs web dan organisasi, termasuk Demand Studios, sejak tahun 2006:

a. Model Kompetensi Organisasi

Model kompetensi organisasi Model kompetensi organisasi, yang juga dikenal sebagai kompetensi inti atau generik, menguraikan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang di perusahaan. Model ini menjelaskan bagaimana karyawan di setiap level dapat mengembangkan kompetensi ini, dengan memperoleh keterampilan yang lebih kompleks atau mengembangkan keterampilan mereka saat ini.

b. Model Kompetensi Fungsional

Persyaratan kinerja yang harus dipenuhi seseorang untuk menjalankan posisi atau tugas tertentu dijelaskan oleh model kompetensi fungsional. Sebagai contoh, seseorang yang ingin bekerja di bidang keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia harus memiliki berbagai kemampuan fungsional. Masing-masing pekerjaan tersebut di atas membutuhkan model kompetensi tertentu untuk setiap fungsi.

c. Model Kompetensi Jabatan/Pekerjaan

Model kompetensi kerja semacam ini menguraikan serangkaian perilaku, ke-

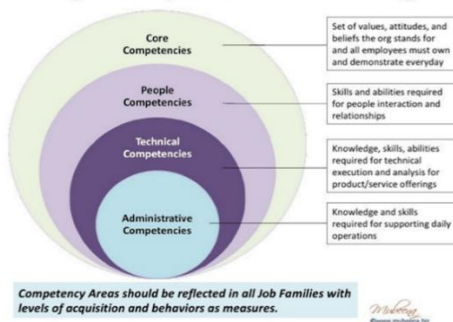
mampuan, dan pengetahuan tertentu yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik dalam peran tertentu. Misalnya, kasir dan pelayan di perusahaan ritel seperti mal dan supermarket memiliki kompetensi yang berbeda dengan mereka yang bekerja di gudang atau di bagian kontrol inventaris.

d. Model Kompetensi Kepemimpinan

Model kompetensi manajerial atau kompetensi kepemimpinan menguraikan elemen-elemen yang akan membantu para pemimpin untuk sukses ketika mereka mengambil peran manajemen puncak atau kepemimpinan. Untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan, banyak organisasi menggunakan model kompetensi kepemimpinan, yang biasanya menekankan pada kepercayaan diri, penilaian profesional, kepemimpinan, inovasi, membangun koneksi, dan pertumbuhan pribadi.

Contoh Model Kompetensi yang dilaksanakan di dalam Bisnis dan Industri

Competency Framework Design



Dari model Kompetensi diatas dapat dipahami bahwa terdapat 4 (empat) tingkatan kompetensi ialah:

1) Kompetensi Administrasi

Kompetensi Administrasi ialah hal yang paling mendasar dimana seorang karyawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang akan mendukung pekerjaannya sehari hari antara lain, tentang Pendidikan misalnya Staf Keuangan harus sarjana Manajemen Keuangan, dan memiliki sertifikat Akuntansi dasar, dan lain lain.

2) Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis ialah kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan, menganalisis masalah, dan mengambil langkah langkah tindakan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas. Misalnya seorang Staf keuangan harus mahir mengoperasikan aplikasi atau software yang berkaitan dengan keuangan.

3) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia ialah skill yang diperlukan karyawan untuk mengelola dan berinteraksi dengan karyawan lainnya, baik itu dengan atasan, rekan kerja, tim kerja, dan bawahan. Misalnya tentang etika pergaulan, komunikasi, motivasi dan kepemimpinan

4) Kompetensi Inti

Kompetensi inti ialah kompetensi yang diperlukan semua karyawan untuk menjalankan kegiatan sehari hari di

perusahaan, misalnya norma dan nilai-nilai yang dikembangkan, budaya organisasi yang harus dikuatkan misalnya, kepercayaan, tanggung jawab, dan sikap.

3. Kompetensi Teknis dan Managerial di Bidang Keuangan.

Kompetensi Teknis Umum

Pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu dalam suatu bidang atau profesi secara kolektif disebut sebagai kompetensi teknis umum.

Keterampilan ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang ide, prosedur, instrumen, atau teknologi yang relevan di suatu bidang.

Orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dapat bekerja secara efektif, memecahkan masalah yang menantang, dan memberikan kontribusi yang berharga di tempat kerja. Untuk berkembang dalam pekerjaan Anda dan menjadi seorang profesional yang kompeten, Anda harus menguasai kemampuan teknis.

Kompetensi Teknis Keuangan

Kompetensi Teknis keuangan di kelompokkan kedalam 6 (enam) kompetensi, ialah :

- a. Manajemen Keuangan
 - Menentukan aturan, persyaratan, dan proses untuk menangani pendanaan pemerintah organisasi lokal.
 - Mengenali proses-proses yang terlibat dalam manajemen keuangan.

- Semua laporan keuangan unit harus direkonsiliasi.
 - Mampu menganalisis laporan keuangan, menilai kesehatan keuangan organisasi, menunjukkan kekurangan, dan memberikan saran untuk kinerja keuangan yang lebih baik.
- b. Penyusunan Anggaran
- Mampu menjelaskan elemen-elemen penyusunan anggaran, metode realisasi, dan proses yang terkait, memahami proses yang lengkap dari awal hingga akhir.
 - Menyadari realisasi yang dilaporkan
 - Memantau penggunaan anggaran
 - Memantau penggunaan anggaran biro/direktorat.
- c. Laporan Keuangan
- Memahami cara membuat jurnal dan mencatat informasi transaksi keuangan.
 - Membuat neraca laporan keuangan
 - Membuat analisis terhadap laporan keuangan
 - Dengan menggunakan temuan analisis laporan keuangan, buatlah saran untuk meningkatkan kinerja keuangan.
- d. Kas dan Perbendaharaan
- Mengenali dan memahami berbagai masalah terkait mata uang dan treasury
 - Mampu menjelaskan manajemen perbendaharaan unit kerja dan aktivitas kas.

- Mampu menjelaskan dan mempraktikkan manajemen treasury dan pengeluaran kas.
- Jelaskan bagaimana manajemen kas, kontrol, dan manajemen perbendaharaan mendukung operasi sehari-hari.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 119/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah merupakan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai kompetensi jabatan di bidang keuangan.

Kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan suatu posisi dikenal sebagai kompetensi posisi. Kompetensi Jabatan terbagi atas 3 (tiga) kelompok, ialah:

a. Kompetensi Jabatan Teknis

Tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis praktis, dan pengalaman kerja dalam disiplin teknis tertentu merupakan indikator kemahiran teknis, yang juga dikenal sebagai kompetensi keras. Untuk menyelaraskan kemampuan teknis dengan tuntutan unit kerja masing-masing, setiap unit kerja harus memeriksa dan meningkatkannya.

b. Kompetensi Jabatan Manajerial

Pengalaman kepemimpinan, pelatihan struktural atau manajemen, dan/atau pencapaian pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kompetensi manajerial.

c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pengamatan terhadap sikap dan perilaku serta interaksi dengan masyarakat untuk mencapai hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dapat digunakan untuk mengukur kompetensi sosial budaya.

Kompetensi Jabatan Teknis Keuangan

Kompetensi Jabatan Teknis Keuangan , terdiri dari :

1) Pengelolaan Keuangan Negara Daerah

Ide-ide dasar, hukum, peraturan, metode, proses, dan kebijakan pengelolaan keuangan negara bagian dan kota (termasuk pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan, serta pengelolaan aset/barang dan utang), semuanya tercakup dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

2) Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal melibatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta pemahaman akan ide-ide dasar, peraturan dan regulasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan.

3) Hukum Administrasi Keuangan Negara

Peraturan perundang-undangan administrasi keuangan negara, sistem dan prosesnya, termasuk peraturan perundangan yang relevan, serta kemampuan untuk membuat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yang semuanya tercakup dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

4) Teknik Analisis

Kapasitas untuk menggunakan alat dan metodologi analisis berdasarkan data dan informasi yang dapat dipercaya (evidence based) untuk melakukan analisis dan mengembangkan saran untuk kebijakan publik yang sesuai dengan gagasan perbaikan yang berkelanjutan.

5) Teknik Menulis

Kemampuan untuk mengumpulkan fakta-fakta objektif dan dapat diverifikasi yang dapat diperiksa dan kemudian ditulis dengan menggunakan prosedur, standar, dan metodologi yang tepat sehingga tulisannya logis, sistematis, dapat dipahami, dan sesuai dengan peruntukannya.

6) Teknik Persuasi

Kapasitas untuk menggunakan prosedur dan taktik yang telah disiapkan untuk menjelaskan dan menyampaikan konsep, rencana, proses, data, program, dan kebijakan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain dan pengambil keputusan dan mematuhi saran yang diberikan.

Kompetensi Jabatan Manajerial Keuangan

1) Integritas

Menjaga budaya etika yang tinggi, bertanggung jawab, jujur dalam berinteraksi dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi.

2) Kerja sama

Kapasitas untuk menciptakan, memelihara, dan menjunjung tinggi hubungan kerja yang produktif; dedikasi untuk membantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugas; dan kemampuan untuk memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.

3) Komunikasi

Kapasitas untuk mengkomunikasikan pendapat dan ide dengan cara yang jelas dan metodis dengan alasan yang logis dalam format yang sesuai, baik secara tertulis maupun lisan, sambil menjamin pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efisien, dan mempengaruhi atau meyakinkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4) Orientasi Pada Hasil

Memiliki komitmen pribadi yang kuat untuk menyelesaikan tugas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mampu mengenali kemungkinan dan bahaya secara metodis serta memperhatikan hubungan antara perencanaan dan hasil, semuanya diperlukan untuk keberhasilan organisasi.

5) Pelayanan Publik

Kapasitas untuk melakukan pekerjaan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan untuk memenuhi persyaratan layanan publik secara transparan, profesional dengan tetap berpegang pada standar layanan yang tidak bias, netral, obyektif, dan tidak diskriminatif.

- 6) Pengembangan Diri Dan Orang Lain
Kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri sendiri sekaligus memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dapat membantu pertumbuhan profesional jangka panjang.
- 7) Mengelola Perubahan
Kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam mendukung dan mengimplementasikan proyek perubahan, memimpin upaya perubahan, menyesuaikan diri dengan kondisi baru atau kondisi yang berubah, dan bertanggung jawab secara pribadi untuk memastikan bahwa perubahan diimplementasikan dengan sukses.
- 8) Pengambilan Keputusan
Kapasitas untuk membuat penilaian yang bijaksana dengan cepat dan percaya diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, merumuskannya secara metodis dan menyeluruh berdasarkan berbagai fakta, solusi potensial untuk masalah, dan dampaknya, dan menerima akuntabilitas atas pilihan yang dibuat.

Kompetensi Sosial Kultural

1) Perekat Bangsa

Perpanjangan dari peran pemerintah dalam menyatukan masyarakat dan membina ikatan sosio-psikologis dengan mereka adalah kemampuan untuk menumbuhkan toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap keragaman individu dan kelompok.

C. Kompetensi SDM Untuk Keuangan Berkelanjutan

1. Konsep Keuangan Berkelanjutan

Sebuah strategi yang dikenal sebagai “keuangan berkelanjutan” memadukan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan kemakmuran ekonomi. Triple Bottom Line (TBL), terkadang disebut sebagai tiga pilar keberlanjutan, adalah integrasi dari tiga komponen utama dalam keuangan berkelanjutan: profit, planet, dan people.

Bagi para pelaku pasar, memahami fokus yang terus berkembang pada keuangan berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi peluang investasi baru dan menyelaraskan portofolio dengan tren yang muncul. Investor dapat memanfaatkan wawasan tentang topik seperti 'Ekonomi Hijau' untuk mendukung perusahaan yang memimpin dalam upaya keberlanjutan, yang berpotensi meningkatkan keuntungan jangka panjang sekaligus berkontribusi pada tujuan keberlanjutan global (Ashish Kumar Jha, et.al. 2024).

Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk keuangan yang berkelanjutan ialah keharusan dan tuntutan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masa depan dan generasi selanjutnya.

a. Profit (Keuntungan)

Salah satu komponen penting dalam pembiayaan berkelanjutan adalah keuntungan finansial. Namun, keuntungan dalam konteks ini ditentukan oleh dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasi atau investasi perusahaan, selain aspek keuangan. Perusahaan dan investor sering kali

mempertimbangkan keuntungan jangka panjang, menghindari praktik bisnis yang merusak lingkungan dan sosial, serta menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat.

b. Planet (Lingkungan)

Komponen lingkungan hidup dalam keuangan berkelanjutan sangat menekankan pada pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam. Perusahaan dan investor diwajibkan untuk menggunakan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasi mereka, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, mengelola limbah dengan baik, dan melindungi keanekaragaman hayati. Investasi dalam inisiatif yang mempromosikan pelestarian lingkungan dan energi berkelanjutan menjadi semakin populer.

c. People (Masyarakat)

Dampak positif bagi masyarakat dan kesejahteraan manusia merupakan penekanan utama dari komponen sosial keuangan berkelanjutan. Hal ini mencakup keadilan sosial, kondisi kerja yang aman, perlindungan hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan seharusnya berkontribusi secara positif terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi dan menyadari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

Selain memberikan dampak yang baik bagi lingkungan hidup dan masyarakat, keuangan berkelanjutan juga memberikan sejumlah manfaat penting bagi bisnis, investor, dan masyarakat luas. Manfaat bagi tujuan-tujuan berkelanjutan dapat dicapai dengan memasukkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang dikenal sebagai Tujuan Berkelanjutan Lingkungan Hidup, atau ESG-ke dalam pilihan-pilihan keuangan.

Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam organisasi terkait langsung dengan hal ini. Kemampuan untuk merancang inisiatif jangka panjang tanpa mengorbankan kapasitas generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan sektor keuangan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan harus diprioritaskan ketika mengembangkan sistem keuangan yang lebih inklusif yang secara langsung menguntungkan kelompok miskin dan berpendapatan rendah dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan yang sesuai (Ping Xin Liew. at.al. 2023)

2. Sertifikasi di Bidang Keuangan.

Sertifikasi dapat memberikan manfaat, terutama bagi pencari kerja, karena memberikan verifikasi atau bukti nyata bahwa seseorang telah menyelesaikan kursus dan tes yang memenuhi kriteria lembaga resmi.

Banyak sertifikat yang tersedia di industri keuangan yang dapat meningkatkan reputasi profesional dan menambah pengetahuan. Berikut ini

sertifikasi kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi antara lain:

a. Chartered Financial Analyst

Salah satu kredensial keuangan yang paling terkemuka di dunia adalah sebutan CFA. Situs web Big Alpha menyatakan bahwa lebih dari 100.000 orang telah mendaftar dalam program sertifikasi ini secara global, namun masih relatif sedikit pemegang kredensial CFA di Indonesia. Hanya 261 orang di Indonesia yang memiliki sertifikasi CFA pada tahun 2019.

Sertifikasi ini cocok untuk yang sedang ingin bekerja pada sektor investasi serta finansial.

b. Certified in Finance, Accounting, and Business

Sertifikasi keuangan yang berbasis di Inggris yang dikenal dengan nama Certified in Finance, Accounting, and Business (CFAB) kini memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Kualifikasi ini, yang mengajarkan akuntansi, keuangan, bisnis, manajemen informasi, hukum bisnis, dan asuransi, cocok untuk orang-orang yang ingin bekerja di industri keuangan.

c. Certified Securities Analyst

Certified in Finance, Accounting, and Business (CFAB) adalah sertifikasi keuangan dari Inggris yang kini memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Sertifikasi ini cocok bagi mereka yang ingin berkarir di bidang keuangan, mengajarkan keterampilan di bidang akuntansi, keuangan, bisnis, manajemen informasi, hukum bisnis, dan asuransi.

Kurikulum ini menawarkan banyak peluang kerja di bidang manajemen aset, pensiun, asuransi, dan sekuritas serta di sektor publik di bidang hubungan investor.

d. Certified Management Accountant

Bagi mereka yang ingin bekerja sebagai akuntan perusahaan, kualifikasi Certified Management Accountant (CMA) adalah pilihan terbaik. Sertifikasi yang dimulai oleh Institute of Management Accountants (IMA) ini memiliki prasyarat seperti menjadi anggota IMA, memiliki gelar sarjana di bidang akuntansi, atau bekerja sebagai akuntan selama dua tahun.

e. Certified Financial Planner

Kredensial Perencana Keuangan Bersertifikat (CFP) diperlukan untuk bekerja sebagai perencana keuangan di industri perbankan, pasar modal, dan asuransi.

Setelah mendapatkan sertifikasi ini, peserta akan menjadi sangat mahir dan berpengetahuan luas tentang semua aspek perencanaan keuangan.

f. Certified Wealth Manager (CWM)

Program sertifikasi manajemen kekayaan internasional lainnya adalah program Certified Wealth Manager (CWM). Standar kompetensi internasional yang digunakan di sejumlah negara lain, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, digunakan dalam sertifikasi ini.

Dasar-dasar manajemen kekayaan, investasi, manajemen risiko, pertimbangan hukum, dan manajemen pensiun akan dibahas dalam program sertifikasi CWM.

g. Intuit Certified Bookkeeping Professional

Program Intuit Certified Bookkeeping Professional merupakan pilihan tambahan untuk sertifikasi keuangan. Program ini bertujuan untuk mengajarkan peserta cara menangani pembukuan akuntansi, memahami konsep dasar akuntansi, menggunakan perangkat lunak akuntansi, serta mengevaluasi dan menyajikan data keuangan.

3. Prospek Kerja untuk Sertifikasi Keuangan

Seiring dengan semakin rumitnya pasar keuangan, kebutuhan akan spesialis keuangan akan terus meningkat. Memperoleh sertifikasi keuangan dapat mengarah pada sejumlah pilihan pekerjaan yang menarik. Berikut ini adalah beberapa opsi pekerjaan yang dapat dikejar setelah sertifikasi:

a. Broker Saham

Anda akan membeli dan menjual saham atas nama pelanggan atau bisnis sebagai pialang saham. Karena mereka menawarkan keahlian dan reputasi yang dibutuhkan di sektor pasar keuangan, sertifikasi seperti CFA dan CSA sangat berguna untuk peran ini.

b. Auditor

Memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan adalah tanggung jawab seorang

auditor. Kemampuan audit dan pengetahuan tentang kontrol dan proses akuntansi dapat ditingkatkan dengan menggunakan sertifikasi seperti CMA dan CFAB.

c. Perpajakan

Memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan adalah tanggung jawab seorang auditor. Kemampuan audit dan pengetahuan tentang kontrol dan proses akuntansi dapat ditingkatkan dengan menggunakan sertifikasi seperti CMA dan CFAB.

d. Analis Keuangan

Untuk membantu bisnis atau klien dalam membuat keputusan investasi yang bijak, analis keuangan dipercaya untuk menganalisis data keuangan. Menilai kemungkinan dan bahaya investasi membutuhkan kemampuan analitis dan pengetahuan pasar yang mendalam, yang disediakan oleh sertifikasi seperti Intuit Personal Finance, CFA, dan CSA.

e. Konsultan Keuangan

Konsultan keuangan adalah para ahli yang membantu orang atau bisnis dalam manajemen risiko, perencanaan pensiun, perencanaan investasi, dan tugas-tugas perencanaan dan manajemen keuangan lainnya. Para profesional dengan sertifikasi seperti Intuit Certified Bookkeeping Professional dan Intuit Personal Finance lebih mampu memberikan saran kepada pelanggan secara strategis dan tepat serta membina

hubungan kepercayaan antara konsultan dan klien.

BAB 7 | Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Organisasi: Perspektif Sumber Daya Manusia

Yurianto

Secara teoritis, tujuan utama setiap negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sangat disadari bahwa kesejahteraan bukan hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang lingkungan, sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya yang berkorelasi satu sama lain. Kesejahteraan yang dimaksud juga harus berkelanjutan, artinya dapat bertahan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam situasi seperti ini, tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh berbagai negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan secara paripurna (Sachs, 2012). Paradigma seperti ini sering disebut dengan pembangunan berkelanjutan.

Kehidupan manusia banyak mengalami perubahan. Situasi transformasi seperti ini hampir terjadi pada semua bidang. Perubahan terjadi pada cara individu berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan data dan informasi dalam memenuhi kehidupannya. Situasi seperti ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kondisi ini tidak hanya menciptakan peluang baru secara bersamaan hal ini menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam usaha menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi efek negatif dari situasi seperti ini, diperlukan pengembangan berbagai solusi inovatif dan pendekatan antar sektor.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah ketidakharmonisan dalam pengelolaan perubahan lingkungan baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pertumbuhan populasi yang besar telah menyebabkan peningkatan permasalahan di suatu wilayah, baik yang di kawasan perkotaan

maupun perdesaan, yang tentunya disertai dengan bertambahnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja menjadi masalah sosial yang terus memburuk.

Sebaliknya, pendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan prinsip keberlanjutan memberikan dampak eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara dan air, deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana ekologis dan perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia.

Kehidupan manusia akan sangat terpengaruh jika ketimpangan ini dibiarkan berlanjut. Dari segi sosial, masalah yang muncul termasuk kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup. Dari segi ekonomi, ketidakstabilan sosial dapat menyebabkan krisis ekonomi, biaya kesehatan yang meningkat karena pencemaran, dan penurunan produktivitas karena kerusakan lingkungan. Di sisi lingkungan, bencana air bersih, bencana kekeringan, bencana banjir, dan polusi udara ekstrim adalah beberapa contoh dari risiko yang dihadapi.

Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip harmonisasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan karena ketiga aspek ini saling terkait dan saling terkait. Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, sedangkan kebijakan sosial harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

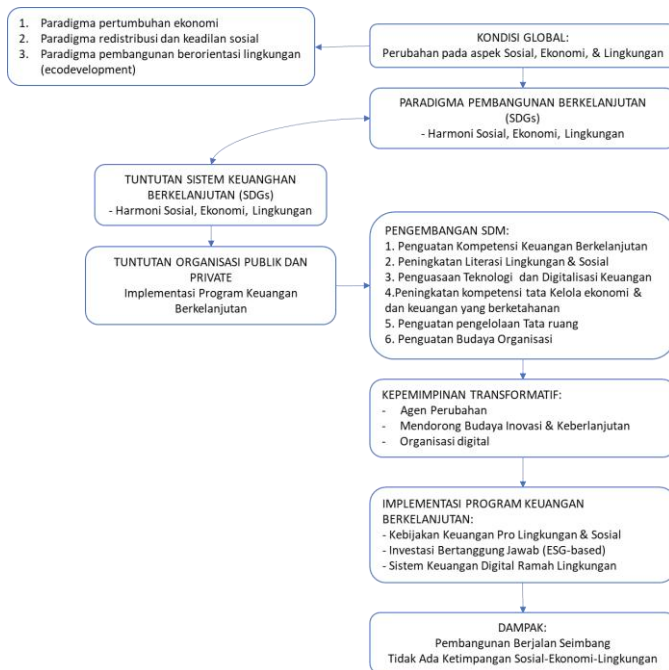
Kondisi ini menuntut kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana

diarahkan dalam paradigma Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk menjaga harmonisasi sosial, ekonomi dan lingkungan, perlu dirancang kebijakan dan program pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Salah satu instrumen strategis yang dapat memperkuat upaya tersebut adalah penerapan sistem keuangan berkelanjutan, yaitu sistem pembiayaan yang mendukung aktivitas ekonomi ramah lingkungan, inklusif, serta berpihak pada kepentingan sosial. Keuangan berkelanjutan perlu didorong dan diimplementasikan secara menyeluruh sebagai bagian integral dari agenda pembangunan baik nasional maupun global

Keadaan seperti ini, pendekatan pembangunan berkelanjutan, termasuk pendekatan keuangan, menjadi sangat relevan. Profitabilitas bukan satu-satunya pertimbangan untuk perilaku keuangan berkelanjutan; investasi harus mempertimbangkan bagaimana investasi berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Keuangan berkelanjutan harus dapat mengimbangi keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan (Fahrurrozi et al., 2025). Oleh karena itu, pembangunan dapat berjalan selaras dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) menjadi aspek penting dari pembangunan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlangsungan ekosistem dan keadilan sosial. Setidaknya terdapat empat dimensi strategis dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Secara diagramatik proses ini dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut.



Kerangka Berfikir Keuangan Berkelanjutan dan Sumber daya Manusia

Gambar diatas menunjukkan bahwa keadaan dunia saat ini ditandai oleh transformasi yang sangat mendalam dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam sepuluh tahun sebelumnya, fokus paradigma pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, redistribusi, keadilan sosial, dan pembangunan yang berorientasi lingkungan. Namun, karena kondisi global saat ini telah berubah, pendekatan pembangunan harus disesuaikan. Pembangunan harus dilakukan dengan cara yang mengintegrasikan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs)

Inti dari SDGs adalah tercapainya harmonisasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Paradigma ini kemudian menimbulkan tuntutan terhadap sistem keuangan. Pembangunan berkelanjutan akan berhasil dan terwujud jika didukung dengan subsistem - subsistem pendukungnya. Salah satu contohnya adalah sistem keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini seluruh aktivitas keuangan berjalan seimbang dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Sistem keuangan perlu dilakukan pengelolaan tidak hanya bagi organisasi publik tetapi juga untuk organisasi swasta. Keduanya didorong untuk menjalankan program keuangan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini maka sistem keuangan berkelanjutan harus didukung SDM yang kompeten. SDM harus disiapkan secara sistematis dan terarah dengan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara keseluruhan. Pengembangan sumber daya manusia agar penerapan sistem keuangan berkelanjutan bisa berjalan efektif, efisien dan holistik. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) diarahkan kepada aspek-aspek penting, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi di bidang keuangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan literasi atau pemahaman tentang isu lingkungan dan sosial.
3. Menguasai teknologi dan digitalisasi keuangan.
4. Meningkatkan kemampuan tata kelola ekonomi dan keuangan yang tangguh dan tahan krisis.
5. Memperkuat pengelolaan tata ruang.
6. Membangun budaya organisasi yang baik.

Tidak hanya kompetensi dalam aspek teknis saja tetapi perlu kompetensi kepemimpinan yang efektif dan efisien serta profesional. Kepemimpinan transformatif ini dituntut untuk berperilaku dan berperan sebagai Pemimpin yang menjadi agen

perubahan, Mendorong budaya inovasi dan keberlanjutan, serta Mengelola organisasi berbasis digital.

Dengan demikian, maka kebijakan yang telah disusun perlu diimplementasikan terutama untuk kebijakan keuangan yang pro-lingkungan dan sosial, Investasi yang bertanggung jawab atau berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), dan sistem keuangan digital yang ramah lingkungan.

Jika hal ini dilakukan tentu melalui beragam aktivitas tersebut dan semua ini berjalan sesuai rencana, maka akan tercapai dampak positif berupa pembangunan yang berjalan seimbang, tanpa adanya ketimpangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sistem keuangan berkelanjutan sangat strategis bagi keberlangsungan organisasi. Sistem keuangan berkelanjutan bukan sekadar instrumen manajemen risiko atau kepatuhan semata, melainkan sebuah strategi penting untuk mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Seperti ditekankan oleh (Gopal & Pitts, 2025), integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam pengambilan keputusan keuangan merupakan langkah esensial untuk memastikan ketahanan organisasi menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian

Dengan menerapkan prinsip - prinsip ini, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor, tetapi juga memperluas akses terhadap sumber pembiayaan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, sistem keuangan berkelanjutan menjadi fondasi strategis bagi organisasi yang ingin tetap relevan, kompetitif, dan bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan di masa depan.

Pada era ketidakpastian global yang diwarnai oleh krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan volatilitas pasar keuangan, konsep keuangan berkelanjutan menjadi semakin relevan dan strategis bagi keberlangsungan organisasi maupun perekonomian nasional. Keuangan berkelanjutan bukan sekadar pendekatan finansial yang bertanggung jawab, melainkan juga instrumen penting untuk mengarahkan alokasi dana ke sektor-sektor yang mampu mendukung keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya penerapan sistem keuangan berkelanjutan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, keuangan berkelanjutan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendanaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan (surya, angin, hidro), pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi tetapi rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (UNEP, 2016). Investasi berkelanjutan diarahkan untuk tidak merusak ekosistem sebagai sumber daya utama masyarakat, sekaligus berperan dalam mitigasi perubahan iklim (G20 Sustainable Finance Study Group, 2018)

Kedua, keuangan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal, guna memastikan manfaat pembangunan bersifat jangka panjang dan inklusif (World Bank, 2020). Dengan demikian, keuangan berkelanjutan tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, melainkan juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai alat mitigasi risiko finansial dengan menghindari proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan konflik sosial, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi perusahaan, investor, maupun negara (Schoenmaker & Schramade, 2019). Pengabaian terhadap aspek lingkungan dan sosial terbukti dapat meningkatkan risiko reputasi, litigasi, dan volatilitas nilai aset di pasar keuangan global (UNEP FI, 2018).

Keempat, implementasi keuangan berkelanjutan akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Banyak negara investor kini menetapkan kriteria keberlanjutan sebagai bagian dari pertimbangan investasi mereka. Negara yang mengadopsi sistem keuangan berkelanjutan akan lebih menarik bagi investor global karena dinilai lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (OECD, 2020). Hal ini sejalan dengan tren global di mana investor institusi dan pasar modal mulai menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai indikator kelayakan investasi jangka panjang (UNEP, 2016).

Terakhir, penerapan keuangan berkelanjutan juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global (Mahmood et al., 2024). Hal ini selaras dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi PBB, serta komitmen Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Paris Agreement dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Hulu et al., 2024). Oleh karena itu, keuangan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan integral dan inklusif bagi masa depan bangsa dan dunia.

Melihat urgensi dan manfaat strategis keuangan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kontribusinya terhadap mitigasi risiko dan peningkatan daya saing nasional, pemerintah perlu memastikan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih sistematis. Langkah ini tidak hanya penting untuk mendukung pencapaian target perencanaan pembanaguan Jangka menengah dan jangka panjang dan SDGs, tetapi juga untuk menarik investasi global yang berorientasi pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal yang sangat penting ini juga perlu disiapkan kesiapan sumber daya manusia yang mimpuni baik di lingkungan pengambil kebijakan maupun pelaku usaha.

A. Organisasi Publik dan Swasta dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Organisasi publik dan organisasi swasta memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan tujuan dan perannya. Organisasi publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga negara, memiliki tujuan untuk melayani kepentingan umum dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Gurendrawati et al., 2024). Peran utamanya adalah sebagai pengarah kebijakan, pembuat aturan, dan fasilitator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Organisasi publik bertugas menetapkan standar, regulasi, dan memberikan dukungan agar program-program yang dijalankan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, organisasi swasta memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, tetapi saat ini juga mulai banyak yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran organisasi swasta lebih banyak sebagai pelaku usaha, yang secara langsung menjalankan berbagai

inovasi, investasi, dan implementasi program-program keberlanjutan di lapangan. Organisasi swasta bisa menjadi motor penggerak dengan teknologi, produk, atau layanan yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat.

Meski memiliki tujuan dan peran yang berbeda, keduanya saling melengkapi. Organisasi publik menyediakan kebijakan dan aturan mainnya, sedangkan organisasi swasta melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Kolaborasi kedua jenis organisasi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi publik adalah lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan. Sebaliknya, organisasi swasta merupakan badan usaha milik individu atau kelompok yang bertujuan memperoleh profit, meskipun saat ini juga didorong untuk turut bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan. Perbedaan fundamental ini menjadi landasan pembeda dalam cara kedua jenis organisasi tersebut menerapkan sistem keuangan berkelanjutan.

Jika dilihat dari tujuan dan programnya, organisasi publik lebih banyak berorientasi pada pelayanan sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan, sementara organisasi swasta cenderung fokus pada investasi ramah lingkungan, pengelolaan risiko bisnis jangka panjang, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pelaksanaan kebijakan keuangan berkelanjutan, organisasi publik berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana kebijakan, sedangkan organisasi swasta menjadi pelaku

usaha, inovator, sekaligus pengembang produk-produk yang ramah lingkungan.

Perbedaan juga terlihat dari sumber pendanaan yang digunakan. Organisasi publik pada umumnya menggunakan dana dari APBN, APBD, atau hibah, sedangkan organisasi swasta lebih mengandalkan modal sendiri, pinjaman bank, atau investasi berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Masing-masing sektor memiliki mekanisme keuangan yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama yaitu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Pada sisi organisasi publik, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Instrumen seperti green budgeting dan penerbitan obligasi hijau negara menjadi contoh bagaimana keuangan publik digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip ESG dalam pengelolaan keuangan negara akan memastikan kebijakan fiskal tetap transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Di sektor swasta, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan terbukti dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Saat ini, investor global sangat mempertimbangkan kinerja perusahaan dari aspek ESG sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Perusahaan yang menerapkan strategi keberlanjutan cenderung memiliki reputasi lebih baik dan peluang memperoleh akses pendanaan lebih luas. Selain itu, penerapan keuangan berkelanjutan membantu perusahaan melakukan mitigasi risiko jangka panjang, seperti perubahan regulasi atau bencana lingkungan.

Lebih jauh lagi, perusahaan yang konsisten menerapkan standar keberlanjutan dapat memperoleh pembiayaan ramah lingkungan seperti green bonds atau sustainability-linked loans dengan biaya lebih rendah. Keberhasilan implementasi sistem keuangan berkelanjutan akan lebih optimal jika dijalankan secara bersama-sama oleh organisasi publik dan swasta (Nurza, 2024). Kedua sektor ini memegang peranan strategis dalam membangun perekonomian yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan.

Organisasi publik memiliki kewenangan dalam membuat regulasi, menyusun anggaran, serta melaksanakan program-program pembangunan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara itu, organisasi swasta berperan sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi yang berkontribusi melalui investasi, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi antara kedua sektor ini menjadi penting agar kebijakan dan inisiatif keberlanjutan dapat berjalan efektif dan berdampak luas.

Faktor penting lain yang menentukan keberhasilan implementasi sistem keuangan berkelanjutan adalah sumber daya manusia (Meylid & Yuliani, 2024). Baik di sektor publik maupun swasta, SDM yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kedua sektor perlu terus melakukan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi SDM-nya agar mampu menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem keuangan berkelanjutan tidak hanya soal pengelolaan dana yang efisien, tetapi juga mengenai integrasi nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam setiap

keputusan organisasi. Kerja sama lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen bersama antara organisasi publik dan swasta, pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan rakyat bisa lebih cepat terwujud

B. Konsep Dasar Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam setiap proses pengambilan keputusan keuangan (Angorani, 2024). Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta bertanggung jawab, sehingga setiap aktivitas keuangan yang dilakukan bukan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat (Oka & Hermawan, 2025) .

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam keuangan berkelanjutan, keputusan investasi dan pembiayaan diharapkan mampu mempertimbangkan risiko dan peluang yang muncul akibat berbagai isu keberlanjutan. Dalam hal ini, aktivitas keuangan tidak semata-mata didasarkan pada potensi keuntungan finansial, melainkan juga memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai praktik investasi dan pembiayaan yang secara aktif mempertimbangkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, baik yang berasal dari sektor publik maupun swasta. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, diharapkan lembaga keuangan dapat lebih bijaksana dalam memilih aktivitas investasi yang berpotensi menimbulkan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa organisasi internasional seperti OECD dan World Bank juga memandang bahwa kebijakan keuangan berkelanjutan berperan penting dalam mendorong terwujudnya ekonomi hijau. Selain itu, konsep ini menjadi pendorong transisi menuju model bisnis yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan kepentingan sosial. Partisipasi dari lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan ini menjadi penting karena sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendistribusikan dana ke berbagai sektor ekonomi.

Di tingkat nasional, Indonesia turut mengambil langkah serius dalam mendorong keuangan berkelanjutan. Penguatan regulasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam visi, misi, strategi, serta program kerja mereka secara sistematis.

Peraturan tersebut memuat delapan prinsip utama sebagai pedoman penerapan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia. Prinsip pertama adalah Prinsip Investasi Bertanggung Jawab, di mana setiap keputusan

investasi harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat.

Selanjutnya, prinsip kedua adalah Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan. Prinsip ini menuntut setiap lembaga keuangan dan perusahaan untuk memiliki tujuan bisnis jangka panjang yang berorientasi keberlanjutan. Visi dan misi perusahaan, rencana strategis, serta praktik operasional sehari-hari harus diturunkan dari komitmen tersebut agar keberlanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas bisnis.

Prinsip ketiga yang harus diimplementasikan adalah prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan. Lembaga jasa keuangan diharuskan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, memantau, dan mengevaluasi setiap risiko sosial dan lingkungan yang muncul dari aktivitas pengumpulan dana maupun penyaluran pembiayaan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian jangka panjang akibat dampak lingkungan dan sosial yang tidak dikelola dengan baik.

Prinsip keempat yang diatur dalam POJK ini adalah Prinsip Tata Kelola yang Baik. Prinsip ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesionalisme, kesetaraan, dan kewajaran dalam operasional perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Prinsip kelima adalah Prinsip Komunikasi yang Informatif. Lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, bertanggung jawab, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Informasi ini harus disampaikan melalui media yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip keenam yaitu Prinsip Inklusivitas menekankan pentingnya keterbukaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Produk dan layanan keuangan yang dikembangkan harus ramah bagi semua kalangan agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan secara merata.

Prinsip ketujuh adalah Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas. Lembaga keuangan diharapkan dapat mendukung sektor-sektor prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPN/RPJMN), mitigasi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini mencakup pembiayaan proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan dan sosial.

Terakhir, prinsip kedelapan yaitu Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi. Prinsip ini bertujuan mendorong sinergi antar pelaku industri keuangan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, serta inovasi keuangan berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif akan mempercepat terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan global.

Industri keuangan dan perusahaan bergantung pada implementasi keuangan berkelanjutan untuk melakukan tindakan yang memengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan selain menghasilkan keuntungan finansial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat diimbangi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada masa yang akan datang, penerapan keuangan berkelanjutan perlu diperkuat melalui sinergi antara industri keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi yang terarah akan mendorong lahirnya berbagai produk dan layanan keuangan yang inklusif, ramah lingkungan, serta responsif terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang bertanggung jawab dan adaptif menghadapi tantangan masa depan. Melalui pemahaman yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan keuangan berkelanjutan dapat menjadi arus utama dalam kebijakan dan praktik bisnis nasional.

Perlu diingat bahwa konsep keuangan berkelanjutan tidak muncul secara instan. Relevansinya meningkat seiring dengan munculnya agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan kesadaran akan risiko finansial yang disebabkan oleh krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, keuangan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan.

Di tingkat global, institusi-institusi besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNEP FI, World Bank, serta berbagai organisasi keuangan internasional turut berperan aktif dalam mendorong pengarusutamaan keuangan berkelanjutan. Peran mereka tidak hanya dalam merumuskan standar dan prinsip global, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan pembiayaan untuk berbagai program keberlanjutan.

Dengan demikian, implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia maupun di tingkat global memerlukan komitmen jangka panjang, kerangka regulasi yang kuat, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Hanya melalui sinergi dan kolaborasi tersebut, transformasi menuju sistem keuangan yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

C. Peran Strategis Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam proses transisi dari sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan finansial, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental, pengetahuan, serta komitmen dari seluruh elemen organisasi. Dalam hal ini, bagian yang membidangi SDM dalam organisasi tersebut berperan sebagai motor penggerak perubahan budaya organisasi agar seluruh karyawan dapat memahami dan mendukung nilai-nilai keberlanjutan yang menjadi dasar dalam sistem keuangan baru tersebut. Tanpa adanya perubahan budaya yang menyeluruh dan terinternalisasi, penerapan keuangan berkelanjutan akan sulit tercapai secara efektif.

Secara konsep dapat dimengerti bahwa perubahan adalah keadaan yang terus-menerus terjadi dan tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini organisasi dituntut untuk tidak hanya mampu menghadapi perubahan, tetapi juga mengelola dan memanfaatkannya secara efektif demi keberlanjutan organisasi (Napisah et al., 2024). Dalam konteks saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi berlangsung cepat, dinamis, dan non-linier, organisasi menghadapi tantangan yang semakin besar, berat dan kompleks, termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi dan manajemen keuangan.

Transformasi ini juga memiliki dampak pada arah pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu pilar penting SDGs adalah penciptaan sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Hal ini mendorong organisasi untuk menyesuaikan praktik manajemen keuangan mereka, tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Di sinilah peran SDM dan kepemimpinan menjadi sangat strategis. SDM dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif, keterampilan digital, dan wawasan keberlanjutan guna mengikuti perubahan sistem keuangan modern yang lebih kompleks dan berbasis teknologi. Pimpinan organisasi juga harus mampu bertindak sebagai agen perubahan (change agent) yang visioner, profesional, dan mampu memastikan bahwa kebijakan serta strategi keuangan organisasi selaras dengan prinsip keberlanjutan, mengelola risiko secara cermat, serta membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi.

Berkaitan dengan komponen yang mempengaruhi kinerja tenaga kerja manusia, dapat diuraikan sebagai

berikut. Kualitas sumber daya manusia terdiri dari tiga komponen utama: kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Kualitas SDM sangat menentukan kinerja organisasi. AMO Framework—Ability, Motivation, and Opportunity—diciptakan oleh Blumberg dan Pringle pada tahun 1982. Menurut model ini, kinerja individu di perusahaan dipengaruhi oleh:

1. Kemampuan: Potensi dan keterampilan nyata individu, termasuk hard skill, soft skill, dan kompetensi manajerial.
2. Motivasi: Dorongan internal (intrinsik) maupun eksternal (ekstrinsik) yang mendorong individu untuk berkinerja optimal.
3. Kesempatan: Kondisi lingkungan kerja dan peluang yang tersedia bagi individu untuk mengaktualisasikan kemampuan dan motivasinya.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menentukan hasil kerja pegawai. Misalnya, seorang pegawai dengan kemampuan tinggi dan motivasi kuat tetap tidak dapat menunjukkan performa optimal tanpa adanya kesempatan atau dukungan lingkungan kerja. Secara diagramatik dapat digambarkan sebagai berikut.

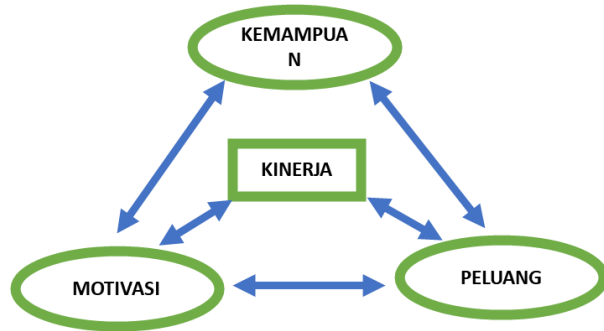


Diagram Pengaruh Kemampuan, Motivasi, dan Peluang terhadap Kinerja

Dengan melihat gambar di atas, tampak bahwa kinerja SDM dalam organisasi ditentukan oleh interaksi tiga faktor utama, yaitu kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kerangka AMO (Ability, Motivation, and Opportunity). Ini juga menegaskan bahwa ketiga faktor ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Individu dengan kemampuan dan motivasi tinggi tetap membutuhkan lingkungan kerja yang memberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa pengelolaan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi dan pemberian insentif, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang kondusif, agar ketiga faktor tersebut dapat bersinergi secara efektif dalam mendorong pencapaian kinerja organisasi.

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, peran sumber daya manusia (SDM) sangat strategis dalam memastikan kebijakan, nilai, dan praktik keberlanjutan terintegrasi secara efektif ke dalam proses organisasi. Menurut Wilkinson et al. (2020), SDM memiliki tanggung jawab sebagai arsitek kebijakan dengan menyusun panduan dan standar etika yang relevan terhadap isu-isu lingkungan,

sosial, dan tata kelola (ESG). Kebijakan ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan organisasi yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial.

Selain itu, SDM juga berperan penting dalam mengembangkan kompetensi berbasis keberlanjutan. Proses rekrutmen dan pelatihan harus memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kepekaan terhadap isu keberlanjutan (Jepsen & Grob, 2015). Oleh sebab itu, pengembangan literasi keberlanjutan bagi seluruh anggota organisasi menjadi bagian penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan memiliki orientasi jangka panjang.

Peran berikutnya adalah sebagai pengelola komunikasi internal yang efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Guerci dan Carollo (2016), SDM bertanggung jawab menyampaikan pesan strategis organisasi terkait keberlanjutan secara jelas dan konsisten, sehingga dapat membangun partisipasi dan keterlibatan seluruh karyawan dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan perusahaan.

Terakhir, SDM berperan dalam merancang sistem insentif dan penilaian kinerja yang berorientasi keberlanjutan. Menurut Renwick et al. (2013), sistem insentif berbasis keberlanjutan dapat mendorong perilaku ramah lingkungan dan sosial dalam aktivitas kerja sehari-hari, baik melalui penghargaan finansial maupun non-finansial. Indikator keberlanjutan yang terintegrasi dalam penilaian kinerja juga terbukti meningkatkan komitmen karyawan terhadap praktik berkelanjutan organisasi.

Akhirnya, dalam proses implementasi sistem keuangan berkelanjutan, sumber daya manusia memiliki peranan penting dan strategis yang tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga transformatif bagi organisasi. SDM bertanggung jawab sebagai arsitek kebijakan, memastikan seluruh regulasi internal sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai etika organisasi. Selain itu, SDM berperan dalam mengembangkan kompetensi berbasis keberlanjutan, memastikan seluruh talenta memiliki sensitivitas terhadap isu-isu ESG dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi masa depan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan strategi organisasi semata, tetapi sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif dari sumber daya manusianya. SDM yang adaptif, kompeten, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang keberlanjutan menjadi faktor penting bagi organisasi dalam mengatasi tantangan global sekaligus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi bisnis, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan peran strategis SDM merupakan langkah penting menuju organisasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing di era transformasi berkelanjutan.

D. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

Dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks, organisasi dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal guna mencapai tujuan strategisnya. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik internal dan maupun eksternal, mulai dari kepemimpinan, sumber daya manusia, struktur organisasi, hingga kondisi ekonomi dan regulasi pemerintah. Di antara faktor-faktor tersebut, sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci karena kompetensi, motivasi, dan produktivitas pegawai secara langsung menentukan efektivitas

pelaksanaan strategi dan keberhasilan organisasi dalam mencapai target-targetnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peran sumber daya manusia menjadi semakin strategis dan penting dalam penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan. Untuk mencapai keuangan berkelanjutan, tidak hanya diperlukan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM sangat penting untuk organisasi yang ingin merancang, menerapkan, dan mengelola kebijakan serta praktik keuangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial sambil mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik. SDM yang kompeten akan mendorong organisasi lebih adaptif dalam menghadapi tuntutan global terhadap keberlanjutan serta memenuhi standar dan regulasi yang terus berkembang.

Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga akan berkontribusi terhadap terbentuknya budaya kerja yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan secara berkelanjutan. SDM yang memiliki wawasan keberlanjutan dapat menjadi agen perubahan di dalam organisasi, mendorong kolaborasi lintas divisi, serta menghasilkan inovasi keuangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM bukan hanya penting untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi organisasi dalam mewujudkan praktik keuangan berkelanjutan yang efektif dan berdampak luas. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia dapat dikategorikan

menjadi dua jenis, yaitu, faktor eksternal dan faktor internal (Theotokas et al., 2024) dan (Harsono et al., 2024)

1. Faktor Eksternal, yang merupakan tantangan dari luar organisasi

a. Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro (inflasi, suku bunga, daya beli masyarakat) bisa mempengaruhi kelangsungan dan peluang organisasi. Misalnya saat resesi, perusahaan harus hemat biaya termasuk dalam pelatihan SDM.

b. Persaingan pasar kerja

Banyaknya tenaga kerja dengan kualitas tinggi menuntut SDM di organisasi harus selalu ditingkatkan. Tingkat persaingan dalam industri atau sektor akan menentukan strategi dan inovasi organisasi.

c. Kebijakan Pemerintah:, Kondisi perundang-undangan

Regulasi, peraturan, dan kebijakan fiskal/moneter berpengaruh langsung terhadap ruang gerak organisasi. Pengembangan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ada terutama dalam hal administrasi. Tidak dipungkiri masalah administrasi ketenagakerjaan menjadi satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan ketenagakerjaan

d. Teknologi Global

Perkembangan teknologi global mendorong organisasi untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif, sekaligus memengaruhi perkembangan sumber daya manusia (SDM).

Teknologi tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga menuntut SDM memiliki keterampilan baru yang relevan, sehingga organisasi perlu melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu bersaing di era digital..

e. Sosial dan Budaya Masyarakat:

Perubahan gaya hidup, nilai sosial, norma, pola hidup masyarakat dan ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi produk, layanan, dan cara kerja organisasi . Pdan gaya kepemimpinan. erubahan sosial dan budaya.

2. Faktor Internal merupakan tantangan yang berasal dari dalam organisasi

a. Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan dan kemampuan manajerial sangat mempengaruhi motivasi, budaya kerja, dan pencapaian target organisasi. Kompetensi pimpinan juga menjadi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan yang tidak peduli pada pengembangan SDM akan memperlambat kemajuan organisasi.

b. Strategi Organisasi

Kejelasan visi, misi, dan perencanaan strategis menjadi pedoman pencapaian tujuan organisasi. Visi, misi, dan strategi organisasi, ini menyangkut pengembangan SDM harus sejalan dengan tujuan organisasi. sebis mungkin strategi harus dimengerti oleh semua komponen organisasi sehinggat tidak terjadi miskonsep dalam menjalankan organisai kedepannya.

c. Ketersediaan anggaran SDM

Ketersediaan anggaran SDM menjadi faktor krusial dalam penerapan sistem keuangan berkelanjutan. Anggaran ini diperlukan untuk mendukung program pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penguatan kapasitas SDM. Selain itu, rencana pengembangan karir perlu didukung dana yang memadai agar SDM dapat berkontribusi optimal. Anggaran juga dibutuhkan untuk biaya restrukturisasi dan pengembangan organisasi ke depan. Dengan anggaran yang terencana, organisasi mampu menjaga keberlanjutan program dan kualitas SDM.

d. Kultur organisasi

Budaya kerja yang kurang mendukung inovasi bisa menghambat pengembangan SDM. Nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan kerja berpengaruh terhadap etos kerja dan loyalitas karyawan. Budaya kerja harus disiapkan secara komprehensif dan melibatkan semua komponen organisasi tanpa terkecuali.

e. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam konteks ini, kondisi SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pemanfaatan teknologi, bukan semata soal jumlah, tetapi lebih pada kualitasnya. SDM yang memiliki kompetensi teknis yang memadai, kapasitas adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, motivasi kerja yang kuat, serta integritas dalam menjalankan tugas akan menjadi penggerak utama transformasi organisasi. Oleh karena itu,

perencanaan SDM harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga membangun kompetensi digital, meningkatkan kapasitas problem solving, menumbuhkan motivasi berbasis tujuan bersama, serta menanamkan nilai integritas agar tercipta budaya kerja profesional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang efisien dan jelas sangat penting dalam penerapan sistem keuangan berkelanjutan. Desain struktur yang tepat akan mempermudah koordinasi antar unit, mempercepat alur komunikasi, dan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan efektif. Selain itu, pembagian peran yang tegas mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana berkelanjutan. Struktur yang adaptif juga memungkinkan organisasi merespons cepat terhadap dinamika pasar dan regulasi. Dengan demikian, implementasi keuangan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan terarah.

g. Teknologi dan Sistem Informasi

Teknologi dan sistem informasi merupakan komponen vital dalam mendorong efisiensi operasional dan kualitas pelayanan di berbagai organisasi, baik publik maupun privat. Ketersediaan teknologi modern seperti sistem informasi manajemen, big data analytics, hingga aplikasi berbasis AI dapat mempercepat proses kerja, meminimalisir kesalahan manual,

serta menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, pemanfaatan teknologi tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif. Di sinilah pentingnya perencanaan SDM yang matang, yang tidak hanya memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil, tetapi juga menyiapkan mereka untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal dan maupun eksternal yang saling terkait, mulai dari kepemimpinan, sumber daya manusia, struktur organisasi, hingga kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Di antara faktor-faktor tersebut, sumber daya manusia memiliki posisi strategis karena secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi, produktivitas kerja, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, termasuk dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang.

Dalam konteks penerapan keuangan berkelanjutan, pengembangan kompetensi SDM menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam prinsip-prinsip ESG akan membuat organisasi lebih adaptif, inovatif, dan mampu memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Investasi dalam peningkatan kapasitas SDM tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang mendukung keuangan berkelanjutan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung implementasi sistem keuangan berkelanjutan, organisasi di sektor publik maupun swasta harus melakukan pengembangan kompetensi

sumber daya manusia (SDM) secara terstruktur dan berkelanjutan. Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan isu-isu keberlanjutan global. Oleh karena itu, metode pengembangan kompetensi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami, merancang, dan mengelola kebijakan serta aktivitas keuangan yang bertanggung jawab.

Metode pertama yang dapat diterapkan adalah melalui program pelatihan dan workshop tematik terkait keuangan berkelanjutan. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen risiko lingkungan, pengembangan green financing, integrasi prinsip ESG dalam laporan keuangan, serta studi kasus penerapan keuangan berkelanjutan di organisasi lain. Program ini sebaiknya dirancang berbasis kebutuhan (training need analysis) agar materi yang disampaikan benar-benar relevan dengan tugas dan peran setiap pegawai atau karyawan.

Selanjutnya, organisasi dapat menyelenggarakan mentoring dan coaching bagi para pegawai yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara personal maupun kelompok dalam memahami dinamika dan tantangan penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan kerja. Coaching efektif untuk membentuk pola pikir keberlanjutan (sustainability mindset) dan membangun kepercayaan diri dalam menerapkan kebijakan keuangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Selain itu, metode pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan membentuk forum diskusi, komunitas belajar, dan knowledge sharing session. Forum ini

memungkinkan pegawai dari berbagai unit kerja saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Kegiatan semacam ini penting untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung terhadap inovasi dan kolaborasi lintas bidang dalam upaya mencapai sasaran keberlanjutan organisasi.

Metode terakhir yang tidak kalah penting adalah memberikan akses kepada platform pembelajaran digital dan sertifikasi profesional dalam bidang keuangan berkelanjutan. Organisasi perlu memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus daring, webinar, atau program sertifikasi internasional yang berkaitan dengan ESG, green finance, dan sustainability reporting. Dengan adanya sistem pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan (lifelong learning), SDM diharapkan dapat terus memperbarui kompetensinya sesuai dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan tren global. Penggunaan beragam metode ini akan memperkuat kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem keuangan berkelanjutan secara efektif dan berdampak nyata.

Perlu diperhatikan bahwa strategi pembelajaran untuk pengembangan SDM harus sesuai dengan tuntutan keadaan. Strategi pembelajaran dalam rangka pengembangan SDM guna penerapan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi pembelajaran yang merupakan upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat dan akuntabel dapat dikombinasikan melalui pendekatan individu, pendekatan tim, pendekatan organisasi maupun pendekatan proses.

Strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan

Dalam upaya mewujudkan organisasi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi di era perubahan yang dinamis,. Salah satu cara yang efektif untuk membangun kapasitas tersebut adalah melalui pelaksanaan strategi pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan organisasi. Strategi pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan teknis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.

Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterapkan beberapa pendekatan pembelajaran yang saling melengkapi. Menurut LAN (2024) strategi pendekatan pembelajaran meliputi, yang pertama adalah strategi pendekatan individu, yang memberi ruang bagi pegawai untuk melakukan pembelajaran secara mandiri sesuai kebutuhan pekerjaannya. Yang kedua adalah strategi pendekatan tim, yang mendorong terciptanya proses pembelajaran kolaboratif antar anggota tim. Yang ketiga adalah strategi pendekatan organisasi, yang dilakukan secara top-down untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi melalui pembelajaran tematik. Yang terkahis adalah strategi pendekatan proses, yang bersifat bottom-up dengan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dari level teknis hingga strategis berdasarkan data dan informasi yang terkumpul.

Keempat strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta budaya belajar yang kuat, berorientasi kinerja, dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan yang dihadapi organisasi secara efektif.

E. Tantangan penerapan Keuangan berkelanjutan di Organisasi

Perubahan paradigma pembangunan global yang kini menekankan prinsip keberlanjutan menuntut sektor keuangan untuk turut bertransformasi. Program keuangan berkelanjutan menjadi salah satu konsekuensi logis dari pergeseran ini, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi bagian integral dalam setiap keputusan keuangan organisasi, baik publik maupun swasta. Konsep ini sejalan dengan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kini menjadi standar internasional dalam praktik bisnis dan keuangan (Inawati & Rahmawati, 2023). Oleh sebab itu, kesiapan seluruh aspek organisasi, khususnya sumber daya manusia (SDM), menjadi elemen penting dalam memastikan implementasi program keuangan berkelanjutan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Sumber daya manusia merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan program keuangan berkelanjutan. Kualitas SDM yang tangguh, kompeten, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan akan mendorong terciptanya kebijakan dan keputusan keuangan yang bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan (Terimajaya et al., 2024). Tanpa dukungan SDM yang mampu memahami risiko lingkungan, potensi dampak sosial, serta tata kelola organisasi yang baik, penerapan keuangan berkelanjutan hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa makna substansi. Seperti dinyatakan oleh Elkington (1997) dalam konsep Triple Bottom Line, keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila organisasi mengintegrasikan aspek manusia (people), lingkungan (planet), dan keuntungan (profit) secara seimbang.

Menjawab tantangan tersebut, organisasi perlu merancang strategi pengembangan SDM yang terarah, melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi program keuangan berkelanjutan secara berkelanjutan pula. Program pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai keberlanjutan, mitigasi risiko lingkungan, serta penguatan etika bisnis dan tata kelola yang bertanggung jawab. Selain itu, pendampingan dan coaching menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif dalam aktivitas kerja, bukan sekadar wacana. Hal ini didukung oleh teori Human Capital Development dari Becker (1993) yang menekankan pentingnya investasi berkelanjutan pada kapasitas individu demi peningkatan produktivitas organisasi.

Selanjutnya, upaya sosialisasi yang terstruktur juga harus dilakukan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam lingkungan organisasi terhadap pentingnya keuangan berkelanjutan. Melalui forum-forum diskusi, workshop, dan seminar, seluruh lini organisasi dapat memiliki pemahaman yang sama tentang konsep, urgensi, serta manfaat implementasi keuangan berkelanjutan bagi keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Organisasi yang berhasil membangun budaya keberlanjutan berbasis SDM akan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko global serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan. Seperti ditegaskan oleh Schwab (2017) dalam *The Fourth Industrial Revolution*, keberhasilan organisasi di era ini bukan lagi semata ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi dan nilai-nilai keberlanjutan secara bijaksana.

Perubahan paradigma pembangunan global yang saat ini mengedepankan aspek keberlanjutan, inovasi, dan digitalisasi, ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, telah menciptakan tantangan baru bagi organisasi, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

Perubahan paradigma pembangunan global yang kini menekankan aspek keberlanjutan, inovasi, dan digitalisasi, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, telah menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan kompetensi digital, di mana perkembangan teknologi menuntut penguasaan digital literacy dan pemanfaatan teknologi dalam proses kerja. Sayangnya, banyak organisasi masih mengalami kesenjangan antara kemampuan SDM yang ada dengan kompetensi yang dibutuhkan di era digital ini (Rifkin, 2011; Schwab, 2017).

Selain itu, organisasi juga harus menghadapi tantangan adaptasi terhadap model kerja baru seperti remote working, hybrid working, serta penggunaan sistem berbasis cloud, yang memerlukan kesiapan mental dan teknis dari SDM. Tidak semua individu memiliki kemampuan dan kesiapan untuk beralih dari pola kerja konvensional ke pola kerja yang lebih fleksibel ini (Mello et al., 2025).

Tantangan berikutnya adalah perubahan pola kompetensi inti. Saat ini, kompetensi SDM tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga harus mencakup soft skills seperti kreativitas, critical thinking, kemampuan kolaborasi, dan kepemimpinan digital yang

sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja berbasis inovasi dan keberlanjutan (World Economic Forum, 2020).

Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan klasik yang tetap relevan hingga saat ini. Perubahan yang cepat seringkali menimbulkan ketidakpastian, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, dan ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi di kalangan SDM (Robbins & Judge, 2019).

Seiring dengan transformasi digital, pengelolaan work-life balance juga menjadi isu penting. Digitalisasi yang memungkinkan akses kerja tanpa batas waktu dan tempat dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, sehingga berdampak terhadap stres kerja dan produktivitas SDM (Greenhaus & Allen, 2011).

Terakhir, organisasi menghadapi kebutuhan pengembangan kompetensi berkelanjutan (lifelong learning). Di tengah perubahan cepat, kompetensi SDM harus terus diperbarui melalui sistem pelatihan dan pengembangan yang adaptif, relevan, serta berkelanjutan agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis (Noe, 2020).

Tantangan-tantangan tersebut menuntut organisasi untuk tidak hanya memutakhirkan sistem teknologi dan proses bisnisnya, tetapi juga merancang strategi pengembangan SDM yang responsif terhadap dinamika eksternal dan internal. Penerapan model agile human capital management, investasi pada digital learning ecosystem, serta penguatan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan menjadi prasyarat penting dalam menghadapi era transformasi digital dan perubahan paradigma pembangunan.

F. Penutup

Dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah, pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Ini berarti menjaga keseimbangan antara elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan (Darma Sabri et al., 2024). Jika ketiga komponen ini tidak dikelola dengan seimbang, akan muncul berbagai masalah serius, seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan krisis sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan harus difokuskan pada peningkatan ekonomi serta keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kemudian gagasan ini dimasukkan ke dalam paradigma Sustainable Development Goals (SDGs), yang mendorong kerja sama lintas

Keuangan berkelanjutan merupakan alat strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem keuangan ini mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi risiko keuangan akibat proyek yang merusak lingkungan, dan meningkatkan daya saing ekonomi di seluruh dunia. Sumber daya manusia yang kompeten, kepemimpinan transformatif, dan penguasaan teknologi keuangan digital adalah semua komponen yang diperlukan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan akan menjadi alat yang berguna untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan lestari jika diterapkan secara terencana dan terintegrasi. Ini akan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs dan berbagai perjanjian global.

Keuangan berkelanjutan merupakan metode dalam pengelolaan keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini

dikenal dengan istilah Environmental, Social, and Governance (ESG). Melalui keuangan berkelanjutan, aktivitas investasi dan pembiayaan diharapkan mampu mempertimbangkan risiko serta peluang yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Selain itu, konsep ini mendorong lembaga keuangan untuk lebih bijak dalam memilih aktivitas yang memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep keuangan berkelanjutan tidak bisa lepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi. SDM berperan sebagai motor penggerak perubahan budaya organisasi agar seluruh karyawan memahami dan mendukung nilai-nilai keberlanjutan. Agar efektif, organisasi perlu memastikan adanya keseimbangan antara kemampuan, motivasi, dan kesempatan kerja bagi pegawai, seperti yang dijelaskan dalam Ability, Motivation, and Opportunity (AMO) Framework. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan lingkungan kerja yang kondusif, diharapkan implementasi keuangan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya manusia memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan cepat berubah. Faktor-faktor internal seperti kepemimpinan, struktur organisasi, dan budaya kerja, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi, secara kolektif memengaruhi kinerja organisasi. Di antara semua faktor tersebut, SDM menjadi elemen strategis karena kompetensi, motivasi, dan produktivitas pegawai secara langsung berdampak pada efektivitas pelaksanaan strategi

dan pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam agenda keuangan berkelanjutan.

Penerapan keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) membutuhkan kesiapan SDM yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman menyeluruh tentang keberlanjutan (Paroli et al., 2025). Tantangan seperti kesenjangan dalam kompetensi digital, adaptasi terhadap model kerja baru, serta resistensi terhadap perubahan menjadi isu utama yang harus dihadapi organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, coaching, dan lifelong learning menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan program keuangan berkelanjutan berjalan efektif dan berdampak nyata.

Selanjutnya, dalam menghadapi perubahan organisasi kerja dan paradigman pembangunan, sebuah organisasi perlu membangun sistem pengembangan SDM yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan tuntutan internal (Djafar & Ap, 2024). Penerapan agile human capital management, integrasi digital learning ecosystem, serta pembentukan budaya organisasi yang kolaboratif dan terbuka terhadap inovasi harus menjadi prioritas. Selain itu, organisasi perlu mengedukasi seluruh lini manajemen tentang pentingnya nilai-nilai keberlanjutan agar tercipta budaya kerja yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan secara konsisten dan berdampak luas bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi (Afzil Ramadian et al., 2025).

BAB 8 | Kesejahteraan Karyawan dan Keuangan Berkelanjutan: Pendekatan Realisme Kritis dalam Perspektif MSDM

Nuryadi Wijiharjono, Bambang Tutuko, Dicky Chandra, dan Nur Hadiyazid Rachman-Rachman

Dalam perekonomian kontemporer, perusahaan (multinasional) telah menjadi aktor non-negara paling berpengaruh pada isu-isu keberlanjutan. Pengaruh oligarki, hampir tanpa terkecuali, berpotensi mengganggu tatanan demokrasi, ekonomi dan ekologi. Karena itu, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melibatkan lebih dari sekedar membuat pernyataan prinsip, berpartisipasi dalam kegiatan filantropi maupun mempublikasikan laporan berkelanjutan (sustainable/green report), termasuk peringkat dan skor kinerja environmental, social, dan governance (ESG) dari institusi yang direkognisi.

Apalagi data ESG yang disediakan dalam laporan berkelanjutan perusahaan sering kali tidak diaudit. Jika informasi ESG yang diungkapkan oleh perusahaan tidak dapat diandalkan, perilaku greenwashing perusahaan dapat menjadi penghalang untuk mengintegrasikan faktor-faktor ESG ke dalam keputusan investasi (Yu et al., 2020). Implikasinya, masalah kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan bukan sekedar serangkaian manfaat atau program dari praktik tradisional tata kelola dan manajemen perusahaan atau organisasi, melainkan terutama sebuah fenomena kompleks yang muncul dari interaksi berbagai mekanisme kausal yang beroperasi pada berbagai tingkat ontologis.

Keengganan kaum akademisi arus utama untuk menyelidiki kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan, karena menurutnya, satu-satunya studi keuangan yang sah dan ilmiah adalah studi pada perusahaan kapitalis, dan satu-satunya bentuk rasionalitas yang dipertimbangkan adalah rasionalitas utilitarian (Lagoarde-Segot, 2018). Adalah tugas dan tanggung jawab para ahli untuk menyediakan metodologi di luar arus utama (non-mainstream) untuk menyelidiki tingkat akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan korelasi maupun makna dari berbagai data laporan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan/keuangan berkelanjutan. Bukan hanya berdasarkan ambisi dan pengungkapan laporan/dokumentasi.

Jika kita hanya melihat dari aspek tingkat stres kerja (daily stress) yang rendah, bahkan paling minimal tingkat kesetresannya (16%) di kawasan negara-negara anggota ASEAN, maka kondisi mayoritas karyawan Indonesia termasuk dalam kategori bahagia/sejahtera. Tetapi kontras dengan aspek penting lainnya, di mana karyawan Indonesia di hampir semua level, termasuk paling minimal dalam berinisiatif dan keterlibatan mereka dalam produktivitas kerja (employee engagement). Bahkan pada level manajer sekalipun hanya sebanyak delapan persen (8%) yang terlibat aktif. Akibatnya, tingkat kesejahteraan karyawan lebih banyak dinikmati oleh para pekerja dari negara-negara maju. Karena manajer perusahaan memainkan peran krusial dalam masyarakat kita. Mereka menduduki puncak organisasi dan mengendalikan kumpulan sumber daya yang sangat besar (Bartlett & Bubb, 2023). Tujuh dari sepuluh negara paling sejahtera kaum pekerjaannya (60%-83%) berasal dari negara-negara di kawasan Eropa Barat (Gallup, 2024).

Belum ada bukti empiris yang menunjukkan konsistensi antara meningkatnya investasi dengan tingkat kesejahteraan dan keuangan berkelanjutan. Eksekutif perusahaan dan keuangan biasanya menganggap peringkat ESG sebagai variabel kausal lain

dalam upaya mereka untuk mendapatkan 'materialitas' keuangan jangka pendek daripada menyesuaikan misi mereka untuk mengatasi krisis sosial dan ekologi. Apalagi masih terdapat kecenderungan adanya praktik greenwashing, di mana perusahaan mengklaim dirinya ramah lingkungan hanya untuk kepentingan advertensi dan pencitraan (Yu et al., 2020; Yildirim, 2023; Bernini & Rosa, 2023; Williams, et al, 2023); Dempere et al, 2024; Lagoarde-Segot, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar keuangan hijau (berkelanjutan) dalam beberapa tahun terakhir tidak serta merta menyiratkan bahwa ekonomi akan menjadi 'lebih hijau'. Keuangan berkelanjutan tidak melindungi sumber daya global tetapi mempercepat penyertaan alam dan masyarakat dalam logika, narasi, dan kepentingan keuangan. Mengutip sebuah penelitian di Eropa, Lagoarde-Segot (2024) mengungkapkan bahwa, hampir setengah (46,3%) dana hijau berinvestasi gelap pada aset yang terkait dengan bahan bakar fosil atau penerbangan. Sebuah studi global juga menunjukkan bahwa hanya 0,5% aset global yang dikelola sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan merupakan dua aspek penting yang saling terkait dalam konteks bisnis modern. Keduanya tidak hanya memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan bisnis, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan lingkungan. Realisme kritis menyediakan kerangka filosofis untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dengan memeriksa struktur dan mekanisme yang mendasarinya, dan sangat relevan dengan keadilan ekologi berkelanjutan (Cobs-Muñoz & Westerholt, 2025).

Oleh karena itu, dalam menginvestigasi kompleksitas manajemen sumberdaya manusia (MSDM) menyangkut masalah kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan, studi kami sekaligus memperkenalkan Realisme Kritis (Critical Realism)

sebagai sebuah pendekatan. Pendekatan Realisme Kritis memungkinkan profesional MSDM untuk bergerak lebih maju, melampaui pengamatan tingkat permukaan tentang kesejahteraan karyawan maupun keuangan berkelanjutan. Yakni, untuk mengidentifikasi mekanisme generatif yang memungkinkan atau membatasi kesejahteraan dalam konteks organisasi (Kringelum & Brix, 2021).

Tujuan kami adalah menggunakan argumen dari literatur Realisme Kritis untuk menunjukkan bahwa, kecenderungan saat ini mengenai kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan masih jauh dari kata optimal, termasuk akibat dari perilaku greenwashing perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar. Untuk itu, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kami menyajikan literatur yang ada mengenai pendekatan Realisme Kritis, termasuk memperkenalkan geneologi pemikiran tersebut, untuk membahas pertautan SDM dan keuangan berkelanjutan. Kedua, kami mengeksplorasi literatur sebagai kerangka analisis untuk membahas masalah greenwashing yang terkait dengan subjek kami, terutama untuk mengidentifikasi dan menemukan mekanisme kausal yang menghubungkan konsep-konsep ini dengan kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan. Ketiga, berdasarkan temuan tersebut kami mengajukan 'Kerangka Konseptual Mekanisme Generatif Kesejahteraan Karyawan dan Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG' sebagai pemantik diskusi. Pada bagian terakhir, keempat, yaitu kesimpulan dan implikasi kebijakan.

A. Memperkenalkan Realisme Kritis

Munculnya pendekatan Realisme Kritis berawal dari pemikiran Ram Roy Bhaskar (1944-2014), seorang akademisi-filsuf lulusan Universitas Oxford, Inggris. Bukunya yang bertitel *A Realist Theory of Science* (2008 [1975]) dan karya akademik Bhaskar lainnya (Hartwig, 2015), berhasil menarik minat para akademisi dan telah menjadi rujukan

dalam beragam penelitian di bidang sosial (Sayer, 2000), pendidikan (Scott, 2010), ekonomi (Lawson, 1996; 2023; 2025), bisnis, organisasi dan manajemen (Fleetwood, 2016), teknologi dan sistem informasi (Wynn & Williams, 2012; Bygstad et al., 2015), bidang studi keagamaan (Wilkinson, 2013) sampai bidang ilmu kedokteran dan kesehatan (Ellaway et al., 2015, 2020). Area subjek penelitiannya pun semakin berkembang, termasuk, misalnya dalam, riset operasi, marketing, strategi, dan akuntansi (Mingers, 20014), manajemen kinerja (Amstrong, 2019), manajemen SDM (Mat & Barrett, 2017; Edwards & Kakavelakis, 2021), organisasi dan manajemen (MacAvoy & Butler, 2018; Frederiksen & Kringelum, 2020), keuangan berkelanjutan (Lagoarde-Segot, 2018; 2024), kebijakan publik dan administrasi (Ongaro & Yang, 2024).

Sebagai filsafat ilmu (sains), realisme kritis merangkul agenda deskriptif analitis dan preskriptif. Realisme kritis menyediakan peralatan akademis (metodologi) untuk: 1) menjelaskan bagaimana sistem sosial bekerja; dan 2) bagaimana menjelaskan hal-hal yang tidak teramati dan yang tidak dapat diamati dalam dunia sosial (Anderson, 2020; Ongaro & Yang, 2024). Realisme kritis mengidentifikasi mekanisme tersembunyi seperti kebijakan perusahaan yang tidak adil, regulasi pemerintah yang lemah, dan praktik bisnis yang eksploitatif sebagai penyebab ketidakseimbangan dalam kesejahteraan karyawan (Fleetwood, 2014). Misalnya, penelitian oleh Wilkinson dan Pickett (2009), menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Berbeda dengan empirisme tradisional (klasik) dan idealisme transendental, realisme kritis merupakan realisme transendental yang menekankan struktur dan mekanisme

yang menghasilkan fenomena yang sedang dipelajari (Kringelum & Brix, 2021). Realisme kritis merupakan alternatif bagi perspektif positivis (positivisme) dan konstruktivis (konstruktivisme) atau interpretivis (interpretivisme) dengan tujuan inheren tidak hanya menjelaskan dunia tetapi juga mengubahnya (Alvesson & Skoldberg, 2009).

Secara geneologis pemikiran, mengutip pandangan Mendizabal-Espinosa (2017), paradigma positivisme dapat kita runut kembali ke Francis Bacon (1561-1626) dan Auguste Comte (1798-1857), ketika kedua tokoh tersebut menyebut tentang 'sains positif'. Sains positif merujuk pada metode untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan spekulasi. Meskipun dalam pandangan Roy Bhaskar, pengalaman melibatkan interpretasi dan spekulasi, yang dimediasi oleh penalaran. Secara ontologis, kaum positivis percaya bahwa ada realitas konkret yang secara epistemologis dapat diukur. Walaupun dasar filosofisnya telah berkembang, misalnya dalam post-positivisme, ia terus membentuk dasar paradigmatis bagi banyak penelitian saat ini.

Sedangkan paradigma interpretivisme, menggemakan ide-ide yang dikembangkan oleh, antara lain, Immanuel Kant (1724-1804) yang berpendapat bahwa ada bentuk-bentuk alternatif untuk mempelajari dunia, selain observasi langsung. Model 'idealisme transendental' Kant melampaui penyelidikan empiris dan realisme. Pemahaman terhadap fenomena sosial kemudian didasarkan pada 'interpretasi'. Selanjutnya Wilhelm Dilthey (1833-1911) menekankan pentingnya konteks sosial dan historis untuk 'memahami' pengalaman hidup masyarakat. Memperluas ide-ide Dilthey, Max Weber (1864-1920) mengusulkan bahwa peneliti harus memahami makna tindakan sosial dalam konteks kondisi

material tempat masyarakat hidup. Secara ontologis, interpretivis percaya bahwa realitas sosial adalah hasil dari persepsi dan interpretasi (epistemologis) aktor; dengan demikian, realitas sosial tidak terlepas dari pemahaman peneliti dan tidak dapat bebas nilai. Interpretivisme mungkin merupakan alternatif yang lebih baik daripada positivisme ketika meneliti pengalaman hidup orang (Mendizabal-Espinosa, 2017).

Domain Ontologi dan Mekanisme Kausal

Landasan filosofis yang mendasari konsepsi tentang pengetahuan dan mengetahui dikenal dalam empat kategori yang saling terkait dan koheren, yakni: Ontologi, yaitu pemahaman seseorang tentang hakikat realitas dan apa yang dapat diketahui tentang realitas itu; Epistemologi, yaitu pemahaman tentang hakikat pengetahuan, proses mengenal/mengetahui, hubungan penahu dan yang diketahui, kriteria dan klaim tentang pengetahuan; Metodologi, yaitu pendekatan terhadap konstruksi pengetahuan; dan Aksiologi, yakni pengaruh nilai-nilai pada pengetahuan yang diperoleh dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh/dimanfaatkan (Haigh et al., 2019).

Ontologi Realime Kritis		
Domain Ontologi	Entitas	Hukum; mekanisme sebagai tendensi, di mana tendensi adalah kekuatan.
Empiris	Pengalaman, observasi	
Aktual	Peristiwa, tindakan/aksi	
Nyata (<i>Real, Deep</i>)	Struktur, mekanisme, institusi, <i>non-human powers</i>	

Sumber: Diadaptasi dari pemikiran Bhaskar (2008 [1975]); Fleetwood & Hesketh (2010).

Realisme Kritis dibangun di atas premis bahwa ontologi mendahului epistemologi: setiap kali seseorang membuat klaim pengetahuan, orang tersebut telah membuat klaim eksplisit atau implisit tentang cara dunia dipikirkan. Dengan kata lain, orang tersebut telah mengadopsi posisi ontologis. Dalam sains, ranah pertanyaan penelitian (dan jawaban) dengan demikian ditentukan sebelumnya oleh asumsi ontologis *ex-ante*. Menilai validitas paradigma tertentu dengan demikian melibatkan pemeriksaan sejauh mana asumsi ontologis yang mendasarinya realistis (Lagoarde-Segot, 2024).

Cara kita berpikir tentang dunia (ontologi), menurut Fleetwood, memengaruhi: apa yang kita pikir dapat diketahui tentangnya (epistemologi); bagaimana kita pikir itu dapat diselidiki (metodologi dan teknik penelitian); jenis teori yang kita pikir dapat dibangun tentangnya; dan sikap politik dan kebijakan yang siap kita ambil. Sementara memiliki ontologi yang 'tepat' tidak menjamin bahwa meta-teori, teori, dan praktik berikutnya juga akan 'benar', memiliki ontologi yang 'salah' membuat ini hampir mustahil - meskipun kita mungkin 'benar' secara tidak sengaja. Demikian pula, memiliki ontologi yang tidak ambigu tidak menjamin bahwa meta-teori, teori, dan praktik berikutnya juga akan tidak ambigu, tetapi memiliki ontologi yang ambigu membuat ini jauh lebih sulit. Singkatnya, ontologi itu penting (Feetwood, 2005).

Realisme kritis menjelaskan fenomena dengan mengungkap mekanisme yang menghasilkan dan mempertahankan fenomena tersebut (Samsonsén & Heggdalsvik, 2024). Realisme kritis mengalihkan perhatian pada penyebab mendalam dari kerugian atau mekanisme mendasar yang menimbulkan risiko (Houston, 2001). Ia mengakui keberadaan realitas objektif sambil mengakui

pengaruh struktur sosial dan tindakan manusia (Mavunga, 2019).

Berdasarkan pemikiran realisme kritis (Bhasar, 2008 [1975]) tentang domain ontologi (Riil, Aktual, dan Empiris), sebagaimana telah dijelaskan di muka, dan kerangka organisasi bisnis (Vanharanta & Wong, 2024), maka dalam studi di sini, domain ontologi Manajemen SDM dan Keuangan Berkelanjutan dapat ditunjukkan seperti gambar berikut ini.

Domain sebenarnya terdiri dari struktur dan mekanisme dasar yang menghasilkan peristiwa (Samsonsén & Heggdalsvik, 2024). Realisme kritis memandang bahwa realitas sosial terdiri dari lapisan-lapisan yang tidak selalu terlihat, termasuk struktur sosial, institusi, dan hubungan kekuasaan yang memengaruhi tindakan individu. Realisme kritis memungkinkan kita untuk melihat mekanisme tersembunyi yang memengaruhi fenomena sosial, seperti eksploitasi tenaga kerja dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya (Bhaskar, 2008 [1975]). Misalnya, sistem kapitalis global sering menciptakan ketidakadilan struktural, seperti ketimpangan upah dan eksploitasi tenaga kerja, yang memengaruhi kesejahteraan karyawan (Sayer, 2000).

Laminasi Sistem Terbuka

Realisme kritis mengadopsi pandangan realitas sebagai sistem terbuka (Bhaskar, 1998), yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya secara langsung (Wynn & William, 2012; Brunson et al., 2025). Dalam banyak ilmu alam dan fisika, eksperimen laboratorium dapat dirancang sebagai sistem yang kurang/lebih tertutup, di mana kondisi kontekstual dan pengaruh eksogen dikendalikan untuk membuat fenomena terlihat dengan mengurangi efek pengganggu dan memastikan lingkungan yang sama untuk penyelidikan yang direplikasi. Dalam

eksperimen tertutup ini, penyebab spesifik dari hasil peristiwa atau perubahan keadaan dapat diisolasi.

Tetapi, dunia sosial atau sistem sosial dan fenomena kompleks lainnya jarang menunjukkan penutupan eksperimen atau spontan seperti itu (Bhaskar, 1998). Sistem sosial, seperti sistem sosio-teknis dalam lingkungan organisasi, tidak dapat dibatasi secara memadai di dunia nyata seperti yang dapat dilakukan dengan eksperimen laboratorium. Setiap peristiwa tidak hanya bergantung pada kekuatan kausal yang tersedia dalam suatu struktur sosial, tetapi juga pada kondisi kontekstual yang terus berubah dan sifat-sifat komponen yang berkembang dalam struktur tersebut.

Ketika mekanisme diberlakukan, struktur tersebut dimodifikasi sebagai akibat dari efeknya (Archer, 1995), menjadikan kondisi kontekstual yang konstan sebagai pengecualian yang langka. Sebaliknya, karena batas-batas sistem sosial biasanya cair dan tidak kaku, kita tidak dapat berasumsi bahwa mekanisme yang diberlakukan dalam sistem dan konteks lingkungan tertentu akan menghasilkan peristiwa yang sama jika diberlakukan di masa mendatang. Dalam realisme kritis, realitas sistem terbuka yang dinamis dan bervariasi mengalihkan fokus ke mengidentifikasi kecenderungan mekanisme untuk bertindak dalam lingkungan kontekstual tertentu pada waktu tertentu (Sayer, 1992; Wynn & Williams, 2012; Brunson et al., 2025).

Prinsip-prinsip Realisme Kritis

Pertama, asumsi dasar realisme kritis adalah keberadaan dunia nyata yang independen dari pengetahuan kita tentangnya (Bhaskar, 1998). Realitas dipahami sebagai sesuatu yang terstratifikasi dalam tiga domain; yang nyata, yang aktual, dan yang empiris. Aspek utama ontologi stratifikasi realisme kritis adalah domain nyata. Domain

nyata terdiri dari struktur objek, baik fisik maupun sosial, dengan kapasitas untuk berperilaku yang disebut mekanisme. Domain ini tidak dapat diamati. Intinya adalah bahwa domain nyata terdiri dari struktur dan mekanisme yang mewakili kecenderungan kausal yang mungkin atau mungkin tidak diaktifkan, menyiratkan bahwa kausalitas tidak linier dalam realisme kritis (Bhaskar, 1975, 2008; Mingers & Standing, 2017). Mekanisme ini mungkin (atau mungkin tidak) memicu peristiwa dalam domain aktual.

Dalam domain ketiga, yang empiris, peristiwa ini mungkin (atau mungkin tidak) diamati. Dengan demikian, struktur tidak deterministik; mereka memiliki potensi untuk memungkinkan dan membatasi peristiwa melalui mekanisme inherennya (Archer, 1995; Sayer, 2004). Ini tidak menyiratkan relativisme yang menghakimi; karena dunia nyata memang ada, realisme kritis berpendapat bahwa beberapa teori mendekati realitas lebih baik daripada yang lain, dan bahwa ada cara rasional untuk menilai klaim pengetahuan (Bygstad et al., 2016). Realisme kritis menggabungkan ontologi realis dengan epistemologi interpretatif (Bhaskar, 1998).

Kedua, hubungan antara agensi dan struktur dalam realisme kritis dikembangkan dalam model transformasional aksi sosial (TMSA) Bhaskar (1998) dan kemudian dalam model morfogenetik Archer (1995), yang mengasumsikan bahwa aksi dan struktur adalah 'dualisme analitis' dalam arti bahwa struktur sosial ada secara independen dari aktivitas manusia saat ini (Mutch, 2007). Ini menyiratkan bahwa meskipun struktur hanya ada melalui aktivitas manusia, struktur itu tidak dapat direduksi menjadi aktivitas tersebut. Struktur memungkinkan dan membatasi aksi, sementara aksi manusia mereproduksi atau mengubah struktur,

meskipun ini biasanya bukan tujuan dari aktivitas tersebut (Bygstad et al., 2016).

Ketiga, elemen terakhir dalam pendekatan realis kritis adalah konsep stratifikasi objek atau struktur itu sendiri (Mutch, 2010; Volkoff & Strong, 2013). Struktur dapat diurai menjadi komponen, atau digabungkan menjadi himpunan (DeLanda, 2006). Fenomena yang menarik dan mekanisme terkaitnya dapat muncul di tingkat mana pun. Domain sebenarnya terdiri dari struktur dan mekanisme dasar generatif yang menghasilkan peristiwa (Samsonsen, 2024).

Lima langkah Realisme Kritis

Dalam mengadaptasi metodologi realisme kritis untuk penelitian empiris, khususnya untuk penelitian studi kasus, secara komprehensif, Wynn dan Williams (2012) memperkenalkan lima langkah/tahapan (dalam struktur iteratif) berikut ini: 1) Penjelasan kejadian: Identifikasi kejadian utama kasus, berdasarkan pengalaman dan abstraksi. Kejadian-kejadian ini adalah hasil, yang ingin kita jelaskan; 2) Penjelasan struktur dan konteks: Identifikasi entitas manusia, sosial, dan fisik dari kasus, dan hubungan di antara mereka. Hubungan ini dapat mengungkapkan sifat-sifat yang muncul; 3) Retroduksi: Identifikasi mekanisme (kekuatan dan kecenderungan) yang menjelaskan hasil. Analisis harus memberikan dukungan logis dan analitis untuk keberadaan mekanisme yang diusulkan yang menghubungkan struktur dengan kejadian; 4) Penguatan empiris: Pastikan bahwa mekanisme yang diusulkan memiliki kekuatan kausal dan bahwa mereka memiliki kekuatan penjelasan yang lebih baik daripada alternatif: Menilai kekuatan penjelasan dari setiap mekanisme yang diusulkan dengan bukti empiris; dan 5) Triangulasi dan berbagai metode: Gunakan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi hubungan kausal, dan

bangun berbagai sumber dan tipe data untuk mengeksplorasi keragaman struktur yang mendasarinya dan mengendalikan bias.

Dari penjelasan di atas dapat diringkas bahwa, pendekatan realisme kritis memiliki perspektif utama yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar ekologi, dan relevan pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perspektif utama yang kami maksudkan adalah: 1) Realitas yang kompleks ada secara independen dari gagasan kita tentangnya, dan realitas ini dapat diketahui, meskipun tidak sempurna; 2) Realitas terdiri dari hierarki yang kompleks dan bertingkat sistem terbuka; 3) Kausalitas paling baik dipahami dalam hal proses kausal yang mungkin atau mungkin tidak secara langsung dapat diamati atau digeneralisasikan, proses ini melibatkan interaksi kompleks antara mekanisme generatif dan kondisi kontekstual; 4) Teori dan berteori tentang proses kausal merupakan inti dari penjelasan ilmiah dan tindakan praktis; 5) Teori ada di berbagai tingkatan abstraksi, mulai dari model sampai metateori; dan 6) keberagaman metode dapat memberikan bukti dalam pencarian pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Brunson et al., 2025).

B. Pertautan SDM dan Keuangan Berkelanjutan

Demi keberlanjutan kehidupan masyarakat, sejak zaman Yunani Kuno distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil telah dibahas oleh Plato. Menurutnya, anggota masyarakat terkaya tidak boleh lebih dari empat kali lipat lebih kaya daripada anggota masyarakat yang termiskin (Fair, 1971). Oleh karena itu, struktur distribusi pendapatan yang masuk akal harus diperkenalkan karena alasan etika yang ketat dan juga dari kepentingan pribadi semua entitas utama yang membentuk masyarakat tertentu. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Peter Drucker (1977) berpendapat bahwa

kompensasi maksimum eksekutif perusahaan teratas (CEO) harus ditentukan dengan jelas oleh kebijakan perusahaan resmi dan tidak boleh melebihi kompensasi karyawan tetap penuh waktu yang dibayar terendah lebih dari 25 kali.

Kesenjangan pendapatan akibat perbedaan gaji antara eksekutif (CEO) dan karyawan merusak kesejahteraan dan praktik keuangan berkelanjutan. Karena keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan salah satu pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, masalah pemerataan pendapatan harus menjadi subjek pertimbangan terperinci bagi setiap organisasi yang berkelanjutan. Kompensasi eksekutif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada peringkat ESG perusahaan, perusahaan harus memperkuat kontrol internal dan pengawasan perilaku eksekutif serta mengadopsi mekanisme pengawasan eksternal yang baik untuk mengekang perilaku oportunistik di antara para eksekutif (Zhu et al., 2024).

Beberapa dekade belakangan, bidang manajemen sumber daya manusia (MSDM) telah berkembang secara signifikan. Paradigma penelitian realisme kritis—fitur utama dan relevansinya dengan MSDM, khususnya terhadap masalah kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan, adalah posisi paradigma yang relatif baru. Ini merupakan integrasi pandangan yang saling berlawanan dengan pandangan yang diasosiasikan dengan posisi positivis tradisional (positivisme) dan interpretatif (Sayer, 2000; Haigh et al., 2019).

Kesejahteraan karyawan telah dikonseptualisasikan dan dikonstruksikan sebagai representasi dari sebuah nilai manfaat (benefits) yang diterima oleh karyawan/pekerja (employee) dari perusahaan/pemberi kerja (employer). Kesejahteraan karyawan bukan sekedar gaji. Kesejahteraan karyawan mencakup kemanfaatan material dan non-

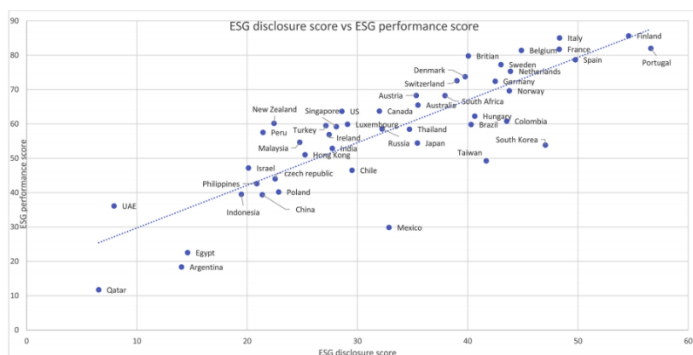
material seperti keselamatan kerja, dukungan kesehatan, keseimbangan kehidupan kerja, dan lain sebagainya. Organisasi yang berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan tidak hanya memenuhi kewajiban etis tetapi juga mencapai kinerja keuangan yang unggul. Kesejahteraan karyawan berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan (Liang, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman interdisiplin antara disiplin MSDM dengan disiplin Keuangan. Dalam konteks kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan, basisnya sama, yakni ESG. Karakteristik MSDM-Berkelanjutan minimal dicirikan oleh: 1) indentifikasi ketegangan antara hasil organisasi yang diharapkan; 2) perhatian penting terhadap pengembangan kapasitas; 3) kebutuhan untuk mengenali hasil positif dan negatif dari aktivitas MSDM; 4) perhatian diberikan pada pengembangan dan implementasi aktivitas MSDM; 5) pernyataan eksplisit tentang nilai dan etika yang menginformasikan MSDM-Berkelanjutan; dan 6) metrik MSDM-Berkelanjutan yang dirancang untuk mendorong perubahan sosial organisasi, ekonomi, dan ekologi (Kramar, 2022).

Kebijakan keuangan berkelanjutan mengarah pada perluasan pasar keuangan lebih lanjut, terutama melalui peningkatan komodifikasi dan finansialisasi alam, daripada menanamkan akumulasi modal dalam batas-batas keadilan sosial dan planet. Secara akademis, konsep maupun implementasi keuangan berkelanjutan masih terdapat banyak kontradiksi (Lagoarde-Segot, 2018; 2024). Pengungkapan kinerja ESG belum menunjukkan efisiensinya (Hassani & Bahini, 2022). Penelitian empiris tidak menemukan perubahan signifikan dalam kualitas pelaporan dan secara umum menyimpulkan bahwa pelaporan CSR tetap bersifat seremonial daripada substantif

pascaperaturan—konsisten dengan legitimasi perusahaan dan pandangan greenwashing. Sebaliknya, bukti yang berkembang menunjukkan dampak positif dan negatif terhadap pasar modal dan riil dari peraturan tersebut (Haji et al., 2023).

Dalam konteks keberlanjutan, pertautan struktur kepentingan terjadi di hampir semua dimensi ESG. Perbandingan antara skor pengungkapan (ESG disclosure score) dan skor kinerja (ESG performance score), sebagaimana diperlihatkan dalam gambar berikut, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara-negara di bawah garis regresi tersebut mungkin lebih cenderung terlibat dalam greenwashing.



Sumber: Distribusi negara – skor pengungkapan ESG vs skor kinerja ESG (Yu et al, 2020).

Agaknya, perusahaan yang mengadopsi greenwashing sebagai strategi perusahaan, mereka mencoba untuk mengaburkan kinerja ESG mereka yang kurang me-ngesankan secara keseluruhan dengan mengungkapkan sejumlah besar data ESG untuk menyesatkan para pemangku kepentingan.

Greenwashing sebagai pengungkapan yang menipu dalam ketiga dimensi ESG (Yu et al., 2020).

Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia 'hijau' (green) yang berfokus pada inisiatif lingkungan, manajemen sumber daya manusia berkelanjutan mengambil pendekatan holistik dengan mengintegrasikan praktik sosial dan berpusat pada karyawan atau pekerja untuk memastikan kesejahteraan karyawan/tenaga kerja. Pengintegrasian prinsip-prinsip Strategi SDM dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan di seluruh dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan modal insani (Kramar, 2022). Dengan demikian dalam perspektif MSDM-Berkelanjutan, karyawan merupakan modal insani yang sangat penting bagi organisasi, dan karena itu penting pula memperhatikan preferensi, kebutuhan, dan perspektif mereka (Sypniewska et al., 2023).

Menggunakan pendekatan realis kritis dalam praktik MSDM berkelanjutan membantu refleksi komunikatif, terutama dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di antara karyawan. Dalam konteks struktur-agensi, ditemukan penjelasan mengapa di satu saat karyawan mungkin memutuskan untuk terlibat atau menarik diri dari pekerjaan kolaboratif. Dengan berfokus pada reflektivitas bukan hanya sebagai 'dialog internal' tetapi juga sebagai 'percakapan eksternal', kami menunjukkan bagaimana dan mengapa interaksi tersebut merupakan bentuk mediasi tambahan dan signifikan antara konteks sosial dan praktik (Edwards & Kakavelakis, 2021).

Kekuatan kausal agen sosial dalam peristiwa sosial dengan demikian bergantung pada sifat-sifat kehidupan sosial yang telah terstruktur sebelumnya, pengetahuan tentang hal itu hanya dapat diperoleh melalui abstraksi, dan pengetahuan tentang hal itu diperlukan untuk analisis

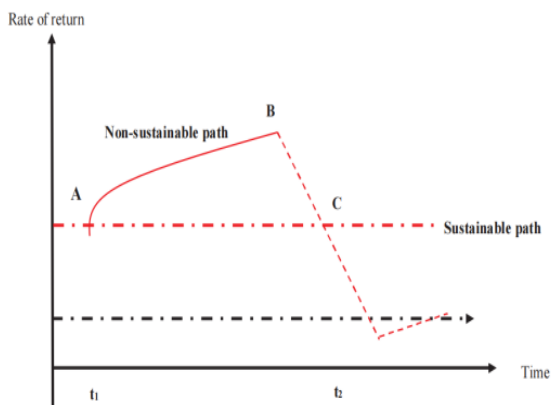
peristiwa konkret yang dapat menunjukkan kekuatan transformatif dan konstruktif sosial agen sosial (Fairclough, 2005). Realis kritis percaya bahwa eksplorasi pengetahuan adalah proses yang berkelanjutan karena melibatkan interaksi antara faktor mikro dan makro, yang dikenal sebagai agen dan struktur. Proses berkelanjutan terjadi karena perubahan faktor-faktor ini yang memengaruhi reaksi dan pemahaman orang tentang hal-hal nyata yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, posisi sosial memengaruhi cara berpikir orang dan dapat menjelaskan perbedaan pemahaman antara orang-orang dengan status yang berbeda. Penelitian yang mengacu pada realisme kritis menggunakan metodologi penelitian yang berbeda untuk mengevaluasi struktur dan materi, sering kali dengan menggunakan penelitian metode campuran (mixed method), kualitatif-kuantitatif (Syed, et al., 2009; Nik Mat (2014).

Meskipun pendekatan 'ilmiah', dengan komitmennya terhadap teknik penelitian empiris, mungkin menjadi titik awal yang berguna untuk memahami hubungan SDM dan kinerja. Pendekatan tersebut saat ini dianggap sebagai tujuan akhir. Realisme kritis, dengan menawarkan meta-teori yang lebih bermanfaat, dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman terhadap peran kausal yang dimainkan oleh SDM dalam kinerja organisasi. Namun, kita tidak hidup dalam kekosongan sosial, banyak hal yang mestinya terungkap (Hesketh & Fleetwood, 2006).

Memperhatikan SDM atau karyawan perusahaan dengan mengadopsi konsep ESG, akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam hal kebijakan tata kelola organisasi, meskipun lembaga internasional maupun pemerintah telah merumuskan

standar referensi yang relevan, perusahaan harus memiliki fungsi yang lebih kondusif untuk mengembangkan langkah-langkah sumber daya manusia berbasis ESG (Kramar, 2022). Semakin banyak perusahaan yang meningkatkan keterlibatan ESG dalam strategi manajemen mereka, berdampak pada aktivitas ESG terhadap stres kerja dan memerlukan investigasi mendalam tentang hubungan antara aktivitas ini dan kesejahteraan psikologis karyawan. Studi ini mengonfirmasi dampak aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan (Piao et al., 2022).

Dari perspektif keuangan berkelanjutan, terlepas dari bentuk yang dipilih, prinsip keberlanjutan memiliki implikasi yang kuat terhadap preferensi antarwaktu. Aspek ini, sebagaimana tampak pada grafik berikut (Wilson, 2018), menyoroti ketegangan mendasar antara penalaran keuangan konvensional dan kendala yang diberlakukan oleh keberlanjutan.



Sumber: Wilson [2018] dalam Lagoarde-Segot, 2018, 2019).

Memilih jalur berkelanjutan memang mengharuskan generasi saat ini untuk memprioritaskan kesejahteraan generasi berikutnya (di masa depan yang jauh t_2) di atas kesejahteraannya sendiri. Memang, memilih 'jalur berkelanjutan' menyiratkan kerugian kesejahteraan jangka pendek yang diwakili kembali oleh area ABC. Mengingat bahwa preferensi antarwaktu dalam keuangan diukur melalui biaya modal, kondisi yang diperlukan untuk keberlanjutan adalah penggunaan oleh investor dari "tingkat pengembalian yang diperlukan" yang mungkin lebih rendah daripada 'pengembalian pasar ekuilibrium' (yang diberikan oleh biaya modal rata-rata tertimbang). Penyesuaian ini sendiri akan memungkinkan untuk meningkatkan efek marjinal arus jangka panjang pada nilai sekarang bersih dari investasi yang direncanakan, dan dengan demikian untuk menyelaraskan pilihan investasi dengan kriteria keberlanjutan (Lagoarde-Segot, 2018, 2019).

Persinggungan antara MSDM, kesejahteraan karyawan, dan keuangan berkelanjutan merupakan batas penting dalam teori dan praktik organisasi kontemporer. Analisis realisme kritis memberikan kerangka kerja yang lebih bernuansa dan efektif untuk memahami MSDM. Kurangnya definisi dalam peran lini manajer MSDM, misalnya, menunjukkan perlunya mengeksplorasi struktur yang memengaruhi pengembangan peran agen (SDM) dalam struktur tersebut. Realisme kritis menyediakan kerangka kerja untuk memahami perubahan organisasi dan hubungan antara struktur organisasi dan perilaku individu, termasuk peran manajer lini MSDM dalam organisasi (Nik Mat, 2014; Mat & Barrett, 2017).

Identifikasi Mekanisme Generatif

Sejumlah argumen yang meyakinkan cenderung menunjukkan bahwa dunia sosial sebenarnya bukanlah sistem tertutup, melainkan sistem terbuka, yang di dalamnya pengaruh, interaksi, dan evolusi dari luar dalam sistem tersebut tidak dapat diantisipasi. Argumen-argumen ini berkaitan dengan: 1) fakta bahwa dunia fisik itu sendiri bukanlah sistem tertutup; 2) keberadaan kreativitas dan agensi manusia; 3) evolusi lembaga sosial yang sedang berlangsung; dan 4) kapasitas manusia untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu kemampuan untuk bertindak secara berbeda dalam serangkaian keadaan tertentu. Dalam sistem terbuka seperti dunia sosial, merujuk Downward (2016), mekanisme kausal mengambil bentuk kekuatan, atau kecenderungan, yang mungkin aktif atau tidak pada satu waktu, yang ketika aktif dapat beroperasi secara bersamaan dan dengan cara yang dapat saling menangkal. Di antara mekanisme ini adalah alasan pemodal mendukung proyek kewirausahaan dan makna kewirausahaan ini bagi pemodal. Di tengah kompleksitas sosial dan psikologis tersebut, model rasional pemaksimalan nilai agen/pemegang saham yang mendasari studi empiris tata kelola perusahaan tampak agak dangkal (Lagoarde-Segot, 2018, 2019, 2024).

Sebagian besar perusahaan gagal mengambil tindakan konkret baru untuk mencapai tujuan SDG 's. Keterlibatan mereka yang kurang memuaskan lebih terlihat seperti pencucian SDG's, mirip dengan perusahaan greenwashing yang memasarkan produk "hijau" yang hanya sedikit lebih ramah lingkungan daripada produk sejenisnya. Perusahaan yang melakukan SDG's-washing mengklaim berkontribusi pada tujuan keberlanjutan di tingkat masyarakat, tetapi tidak memiliki bukti dan tindakan yang tepat untuk mendukung klaim tersebut. Faktanya, pencucian SDG's lebih menyeluruh dan berpotensi lebih merugikan daripada

greenwashing, karena mencakup domain sosial, ekonomi, dan tata kelola dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk pemerintah dan LSM (Williams, et al, 2023; Poiriazi et al., (2025).

Dalam skala global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya mengintegrasikan faktor-faktor ESG secara holistik ke dalam proses pemilihan aset. Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) dan Inisiatif Pelaporan Global (GRI) juga mengembangkan dan menyebarkan standar akuntansi keberlanjutan. Namun, tantangan yang ada pada pengungkapan perusahaan pada data ESG bermacam-macam: data ESG yang tidak diaudit, tidak ada badan pengatur global, berbagai masalah perilaku di tingkat perusahaan, dan tidak ada pedoman peraturan khusus untuk memastikan keakuratan data ESG yang dilaporkan. Oleh karena itu, untuk setiap negara, pihak pemangku kepentingan masih memerlukan instrumen pengungkapan ESG wajib dan sukarela untuk mengikuti pedoman pengungkapan ESG umum yang diusulkan oleh PBB, SASB, dan GRI (Yu et al., 2020; Yildirim, 2023; Bernini & Rosa, 2024; Dempere et al., 2024).

Identifikasi Mekanisme Generatif: Mitigasi Perilaku <i>Greenwashing</i> untuk Kesejahteraan Karyawan dan Keuangan Berkelanjutan dalam Wawasan Laminasi Sistem Terbuka	
Level dan Skala	Deskripsi
7-Planetary scale <i>(Planetary level of whole cosmos).</i> 	Dalam skala global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya mengintegrasikan faktor-faktor ESG secara holistik ke dalam proses pemilihan aset. Dewan standar akuntansi keberlanjutan (IASB) dan inisiatif Pelaporan Global (GRI) juga mengembangkan dan menyebarkan standar akuntansi keberlanjutan. Namun, tantangan yang ada pada pengungkapan perusahaan pada data ESG bermacam-macam: data ESG yang tidak diaudit, tidak ada badan pengatur global, berbagai masalah perilaku di tingkat perusahaan, dan tidak ada pedoman peraturan khusus untuk memastikan keakuratan data ESG yang dilaporkan. Oleh karena itu, untuk setiap negara, pihak pemangku kepentingan masih memerlukan instrumen pengungkapan ESG wajib dan sukarela untuk mengikuti pedoman pengungkapan ESG umum yang diusulkan oleh PBB, SASB, dan GRI (Yu et al., 2020).
6-Mega scale <i>(Mega-level of whole traditions of civilization).</i> 	Secara tradisional, nilai-nilai sosial budaya yang diilhami oleh Konfusianisme, Budha, Islam dan agama lain telah mempromosikan gagasan untuk mencari keharmonisan sosial, saling menghormati, dan toleransi. Investor utama Eropa dan Amerika dan pelanggan mengaruhi nilai-nilai yang sudah ada sejak lama ini dengan mensyaratkan efisiensi yang lebih tinggi, keadilan sosial, dan kesadaran lingkungan. Namun, hal ini terjadi bersamaan dengan beberapa organisasi yang memiliki toleransi yang rendah terhadap keberagaman di antara tenaga kerja mereka. Meskipun beberapa negara membuat pernyataan tentang dukungan non-diskriminasi, ini adalah tindakan reaktif yang diambil untuk mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti PBB (Kramer, 2022).
5-Macro scale <i>(Macro-level of whole regions or whole societies).</i> 	Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita, memainkan peran ambigu dalam perilaku <i>greenwashing</i> perusahaan dalam dimensi ESG. Justru kesejahteraan nasional yang lebih tinggi (Indeks Pembangunan Manusia, yakni gabungan pengukuran pencapaian pendidikan, PDB per kapita, dan harapan hidup) dapat mengurangi perilaku <i>greenwashing</i> perusahaan. Berkaitan dengan gerakan anti korupsi dan penyuaian di skala makro, di negara dengan korupsi yang lebih sedikit, perusahaan cenderung tidak terlibat dalam perilaku <i>greenwashing</i> . Oleh karena itu, sistem yang korupsinya lebih sedikit dapat memberikan lebih banyak peluang bagi pihak pemangku kepentingan yang relevan untuk mengurangi tingkat <i>greenwashing</i> (Yu et al., 2020).
4-Meso scale <i>Meso-level (functional roles of capitalist and worker).</i> 	Sebagian besar perusahaan gagal mengambil tindakan konkret baru untuk mencapai tujuan SDG. Keterlibatan mereka yang kurang membuat lebih terlintas target pencucian SDG, misal dengan perusahaan <i>greenwashing</i> yang memasarkan produk "hijau" yang hanya sedikit lebih ramah lingkungan daripada produk sejenisnya. Perusahaan yang melakukan SDG-washing mengklaim berkontribusi pada tujuan keberlanjutan di tingkat masyarakat tetapi tidak memiliki bukti dan tindakan yang tepat untuk mendukung klaim tersebut. Faktanya, pencucian SDG lebih menyeluruh dan berpotensi lebih merugikan daripada <i>greenwashing</i>, karena mencakup domain sosial, ekonomi, dan tata kelola dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk pemerintah dan LSM (Williams, et al, 2023). Gagasan bahwa hak politik yang substansial memberdayakan orang untuk mencegah perilaku <i>greenwashing</i> perusahaan belum banyak didukung oleh penelitian empiris. Memang, orang-orang dalam masyarakat dengan hak politik yang lebih kuat diberi lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka melalui media, organisasi lingkungan yang berpengaruh, dan LSM. Tetapi bersamaan dengan itu pula, perusahaan berkapitalisasi besar, menurut Delmas & Montez-Sancho (2010) seperti dikutip oleh Ellen Pei-Yu dkk., juga memiliki lebih banyak hak politik untuk secara selektif mengungkapkan kredensial lingkungan yang menguntungkan mereka, meningkatkan opini pemangku kepentingan melalui kegiatan seperti: a) upaya lobi kepada pemerintah, (b) mencari legitimasi pencitraan merek hijau perusahaan, atau (c) menghindari peraturan wajib dengan mengembangkan regulasi mandiri sukarela. Organisasi dapat memperoleh imbalan dan legitimasi finansial dengan mengambil tindakan simbolis tanpa menerapkan praktik tersebut (Yu et al., 2020).
3-Micro scale <i>Micro-level (e.g. ethnomethodology)</i> 	Beberapa akademisi terutama di bidang MSDM, Keuangan dan Moneter, Kebijakan Publik dan Administrasi, telah berinisiatif mempromosikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip maupun pilar-pilar ESG dapat tercapai dalam kurikulum universitas maupun pelatihan praktis eksekutif. MSDM-Berkelanjutan bertujuan mempromosikan dimensi ekologi, termasuk kesejahteraan individu karyawan, terutama di luar eksekutif, dan hasil positif lainnya bagi karyawan di tempat kerja serta memajukan hasil sosial di luar organisasi, seperti organisasi yang dipandang sebagai pemberi kerja pilihan dan memajukan kesetaraan di pasar tenaga kerja (Kramer, 2022). Sedangkan dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, mereka bertujuan mencari model alternatif pembelajaran keuangan dan moneter di tingkat universitas agar sesuai dengan SDGs (Lagoarde-Segot, 2023).
2-Biological scale <i>(Individual, biological level)</i> 	Dengan mengutip berapa hasil penelitian sebelumnya, Dorfleitner & Utz (2024) menyebutkan bahwa penggerak utama <i>greenwashing</i> adalah: (i) bias optimis (Kahneman dan Tversky 1979), (ii) pembingkai keputusan yang sempit (Kahneman dan Tversky 1979), dan (iii) diskonto intertemporal hiperbolik (Delmas dan Burbano 2011). Beberapa penelitian juga menyajikan bukti insentif finansial perusahaan untuk melakukan <i>greenwashing</i> (Li et al. 2023).
1-Sub-individual scale <i>(psychological level)</i> 	Menurut Lassoued dan Khanchel yang dirujuk oleh William dkk., CEO yang sangat naris cenderung mengungkapkan lebih banyak aktivitas CSR agar dapat memainkan peran protagonis yang menerima validasi dan tepuk tangan dari audiens (Dorfleitner & Utz, 2024).

Gagasan bahwa hak politik yang substansial memberdayakan orang untuk mencegah perilaku *greenwashing* perusahaan belum banyak didukung oleh penelitian empiris. Memang, orang-orang dalam masyarakat dengan hak politik yang lebih kuat diberi lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka

melalui media, organisasi lingkungan yang berpengaruh, dan LSM. Tetapi, menurut Delmas & Montez-Sancho (2010), seperti dikutip oleh Ellen Pei-Yu dkk., bersamaan dengan itu pula, perusahaan berkapitalisasi besar, juga memiliki lebih banyak hak politik untuk secara selektif mengungkapkan kredensial lingkungan yang menguntungkan mereka, meningkatkan opini pemangku kepentingan melalui kegiatan seperti: a) upaya lobi kepada pemerintah, (b) mencari legitimasi pencitraan merek hijau perusahaan, atau (c) menghindari peraturan wajib dengan mengembangkan regulasi mandiri sukarela. Organisasi dapat memperoleh imbalan dan legitimasi finansial dengan mengambil tindakan simbolis tanpa menerapkan praktik tersebut (Yu et al., 2020; Bernini & Rosa, 2023).

Secara tradisional, nilai-nilai sosial budaya yang diilhami oleh pandangan Konfusianisme, Budha, Islam dan agama lain telah mempromosikan gagasan untuk mencari keharmonisan sosial, saling menghormati, dan toleransi. Investor utama Eropa dan Amerika dan pelanggan memengaruhi nilai-nilai yang sudah ada sejak lama ini dengan mensyaratkan efisiensi yang lebih tinggi, keadilan sosial, dan kesadaran lingkungan. Namun, hal ini terjadi bersamaan dengan beberapa organisasi yang memiliki toleransi yang rendah terhadap keberagaman di antara tenaga kerja mereka. Meskipun beberapa negara membuat pernyataan tentang dukungan non-diskriminasi, ini adalah tindakan reaktif yang diambil untuk mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti PBB (Kramar, 2022).

Banyak akademisi saat ini, termasuk di bidang MSDM, Keuangan dan Moneter, Kebijakan Publik dan Administrasi, telah berinisiatif mempromosikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip maupun pilar-pilar ESG

dapat tercakup dalam kurikulum universitas maupun pelatihan praktis eksekutif. MSDM-Berkelanjutan bertujuan mempromosikan dimensi ekologi, termasuk kesejahteraan individu karyawan, terutama di luar eksekutif, dan hasil positif lainnya bagi karyawan di tempat kerja serta memajukan hasil sosial di luar organisasi, seperti organisasi yang dipandang sebagai pemberi kerja pilihan dan memajukan kesetaraan di pasar tenaga kerja (Kramar, 2022). Sedangkan dalam konteks keuangan berkelanjutan, mereka bertujuan mencari model alternatif pembelajaran keuangan dan moneter di tingkat universitas agar sesuai dengan SDG's (Lagoarde-Segot, 2023). Tetapi, beberapa penelitian juga menyajikan bukti insentif finansial perusahaan untuk melakukan greenwashing (Li et al. 2023).

C. Diskusi: Mekanisme Generatif

Masalah kesejahteraan dan keuangan berkelanjutan berjalın-kelindan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), terutama dengan pelaksanaan pilar-pilar ESG maupun laporan matriks ESG. Di sanalah pangkal masalahnya, yaitu perilaku greenwashing (Yu et al., 2020; Lagoarde-Segot, 2024; Li et al., 2023; Williams, et al, 2023), sebagaimana telah kami paparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Meskipun lembaga internasional dan pemerintah telah merumuskan standar referensi yang relevan, perusahaan harus memiliki fungsi yang lebih kondusif dan transparan dalam praktik ESG. Fungsi-fungsi ini termasuk, fungsi dewan direksi, desain struktur kepemilikan saham—termasuk bagi karyawan, yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia yang stabil, yang menghargai semua pemangku kepentingan (Yu et al., 2020; Piao et al., 2022; Li & Lee, 2024; Zhang et al., 2024).

Perubahan tata kelola (governance) dan manajemen perusahaan merupakan respon terhadap krisis ekologi, meningkatnya dampak negatif terhadap pekerja, meningkatnya ketimpangan dalam distribusi kekayaan, menurunnya pertumbuhan dan produktivitas. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, pergantian staf meningkat, loyalitas menurun dan stres meningkat (Wilkinson et al., 2018).

Berikut adalah 'tabel struktur dasar' dari pendekatan Realisme Kritis yang, seperti telah kami jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, secara ringkas menggambarkan mekanisme kausal perilaku greenwashing.

Struktur Dasar <i>Greenwashing</i>: Penghambat Kesejahteraan dan Keuangan Berkelanjutan		
Tahapan	Entitas	Referensi
1) Penjelasan kejadian	Kasus: Perilaku <i>Greenwashing</i> sebagai penghambat kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan	Yu <i>et al.</i> , (2020); Lagoarde-Segot (2018, 2019, 2024); Dempere <i>et al.</i> , (2024); Poiriazi <i>et al.</i> , (2025).
2) Penjelasan struktur dan konteks	ESG (relasi Struktur-Agen): negara (regulator), perusahaan (pemegang saham, eksekutif), dan masyarakat (konsumen).	Yu <i>et al.</i> , (2020); Lagoarde-Segot (2018, 2019, 2024); Dempere <i>et al.</i> , (2024); Poiriazi <i>et al.</i> , (2025).

3) Retroduksi	Kepentingan ekonomi, maksimalisasi nilai pemegang saham (<i>homo economicus</i>).	Yu <i>et al.</i> , (2020); Li <i>et al.</i> (2023); Bernini & Rosa (2024) Williams, <i>et al.</i> , (2023)
4) Penguatan empiris	<i>corruption, bribery, and fraud.</i>	Yu <i>et al.</i> , 2020 (Li <i>et al.</i> 2023); Poiriazi <i>et al.</i> , (2025).
5) Triangulasi dan berbagai metode	Temuan penelitian empiris baik menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif maupun keduanya (<i>mix method</i>).	Yu <i>et al.</i> , (2020); Lagoarde-Segot (2018, 2019, 2024); Dempere <i>et al.</i> , (2024); Poiriazi <i>et al.</i> , (2025).

Sumber: Disistesisikan oleh penulis berdasarkan pendekatan Realisme Kritis.

Bukti empiris menyebutkan bahwa perilaku greenwashing terjadi secara sistemik dan terstruktur, dan hampir semua pemangku kepentingan terlibat (Yu *et al.*, 2020; Williams, *et al.*, 2023), terutama pada perusahaan-perusahaan di negara yang banyak terjadi praktik korupsi, penyuapan, dan penipuan (*corruption, bribery, and fraud*). Padahal aspek tersebut merupakan salah satu indikator penting untuk skor tata kelola (*governance*) dalam pilar/dimensi/matriks ESG. Oleh karena itu, perilaku greenwashing harus dimitigasi melalui peraturan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang efektif serta peningkatan transparansi (Bernini & Rosa, 2023; Filippini *et al.*, 2024).

Tekanan untuk mencegah perilaku greenwashing ESG dapat ditingkatkan dengan empat mekanisme berikut: 1) direktur yang lebih independen; 2) investor institusional

yang lebih banyak; 3) kepentingan publik yang lebih berpengaruh melalui sistem negara yang anti-korupsi; dan 4) status lintas-daftar. Dua yang pertama menjadi aktor yang paling efisien untuk mengurangi greenwashing. Kedua hal tersebut didukung oleh fakta bahwa penduduk di negara yang kurang korup dapat lebih baik dalam meneliti perilaku greenwashing perusahaan karena mereka dapat berbicara tentang greenwashing. Temuan empiris mendukung pandangan bahwa perusahaan yang terpantau dalam pengawasan yang lebih besar cenderung tidak terlibat dalam greenwashing. Implikasinya bagi para pembuat kebijakan dan investor ESG dengan menunjukkan bagaimana faktor-faktor di tingkat perusahaan dan negara dapat menghalangi perilaku greenwashing (Yu et al., 2020; Bernini & Rosa, 2024; Poiriazzi et al., (2025). Berdasarkan pendekatan Realisme Kritis dalam perspektif Manajemen SDM, berikut adalah kerangka konseptual mekanisme generatif kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan. Kerangka konseptual ini, dimaksudkan untuk mengidentifikasi tendensi (T1, T2, T3) yang memungkinkan struktur ESG bekerja, yang mencakup kesejahteraan karyawan (T1) dan keuangan berkelanjutan (T2) maupun tendensi kesalingan di antara keduanya untuk melakukan perubahan (T3).

D. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesejahteraan karyawan dan keuangan berkelanjutan dalam perspektif sumber daya manusia (SDM) dengan pendekatan Realisme Kritis, mengonfirmasi bahwa subjek kajian tersebut seperti fenomena 'gunung-es' (iceberg phenomenon). Analogi ini mirip dengan pandangan ontologi Realisme Kritis (real, actual, empirical) bahwa, di bawah permukaan ESG terdapat hubungan yang kompleks antara konteks, mekanisme, dan hasil (context, mechanism, and outcomes). Artinya, dalam perspektif Manajemen SDM

(context), seharusnya dengan beroperasinya intervensi ESG (mechanism), terwujud kesejahteraan dan keuangan berkelanjutan (outcome). Tetapi, temuan empiris menunjukkan hasil yang berlawanan akibat dari perilaku greenwashing (domain aktual dan empiris) yang, patut diduga, sebagian atau seluruhnya, disebabkan oleh tindakan corruption, bribery, and fraud (domain aktual dan empiris). Dalam pendekatan Realisme Kritis, tidak semua mekanisme dapat teramati secara inderawi karena sebagian beroperasi pada ranah psikologis atau mekanisme kognitif (domain riil). Di situlah pentingnya melakukan indentifikasi mekanisme generatif secara cermat, baik yang mendukung maupun yang menghambat, agar diperoleh cara intervensi yang tepat, sebagaimana kami usulkan dalam kerangka konseptual mekanisme generatif di atas.

Dalam tataran global, setiap kebijakan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang environmental, social, governance (ESG) harus berfokus pada terwujudnya kesejahteraan dan keberlanjutan berdasarkan nilai etika dan moral universal: kemanusiaan yang adil dan beradab. Di tingkat nasional/domestik, setiap negara harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap implementasi ESG di tingkat perusahaan, termasuk kewajiban audit dan keakuratan data ESG yang dilaporkan.



BAGIAN 4

PERSPEKTIF PEMASARAN DAN KOMUNIKASI



BAB 9 | Pemasaran Produk Keuangan Berkelanjutan

Edi Setiawan

Perkembangan teknologi digital dan kesadaran kolektif terhadap keberlanjutan telah mengubah lanskap industri keuangan secara radikal. Produk keuangan kini tidak lagi sekadar alat transaksi ekonomi, melainkan juga cerminan dari nilai, tujuan hidup, dan orientasi sosial masyarakat modern. Perbankan, asuransi, pasar modal, dan instrumen fintech berbasis syariah dan konvensional berlomba-lomba mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta nilai etika dalam desain produknya (Damayanti, 2023).

Dalam konteks ini, strategi pemasaran tidak hanya bertujuan menjual produk, melainkan membentuk persepsi, nilai, dan pengalaman yang bermakna. Konsep Pemasaran 5.0 yang dikembangkan oleh Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2021) menekankan pentingnya penggunaan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan data analytics secara empatik dan humanistik. Pemasaran 5.0 tidak hanya berbicara efisiensi digital, tetapi juga bagaimana teknologi mampu menyampaikan nilai-nilai spiritual, moral, dan keberlanjutan. Hal ini berpadu erat dengan Teori 4A oleh Sheth (2011), yang menyatakan bahwa produk harus Acceptable (diterima secara nilai), Affordable (terjangkau), Accessible (mudah dijangkau), dan Awareness-nya tinggi. Strategi pemasaran keuangan yang sukses di era ini bukan hanya yang mencetak angka transaksi tinggi, tetapi juga yang membentuk loyalitas sosial, kesadaran spiritual, dan dampak ekologis positif. Itulah tantangan sekaligus peluang pemasaran berkelanjutan.

Pendahuluan Perubahan iklim, krisis energi, dan tekanan pada sumber daya alam telah mendorong sistem keuangan global untuk melakukan evolusi menuju praktek yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Dalam konteks ini, produk keuangan yang berkelanjutan muncul sebagai alat penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Produk-produk seperti obligasi ramah lingkungan (green bonds), pendanaan untuk sumber energi terbarukan, serta instrumen investasi yang berlandaskan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) mencerminkan komitmen lembaga keuangan untuk mengalihkan modal dari sektor yang merugikan lingkungan menuju yang lebih berkelanjutan (Inisiatif Keuangan UNEP, 2021).

Namun, di banyak negara yang sedang berkembang, penerimaan terhadap produk-produk keuangan yang berkelanjutan belum sejalan dengan pentingnya yang ditimbulkan. Beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman tentang keuangan, terbatasnya akses informasi, serta pandangan bahwa produk ramah lingkungan itu kompleks dan berisiko tinggi, menjadi hambatan bagi penetrasi pasar.

Sebaliknya, lembaga keuangan sering kali tidak berhasil dalam merancang strategi pemasaran yang dapat menyampaikan nilai keberlanjutan secara mudah, relevan, dan meyakinkan bagi masyarakat umum. Dalam dunia pemasaran saat ini, perubahan dalam nilai-nilai konsumen dan perkembangan teknologi informasi memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih fleksibel. Pemasaran 5.0, yang dijelaskan oleh Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2021), menekankan betapa pentingnya penggunaan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (AI), data besar, dan otomatisasi dalam memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam memasarkan produk keuangan yang berkelanjutan, cara ini dapat dimanfaatkan untuk mengenali perilaku pasar, menyesuaikan pesan keberlanjutan, serta meningkatkan efektivitas saluran komunikasi.

Selain metode berbasis teknologi, kerangka pemasaran yang fokus pada kebutuhan konsumen masih tetap penting. Bauran pemasaran 4A—yang terdiri dari Acceptability, Affordability, Accessibility, dan Awareness—memberikan pandangan praktis dalam merancang strategi pemasaran yang komprehensif (Kartajaya dan Sugiarto, 2019). Keterterimaan mengacu pada keharusan bahwa produk harus mencerminkan preferensi dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh konsumen. Keterjangkauan menekankan signifikansi biaya yang terjangkau dan risiko yang terkait.

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan untuk mendapatkan dan menggunakan produk, sedangkan Kesadaran berkaitan dengan usaha komunikasi untuk menciptakan pemahaman yang mendalam bagi konsumen. Penerapan konsep 4A dalam bidang keuangan berkelanjutan dapat memperkuat relevansi dan penerimaan produk di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, penyederhanaan rencana investasi yang berfokus pada ESG, pengembangan narasi terkait keberlanjutan dalam bahasa yang jelas, serta bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menciptakan kepercayaan. Keempat unsur tersebut tidak hanya berpengaruh pada keputusan berbelanja, tetapi juga meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap institusi keuangan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap kelestarian.

Selanjutnya, pergeseran dalam preferensi konsumen saat ini juga menciptakan kesempatan yang sangat besar. Generasi milenial dan Gen Z, yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan isu sosial dan lingkungan, cenderung memilih untuk mendukung merek dan produk yang memberikan dampak positif. Laporan Accenture (2022) mengindikasikan bahwa konsumen muda menunjukkan reaksi yang lebih positif terhadap perusahaan yang transparan, asli, dan terlibat dalam program keberlanjutan. Hal ini menjadi dasar strategis dalam menentukan posisi produk keuangan berkelanjutan sebagai pilihan utama bagi segmen pasar

yang semakin peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan strategi pemasaran yang didasarkan pada teknologi dan nilai dalam konteks produk keuangan yang berkelanjutan.

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah adopsi, tetapi juga untuk mendorong perubahan budaya keuangan masyarakat menuju praktik yang lebih bertanggung jawab. Penelitian ini akan menyelidiki hubungan antara konsep Marketing 5.0 dan bauran pemasaran 4A sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang lebih sesuai, efisien, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Klasifikasi Produk Keuangan dan Strategi Pemasarannya

Produk keuangan kini berkembang menjadi berbagai bentuk: konvensional, syariah, digital, dan alternatif. Setiap jenis produk memerlukan strategi pemasaran yang kontekstual dan relevan dengan nilai pasar serta perilaku konsumennya.

Produk keuangan dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk utama, yaitu konvensional, syariah, digital, dan alternatif. Masing-masing memiliki karakteristik, prinsip operasional, serta pendekatan regulasi yang berbeda. Produk konvensional seperti tabungan, deposito, kredit, dan obligasi didasarkan pada prinsip bunga, risiko kredit, dan efisiensi intermediasi lembaga keuangan (Mishkin & Eakins, 2018). Keberadaan produk ini telah lama mendominasi sektor perbankan dan pasar modal tradisional.

Produk keuangan syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sukuk dirancang tanpa unsur riba, gharar, maupun maisir. Strategi pemasaran produk syariah menitikberatkan pada nilai keadilan, transparansi, serta

spiritualitas transaksi (Hassan et al., 2021). Oleh karena itu, komunikasi produk syariah umumnya menggunakan pendekatan nilai (value-based marketing) yang relevan bagi segmen Muslim.

Produk digital merupakan hasil dari revolusi teknologi informasi dan transformasi digital di sektor jasa keuangan. Jenis produk ini mencakup layanan mobile banking, dompet elektronik, peer-to-peer lending, robo-advisor, dan insurtech. Karakteristik produk digital antara lain kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta integrasi dengan perangkat mobile. Strategi pemasarannya mengandalkan pendekatan Marketing 5.0 yang memadukan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan automasi dalam menyasar konsumen digital (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021).

Produk keuangan alternatif merupakan bentuk inovasi yang menjawab kebutuhan akan diversifikasi investasi, pendanaan non-konvensional, serta instrumen keberlanjutan. Contohnya termasuk kriptoaset, green bond, social impact investment, dan equity crowdfunding. Pemasaran produk ini memerlukan literasi teknologi dan keuangan yang tinggi dari konsumen, serta pendekatan komunikasi risiko dan keberlanjutan yang kuat (OECD, 2022; World Bank, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi publik dalam strategi pemasaran produk keuangan baru.

Perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis produk memerlukan strategi pemasaran yang kontekstual dan berbasis pada segmentasi pasar. Konsumen dengan tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih menerima produk keuangan digital, sedangkan konsumen dengan orientasi etika lebih memilih produk syariah (Alam & Rizvi, 2017). Oleh karena itu, pemetaan pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku menjadi langkah awal dalam merancang kampanye pemasaran yang efektif dan tepat sasaran.

Strategi pemasaran juga dapat memanfaatkan model Customer Path 4A yang mencakup tahapan *Aware*, *Appeal*, *Ask*, dan *Act*. Model ini menekankan pentingnya menarik perhatian konsumen, membangun ketertarikan, menyediakan informasi yang dibutuhkan, hingga mendorong tindakan pembelian atau pemanfaatan produk (Kotler et al., 2021). Dalam konteks produk keuangan, strategi ini bisa diterapkan melalui media digital, kampanye edukatif, serta layanan pelanggan berbasis teknologi.

Dengan demikian, pengembangan strategi pemasaran untuk produk keuangan harus adaptif terhadap perubahan lanskap pasar dan teknologi. Lembaga keuangan harus mampu merancang strategi yang sesuai dengan klasifikasi produk yang ditawarkan, mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai (*value-driven*), dan memanfaatkan teknologi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen (Hassan et al., 2021; Kotler et al., 2021). Integrasi antara teknologi, etika, dan preferensi konsumen menjadi kunci utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif di sektor keuangan modern.

1. Strategi Pemasaran Produk Keuangan Konvensional

Produk konvensional seperti tabungan, kredit, investasi, dan asuransi dipasarkan dengan pendekatan utilitarian dan *digital-first*. Tabungan dan deposito dipromosikan melalui *mobile banking*, insentif hadiah, dan bunga kompetitif. Kredit konsumtif seperti KPR dan KTA dijual lewat kemitraan strategis dengan *developer* atau *dealer*. Asuransi konvensional mengandalkan kampanye emosional seperti "perlindungan keluarga tercinta".

Dalam kerangka Pemasaran 5.0, promosi dilakukan secara omnichannel dengan penggunaan AI untuk prediksi perilaku konsumen dan segmentasi yang presisi. Sementara itu, Teori 4A diterapkan melalui simplifikasi proses (*accessibility*), diskon biaya (*affordability*), serta *storytelling*

untuk membangun awareness dan acceptability (Sari & Prasetyo, 2021).

Penulis berpendapat, pemasaran konvensional harus mulai bergeser dari eksploitasi emosi semata ke arah pemasaran berbasis nilai dan transparansi.

2. Strategi Pemasaran Produk Keuangan Syariah

Produk syariah mengusung nilai-nilai bebas riba, gharar, dan maysir. Produk seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, sukuk, saham syariah, dan takaful membutuhkan pendekatan pemasaran yang religius, edukatif, dan komunitarian.

Penerapan Pemasaran 5.0 dalam konteks ini misalnya penggunaan chatbot syariah, fitur kalkulator zakat di aplikasi, dan konten media sosial bertema hijrah atau keberkahan. Sementara itu, elemen 4A hadir dalam bentuk akses produk via masjid digital (accessibility), desain akad yang sederhana (affordability), kampanye bebas riba (acceptability), dan edukasi halal finance (awareness) (Afiff & Mulyani, 2021).

Menurut penulis, kekuatan utama pemasaran syariah bukan hanya pada produk halal, tetapi pada kemampuan membentuk ekosistem spiritual digital.

3. Strategi Pemasaran Produk Keuangan Digital dan Inovatif

Fintech, e-wallet, BNPL, P2P lending, hingga crypto syariah menjadi wajah baru keuangan digital. E-wallet seperti DANA dan OVO menggunakan referral, cashback, dan gamifikasi. Neo banking seperti Jago dan Bank Aladin mengedepankan lifestyle finance dengan UX modern. Crowdfunding halal seperti KapitalBoost mengusung cerita sosial.

Pemasaran 5.0 mendukung segmentasi pengguna dengan data real-time dan kampanye mikro via AI. Teori 4A diterapkan dengan pembuatan aplikasi ringan (accessibility), sistem fee transparan (affordability), konten edukatif (awareness), dan sertifikasi halal (acceptability) (Rahmawati, 2024).

Fintech syariah harus menyeimbangkan antara inovasi dan integritas nilai agar tidak terjebak pada gimmick teknologi semata.

4. Strategi Pemasaran Produk Pasar Modal dan Derivatif

Produk pasar modal seperti saham, obligasi, sukuk, ETF, dan derivatif memiliki kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, strategi pemasarannya harus edukatif dan transparan. Kampanye dilakukan lewat e-learning, webinar, TikTok edukatif, dan influencer finansial.

Dengan Pemasaran 5.0, platform investasi seperti Bibit atau Ajaib memanfaatkan machine learning untuk personalisasi portofolio. Dalam kerangka 4A, platform membuat simulasi investasi (accessibility), akun gratis (affordability), serta narasi investasi halal dan hijau (acceptability dan awareness) (Wibowo & Hartati, 2020).

Menurut penulis, pasar modal akan semakin diminati generasi muda bila pendekatan pemasarannya menekankan narasi dampak dan nilai bukan sekadar return.

5. Strategi Pemasaran Produk Keuangan Pemerintah dan Ritel

Produk seperti ORI, SBR, dan Sukuk Ritel dipasarkan lewat platform digital pemerintah dan bank mitra. Kampanye mengangkat isu nasionalisme, pembangunan hijau, dan insentif pajak.

Pemasaran 5.0 diterapkan melalui dashboard digital transparan dan fitur auto-debit. Teori 4A tampak dari minimum investasi rendah (affordability), ketersediaan luas (accessibility), branding patriotik (acceptability), dan edukasi lewat webinar (awareness) (Ma'ruf, 2022).

Penulis menilai bahwa digitalisasi produk pemerintah membuka peluang perluasan pasar ke kalangan milenial dan pesantren digital.

6. Strategi Pemasaran Produk Keuangan Berbasis Komunitas dan Alternatif

Produk seperti zakat online, koperasi digital, tabungan emas, dan arisan syariah kini menjangkau pasar luas lewat komunitas. Aplikasi seperti e-zakat dan LinkAja Syariah menggunakan gamifikasi, laporan realtime, dan fitur sosial.

Penerapan Pemasaran 5.0 terwujud lewat integrasi platform komunitas dan media sosial dakwah. Teori 4A dihadirkan melalui biaya rendah (affordability), digitalisasi proses (accessibility), tema solidaritas (acceptability), dan kampanye Ramadan (awareness) (Fitrani, 2021).

Strategi komunitas adalah bentuk paling kuat dari pemasaran syariah karena menggabungkan nilai spiritual dan jejaring sosial.

7. Strategi Pemasaran Produk Berbasis ESG dan Keuangan Berkelanjutan

Produk hijau seperti green bond, sukuk hijau, dan ESG fund dipasarkan melalui cerita dampak, transparansi proyek, dan kerja sama dengan NGO. Pemasaran menyasar investor muda dan institusi dengan sensitivitas lingkungan.

Pemasaran 5.0 memungkinkan pelaporan ESG otomatis dan storytelling berbasis data. Teori 4A hadir melalui minimum investasi yang rendah (affordability), platform

digital (accessibility), cerita proyek (acceptability), dan transparansi media (awareness) (Yusran, 2021). Penulis menyimpulkan bahwa pemasaran berbasis ESG adalah masa depan industri keuangan karena menyatukan profit dan tanggung jawab semesta.

Strategi pemasaran produk keuangan berkelanjutan, baik konvensional maupun syariah, harus bertransformasi menyambut era digital yang berorientasi pada nilai dan teknologi. Pemasaran 5.0 dan Teori 4A menjadi fondasi konseptual yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan tantangan global. Teknologi menjadi alat untuk membumikan nilai spiritual dan etika bisnis. Seluruh strategi yang berhasil adalah strategi yang mampu membangun kesadaran, akses, keterjangkauan, dan penerimaan yang mendalam. Keberhasilan pemasaran produk keuangan masa depan diukur bukan dari volume transaksi semata, tetapi dari perubahan perilaku, penguatan nilai, dan keberpihakan pada umat dan bumi.

BAB 10 | Strategi Branding Berbasis Keberlanjutan

Faozan Amar

Salah satu persoalan utama yang dihadapi manusia modern adalah keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya tersebut bisa menjadi langka karena penggunaannya yang berlebihan dan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Selain itu, kerusakan lingkungan juga bisa terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebabkan banjir atau tanah longsor. Situasi ini memunculkan kesadaran di kalangan konsumen sebagai pengguna akhir mengenai pentingnya memilih produk barang dan jasa yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah menjaga kelestarian alam tanpa mengabaikan kebutuhan konsumsi yang diperlukan.

Kesadaran tersebut mendorong Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), baik dalam skala kecil maupun besar, untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam proses produksi. Di tengah iklim bisnis yang semakin dinamis, kompleks, dan penuh persaingan, pelaku usaha dituntut untuk melakukan transformasi guna menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jika produk yang ditawarkan tidak ramah lingkungan atau tidak memiliki keunggulan bersaing, maka kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh konsumen.

Selain itu, pemerintah juga terus menggalakkan kampanye pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sejumlah peraturan disertai implementasi dan sanksi telah diberlakukan. Contohnya termasuk larangan penggunaan kantong plastik di toko-toko ritel, pelarangan penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan, serta pembatasan penggunaan botol plastik.

Sampah plastik sekali pakai sering kali diabaikan, padahal dampaknya sangat merugikan lingkungan dan kesehatan. Jenis limbah plastik yang sering dijumpai antara lain kantong plastik, popok bayi, pembalut sekali pakai, styrofoam, dan sedotan plastik

dan kemasan sachet termasuk dalam kategori limbah yang sulit terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menginisiasi kampanye "Ban the Big Five (5)" di berbagai tingkat satuan pendidikan. Kampanye ini bertujuan menghapus penggunaan lima jenis produk berbahan dasar plastik tersebut (aliansizerowaste.id, 16 Agustus 2021).

Upaya tersebut sejalan dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992. Konferensi tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam konferensi tersebut menyoroti dua gagasan utama. Pertama, pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup. Kedua, adanya batasan terhadap kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, baik untuk masa kini maupun masa depan. Konferensi ini juga menjadi momen penting dalam menegaskan peran bisnis dan industri dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Program Lingkungan PBB, Bisnis Berkelanjutan, 1998).

Lalu, bagaimana strategi yang bisa dijalankan oleh perusahaan agar brand yang dikembangkan tetap relevan dan tumbuh dalam konteks keberlanjutan? Tulisan ini akan mencoba memberikan penjelasan singkat.

A. Memahami Makna Strategi, Branding, Manajemen Strategi, dan Keberlanjutan

1. Strategi

Secara etimologis, istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia*, yang terdiri dari *stratos* (militer) dan *ag* (memimpin), yang berarti seni atau ilmu dalam kepemimpinan militer. Menurut Tjiptono (2008), strategi dapat diartikan sebagai rencana dalam pengalokasian dan penggunaan kekuatan militer dan sumber daya material di area tertentu untuk mencapai tujuan spesifik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 2007, strategi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Ilmu dan seni dalam menggunakan seluruh sumber daya bangsa untuk menjalankan kebijakan tertentu dalam kondisi perang atau damai.
- b. Ilmu dan seni dalam memimpin pasukan dalam peperangan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Rencana yang dirancang secara cermat guna mencapai tujuan tertentu.
- d. Lokasi strategis yang menguntungkan dalam konteks peperangan.

Secara istilah, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengarahan aktivitas bisnis berskala besar dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya perusahaan demi mencapai keunggulan kompetitif yang nyata. John A. Bryne (dikutip oleh Ali Hasan, 2010) menjelaskan strategi sebagai pola dasar dari tujuan yang telah direncanakan, distribusi sumber daya, dan interaksi organisasi dengan pasar, kompetitor, serta faktor lingkungan lainnya. David (2004) menambahkan bahwa strategi adalah rencana terpadu dan menyeluruh yang mengaitkan

keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan eksternal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa target utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.

Keberhasilan suatu organisasi bisnis dapat diukur dari daya saing strategis dan tingkat profitabilitasnya, yang sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan kompetensi inti lebih cepat dibandingkan pesaingnya dalam meniru keunggulan yang dimiliki (Mitchel dkk., 1997). Throuth, sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan (2008), mengemukakan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana suatu bisnis mampu bertahan dalam kompetisi yang kian sengit. Strategi mencakup upaya membangun persepsi positif di benak konsumen, menciptakan diferensiasi, memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialis dalam bidang tertentu, menguasai satu kata kunci dalam pikiran konsumen, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu memberikan arah dan memahami dinamika pasar, menjadi yang pertama, lalu menjadi yang terbaik.

Dengan demikian, strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana terstruktur dan sistematis yang dirancang oleh manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen strategi yang akurat, tepat, dan efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

2. Manajemen Strategi

Beragam pandangan dari para ahli telah dikemukakan mengenai konsep manajemen strategi. David (2015) menyatakan bahwa manajemen strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, manajemen strategi berperan penting dalam menyatukan berbagai elemen organisasi seperti sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, produksi, riset dan pengembangan, serta sistem informasi dan teknologi guna meraih keberhasilan organisasi secara menyeluruh.

Sementara itu, Fred R. David (2011) juga mendefinisikan manajemen strategi sebagai seni dan ilmu dalam menyusun, menerapkan, dan menilai keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, Yunus (2016) menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan sebuah sistem terpadu yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bergerak secara serempak ke arah yang sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika sebuah perusahaan ingin bertahan dan unggul dalam persaingan bisnis, maka ia harus memiliki sistem manajemen strategi yang kuat, terintegrasi, dan bergerak secara kolektif menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari manajemen strategi adalah untuk membantu organisasi dalam meraih tujuan jangka panjangnya, meningkatkan kinerja secara optimal, dan memperkuat daya saing di pasar. Seluruh proses ini bersifat berkelanjutan dan membutuhkan

pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian yang konstan terhadap perubahan lingkungan eksternal.

3. Branding

Branding merupakan aktivitas membangun, menyampaikan, dan memperkuat eksistensi sebuah merek. Proses ini tidak hanya berfokus pada upaya menciptakan merek yang menarik di mata konsumen, tetapi juga melibatkan serangkaian tahapan mulai dari input, proses, hingga output. Menurut Khairunnisa et al. (2018) dan Yolanda et al. (2019), keberhasilan dalam membangun sebuah merek dapat menjadi faktor kunci dalam meraih kesuksesan bisnis. Merek mencerminkan identitas perusahaan dan berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Dengan kata lain, branding produk merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen. Seperti halnya istilah brand, makna dari branding dapat berbeda tergantung dari sudut pandang penggunaannya. Secara umum, branding dipahami sebagai aktivitas yang mencakup promosi, periklanan, dan publikasi. Kehadiran merek membantu konsumen dalam membedakan dan memilih produk barang atau jasa yang ingin digunakan.

Di era saat ini, branding dianggap sebagai elemen penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran sebuah merek. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pilihan produk atau merek yang ditawarkan di pasar, sehingga konsumen sering kali menghadapi kebingungan dalam menentukan pilihan. Dalam situasi tersebut, merek berfungsi sebagai panduan cepat dalam proses pengambilan keputusan konsumen (Dumitriu et al., 2021). Perusahaan yang

konsisten menerapkan konsep produksi hijau dan mengembangkan merek yang berwawasan lingkungan akan membangun persepsi positif terhadap brand mereka, sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan (Purba et al., 2021).

Menurut pandangan Wood (2000), yang dikutip oleh Susanti et al. (2018), branding merupakan salah satu elemen krusial dalam pencapaian kesuksesan organisasi. Sebuah merek mampu memengaruhi perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan produk tertentu, serta memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, Aaker (1991) memberikan panduan tentang strategi merek dan pentingnya brand dalam proses pengembangan serta penguatan posisi perusahaan di pasar.

Brand memiliki peran penting dalam membangun loyalitas konsumen sekaligus menciptakan efisiensi dalam kegiatan internal perusahaan. Merek mampu memberikan diferensiasi yang jelas bagi pelanggan, serta membantu perusahaan dalam mengurangi biaya pemasaran dan operasional bisnis secara keseluruhan (Susanti et al., 2018).

Menurut Kotler (2000), sebagaimana dikutip oleh Nastain (2017) dan Adia (2019), brand adalah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semua unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan produk barang atau jasa yang dimiliki oleh individu atau kelompok dari para pesaingnya. Brand berperan sebagai penghubung emosional yang kuat antara produsen dan konsumen, sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan strategis, dan sebagai kekuatan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan kekuatan brand, loyalitas

pelanggan dapat terbangun, sehingga mendukung keberhasilan bisnis, meningkatkan ketahanan perusahaan, serta menjadikan produk lebih kompetitif di pasar. Brand, dengan segala keunggulan dan kekurangannya, memiliki beragam makna dan fungsi tergantung pada tujuan penggunaannya.

Dalam konteks ini, MarkPlus Institute of Marketing (2009) mengidentifikasi enam tingkatan brand, yaitu:

a. Atribut

Merek seharusnya dapat mengasosiasikan atribut atau karakteristik tertentu yang melekat pada produk tersebut, sehingga mudah dikenali oleh konsumen.

b. Manfaat

Merek tidak hanya mencerminkan serangkaian atribut, tetapi juga harus menawarkan manfaat yang dicari konsumen. Pelanggan yang setia biasanya membeli tidak hanya karena spesifikasi produk, melainkan karena manfaat fungsional seperti daya tahan atau manfaat emosional seperti rasa bangga. Oleh karena itu, sebuah brand yang kuat bukan hanya mampu menjelaskan produk dengan jelas kepada konsumen, tetapi juga harus dibangun melalui konsistensi kualitas dan keunggulan produk. Saat membeli suatu produk, baik barang maupun jasa, konsumen tidak hanya mempertimbangkan nama mereknya, tetapi juga fungsi dan kualitas nyata dari produk tersebut.

c. Nilai

Merek juga harus mampu menyampaikan nilai yang positif bagi produsen. Nilai ini biasanya diwujudkan dalam bentuk sederhana, namun mampu mencerminkan keseluruhan makna dan esensi dari produk tersebut. Sebagai ilustrasi, seorang konsumen yang menggunakan gadget terbaru biasanya ingin menunjukkan jati dirinya sebagai individu yang peduli terhadap teknologi, mengikuti perkembangan zaman, serta ingin membangun citra prestisius melalui produk yang digunakannya.

d. Budaya

Sebuah merek juga dapat merepresentasikan budaya dari suatu negara atau komunitas tertentu. Sebagai contoh, brand Mercedes-Benz mencerminkan budaya efisiensi dan kualitas tinggi khas Jerman. Sementara itu, merek Honda mencerminkan inovasi teknologi dan visi masa depan yang kuat dari Jepang.

Produk-produk yang berasal dari negara dengan budaya kerja tinggi, disiplin yang kuat, serta komitmen terhadap kualitas, umumnya lebih dipercaya oleh konsumen dibandingkan dengan produk dari negara yang tingkat budaya dan kualitas produksinya lebih rendah.

e. Kepribadian

Brand juga mampu membentuk serta mencerminkan kepribadian penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari status sosial, kondisi ekonomi, hingga tingkat pendidikan konsumen. Dengan kata lain, merek dapat menjadi

cerminan identitas pengguna dalam berbagai aspek kehidupan.

f. Pemakai

Brand memberikan kesan terhadap pengguna yang dapat bersifat positif atau negatif, tergantung dari pengalaman mereka dalam menggunakan produk. Pengalaman ini menjadi faktor penting karena dianggap sebagai guru terbaik. Produk dengan kualitas tinggi akan menciptakan kesan positif dan mendorong loyalitas pelanggan. Sebaliknya, kualitas yang buruk dapat menimbulkan pengalaman negatif yang merugikan citra merek (Nastain, 2017).

Dengan demikian, sebuah merek yang unggul harus didukung oleh strategi branding yang solid, melalui proses manajemen yang menyeluruh—meliputi produksi, distribusi, hingga pemasaran—yang dilaksanakan secara profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual brand di mata konsumen sebagai pengguna barang atau jasa dari merek tersebut.

4. Berkelanjutan

Istilah berkelanjutan (sustainable) telah memiliki berbagai definisi tergantung dari sudut pandangnya. Dalam dunia bisnis, konsep keberlanjutan sering diterapkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pendekatan pemasaran berkelanjutan. Terlepas dari beragamnya definisi dan aplikasinya, Elliot (2012) serta Gupta dan Vegelin (2016), sebagaimana dikutip oleh Ahidin (2019), menegaskan bahwa keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini dapat digambarkan sebagai pilar-pilar pembangunan,

lingkaran konsentris, atau sistem yang saling berinteraksi satu sama lain.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat modern terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat dalam setiap aspek kehidupan, muncul pendekatan yang dikenal sebagai pemasaran berkelanjutan. Menurut Nurtjahjadi (2014), pemasaran berkelanjutan merupakan tahap evolusi lanjutan dari pemasaran konvensional menuju pendekatan yang lebih ekologis dan berwawasan lingkungan.

Konsep ini menjadi semakin strategis dan penting, karena keberlanjutan perusahaan sangat terkait dengan arah pembangunan yang juga berkelanjutan. Hunt (2011) menekankan bahwa filosofi di balik pemasaran berkelanjutan harus menjadi dasar bagi seluruh aktivitas ekonomi dalam pasar modern, termasuk bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, otoritas daerah, dan lembaga lokal lainnya.

Dalam pandangan Alhaddi (2016), pemasaran berkelanjutan didasarkan pada kerangka triple bottom line dalam pembangunan berkelanjutan, yang mencakup tiga elemen utama: aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Ketiganya memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pemasaran berkelanjutan juga berperan dalam memperkuat keberlangsungan ekonomi dengan membangun reputasi positif perusahaan melalui solusi bisnis yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rachmawati et al. (2024) menjelaskan bahwa green brand image atau citra merek yang ramah lingkungan mengacu pada praktik

mempromosikan dan memasarkan produk atau merek yang dikenal berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan menerapkan strategi branding ramah lingkungan untuk menyelaraskan citra perusahaan dengan nilai-nilai yang mencakup pelestarian alam, etika, dan tanggung jawab sosial korporat. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan hanya untuk menciptakan diferensiasi di pasar, tetapi juga untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan dan lebih memilih produk yang mendukung keberlanjutan.

Keberlanjutan sosial dapat ditingkatkan melalui upaya edukatif kepada konsumen mengenai cara menyelesaikan berbagai isu penting dan strategis dengan dukungan pendekatan pemasaran berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi salah satu kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak positif lain dari penerapan pemasaran berkelanjutan tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian maupun industri lainnya, serta bertambahnya pendapatan perusahaan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan melalui layanan berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas, mampu mendorong penggunaan produk yang lebih sehat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan taraf hidup konsumen, pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan harapan hidup masyarakat.

Lingkungan yang terjaga kelestariannya turut mendorong konsumen untuk menjadi pengguna produk dan jasa yang berorientasi pada

keberlanjutan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan produk-produk ramah lingkungan yang memberikan nilai tambah, baik dari sisi kesehatan maupun pelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Kesadaran terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnis telah mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan model pemasaran yang lebih bertanggung jawab, yakni pemasaran berkelanjutan (*sustainable marketing*). Menurut Kotler dan Keller (2016), pemasaran berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya mengejar kepuasan konsumen dan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan pemasaran dalam jangka panjang.

Pemasaran berkelanjutan merupakan tahap lanjutan dari proses evaluasi pemasaran yang berlandaskan pada prinsip ekologi, lingkungan hidup, dan konsep kehijauan (Ahidin, 2019). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan nilai tambah bagi konsumen, tetapi juga bagi seluruh ekosistem bisnis, termasuk masyarakat dan lingkungan sebagai bagian integralnya. Salah satu elemen penting dalam praktik pemasaran berkelanjutan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya alam dan energi secara efisien, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.

Pemasaran berkelanjutan tidak sebatas pada produk yang ramah lingkungan, tetapi juga mencakup praktik komunikasi yang jujur, terbuka, dan beretika dengan konsumen (Peattie, 2001). Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini berpotensi untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar, mengingat semakin banyak konsumen yang

cenderung memilih merek yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Perusahaan yang mampu mengurangi dampak ekologis dari operasionalnya, misalnya melalui penerapan teknologi produksi ramah lingkungan, akan memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Strategi pemasaran berkelanjutan tidak hanya memperkuat citra perusahaan, tetapi juga mendukung terbentuknya nilai bisnis jangka panjang yang lebih stabil.

Penerapan pemasaran berkelanjutan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, baik melalui kegiatan operasional sehari-hari yang mengurangi dampak negatif langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan, maupun melalui kebijakan, program, dan strategi baru yang mendukung visi jangka panjang tentang pertumbuhan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem bisnis dan ekonomi yang menguntungkan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk barang dan jasa serta harga yang kompetitif, melainkan juga oleh sejauh mana produk tersebut ramah lingkungan dan didukung oleh strategi pemasaran yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beragam penelitian terkait strategi branding berbasis keberlanjutan telah menunjukkan pentingnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk dan aktivitas pemasaran yang mendukung keberlanjutan. Penelitian oleh Dwi Rachmawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa

keberhasilan kinerja pemasaran yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan green branding. Artinya, efektivitas green branding dalam meningkatkan kinerja pemasaran diperkuat oleh keberlanjutan usaha yang berkelanjutan sebagai faktor mediasi. Oleh karena itu, implementasi green branding yang optimal dapat mendongkrak kinerja pemasaran khususnya dalam industri fashion, di mana keberlanjutan menjadi elemen penting yang memperkuat hubungan tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukmono dan Jalinas (2024) menunjukkan bahwa strategi branding yang mengintegrasikan budaya lokal dan keberlanjutan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai pasar. Branding berbasis budaya lokal tercatat memberikan dampak paling besar dengan kontribusi hingga 25% terhadap peningkatan nilai pasar, sementara strategi diskon harga hanya memberikan dampak sekitar 5%. Temuan ini menegaskan bahwa strategi branding yang modern memiliki keunggulan lebih tinggi dibandingkan metode pemasaran tradisional dalam meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen.

Branding yang dirancang secara efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, melainkan juga merupakan komponen strategis dalam membangun keunggulan kompetitif, terutama di tengah pasar yang semakin kompetitif. Penekanan pada elemen budaya lokal dan keberlanjutan terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepercayaan konsumen, keterlibatan emosional, serta loyalitas terhadap merek.

Selain itu, meskipun pasar makanan di Indonesia dikenal sangat sensitif terhadap harga, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi branding yang dirancang secara tepat tetap mampu membentuk persepsi nilai produk secara signifikan, bahkan melampaui dampak dari strategi pemotongan harga. Hasil ini memperkuat argumen bahwa

pendekatan branding yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman lebih efektif dibandingkan pendekatan pemasaran tradisional, serta memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai pasar suatu produk atau layanan.

Strategi yang mengedepankan aspek keberlanjutan telah terbukti mampu meningkatkan nilai pasar hingga 20%, yang mengindikasikan bahwa konsumen kini semakin memperhatikan isu-isu lingkungan dan sosial. Pendekatan ini juga memberikan citra positif terhadap merek, khususnya di mata konsumen yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dampak lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. (2024) menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang melibatkan masyarakat secara langsung lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif mereka dalam mempromosikan produk-produk lokal dan potensi wisata daerah. Dengan menjalin keterlibatan masyarakat, merek lokal dapat meningkatkan kesadaran, penghargaan, serta partisipasi dari berbagai pihak, baik masyarakat setempat maupun wisatawan domestik dan mancanegara. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam menjalankan strategi branding yang berorientasi pada keberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan komunitas setempat.

Sementara itu, penelitian oleh Septia Wahyu Elda et al. (2024) menyimpulkan bahwa strategi branding pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di Geosite Tabiang Takuruang berhasil meningkatkan citra destinasi dan daya tarik wisata yang dimilikinya. Wisatawan memberikan apresiasi terhadap keunikan alam dan budaya yang ada di kawasan tersebut. Pendekatan eksploratif terhadap kekayaan alam terbukti efektif dalam membangun identitas destinasi, memperlihatkan keindahan geologi dan ekologi

kawasan tersebut, serta menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman wisata yang autentik dan berbeda.

Penelitian oleh Aryntika Cahyantini (2024) menunjukkan bahwa branding Green Agriculture merupakan strategi yang efektif dalam menambah nilai produk serta meningkatkan pendapatan petani di Kota Batu. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas produk, efektivitas pelaksanaan strategi pemasaran, konsistensi penerapan prinsip pertanian ramah lingkungan, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Penerapan branding Green Agriculture di Kota Batu menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengoptimalkan manfaat dari strategi ini, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, penyelenggaraan program edukasi yang memadai bagi petani, serta peningkatan akses terhadap pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa melalui strategi yang terarah dan konsisten, Green Agriculture dapat berfungsi sebagai katalis dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan yang berdampak positif secara ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Damayanti (2025) menunjukkan bahwa PT. Sun Power Ceramics berhasil mengintegrasikan teknologi big data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta sistem otomasi dalam aktivitas pemasaran untuk menciptakan kampanye yang lebih efektif dan mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Prinsip keberlanjutan diterapkan secara menyeluruh di sepanjang rantai pasokan, termasuk melalui pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan upaya memperkuat reputasi perusahaan di pasar internasional.

Meski demikian, perusahaan menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan dalam infrastruktur digital, adanya resistensi terhadap perubahan dalam budaya kerja, serta keterbatasan alokasi anggaran untuk teknologi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, PT. Sun Power Ceramics telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, seperti peningkatan infrastruktur digital, program pelatihan bagi sumber daya manusia, serta peningkatan signifikan dalam pembiayaan teknologi. Meskipun masih terdapat kendala, komitmen perusahaan terhadap penerapan pemasaran berkelanjutan berbasis digital terlihat jelas, dan diharapkan mampu terus meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi branding berkelanjutan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penjualan produk dan jasa. Namun, dalam implementasinya, perusahaan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup resistensi karyawan terhadap transformasi digital, keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya mendukung. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi perubahan kebijakan pemerintah, tingkat persaingan pasar yang semakin tinggi, serta perubahan preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan yang terus berkembang (Damayanti, 2025).

C. Memahami Pentingnya Branding Berbasis Keberlanjutan

Terdapat sejumlah alasan strategis yang perlu dipahami oleh perusahaan dalam menerapkan branding berkelanjutan.

Pertama, menarik minat konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Saat ini, semakin banyak

konsumen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih produk dan layanan, dengan preferensi terhadap barang dan jasa yang dinilai ramah lingkungan. Kondisi ini memberikan peluang positif bagi perusahaan yang telah mengadopsi praktik keberlanjutan.

Kedua, memperkuat citra perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan perlu menjaga dan membangun citra positif agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan operasional bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan dan menghasilkan produk serta layanan yang berkelanjutan. Jika aspek ini diabaikan, perusahaan berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan sosial. Sebagai contoh, penutupan operasional yang dialami oleh PT. Sumber Daya Steel dan PT. Asia Logam Perkasa di kawasan Pasar Kemis, Tangerang (Kompas.com, 3/3/2025), akibat pencemaran lingkungan dan adanya penolakan dari masyarakat sekitar.

Ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa puas dengan produk dan layanan akan cenderung menjadi pelanggan setia. Mereka secara sukarela akan merekomendasikan produk atau jasa yang mereka gunakan kepada orang lain apabila merasakan manfaat yang signifikan. Hal yang sama berlaku sebaliknya jika pengalaman mereka negatif. Oleh karena itu, membentuk loyalitas pelanggan merupakan proses jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang, pelaksanaan yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Loyalitas pelanggan akan menjadi salah satu pilar kekuatan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya di pasar.

Keempat, menempatkan merek sebagai pemimpin dalam hal keberlanjutan. Merek yang memiliki kualitas unggul akan tertanam dalam benak konsumen dan diwariskan antar generasi sebagai sesuatu yang

membanggakan. Konsumen adalah elemen penting dalam menentukan keberlangsungan bisnis. Ketika sebuah merek sudah dicintai dan dipercaya oleh konsumennya, maka merek tersebut memiliki potensi untuk menjadi pemimpin pasar. Sebagai ilustrasi, di beberapa daerah pedesaan, istilah "sepeda motor" sering kali identik dengan "Honda", meskipun Honda hanyalah salah satu dari sekian banyak merek sepeda motor. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan brand dapat mengukuhkan posisi dominannya di pasar.

Kelima, menarik talenta terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, banyak lulusan yang tertarik untuk bekerja di perusahaan yang memiliki reputasi dan brand yang kuat. Misalnya, lulusan Sarjana Ekonomi (SE) cenderung memilih karier di sektor perbankan seperti BRI dan BCA, atau di perusahaan asuransi seperti Jiwasraya dan Prudential. Reputasi merek yang telah tertanam di benak masyarakat menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai tempat yang diidamkan untuk membangun karier, sehingga mereka mampu menarik minat lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi.

1. Aspek-Aspek Branding Berbasis Keberlanjutan

Agar perusahaan dapat menerapkan branding berbasis keberlanjutan secara optimal, terdapat sejumlah aspek penting yang harus dipahami dan dipenuhi, yaitu:

a. Produk.

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar dengan tujuan menarik perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen (Kotler & Armstrong, 2001). Untuk menjadikan produk berorientasi pada keberlanjutan, bahan baku yang digunakan harus ramah lingkungan, dapat meminimalkan

limbah, dan dirancang agar memiliki daya tahan yang tinggi. Dengan demikian, manfaat produk tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan.

b. Layanan Berkualitas.

Layanan adalah aktivitas yang disediakan oleh produsen kepada konsumen dengan tujuan memberikan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan barang yang dihasilkan melalui proses produksi, layanan dihasilkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta didukung oleh kompetensi penyedia layanan (Ellitan & Lina Anatan, 2007).

Dalam konteks branding berbasis keberlanjutan, layanan yang diberikan harus bersifat ramah lingkungan untuk membangun loyalitas pelanggan. Di samping itu, perusahaan juga perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga keberadaan perusahaan turut memberikan dampak positif bagi komunitas di sekitarnya.

c. Komunikasi.

Komunikasi merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia yang memungkinkan terjadinya interaksi di berbagai lingkungan, baik di rumah, tempat kerja, pasar, maupun masyarakat luas. Tanpa keterlibatan manusia, komunikasi tidak akan terjadi.

Mengingat pentingnya peran komunikasi, branding yang berfokus pada keberlanjutan harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai komitmen dan praktik keberlanjutan

perusahaan kepada konsumen. Komunikasi yang jujur dan transparan ini akan memperkuat pemahaman konsumen, meningkatkan kepercayaan, serta mendorong loyalitas terhadap merek.

d. Pemasaran.

Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2005). Inti dari pemasaran adalah bagaimana perusahaan menawarkan produk atau jasa kepada konsumen, serta bagaimana mereka melayani pelanggan dengan cara yang efektif dan etis.

Dalam praktik branding berkelanjutan, perusahaan harus memasarkan produk atau layanan yang ramah lingkungan, disertai strategi pemasaran yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar eksistensi perusahaan di pasar tidak hanya diakui karena produk yang dihasilkan, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan.

Strategi branding berbasis keberlanjutan mengharuskan perusahaan untuk memasarkan produk barang atau jasa yang ramah lingkungan melalui pendekatan pemasaran yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan cara ini, eksistensi perusahaan dapat terjaga dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profitabilitas secara bisnis maupun ekonomi.

Beberapa perusahaan global telah sukses menerapkan strategi branding berkelanjutan. Pertama, Patagonia, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang ritel pakaian, peralatan, dan makanan untuk aktivitas luar ruang (www.patagonia.com). Dalam operasionalnya, Patagonia menetapkan standar tinggi dalam inovasi berbasis keberlanjutan, seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan peluncuran inisiatif "Worn Wear" (Pakaian Bekas). Selain itu, Patagonia juga aktif mendukung gerakan pelestarian alam, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, serta menentang proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Dengan demikian, peran Patagonia tidak hanya terbatas pada produsen pakaian, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang peduli terhadap isu-isu ekologis dan sosial.

Kedua, Unilever, perusahaan multinasional yang beroperasi dengan fondasi berbasis purpose atau tujuan sosial yang luhur. Selama lebih dari 87 tahun berkiprah, Unilever konsisten dengan misinya untuk menjadikan gaya hidup berkelanjutan sebagai bagian yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari, Unilever berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih baik melalui produk-produknya serta melalui kampanye sosial yang diluncurkan (www.unilever.co.id).

Dalam praktik operasionalnya, Unilever menerapkan keberlanjutan ke dalam berbagai merek yang dimilikinya melalui inisiatif bertajuk "Hidup Berkelanjutan". Melalui program ini, strategi branding berbasis keberlanjutan diimplementasikan secara konsisten, yang menjadikan perusahaan tetap eksis sejak mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1933. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir

menghadapi tekanan boikot karena dugaan dukungan terhadap entitas yang terlibat dalam konflik kemanusiaan (misalnya, tuduhan keterlibatan dalam mendukung Zionisme Israel terkait genosida di Palestina), merek-merek andalan Unilever seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan Rinso tetap kuat dan dikenal luas di kalangan konsumen Indonesia.

Ketiga, Pertamina, yakni perusahaan yang mengelola kebutuhan minyak, gas, dan energi milik negara dan telah berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai perusahaan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial. Pertamina telah berinisiatif ikut untuk mendorong kontribusi energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 17% di tahun 2030 dan naik menjadi 23% di tahun 2050. Inisiatif ini disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memiliki target penurunan emisi 29% (MarkPlusInstitute.com). Beberapa merek yang dimiliki oleh Pertamina antara lain adalah Pertamina, Paltalite, Pertamina Lubricant, LPG, dan sebagainya.

2. Langkah-Langkah Membangun Branding Berbasis Keberlanjutan

Setelah perusahaan menetapkan strategi branding berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misinya, langkah selanjutnya menyusun langkah yang bersifat strategis dan taktis. Hal ini penting agar apa yang menjadi visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membentuk branding berkelanjutan adalah; Pertama, melakukan identifikasi nilai-nilai keberlanjutan yang sesuai dengan bisnis. Karena itu, harus memilih dan memilih diantara nilai-nilai yang ada, sehingga relevan dengan bisnis yang dimiliki.

Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai branding keberlanjutan ke dalam bisnis. Perusahaan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada mengontrol produk yang dihasilkan, layanan yang diberikan, dan proses bisnis yang dijalankan secara optimal.

Ketiga, mengkomunikasikan secara transparan, jelas dan jujur komitmen branding berbasis keberlanjutan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting agar diketahui publik, sekaligus perusahaan juga mendapatkan manfaat dengan adanya pengawasan dari konsumen. Sehingga bersama-sama ikut mengawal komitmen tersebut dengan baik dan benar.

Keempat, meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan secara terus menerus dengan disertai layanan yang berkualitas. Yakni dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan secara terus menerus disertai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Muaranya adalah perusahaan tetap eksis, pelanggan puas dan keuntungan perusahaan akan meningkat.

Dengan demikian, branding yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek "ramah lingkungan" semata, tetapi juga mencakup pembangunan merek yang memiliki tanggung jawab sosial, ekonomi, dan ekologis. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu mendorong terbentuknya loyalitas pelanggan, memperkuat citra positif merek, serta memberikan kontribusi terhadap masa depan perusahaan yang lebih berkelanjutan.

D. Manfaat Branding Berkelanjutan

Sebagai pelaku bisnis, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat potensi keuntungan dan kerugian dari setiap strategi yang diambil, termasuk dalam hal penerapan branding berbasis keberlanjutan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari pendekatan tersebut:

Pertama, menciptakan diferensiasi merek (brand differentiation). Artinya, perusahaan mampu mengidentifikasi serta mengkomunikasikan keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari produk kompetitor.

Kedua, membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Hubungan ini tidak hanya menciptakan dukungan langsung, tetapi juga mendorong konsumen untuk secara sukarela mempromosikan produk perusahaan melalui jaringan sosial yang mereka miliki.

Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini dilakukan melalui upaya membangun persepsi positif dan kepercayaan publik terhadap bisnis yang dijalankan. Proses ini berlangsung melalui langkah-langkah yang strategis, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Keempat, mendukung pencapaian nilai jangka panjang. Setiap perusahaan umumnya memiliki visi dan misi yang bersifat jangka panjang. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan implementasi program, kebijakan, dan strategi berkelanjutan yang tetap selaras dengan pertumbuhan bisnis yang menguntungkan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, manfaat branding berkelanjutan bagi perusahaan tidak hanya sekedar perusahaan mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga

eksistensi perusahaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sosial. Konsumen kini semakin sadar dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, sehingga merek yang menonjolkan inisiatif keberlanjutan atau program tanggungjawab sosial memiliki peluang lebih besar untuk diterima (Kapferer, 2012). Pendekatan ini bukan saja dapat menambah citra positif merek tetapi juga memberikan impek terhadap nilai pasar jangka panjang. Akhirnya, adaptasi teknologi dalam strategi branding juga berperan dalam menentukan keberhasilan merek di pasar makanan Indonesia.

Pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, serta berbagai teknologi digital lainnya memungkinkan merek untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui pendekatan yang bersifat personal dan interaktif (Kotler & Keller, 2016). Dengan merancang strategi branding yang mencakup unsur-unsur digital tersebut, perusahaan dapat membangun eksistensi merek yang kuat dan tetap relevan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Oleh karena itu, branding yang berlandaskan prinsip keberlanjutan tidak hanya memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi konsumen dan turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kesimpulan

Manajemen strategi branding berbasis keberlanjutan merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang yang sejalan dengan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi ini menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Branding berkelanjutan menuntut integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam seluruh proses bisnis, mulai dari desain produk, pelayanan, komunikasi, hingga strategi pemasaran. Untuk menerapkannya secara efektif, perusahaan perlu menyusun langkah-langkah strategis seperti mengidentifikasi nilai keberlanjutan yang relevan, mengintegrasikannya dalam proses operasional, mengomunikasikannya secara transparan kepada publik, serta terus meningkatkan kualitas produk dan layanan secara konsisten.

Berbagai studi dan contoh kasus perusahaan seperti Patagonia, Unilever, dan Pertamina menunjukkan bahwa branding yang mengedepankan keberlanjutan mampu meningkatkan citra perusahaan, menarik konsumen yang sadar lingkungan, membangun loyalitas pelanggan, hingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, manajemen strategi branding berbasis keberlanjutan tidak hanya menjadi alat untuk memenangkan pasar, tetapi juga sebagai sarana membangun reputasi, menciptakan nilai tambah, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat yang lebih luas. Pendekatan ini adalah investasi strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

* ★ *

BAGIAN 5

PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM ATAU

EKONOMI ISLAM

* ★ *

BAB 11 | Keuangan Islam dan kontribusinya terhadap SDGs

Ani Silvia

Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan sosial, etika, transparansi, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad para Ulama, sistem ini menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta mengedepankan prinsip berbagi risiko dan keuntungan (profit and loss sharing), kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Selain menawarkan instrumen yang bersifat komersial seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Ahmed et al., 2015; Silvia et al., 2024), keuangan Islam juga memiliki instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Dirie et al., 2024).

Seluruh instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan redistribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok fakir miskin dan rentan sehingga mendorong solidaritas dan kepedulian sosial (Dirie et al., 2024). Dengan karakteristik tersebut, keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial yang lebih luas.

Seiring berkembangnya wacana global mengenai pembangunan berkelanjutan, keuangan Islam mulai mendapat perhatian sebagai salah satu pendorong dan solusi untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, mencakup 17 tujuan (lihat Tabel 1) dan 169 target yang mencerminkan komitmen kolektif dunia untuk mengatasi berbagai tantangan global yang mendasar mulai dari pengentasan kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga mempromosikan masyarakat yang adil dan inklusif (United Nations, 2015). Mengingat skala dan kompleksitas agenda ini, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial dalam memobilisasi sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target SDGs (Ahmed et al., 2015; Stafford-Smith et al., 2017).

Tujuan	Deskripsi
SDG 1	Tanpa Kemiskinan
SDG 2	Tanpa Kelaparan
SDG 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
SDG 4	Pendidikan Berkualitas
SDG 5	Kesetaraan Gender
SDG 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak
SDG 7	Energi Bersih dan Terjangkau
SDG 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
SDG 9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
SDG 10	Berkurangnya Kesenjangan
SDG 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
SDG 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
SDG 13	Penanganan Perubahan Iklim
SDG 14	Ekosistem Laut
SDG 15	Ekosistem Daratan
SDG 16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
SDG 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: United Nations (2015)

Dalam konteks ini, keuangan Islam memberikan kontribusi yang sangat penting dan mendasar. Berbagai prinsip, lembaga dan instrumen keuangan Islam sejalan dengan nilai-nilai inti yang terkandung dalam SDGs. Zakat dan wakaf, misalnya, dapat mendukung SDG 1, 3, dan 4 (Ahmed et al., 2015), yang masing-masing berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, dan pendidikan. Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil seperti pada lembaga keuangan mikro Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sejalan dengan SDG 8 (Mukhlisin et al., 2020). Instrumen seperti green sukuk telah digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan untuk memerangi perubahan iklim sesuai dengan SDG 13 (Musari & Hidayat, 2023). Lembaga-lembaga keuangan syariah dan badan pengelola zakat juga mulai menyusun inisiatif dan program yang terkait langsung dengan target-target SDGs (Ahmed et al., 2015).

Berbagai kontribusi lainnya dalam mewujudkan SDGs masih perlu dipetakan secara komprehensif dan dikaji lebih lanjut. Untuk itu, bab ini bertujuan mengeksplorasi kontribusi penting keuangan Islam terhadap pencapaian agenda SDGs dengan menyajikan keterkaitan antara prinsip, instrumen, dan lembaga keuangan Islam dengan SDGs. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan lebih lanjut tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memaksimalkan peran keuangan Islam dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Bab ini akan ditutup dengan memberikan kesimpulan serta rekomendasi untuk pemangku kepentingan dalam memaksimalkan peran keuangan Islam di masa depan.

A. Keterkaitan Prinsip Keuangan Islam terhadap Dimensi SDGs

Menurut para cendekiawan Muslim (Ulama), konsep SDGs sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan dalam perspektif Islam (Khan & Haneef, 2022). Untuk itu, prinsip-prinsip syariah yang melandasi sistem keuangan

Islam pun sejalan dan turut mendukung pencapaian SDGs. Beberapa prinsip-prinsip dasar keuangan Islam meliputi prinsip keadilan ekonomi dan sosial ('*adl wa al-ihsan*), larangan riba dan eksploitasi ekonomi, maqashid syariah dan kemaslahatan umum (*maslahah*), larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi berlebihan), keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

1. Prinsip Keadilan Ekonomi dan Sosial (*al-'adl al ijtima'i wa al-ihsan*)

Landasan fundamental dalam sistem keuangan Islam adalah keadilan sosial (*al-'adl al ijtima'i*) dan kebaikan (*al-ihsan*) yang harus terefleksi dalam operasi inti keuangan Islam (Zauro et al., 2020). Islam dalam ajarannya yang bersumber dari Al-Qur'an menganjurkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sedekah sehingga mengurangi kesenjangan sosial (QS. At-Taubah: 60, QS. Ali Imran: 92).

Ajaran Islam menekankan pentingnya memberikan makan orang miskin (QS. Al-Insan: 8-9), memperlakukan perempuan secara adil (QS. An-Nisa: 19), dan mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Konsep ihsan, yang berarti melakukan sesuatu dengan kebaikan dan empati, mendorong pelibatan aktif masyarakat untuk beribadah melalui instrumen keuangan sosial seperti zakat, infaq, wakaf, dan pemberian pinjaman dengan murah hati tanpa bunga (*qardhul hasan*). Semua ini sejalan dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8

(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

2. Larangan Riba dan Eksploitasi Ekonomi

Riba mengacu pada tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pokoknya sebagai syarat transaksi (Chapra, 1985). Selain tambahan dalam proses pinjam meminjam (riba an-nasiah), riba juga dapat terjadi dalam perdagangan dan transaksi bisnis (riba al-fadhl). Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi (Aggarwal & Yousef, 2000; Chapra, 1985). Keuangan Islam menolak akumulasi kekayaan melalui mekanisme yang tidak produktif dan merugikan pihak lemah melalui pelanggaran riba (QS. Al-Baqarah: 275-279).

Prinsip ini mendukung agenda SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), karena menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan inklusif. Dengan demikian, keuangan Islam secara aktif mendorong skema pembiayaan yang berbasis pada aktivitas riil dan kemitraan (mudharabah dan musyarakah), bukan spekulasi dan mengandung riba (Silvia et al., 2024).

3. Prinsip Maqashid Syariah dan Kemaslahatan Umum (Maslahah)

Keuangan Islam tidak hanya bertujuan untuk efisiensi pasar, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam (maqashid syariah) dan menciptakan kemaslahatan umum (maslahah). Maqashid Syariah meliputi perlindungan terhadap agama (Hifz ad-Dīn), jiwa (Hifz an-Nafs), akal (Hifz al-

‘Aql), keturunan (Hifz an-Nasl), dan harta (Hifz al-Māl). Keuangan Islam yang dijalankan berdasarkan maqashid syariah dapat mewujudkan kemalahatan secara umum yang sesuai dengan semua tujuan yang ingin dicapai SDGs (Abdullah, 2018; Kasri et al., 2023), seperti:

- SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) – perlindungan jiwa.
 - SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) – perlindungan akal.
 - SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (ekosistem Daratan) – perlindungan jiwa, akal dan keturunan.
 - SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) – perlindungan harta dan kesejahteraan ekonomi.
4. Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi Berlebihan)

Dalam sistem keuangan Islam, transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan (maysir) dan ketidakjelasan (gharar) dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi (Ahmed et al., 2015; Raimi et al., 2024). Larangan ini menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan akuntabel. Secara implisit, prinsip ini

mendukung SDG 16 (Kelembagaan yang Tangguh) karena mendorong tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) karena mendorong investasi yang lebih etis pada sektor-sektor yang produktif dan mencegah aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat.

5. Keseimbangan antara Manusia dan Lingkungan

Sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an menekankan pentingnya peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan memperlakukan bumi sebagai bentuk amanah Allah (QS. Al-Baqarah: 30). Musari & Hidayat (2023) mencatat setidaknya terdapat sekitar 94 ayat Al-Qur'an yang membahas tentang lingkungan hidup dan larangan untuk berbuat kerusakan. Dalam keuangan Islam, prinsip ini memunculkan inisiatif untuk menerbitkan instrumen seperti green sukuk untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang secara langsung mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) (Khateeb et al., 2023).

Prinsip-prinsip dasar dalam keuangan Islam, dengan demikian, mendukung hampir seluruh dimensi SDGs. Untuk itu, keuangan Islam bukan sekedar alternatif dari sistem keuangan konvensional, melainkan sebagai mitra penting dan bisa saling bersinergi dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan global. Implementasi prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkesinambungan dapat

mewujudkan kontribusi penting bagi keuangan Islam dalam pencapaian SDGs.

B. Peran Lembaga dan Instrumen Keuangan Islam terhadap Pencapaian SDGs

Keuangan Islam tidak hanya didukung oleh prinsip-prinsip dasar syariah yang etis dan adil, tetapi juga ditunjang oleh beragam instrumen keuangan dari lembaga keuangan Islam yang memiliki fungsi sosial dan komersial. Instrumen-instrumen ini mencerminkan semangat keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi sosial yang secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Dalam konteks ini, keuangan Islam menawarkan instrumen keuangan yang mampu menjawab mulai dari persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, akses permodalan, dan pembangunan berkelanjutan secara simultan.

1. Lembaga Zakat dan Wakaf yang mengelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat (nisab/batas minimum dan haul/setahun kepemilikan), untuk disalurkan kepada 8 golongan yang membutuhkan (QS. At-Taubah: 60) sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela. Zakat, infaq dan sedekah berfungsi utama sebagai alat redistribusi kekayaan, sehingga sangat relevan dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS di Indonesia, serta institusi serupa di negara-negara lain, telah membuktikan kontribusi zakat dalam mengurangi beban ekonomi kelompok miskin melalui bantuan konsumsi maupun program pemberdayaan produktif (Abdullah et al., 2015; Herianingrum et al., 2024). Pemanfaatan zakat yang

berbasis teknologi dan data juga memperluas jangkauan penerima manfaat secara lebih akurat dan transparan (Beik et al., 2021).

Menurut Dirie et al. (2024), banyak lembaga sosial Islam menggunakan instrumen seperti infaq dan sedekah untuk mendukung SDGs seperti program pangan (SDG 2), layanan kesehatan gratis (SDG 3), serta bantuan pendidikan untuk anak-anak tidak mampu (SDG 4). Karakteristik infaq dan sedekah yang fleksibel menjadikannya sumber dana yang cepat disalurkan dan dapat menjangkau kebutuhan yang tidak tercakup oleh zakat.

Wakaf adalah instrumen keuangan Islam yang memadukan nilai spiritual dan manfaat jangka panjang. Wakaf, baik wakaf tunai dan wakaf produktif, telah berkembang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan layak, hingga infrastruktur sosial lainnya (Abdullah, 2018). Dengan demikian, wakaf memiliki keterkaitan langsung dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Partisipasi berbagai sektor, termasuk swasta, dalam pengelolaan aset publik yang berkelanjutan dan prioritas akan membuat wakaf semakin berdayaguna dan selaras dengan SDGs (Abdullah, 2018).

2. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Fasilitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Bank syariah berperan besar dalam memperluas inklusi keuangan melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi inti dari bisnisnya (Silvia et al., 2024), terutama untuk sektor mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) (Mukhlisin et al., 2020). Melalui akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah mendorong pertumbuhan ekonomi riil yang adil dan produktif sehingga meningkatkan stabilitas di sektor keuangan (Ahmed et al., 2015).

Pembiayaan syariah berbasis kedua akad ini memberikan solusi permodalan tanpa beban bunga, terutama untuk sektor UMKM (Mukhlisin et al., 2020; Silvia et al., 2024). Model ini memungkinkan hubungan mitra usaha yang saling menguntungkan, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat produktivitas ekonomi. Dengan demikian, pembiayaan dengan skema risk sharing ini berkontribusi terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) serta SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Di banyak negara berkembang, bank syariah memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat yang belum dilayani oleh bank konvensional, terutama untuk mengurangi ketimpangan akses ke layanan keuangan dan menghindari praktik riba yang memberatkan (Silvia et al., 2024).

Selain menjadi lembaga intermediari melalui penyediaan pembiayaan komersial, bank syariah juga telah mulai mengintegrasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis syariah, termasuk penyaluran zakat perusahaan, program edukasi keuangan, dan dukungan terhadap startup sosial (social enterprises), yang berkontribusi pada berbagai tujuan SDGs (Hanic & Smolo, 2023).

3. Manajer Investasi Syariah dan Penerbit Sukuk

Lembaga manajemen investasi syariah, otoritas pemerintah dan sektor swasta yang menerbitkan sukuk syariah juga turut andil dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen keuangan Islam berbasis aset yang bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs. Inovasi seperti green sukuk telah menjadi langkah konkret dalam pembiayaan proyek untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim (Musari & Hidayat, 2023).

Sukuk dengan fitur risk sharing dapat membantu menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur di banyak negara-negara berkembang. Menurut Musari & Hidayat (2023), integrasi antara wakaf dan green sukuk dapat menjadi alternatif investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan dapat menghubungkan sektor riil, keuangan komersial, dan sosial sehingga dapat meningkatkan kontribusi keduanya secara eksponensial untuk mengatasi perubahan iklim (SDG 13). Lebih lanjut, penerbitan green sukuk juga selaras dengan SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) (Aassouli et al., 2018). Sukuk juga terbukti menjadi instrumen yang menarik bagi investor yang memiliki kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan (impact investing).

4. Perusahaan Takaful (Asuransi Syariah) untuk Proteksi Risiko Finansial

Mitigasi risiko finansial dalam keuangan Islam dapat dilakukan melalui Takaful (asuransi syariah) untuk berbagai segmen masyarakat, termasuk masyarakat miskin (Ahmed et al., 2015). Takaful atau asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan berbasis sumbangan amal (tabarru') dan kerja sama atau saling membantu (ta'awun).

Dalam melakukan operasinya, Takaful menggunakan akad wakalah bil ujah yang merupakan akad perwakilan (wakalah) antara peserta dan perusahaan sebagai wakil (agen) dalam mengelola dana tabarru' dengan imbal jasa (ujrah) yang disepakati di awal. Lembaga ini menerbitkan polis asuransi syariah yang penting untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan, maupun kehilangan mata pencaharian.

Dengan melindungi kelompok rentan dari kerugian finansial yang drastis, takaful ikut mendukung SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui perlindungan terhadap guncangan ekonomi rumah tangga.

5. Perusahaan Penjaminan Syariah yang Mendukung Inklusi Keuangan Syariah dan Perekonomian

Perusahaan penjaminan syariah yang merupakan lembaga keuangan non-bank juga memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Trimulato, 2022). Perusahaan penjaminan syariah memberikan jaminan atas risiko kegagalan pembayaran atau wanprestasi dari pihak yang

menerima pembiayaan syariah kepada lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Melalui skema penjaminan berbasis prinsip syariah, perusahaan ini memberikan jaminan bagi pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan karena keterbatasan agunan, sehingga mereka tetap dapat mengakses dana dari lembaga keuangan syariah (Hassan & Soumaré, 2015). Pemberian jaminan ini secara langsung mendukung tujuan SDG 1 untuk mengentaskan kemiskinan dan SDG 8 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan penjaminan syariah turut memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada kelompok yang belum terlayani, membantu mengurangi ketimpangan akses keuangan (SDG 10).

Dengan menjamin pembiayaan sektor-sektor produktif, peran ini juga sejalan dengan SDG 9 yang mendorong pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Lebih jauh, perusahaan penjaminan syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba dalam setiap aktivitasnya, yang berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang etis dan akuntabel sesuai dengan semangat SDG 16 (institusi yang kuat, adil, dan inklusif).

Beragam lembaga dan instrumen keuangan Islam menawarkan solusi yang unik namun tetap bisa berintegrasi satu dengan lainnya untuk mendukung agenda SDGs. Baik instrumen sosial (zakat, infaq, sedekah, wakaf) maupun komersial (sukuk, pembiayaan bagi hasil, takaful, penjaminan), semuanya dirancang untuk menciptakan

dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan dan integrasi yang optimal terhadap instrumen-instrumen ini dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi tantangan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang yang berpenduduk mayoritas Muslim.

C. Tantangan dan Peluang dalam Memaksimalkan Peran Keuangan Islam untuk SDGs

Keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) karena prinsip-prinsip dasarnya menekankan keadilan, etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Namun, realisasi kontribusi ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan pelaksanaan. Salah satu hambatan utama adalah terpecahnya tanggung jawab antar lembaga (fragmentasi kelembagaan) serta minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) seperti regulator, lembaga keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, dan pelaku sektor riil. Hambatan ini menyebabkan banyak potensi dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, tidak termobilisasi secara optimal untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan (Abdullah, 2018; Ahmed et al., 2015).

Tantangan lainnya meliputi keterbatasan inovasi produk yang secara langsung mendukung SDGs serta belum adanya standar global yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan indikator dampak pembangunan. Misalnya, pengukuran efektivitas dari green sukuk atau zakat untuk pembangunan berkelanjutan masih belum sistematis dan terstandarisasi secara internasional (OECD, 2020). Selain itu, literasi keuangan Islam di tengah masyarakat juga masih tergolong rendah, terutama dalam memahami zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah

sebagai alat pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Herianingrum et al., 2024; Trimulato, 2022).

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, keuangan Islam tetap memiliki peluang strategis yang sangat besar. Kesadaran global yang terus meningkat terhadap pentingnya keuangan berkelanjutan telah membuka ruang bagi keuangan Islam untuk berperan sebagai alternatif etis dan inklusif yang sejalan dengan prinsip SDGs (Ahmed et al., 2015; Hanic & Smolo, 2023; OECD, 2020). Inovasi teknologi digital seperti blockchain, big data, dan fintech syariah juga semakin mempercepat inklusi dan efisiensi keuangan Islam. Platform digital zakat, dompet wakaf, serta crowdfunding syariah telah digunakan untuk menjembatani akses pendanaan ke sektor-sektor prioritas SDGs (Mukhlisin et al., 2020; Shirazi et al., 2023).

Di sisi lain, penguatan kebijakan publik dan regulasi juga menjadi aspek penting. Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia telah mulai mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, serta menerbitkan green sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan (Musari & Hidayat, 2023; Trimulato, 2022). Lembaga multilateral seperti Islamic Development Bank (IsDB) juga aktif mendorong mekanisme blended Islamic finance untuk mendukung pendanaan pembangunan di negara-negara anggota (OECD, 2020).

Dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor, keuangan Islam memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian SDGs. Lebih dari itu, optimalisasi peran keuangan Islam juga merupakan bentuk aktualisasi dari maqashid syariah yang menjadikan kebermanfaatan sosial sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi dan keuangan Islam (Abdullah, 2018).

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Keuangan Islam, dengan fondasi nilai-nilai syariah seperti keadilan, inklusi sosial, dan tanggung jawab lingkungan, memiliki keselarasan yang kuat dengan agenda SDGs. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam beragam instrumen dan lembaga keuangan Islam, baik sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah, maupun komersial seperti green sukuk, pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing), dan takaful, yang terbukti mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan global, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembiayaan infrastruktur hijau. Implementasi keuangan Islam yang konsisten tidak hanya mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga menjadi aktualisasi dari maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktivitas ekonomi.

Untuk mengoptimalkan peran keuangan Islam dalam mendukung SDGs, diperlukan langkah strategis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kerangka kebijakan yang ramah terhadap integrasi keuangan Islam dalam pembangunan nasional. Lembaga keuangan Islam harus mendorong inovasi produk yang mendukung SDGs secara eksplisit, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan efisiensi. Literasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar pemahaman terhadap potensi zakat, wakaf, dan instrumen syariah lainnya sebagai alat pemberdayaan semakin meluas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, baik lokal maupun global, harus diperkuat untuk membangun sinergi yang berdampak nyata dalam pencapaian SDGs.

BAB 12 | Sukuk Hijau & Instrumen Keuangan Syariah

Novita Kusuma Maharani

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dikembangkan sebagai bentuk usaha untuk memperbaiki kualitas Kesehatan, Pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, sanitasi air dengan tujuan untuk mengurangi Tingkat kemiskinan suatu negara (DJPPR, 2020). Perubahan iklim ekstrim global menjadi hal yang sangat krusial untuk dibahas dan saat ini menjadi salah satu fokus yang dibicarakan terkait perkembangan ekosistem dunia yang berkelanjutan. Banyak negara di dunia mulai beralih fokus pada isu lingkungan berbasis pertumbuhan ekonomi atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi hijau (Bagaskara, Wahyuni & Meldona, 2024).

Saat ini, banyak sekali proyek-proyek hijau yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sebagai bentuk solusi dari perubahan iklim dan ekosistem lingkungan. Proyek Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mengurangi masalah emisi karbon dan ketahanan perubahan iklim regional terus-menerus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, Investasi Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab (Sustainable and Responsible Investment) atau dikenal dengan istilah SRI yang terdiri dari produk keuangan telah menunjukkan momentum yang substansial dalam mengembangkan keuangan hijau (Abdullah dkk, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang besar di Asia selalu mengupayakan terlaksananya Pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk mencapai target SDGs melalui pengembangan keuangan syariah, terutama yang berfokus pada perubahan iklim (Faisal dkk, 2023). Perkembangan keuangan syariah terbukti meningkat pesat di Indonesia dan

memiliki potensi mendukung Pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pencapaian tersebut dibuktikan dengan penerbitan instrument-instrumen investasi berbasis pada lingkungan.

Kehadiran sukuk hijau di Indonesia sebagai salah satu instrument investasi mempunyai kesempatan besar dan sangat penting agar perkembangannya sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Sukuk hijau adalah instrumen pembiayaan yang inovatif untuk mendorong Indonesia pada komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sesuai dengan hukum syariah (Septiana dkk, 2022). Sukuk hijau saat ini mulai eksis dan menjadi salah satu alternatif pendanaan yang digunakan banyak negara sebagai bentuk penanganan masalah lingkungan.

A. Definisi dan Konsep Sukuk Hijau

Sukuk berasal dari kata sakk yang secara bahasa adalah bukti kepemilikan, Dimana merupakan dokumen yang merepre-sentasikan kewajiban keuangan (financial liability) (Alam dkk, 2016). Selanjutnya, pengertian dari Sukuk adalah suatu instrumen pembiayaan yang diperdagangkan dan dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi dengan tujuan sebagai pembiayaan pada suatu proyek infrastruktur dan berdasarkan pada prinsip kepatuhan syariah. Pengertian lainnya menyatakan, sukuk adalah obligasi bebas bunga (interest-free) yang menghasilkan keuntungan bagi investor tanpa melanggar prinsip syariah yang melarang pembayaran bunga, dan juga memiliki underlying asset (World Bank, 2020). Pada dasarnya, sukuk memiliki kemiripan dengan obligasi konvensional namun konsisten pada prinsip-prinsip syariah (Alam dkk, 2016). Sukuk menjadi salah satu instrument yang cocok dalam pembiayaan infrastruktur dikarenakan penerapan risk-sharing, dimana hal tersebut dapat membantu memenuhi kesenjangan keuangan di negara-negara berkembang.

Sukuk pada dasarnya dijamin oleh beberapa regulasi terkait (Mauliyah dkk, 2023), diantaranya:

- (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- (2) POJK Nomor 18/ POJK. 004/ 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk;
- (3) Fatwa DSN MUI Nomor 33/ DSN-MUI/ Tahun 2002 tentang obligasi syariah/ sukuk.

Sukuk hijau adalah salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah dengan tujuan menyediakan pembiayaan dengan fokus pada Pembangunan berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan (Bagaskara dkk, 2024). Selain itu, Sukuk hijau adalah bentuk Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dengan melakukan pembiayaan pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih seperti: perubahan iklim pada area yang sering terjadi bencana alam, transportasi berkelanjutan, proyek energi terbarukan, dan proyek-proyek pertanian (Masruro dkk, 2022; Bagaskara dkk, 2024). Definisi lain menyatakan bahwa Sukuk hijau adalah investasi yang sesuai dengan syariah dalam energi terbarukan dan aset-aset lingkungan lainnya dan berfokus pada perhatiannya terhadap perlindungan lingkungan (Alam dkk, 2016).

Pada prakteknya, Pemegang sukuk hijau akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil (margin/fee) dan bukan dalam bentuk bunga. Sehingga dalam sukuk hijau sendiri telah memiliki dua standar, yaitu terlaksananya kepedulian akan lingkungan dan kepatuhan pada prinsip syariah (Septiana dkk, 2022). Hal ini membuat sukuk hijau menjadi pilihan yang tepat bagi para investor

islam yang mencari instrumen investasi yang ramah lingkungan (Abdullah dkk, 2020). Selanjutnya, di Indonesia Penerbitan sukuk hijau dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memperkuat posisi keuangan negara berdasarkan prinsip syariah secara nasional maupun internasional sehingga Indonesia lebih peduli terhadap lingkungan (Masruro dkk, 2022).

B. Karakteristik Sukuk Hijau

Instrumen investasi hijau yang sudah diterapkan secara global seperti obligasi hijau dan sukuk hijau pada prinsipnya memiliki kesamaan terhadap fokus penanganan isu lingkungan. Sesuai pada prinsipnya, terdapat 10 sektor yang dapat didanai oleh obligasi hijau maupun sukuk hijau, Dimana sektor tersebut terdiri dari: energi terbarukan (Renewable energy); efisiensi energi; pencegahan polusi; konservasi keanekaragaman hayati; transportasi hijau; pengelolaan air limbah; proses produksi yang disesuaikan dengan lingkungan; dan bangunan hijau yang memenuhi standar yang diakui (Bagaskara dkk, 2024).

	Non-Hijau	Hijau
Obligasi	Investor konvensional	Investor konvensional + investor konvensional hijau
Sukuk	Investor konvensional + investor syariah	Semua investor

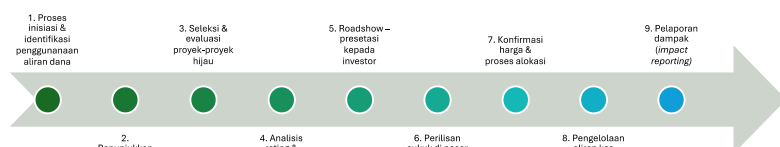
Sumber: World Bank, 2020

Berdasarkan prinsip penerbitan, obligasi hijau dan sukuk hijau memiliki kesamaan yaitu pada penggunaan data untuk proyek lingkungan dan tanggung jawab social, serta tersedianya aset sebagai dasar penerbitan (DJPPR, 2020). Namun, yang menjadi perbedaan antara obligasi hijau dan

sukuk hijau adalah pada prinsip pembiayaan dan tujuan penerapannya.

Obligasi hijau adalah obligasi konvensional yang bertujuan untuk mendanai proyek, dengan investasi yang ramah lingkungan. Sementara, sukuk hijau merupakan gabungan antara pendanaan berbasis syariah dan pembiayaan bagi proyek hijau. Sukuk hijau juga menjadi langkahlanjutan yang menjembatani kesenjangan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.

Selain itu, keunggulan dari sukuk hijau dari segi investor adalah sukuk ini menarik investor hijau, investor yang patuh pada prinsip syariah, dan investor non-hijau, serta investor konvensional. Sementara, sukuk non-hijau hanya menarik minat investor keuangan konvensional dan mengecualikan investor yang patuh pada syariah (World Bank, 2020). Berikut ini proses dan tahapan dalam penerbitan sukuk hijau:



Sumber: World Bank, 2020

Pada alur tahapan proses penerbitan sukuk, terdapat dua perbedaan kondisi: (1) Pra-penerbitan, pada pra-penerbitan (1 sampai 7) identifikasi penggunaan aliran kas penting dilakukan. Selanjutnya proses evaluasi dan pemilihan proyek sebagai komitmen pelaksanaan, dan penilaian dari berbagai pihak, khususnya dari pihak eksternal agar didapat nilai secara independen dan objektif,

dan (2) Pasca penerbitan, dimana setelah sukuk hijau diterbitkan evaluasi terkait sukuk harus transparan dan tepat sasaran. Selain itu. Terdapat laporan dampak (impact reporting) untuk melaporkan progress dari proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini menjadi kunci utama yang dapat membawa sukuk hijau berkembang luas dan dapat diterima di lingkungan Masyarakat (World Bank, 2020).

Indonesia merupakan negara yang pertama kali menerbitkan instrument sukuk hijau ritel. Penerbitannya digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Skema ritel ini dirasa dapat menjangkau investor-investor baru yang memiliki minat pada keberlanjutan lingkungan yang Lestari. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dimana akses ekonomi dan keuangan tersebar luas ke seluruh lapisan Masyarakat.

Selain itu, Salah satu kelebihan dari sukuk hijau ritel adalah tidak memiliki risiko nilai tukar, karena memang diperuntukkan bagi investor domestic dan dibuat dengan denominasi Rupiah. Sukuk hijau juga dapat berkontribusi sebagai pembiayaan infrastruktur negara karena dapat meningkatkan pendapatan fiskal negara. Selanjutnya, Penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah ternyata juga dapat menjadi acuan dalam menentukan keuntungan (yield) sukuk yang diterbitkan oleh banyak korporasi/ Perusahaan dan juga investor dalam menghitung valuasi instrument investasi (DJPPR, 2020).

C. Akad-akad dalam Sukuk Hijau

Berikut ini beberapa akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk hijau (Gunawan, 2020):

1. Sukuk Mudharabah

Sukuk dengan akad mudharabah adalah dimana salah satu pihak memberikan kontribusi modal

(shahibul maal) dan pihak lainnya memberikan tenaga (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari sukuk tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan juga ikut menanggung kerugian.

2. Sukuk Ijarah

Istilah ijarah berkaitan dengan mekanisme perjanjian sewa atas suatu aset. Sehingga pada akad ijarah terdapat pihak ketiga yang bersifat independen melalui perwakilan dan menjual/menyewakan suatu aset kepada pihak ketiga dengan harga dan periode yang telah ditentukan.

3. Sukuk Musyarakah

Mekanisme sukuk dengan akad musyarakah dimana antara dua pihak menyatukan sumber daya masing-masing untuk membiayai suatu proyek. Sehingga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan jumlah persentase penyertaan modal.

4. Sukuk Wakalah

Sukuk ini dilakukan melalui perjanjian wakalah dimana harus menunjuk pihak perwakilan yang berfungsi untuk mengelola aktivitas proyek atas nama pemilik sukuk. Pihak pemegang sukuk merupakan pemilik aset yang diwakili dengan sukuk berserta dengan manfaat dan risikonya.

D. Manfaat Sukuk Hijau

Sukuk hijau memang difokuskan sebagai instrument investasi yang memberikan pendanaan kepada proyek-proyek berbasis lingkungan keberlanjutan. Berikut ini dijelaskan beberapa manfaat dari penerbitan sukuk hijau (Gunawan, 2023):

1. Manfaat Bagi Sosial

- Dana yang berasal dari pembiayaan sukuk hijau dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat meningkatkan akses layanan sosial (contoh: kesehatan, Pendidikan, perumahan).
- Peningkatan proyek-proyek Pembangunan untuk kualitas hidup seperti pengurangan polusi udara.
- Sukuk hijau sebagai wadah pemberdayaan komunitas local dalam mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan.
- Jaminan proyek lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.

2. Manfaat Bagi Lingkungan

- Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar seperti fosil dan beralih menjadi penggunaan energi terbarukan.
- Pelestarian dan pemeliharaan sumber daya alam seperti hutan, lahan basah, laut, dan ekosistem lainnya.
- Tingginya kualitas hidup masyarakat jangka Panjang berbasis lingkungan. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kualitas pada air, udara, lahan, dan sebagainya.
- Terbentuknya pedoman standar pada proyek-proyek lingkungan, sehingga kinerja jelas dan terukur.

3. Manfaat Bagi Finansial

- Adanya sumbangsih dari pemerintah dan industri keuangan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan dan perluasan kesempatan investasi.

- Sukuk hijau dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan sukuk non-hijau.
 - Kemungkinan terbentuknya pasar dan produk baru yang ramah lingkungan di pasar finansial karena semakin berkembangnya teknologi hijau.
4. Manfaat Bagi Emiten (Perusahaan Penerbit)
- Emiten memperoleh sumber pendanaan untuk proyek berbasis lingkungan.
 - Diversifikasi sumber pendapatan dan fleksibilitas keuangan.
 - Meningkatnya reputasi emiten, karena emiten berarti mendukung Pembangunan berkelanjutan.
 - Sukuk hijau sebagai instrument investasi jangka Panjang dengan arus kas yang relatif stabil.
 - Peningkatan pengembangan pasar modal syariah.
5. Manfaat Bagi Investor
- Kecil kemungkinan terjadi risiko gagal bayar. Pembayaran imbal hasil sukuk hijau dijamin oleh negara sebagai penerbit sukuk hijau.
 - Capital gain (selisih harga beli dan harga jual) dan profit sharing.
 - Kesempatan Masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Pembangunan infrastruktur nasional.
 - Diversifikasi portofolio aset.
 - Terciptanya keselarasan dengan nilai etis.

E. Penerapan Sukuk Hijau Di Indonesia

Banyak dari negara-negara di dunia yang telah menerbitkan obligasi hijau sebagai pembiayaan berbasis lingkungan. Pada tahun 2019 saja, Peningkatan obligasi hijau tembus sebesar 51% dibandingkan dengan tahun

2018, yaitu telah mencapai 257,7 miliar dollar. Contoh negara-negara yang telah melakukan penerbitan obligasi hijau diantaranya adalah Kanada, Jepang, Afrika, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Inggris (DJPPR, 2020). Rata-rata negara tersebut melakukan penerbitan sukuk untuk kepentingan pendanaan efisiensi energi dengan energi terbarukan (renewable energy).

Kemunculan sukuk hijau sebagai alternatif investasi dengan prinsip syariah juga diterima oleh banyak investor khususnya yang concern terhadap kepatuhan syariah (shariah compliant). Investor juga dapat memilih jenis Sukuk hijau yang ingin dibeli karena sama seperti obligasi hijau, sukuk hijau dapat diterbitkan oleh pemerintah (sovereign sukuk) maupun Perusahaan (corporate sukuk). Selanjutnya, contoh negara yang pernah menerbitkan sukuk hijau adalah Malaysia dan Indonesia, dimana sukuk hijau Malaysia diterbitkan oleh Perusahaan domestik dan sukuk hijau Indonesia diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian keuangan. Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau dengan struktur ritel atau lebih dikenal dengan green sukuk ritel dan diperdagangkan kepada investor dalam negeri/ domestik (DJPPR, 2020). Di Indonesia sukuk hijau terbukti dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko iklim dan mendukung Pembangunan dalam negeri.

Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk hijau dengan nilai sebesar 1,25 miliar dollar dengan jatuh tempo selama lima tahun. Penerbitan tersebut mendapatkan respon positif dari pasar, sehingga pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali untuk melakukan penerbitan suku hijau pada tahun 2019 dengan nomor seri ST-006 sebagai salah satu pilihan alternatif pembiayaan jangka pendek dan menengah, serta

mendukung terwujudnya keuangan inklusif dan mendukung Pembangunan nasional (Septiana dkk, 2022; Fitrah dkk, 2022).

Selanjutnya dalam hal penggunaan dana, aliran kas dari penerbitan sukuk hijau secara eksklusif digunakan untuk pembiayaan dan pembiayaan Kembali (re-financing) pada proyek-proyek yang termasuk dalam "Eligible Green Projects" (Fitrah dkk, 2022). Pelaksanaan alokasi pendanaan pada proyek-proyek hijau ini menggunakan green bonds principles sebagai benchmark yaitu membiayai proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan energi terbarukan. (DJPPR, 2020; Bagaskara dkk, 2024).

Hingga saat ini berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan terkait proyek-proyek hijau yang telah didanai oleh sukuk hijau meliputi hampir keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia. Proyek-proyek hijau tersebut mencakup proyek pembiayaan maupun proyek yang dibiayai kembali (re-financing) oleh sukuk hijau. Alokasi aliran dana yang berasal dari penerbitan sukuk hijau tersebut berasal dari jenis sukuk hijau yang berbeda-beda (terlihat dari nomor seri penerbitan), dimana fokus pendanaan juga disesuaikan dengan proyek-proyek yang termasuk dalam kriteria proyek hijau yang layak dibiayai.

Jenis proyek apa saja yang telah didanai dijelaskan pada gambar di bawah ini (Gambar 3). Salah satu contoh proyek hijau yang didanai misalnya, pendanaan pada proyek energi terbarukan (renewable energy). Dana sukuk hijau digunakan untuk mendanai proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan cara menambahkan kualitas data geofisika, meningkatkan validitas prospek yang di survei, dan mengurangi risiko eksplorasi (DJPPR, 2024).

Projected Environmental and Social Impacts

The following impact data are accumulated from the projects financed and refinanced by the proceeds of the Global Green Sukuk (SNI 1133), Domestic Wholesale Green Sukuk (PBSG 001), Domestic Retail Green Sukuk (ST 010T4 & ST 011T4).

Renewable Energy 	The annual GHG emission reduction has yet to be calculated. The project supports renewable energy development for geothermal resources by enhancing geophysical data quality, improving the validity of surveyed prospects, and reducing exploration risks.
Energy Efficiency 	Contribute to the annual GHG emission reduction at 2,317 tCO₂e in 2021 and 1,884 tCO₂e in 2022 or 4,201 tCO₂e in total from the overall aids to marine navigation development and replacement The installation and replacement of navigation aids (SBNP) have improved maritime safety and efficiency.
Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/ Disaster Risk Reduction 	- Enhance the infrastructure service capacity of water management areas that are prone to floods and droughts through the development and/or maintenance of: - Flood Control Infrastructure: 145.48 km and Coastal Protection Structures: 60.84 km - Raw Water Infrastructures consisting of Intake Units: 32; Raw Water Networks: 233.57 km; Artificial Aquifers: 268; Groundwater Irrigation Networks: 31.3 km; Reservoirs: 10; Wells: 459; Long Storage Facilities: 6; Rain-fed Water Storage: 18 - Water Supply infrastructure for Agricultural Areas consisting of Rivers: 12; Flood Control Units: 2; Water Surface/Groundwater Irrigation Networks: 1,655.79 km; - Reservoir Storage infrastructures consisting of Rain-fed Water Storage: 94; Weirs: 202; Lakes: 2; Springs: 3
Sustainable Transport 	Contribute to the annual GHG emission reduction at 2,777,421.09 tCO₂e in total from railway infrastructure development and improvement and 129.53 tCO₂e from the conversion of ICE to electric motorcycles The projects enhance railway transportation capacity, safety, efficiency, and regional connectivity through the construction, reactivation, and improvement of double-double tracks, double tracks, new lines, and the reactivation of existing railway lines which contribute to national and regional economic growth and enhances transportation accessibility in various regions. The conversion of ICE to electric motorcycles contribute to the government's program in the electric mobility promotion.
Sustainable Management of Natural Resources on Land 	Contribute to the annual GHG emission reduction at 582.105 million tCO₂e in total from forest and land rehabilitation and 92.88 tCO₂e from PROPER assessment and compliance - Forest and Land Rehabilitation: ± 74,024 hectares - Seedling Production: 39.677 million seedlings - Peatland Rehabilitation: 2,150 hectares - Disaster Management and Monitoring Systems: 63 monitoring systems and 120 infrastructure units
Green Building 	The annual GHG emission reduction has yet to be calculated. The project will construct environmentally friendly and socially acceptable buildings, resulting in 2,523 room units that contribute to sustainable development and community well-being.
Sustainable Water and Wastewater Management 	- Total Drinking Water Treatment Capacity: ± 325 liters per second (2021), ± 110 liters per second (2023) - Total Reservoir and Water Storage Development: 65 dams, 30 rainfed storage units, 5 reservoirs, 2 sediment control units, 9.7 weirs, 4 ponds, 11 lakes, 1 pump station - Total Domestic Wastewater Connections: to benefit 500 household connections - Total Agricultural Water Supply: ± 108,182.76 hectares, 78 canal blockings, 27,864.64 km irrigation networks - Total Reservoir Storage Enhancement: 16.25 weirs, 11 dams, 14 water gates, 3 reservoirs
	 Mitigation Other Result

Sumber: DJPPR, 2024

F. Tantangan dan Peluang Sukuk Hijau

Berikut tantangan dan peluang yang dapat dihasilkan dari sukuk hijau

1. Tantangan

Pertumbuhan sukuk hijau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di pasar global. Indonesia juga dikatakan merupakan negara yang pertama kali menerbitkan sukuk hijau secara ritel untuk investor domestik. Hal ini merupakan bentuk Upaya dari Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan penerbitan sukuk hijau dalam pendanaan proyek hijau di Indonesia.

Pengawasan dan evaluasi berkala terus dilakukan pemerintah agar instrument ini tetap eksis dan diterima di Masyarakat. Namun, seiring dengan Upaya-upaya tersebut, sukuk hijau dalam perkembangannya tentu menghadapi tantangan-tantangan yang pada realitanya memperlambat proses pertumbuhannya. Tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut antara lain:

a. Literasi/ Pengetahuan tentang sukuk hijau

Pada faktanya, hingga saat ini wawasan Masyarakat terkait sukuk hijau secara umumnya masih sangat rendah. Informasi tentang penerbitan sukuk hijau belum tersebar secara luas di publik. Kemungkinan karena instrument sukuk hijau ini belum lama muncul dalam dunia pasar modal sehingga akses informasi masih terbatas pada investor-investor tertentu (Gunawan, 2020). Dengan demikian, perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih menyeluruh tentang kesadaran berinvestasi di sukuk hijau untuk para calon investor,

khususnya yang sangat concern terhadap isu-isu lingkungan dan juga tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diperlukannya juga kegiatan sosialisasi berbasis cooperating atau menjalin Kerjasama dengan para pemangku kepentingan pasar modal secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Septiana dkk, 2022).

b. Peringkat kredit internasional

Peringkat kredit digunakan oleh investor sebagai pedoman dalam menilai Perusahaan penerbit/ emiten. Jika peringkat kredit dinilai rendah, investor menjadi waspada karena sewaktu-waktu bisa saja penerbit berpotensi gagal membayar kewajibannya terhadap investor. Apalagi jika peringkat kredit sudah ke ranah internasional, dimana tidak hanya investor domestic yang menilai tetapi juga investor asing yang ingin berinvestasi pada instrument sukuk tersebut. Penilaian peringkat kredit internasional tersebut dapat bersumber dari banyak faktor misalnya ketidakpastian ekonomi negara, stabilitas keuangan, persoalan politik dan konflik negara, serta risiko-risiko keuangan baik secara makro maupun mikro (Gunawan, 2020). Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi pertimbangan suatu negara untuk mengupayakan keamanan dan pengawasan mendalam terkait faktor-faktor penghambat tersebut.

c. Risiko menjalankan proyek hijau

Perjalanan bisnis/proyek hijau saat ini masih terbatas dan memiliki arus kas yang umumnya rendah (Gunawan, 2020). Hal ini dikarenakan, proyek ini sangat hati-hati dalam pelaksanaannya dan cenderung lebih sensitif dibandingkan proyek-proyek konvensional yang tidak terlalu memperdulikan dampak lingkungan di dalam pelaksanaannya. Umumnya, biaya yang dikeluarkan untuk proyek hijau cukup tinggi dan ini bisa menjadi faktor yang membuat investor kurang berminat berinvestasi pada sukuk hijau. Banyak dari investor pasti akan lebih memiliki berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan keuntungan tinggi dengan biaya yang rendah. Hingga saat ini pun rekam jejak keberhasilan sukuk hijau masih terbatas.

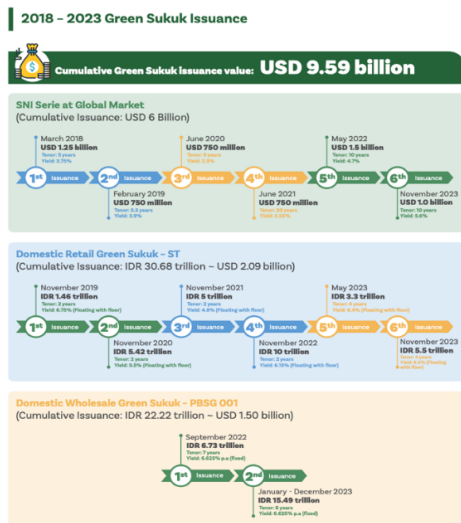
d. Kepastian hukum dan regulasi yang jelas

Regulasi yang berhubungan dengan penerbitan sukuk juga dapat menjadi pertimbangan investor dalam keputusannya berinvestasi pada sukuk hijau. Investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas dan transparan tanpa ada manipulasi dari penerbit sukuk. Kepastian hukum tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor bahwa instrumen ini tepat untuk dibeli karena sangat jelas regulasinya yang dapat memberikan rasa aman bagi investor yang memilikinya.

2. Peluang

Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau ritel memiliki dampak yang positif ke depannya. Instrumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk lebih berfokus pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, Pembangunan fasilitas dan infrastruktur hijau. Penerbitan sukuk hijau ritel menjadi salah satu alternatif investasi yang ramah lingkungan dimana dapat membantu negara mewujudkan Pembangunan hijau yang berkelanjutan (DJPPR, 2020). Penerapan sukuk hijau di Indonesia akan terus mengalami perkembangan karena dapat menjadi solusi dalam mengantisipasi perubahan iklim yang berubah-ubah.

Republic of Indonesia's Green Sukuk Milestone



Sumber: DJPPR, 2024

Indonesia berupaya terus konsisten untuk mendorong Pembangunan berkelanjutan yang juga peduli terhadap lingkungan. Pada awal penerbitan sukuk hijau di tahun 2018 hingga tahun 2023, total pendanaan sukuk hijau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Prestasi ini diharapkan dapat terus dilakukan kedepannya karena dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang seimbang tanpa merusak lingkungan, dan khususnya juga fokus pada kepatuhan syariah. Selain itu, dengan berkembangnya pasar sukuk hijau ini pemerintah seperti Kementerian keuangan diharapkan berpeluang untuk terus mengembangkan dan mengevaluasi secara berkala terkait kerangka sukuk hijau. Evaluasi tersebut mencakup pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana, kebijakan dalam penyusunan kriteria kelayakan proyek hijau, dan memperkuat transparansi pelaporan proses sukuk hijau (Gunawan, 2020).

G. Kesimpulan

Sukuk hijau adalah salah satu instrumen keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sukuk hijau berperan memberikan pendanaan pada proyek-proyek yang dapat mendukung Pembangunan berkelanjutan (SDGs) diantaranya, proyek ebergi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas sumber air bersih dan sanitasi, transportasi berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan hidup. Pendanaan tersebut juga berlandaskan pada nilai-nilai Islami sehingga sesuai dengan syariah compliance. Sukuk hijau berpotensi dapat mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, Pembangunan dan peningkatan stabilitas keuangan, khususnya keuangan berbasis syariah.

Sukuk hijau yang berkembang di Indonesia adalah jenis sovereign sukuk atau sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Sukuk hijau ini diperdagangkan secara ritel kepada investor domestic dan menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk ritel di dunia. Sukuk hijau di Indonesia juga sudah memenuhi standarisasi yang diakui oleh beberapa lembaga internasional. Hal ini menjadikan sukuk hijau akan mampu menjadi salah satu pilihan investasi yang akan dipilih oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB 13 | Wakaf Produktif untuk Pembangunan Berkelanjutan

Diah Ayu Legowati, Hilya Najmi Tsaqib, Ikha Syahrani

Pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu isu yang sangat mendesak di tingkat global, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai wilayah di seluruh dunia. Menurut laporan United Nations (2020), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerjasama antar sektor dan metode inovatif untuk menangani isu – isu kompleks yang saling berkaitan. Menanggapi isu tersebut, dalam sektor ekonomi Islam memberikan potensi yang besar sebagai alternatif solusi.

Ekonomi Islam yang berlandaskan dari Al – Quran dan Hadist serta mengandung prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Menurut Umar Chapra, sistem ekonomi Islam dapat memperkuat kesejahteraan manusia melalui pembagian dan penyaluran sumber daya alam yang terbatas serta selaras dengan maqashid, tanpa mengurangi lisensi individu, sehingga dapat menumbuhkan solidaritas di antara keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat (Ibrahim, A., et al, 2021).

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan adalah wakaf, terkhusus adalah wakaf produktif. Menurut (Anwar dan Yenni, 2023), wakaf produktif merupakan harta atau barang tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam aktivitas produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf, contohnya wakaf tanah yang dipakai untuk bertani. Selanjutnya, hasil dari pertanian tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik dan lain-lain. Oleh karena itu, wakaf dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendahuluan singkat di atas, maka ekonomi Islam memiliki potensi sebagai solusi alternatif, serta peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

A. Konsep Dasar Wakaf Produktif

Wakaf adalah instrumen penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat Islam, yang berarti mengalokasikan harta untuk kepentingan masyarakat secara permanen. Di Indonesia, wakaf dibedakan menjadi wakaf tradisional, yaitu yang menyediakan fasilitas sosial, dan wakaf produktif, yang menginvestasikan aset untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Prinsip wakaf tercermin dalam ajaran yang menekankan dukungan sosial dan amal jariyah. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pengertian Wakaf: Tradisional VS Produktif

Perkataan “Waqf” yang disalin ke dalam ejaan bahasa Indonesia menjadi Wakaf berasal dari kata bahasa arab “Waqafa-Yaqufu-Waqfan” berarti membekukan atau berhenti. Kata “Wakafa” sama artinya “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” berarti menjauhkan manusia dari sesuatu atau memenjarakan. Kata tersebut berkembang menjadi “Habbasa” berarti mewakafkan harta karena Allah SWT (Isfandiar, 2008).

Wakaf tradisional ialah suatu aktivitas seseorang, komunitas atau badan hukum yang dikelola melalui sebagian hartanya, seperti kepemilikan tanah dan mengalokasikannya secara permanen atau kepentingan masyarakat, seperti pembangunan sekolah, ibadah, rumah sakit, atau fasilitas sosial yang sesuai dengan syariat islam. Sedangkan, wakaf produktif adalah suatu aktivitas seseorang, komunitas atau badan hukum yang dikelola dengan cara menginvestasikan aset dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan

atau penciptaan sumber daya dengan memberikan manfaat untuk tujuan sosial atau keagamaan sesuai dengan syariat islam.

Dalil (Al-Qur'an, Hadist, Fiqh) Yang Mendukung Wakaf Produktif

Secara tegas wakaf produktif pada Al-Qur'an tidak dinyatakan secara langsung, tetapi ada nash yang menjadi landasan hukum wakaf. Dalam surah Ali-Imran: 92 Allah shubhannahu wa ta'ala berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Dari perspektif teologis, meskipun Al-Qur'an tidak secara jelas menyebut istilah wakaf. Al-Qur'an menekankan pentingnya dukungan sosial untuk tujuan mulia. Wakaf dipahami sebagai bentuk berdonasi yang merupakan salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW dan implementasi para sahabat, sehingga menjadi inti dari ajaran Islam. Namun seiring berjalannya waktu, lembaga wakaf berkembang dan tak luput dari pengaruh ekonomi, budaya, dan dinamika sosial terhadap perjalanan umat Islam dari masa ke masa (Mufida et al., 2022).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Dalam hadist tersebut, para ulama mengartikan istilah sedekah jariyah sebagai wakaf. Hal ini merupakan bentuk sedekah yang manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan oleh penerimanya (Isfandiar, 2008). Berbeda

dengan sedekah atau hibah biasa, pahalanya tidak selalu bertahan lama karena barang yang diberikan bisa saja dijual atau dialihkan oleh penerima. Sementara itu, harta yang diwakafkan memiliki status kepemilikan yang dikembalikan kepada Allah, sehingga manfaat dan pahalanya tetap mengalir selama harta tersebut dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

Berkenaan dengan hal tersebut wakaf harus dikelola secara produktif dengan manajemen modern, prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Saw. “tahan pokok dan sedekahkan hasilnya”. Ini berarti, pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Wakaf produktif seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan dan pertambahan nilai, menghasilkan surplus, sehingga manfaatnya dapat terus disalurkan (Rozalinda, 2015:73 dalam Fajar, Samson Muhammad, dkk., 2015: 4). Contoh yang sangat ideal dan sesuai prinsip syariah yaitu, wakaf sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan karena pada masanya sumber air bersih sangat terbatas.

Elemen-Elemen Wakaf Produktif

Harta wakaf dibagi menjadi dua objek yaitu, aset tidak bergerak (bangunan, tanah, dan rumah susun) dan aset bergerak (uang, kendaraan, dan surat berharga). Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai tujuan dan fungsinya (Sadat & Samri, 2023). Pengelolaan produktif berarti mengelola aset wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf. Salah satu bentuk aset wakaf bergerak yang umum adalah wakaf tunai, yang dikelola secara produktif untuk kepentingan umat dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf produktif perlu eksistensi manajemen baik, yaitu: Pertama, kerangka manajemen harus disalurkan untuk mendukung program-program pemberdayaan beserta semua jenis pengeluaran yang termasuk di dalamnya. Kedua, mengangkat posisi Nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan terbaik bagi masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ketiga, Badan wakaf wajib menyusun laporan keuangan audit tahunan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Distribusi manfaat harus berkelanjutan dan profesional demi kemaslahatan umum sesuai syariah, mencakup fakir miskin, anak yatim, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi, agar manfaatnya dirasakan luas dan berkelanjutan (Sabdo & Fajar, 2023).

Perbedaan Antara Wakaf Produktif Dan Wakaf Konsumtif

Wakaf produktif dan wakaf konsumtif memiliki perbedaan tujuan, pendapat, dan pengelolaannya. Wakaf produktif bertujuan dapat dirasakan dalam jangka panjang, yang di mana menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan aset wakaf, seperti tanah disewakan untuk usaha atau uang wakaf diinvestasikan, untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Zainal, 2016). Sedangkan, wakaf konsumtif bertujuan memberikan manfaat yang bersifat langsung atau mendesak, tetapi tidak menghasilkan pendapatan tambahan sehingga bersifat sementara, seperti pendirian masjid, sekolah, panti, dan rumah sakit. Keduanya mempunyai peran saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana wakaf konsumtif memenuhi kebutuhan langsung, sementara wakaf produktif memastikan tercapainya manfaat ekonomi dan sosial.

Peran Wakaf Dalam Maqashid Al-Shariah

Secara bahasa maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah jamak dari maqsūd, berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, syariah secara bahasa berarti jalan menuju air (Jamaa, 2011). Maqasid al-shariah merujuk pada tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan norma-norma Islam.

Peran wakaf dalam maqashid al-syar'iah berfungsi sebagai sarana utama dalam pendistribusian dalam membantu fasilitas masyarakat yang mendukung kemaslahtan umat secara menyeluruh. Wakaf diarahkan untuk mencapai tujuan umum dan khusus sesuai syariat islam dalam menjaga maqashid syar'iah al-khamsah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Khususnya, wakaf memastikan bahwa harta tersebut menjadi abadi dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang yang berfungsi sebagai amal jariyah, serta mendorong dalam menolong dan saling membantu terhadap kepedulian sosial secara umum.

B. Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGS): Definisi dan 17 Tujuan Utama

Pokok dari pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan kegiatan sosial dan ekonomi yang berdampak pada lingkungan. Artinya, setiap aktivitas ekonomi dan sosial perlu mempertimbangkan atau menjaga efeknya terhadap lingkungan, agar lingkungan mampu menjalankan perannya dalam mendukung kehidupan saat ini dan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk menjaga daya bersih dan kemampuan alam untuk bertumbuh, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia dari generasi sekarang ke generasi berikutnya.

Menurut (Alisjahbana dan Murningtyas, 2018), pembangunan berkelanjutan dapat diartikan yaitu suatu proses transformasi yang memanfaatkan sumber daya alam, pengelolaan investasi, fokus pada pengembangan teknologi, dan penyesuaian institusi dilakukan supaya selaras dan konsisten dengan kebutuhan masa kini serta yang akan datang. Artinya adalah pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses terus – menerus yang melibatkan sumber daya alam dengan cara bijaksana dan bertanggung jawab serta memanfaatkan investasi dan teknologi untuk diarahkan pada proyek yang mendukung keberlanjutan untuk masa depan dan masa kini.

Tujuan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam 17 sasaran utama (Alisjahbana dan Murningtyas, 2018), yaitu:

1. Menghapuskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan di manapun.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang optimal, serta memajukan pertanian yang berlanjut.
3. Menghasilkan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua kalangan masyarakat dari berbagai usia .
4. Meningkatkan kualitas pendidikan yang menyeluruh dan adil serta memperluas akses terhadap pembelajaran seumur hidup untuk semua orang.
5. Menciptakan kesetaraan gender dan memperkuat pemberdayaan Perempuan.
6. Memastikan penyediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Menjamin memperoleh akses energi yang wajar, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

8. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang universal dan berkelanjutan, menciptakan sektor pekerjaan yang produktif, dan menyeluruh, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Memajukan infrastruktur yang kokoh, memperkuat industri yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam negeri dan antarnegara.
11. Mengembangkan kota dan pemukiman yang menyeluruh, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Menjamin model untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim dan efeknya.
14. Memelihara dan memanfaatkan sumber daya laut serta samudera secara berkelanjutan untuk pengembangan yang berkelanjutan.
15. Memelihara, merehabilitas, dan meningkatkan pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem daratan, mengelola hutan secara bertanggungjawab, mencegah proses penggurunan, menangani penurunan kualitas lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat komunitas yang inklusif dan harmonis untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun institusi yang efisien, akuntabel, dan menyeluruh di semua level.
17. Memperkuat fasilitas pelaksanaan dan mengaktifkan kembali kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan

Kesesuaian Nilai - Nilai SDGS Dengan Prinsip – Prinsip Islam

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu agenda internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip – prinsip Islam yang bersifat universal dan mengatur keseimbangan kehidupan manusia ternyata sejalan dengan nilai - nilai yang terdapat dalam SDGs.

Melalui beberapa prinsip – prinsip Islam seperti, keadilan yang sesuai dengan tujuan SDGs yaitu, pengentasan kemiskinan melalui instrumen sosial zakat dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil agar dapat tercapainya pemerataan di lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pelestarian lingkungan yang sesuai dengan tujuan SDGs yaitu, pendidikan berkualitas dan perubahan iklim yang dijelaskan dalam Al – Qur'an bahwa larangan untuk merusak alam dan mensyukuri karunia dari alam melalui model edukasi hijau untuk pendidikan yang berkualitas.

Melalui berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf produktif, mempunyai potensi besar dalam mendukung inovasi pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perlindungan lingkungan. Mendayagunakan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan untuk menggapai kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dapat memberikan pengaruh positif bagi masa depan. Kebijakan yang berasaskan dengan prinsip – prinsip Islam dapat mendukung terciptanya pembangunan yang lebih universal dan berkelanjutan, serta mampu menghasilkan hasil untuk jangka panjang.

Tujuan – Tujuan Islam Dalam Pembangunan: Keadilan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Pelestarian Lingkungan, dan Kesejahteraan Umat

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan petunjuk dalam pembentukan umat dan masyarakat. Tujuan utama Islam (maqashid al- shariah) dalam pembangunan meliputi, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan umat.

Islam melihat keadilan sosial sebagai hak atas dasar yang harus ditegakkan, sehingga setiap orang memperoleh haknya dengan adil. Dalam maqashid syariah, melindungi kepentingan umat dan menghindari bahaya adalah hal yang utama, dengan menekankan pada distribusi kekayaan, hak, dan kesempatan yang adil untuk membangun masyarakat yang harmonis dan makmur. Keseimbangan dan keadilan ini tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadist yang melarang dan mendorong pemberdayaan.

Pengentasan kemiskinan adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam melalui instrumen zakat dan sedekah, serta prinsip keuangan yang adil. Prinsip maqashid syariah juga sangat mengutamakan perlindungan terhadap harta dan nyawa, sehingga ekonomi dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup, memastikan akses pada sektor pekerjaan, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial di lingkungan masyarakat (Firdaus, S, 2022).

Pelestarian lingkungan merupakan tujuan islam dalam pembangunan. Melalui manusia yang merupakan khalifah Allah di bumi ditugaskan untuk melindungi dan memelihara lingkungan sebagai titipan dari Allah (Firdaus, S, 2022). Islam mengajarkan prinsip keseimbangan (mizan), moderasi (wasathiyyah), dan menghindari kerusakan (fasad), serta pemborosan sumber daya. Menjaga kehidupan (nafs) dan

harta (mal) yang mencakup sumber daya alam dapat menjadi salah satu metode untuk pelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab, etika, dan ibadah.

Kesejahteraan menurut Islam merupakan pencapaian kemaslahatan di bidang spiritual, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Maqashid syariah melindungi lima aspek utama yaitu, pembangunan yang berfokus pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara individu dan komunitas, serta manusia dan lingkungan. Kesejahteraan umat dapat terwujud dengan menghormati hak – hak asasi mereka, memberikan kesempatan yang setara, dan mendukung pendidikan serta inovasi (Firdaus, S, 2022).

Melalui empat hal ini tujuan Islam dalam pembangunan adalah menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan agar umat dapat hidup sejahtera baik lahir maupun batin, tanpa menghancurkan lingkungan serta memastikan tidak ada yang tertinggal baik secara sosial maupun ekonomi.

C. Integrasi Wakaf Produktif Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf produktif sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui optimalisasi aset wakaf dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, konsep ini berkontribusi terhadap berbagai tujuan pembangunan global, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan akses layanan kesehatan (SDG 3), penyediaan pendidikan berkualitas (SDG 4), serta penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8). Integrasi antara prinsip-prinsip wakaf produktif dengan agenda SDGs menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan dalam Islam dapat menjadi solusi konkret

bagi tantangan pembangunan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat global.

Integrasi Wakaf Produktif Terhadap SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan)

Di Indonesia, UMKM memegang peranan vital dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan (Rachman, 2017). Oleh karena itu, UMKM memiliki kemampuan menjangkau hingga daerah pelosok dan berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi (Vandayani & Rohmana, 2023). Untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM secara komprehensif, diperlukan inovasi model pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan, salah satunya melalui mekanisme wakaf produktif.

Saat ini, wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang, saham, atau kekayaan intelektual yang dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, wakaf produktif sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM (Megawati, 2020). Dukungan ini dapat membantu UMKM mengatasi permasalahan klasik seperti modal, pemasaran, dan keterbatasan sumber daya manusia (Ikhsan & Hasan, 2020).

Model wakaf produktif untuk UMKM dapat dilakukan dengan beberapa skema, seperti pengumpulan dana dari masyarakat secara luas, yang kemudian diinvestasikan dalam sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan dan dampak sosial yang signifikan. Model wakaf produktif juga dapat diintegrasikan dengan program

pendampingan dan pelatihan bagi UMKM, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk. Selain itu, wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM melalui penerapan teknologi informasi. Implementasi teknologi informasi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas akses pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga UMKM dapat berkontribusi (Santi et al., 2024). Hal ini mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Santoso & Huda, 2019).

Integrasi Wakaf Produktif Terhadap SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Wakaf produktif, sebagai sebuah instrumen keuangan Islam yang berpotensi besar, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam sektor kesehatan (Adnan et al., 2021). Pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim melalui pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan perlengkapan pertahanan (Ali et al., 2018). Wakaf sebagai sarana pendanaan Islam memiliki keunggulan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat (Putra & Fildayanti, 2021). Dalam konteks kesehatan, Dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat dialokasikan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Integrasi Wakaf Produktif Terhadap SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

Pendidikan memegang peranan krusial sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan menjadi fondasi utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa (Nisa & Istiqomah, 2018). Oleh karena itu, sistem pendidikan suatu negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai dan pembentukan kepribadian (Andari et al., 2019).

Wakaf produktif sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor pendidikan secara berkelanjutan. Seperti wakaf produktif dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan bagi lembaga pendidikan Islam, sehingga tidak hanya bergantung pada dana pemerintah atau sumbangan donatur (Tolchah & Mu'ammam, 2019). Implementasi wakaf produktif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf properti yang disewakan, wakaf saham atau sukuk, atau wakaf uang yang diinvestasikan dalam usaha produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, beasiswa bagi siswa berprestasi, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan baru, seperti sekolah,

madrasah, atau pesantren, yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat luas (Ardiyansyah & Kasdi, 2021). Dengan demikian, wakaf produktif dapat mendukung pencapaian tujuan SDG 4, yang menargetkan untuk memastikan semua masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan berkualitas secara gratis, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau.

Salah satu contoh sukses implementasi wakaf produktif dalam bidang pendidikan adalah Universitas Al-Azhar di Mesir (Syamsuri et al., 2021). Universitas ini didirikan pada abad ke-10 melalui wakaf dan terus berkembang hingga menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di dunia. Wakaf produktif telah menjadi tulang punggung pendanaan Universitas Al-Azhar Mesir selama berabad-abad, sehingga memungkinkan universitas untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi ribuan mahasiswa dari seluruh dunia. Di Indonesia, beberapa lembaga pendidikan Islam juga telah mulai mengembangkan wakaf produktif sebagai sumber pendanaan alternatif, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor.

Integrasi Wakaf Produktif Terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Wakaf produktif juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi tercapainya SDG yang kedelapan. Implementasi wakaf produktif untuk mendukung tercapainya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mendanai proyek-proyek usaha mikro dan kecil, yang selama ini sering mengalami hambatan akses terhadap permodalan. Dengan memanfaatkan dana wakaf, lembaga pengelola wakaf (nazhir) dapat membangun pusat pelatihan keterampilan

kerja, pasar wakaf, atau fasilitas produksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat inklusi ekonomi, salah satu prinsip kunci dalam SDG 8. Menurut Chapra (2008), sistem keuangan Islam yang berbasis keadilan, termasuk wakaf, dapat menjadi alat distribusi kekayaan yang lebih merata, sekaligus pendorong produktivitas.

Di Indonesia, beberapa lembaga wakaf telah mengembangkan model wakaf produktif dalam bentuk pembiayaan mikro syariah, pembangunan ruko wakaf untuk UMKM, dan pengelolaan lahan pertanian berbasis wakaf. Misalnya, Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menginisiasi program wakaf pertanian dan wakaf usaha yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan penerima manfaat. Hal ini mendemonstrasikan bahwa wakaf tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif dapat menjadi strategi efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

D. Tantangan dan Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan aset wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi, termasuk kelemahan dalam kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan nazhir yang kurang efektif, dan rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf. Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, diperlukan strategi pemberdayaan nazhir yang mencakup peningkatan kompetensi, dedikasi etika, dan transparansi dalam pengelolaan (Sundari, 2023). Selain itu, integrasi kurikulum

wakaf dalam pendidikan ekonomi Islam sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan umat, serta mendanai infrastruktur pendidikan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan institusi pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial melalui potensi ekonomi syariah.

E. Tantangan kelembagaan, regulatif, literasi masyarakat, dan transparansi

Pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum optimal dan belum semaju di negara lain. Ada beberapa tantangan pengelolaan aset wakaf, yaitu:

1. Kelembagaan BWI (Badan Wakaf Indonesia) masih menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai regulator dan organisasi pengelola wakaf (Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf). Kelembagaan tersebut merupakan bentuk entitas bertanggung jawab untuk membina nazhir, mengelola administrasi dan pengembangan wakaf, anggota menghentikan nazhir, serta memberikan nasihat kepada perwakilan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, BWI juga mengawasi pengaturan dan pengembangan aset wakaf baik secara nasional maupun internasional, serta memberikan kesepakatan untuk perubahan aset wakaf, serta masih kurang dalam koordinasi di tingkat pusat dan daerah.
2. Masih lemah pengelolaan wakaf oleh lembaga kenazhiran. Nazhir dalam menerima harta wakaf, baik perindividu, organisasi, maupun badan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya. Beberapa nadzhir masih belum memiliki rencana strategis dan enggan memberikan data kepada tim peneliti karena alasan

keamanan. Selain itu, standar laporan akuntansi wakaf yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2021.

3. Literasi masyarakat masih rendah mengenai wakaf dapat diukur melalui Indeks Literasi Wakaf (ILW). Pada tahun 2020, skor ILW secara nasional mencapai 50,48 termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya skor ILW ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek wakaf, seperti tugas dan wewenang nazhir, syarat rukun wakaf, serta legalitas akta ikrar wakaf. Provinsi dengan ILW terendah adalah Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. (Pusat Kajian Anggaran et al., 2022).

F. Strategi pemberdayaan nazhir dan pemanfaatan teknologi informasi

Pengelolaan dan pengembangan nazhir merupakan aspek yang sangat krusial dalam tugas manajemen organisasi yang mengelola wakaf (Ilyas, 2017). Kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi ini di era serba cepat ini. Untuk mencapai pengelolaan wakaf yang baik secara transparansi, bertanggung jawab, dan profesional perlu adanya pembinaan dengan standar manajemen yang kekinian, pendidikan formal dan non formal, pelatihan atau bimbingan, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Strategi pemberdayaan nazhir, yaitu:

1. Mempunyai kompetensi dan keahlian khusus agar menjalankan pekerjaan dengan optimal, yang berasal dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang didapatkan dalam periode tertentu. Dengan itu dapat tepat mengenali dan memahami berbagai persoalan

yang dihadapi. Selain itu, dengan dukungan teknologi, seorang profesional dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dengan kualitas yang baik.

2. Dedikasi etika yang kuat dalam profesi pelayanan sosial, yang diwujudkan melalui kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas yang wajib diterapkan. Kode etik ini bertujuan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan kelalaian, baik secara disengaja maupun tidak sengaja, serta menjaga integritas profesi dari perilaku yang tidak etis dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya.
3. Transparansi merupakan elemen penting sebagai penegak amanah perwakafan yang diajarkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kepemimpinan yang diawasi dengan baik. Keterbukaan dalam lembaga Nazhir merupakan langkah sistematis untuk mencegah tindakan korupsi, manipulasi, dan sejenisnya. Tolak ukur keterbukaan para Nazhir dalam menjalankan tanggung jawab moral itu berkontribusi pada tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Keterbukaan penuh (transparansi) muncul karena banyak peristiwa yang berkaitan dengan kondisi keuangan lembaga yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan mengharuskan lembaga untuk menyajikan berbagai fakta relevan dalam laporannya, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai

lembaga tersebut dari laporan keuangan yang diterbitkan.

G. Urgensi integrasi kurikulum wakaf dalam pendidikan ekonomi Islam

Wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen ekonomi syariah dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui integrasi ini, pendidikan ekonomi Islam tidak hanya fokus pada teori ekonomi syariah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan umat yang terkandung dalam wakaf, seperti solidaritas sosial, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur pendidikan, beasiswa, pengembangan profesional guru, serta penelitian dan pengembangan kurikulum, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan (Rohmatillah, 2023).

Penggabungan wakaf dalam kurikulum ekonomi Islam dapat memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran ekonomi syariah dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Koordinasi yang erat dengan pemerintah, badan wakaf, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan sangat diperlukan dalam mengembangkan program yang bermanfaat dan berkelanjutan. Dengan tujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai potensi ekonomi syariah dalam memajukan dunia pendidikan, peran penting lembaga pendidikan dan tokoh agama sangatlah penting. Dalam konteks ini, integrasi sangatlah penting untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami aspek teori ekonomi Islam, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai wakaf dalam praktik ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets. *California Management Review*, 38(3), 102–120.
<https://doi.org/10.2307/41165845>.
- Aaker, D. A., Kumar, V., Leone, R. P., & Day, G. S. (2013). *Marketing research* (11 Edition). John Wiley & Sons.
- Aassouli, D., Asutay, M., Mohieldin, M., & Nwokike, T. C. (2018). Green Sukuk, Energy Poverty, and Climate Change. Policy Research Working Paper, World Bank Group.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, sustainable development goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Abdullah, M. S., & Keshminder, J. S. (2020). What drives green sukuk? A leader's perspective. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(3), 985–1005.
<https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1821339>
- Abdullah, N., Mat Derus, A., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities: A measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Abubakar, L. (2021). Regulation and implementation of sustainable finance: A challenge to Indonesian banks. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(1S), 1–12.
- Accenture. (2022). *Sustainability: The New Frontier of Consumer Expectations*. Retrieved from [<https://www.accenture.com>] (<https://www.accenture.com>)

- ADB. (2022a). Green infrastructure investment opportunities. Asian Development Bank.
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_indonesia_giio_en.pdf
- ADB. (2022b, June). SDG indonesia one: Green finance facility. Asian Development Bank.
<https://www.adb.org/publications/sdg-indonesia-one>
- Adebayo, O. P., Kehinde, O. J., Ogunnaike, O. O., Olaoye, O. P., & Adesanya, O. D. (2019). Corporate brand identity and service quality in higher education management. *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 45–59.
<https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.04>
- Adia, C. S., Pujiyanto, P., & Arizal, F. W. (2019). Branding TPA Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang. *MAVIS : Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 1(02), 64–71.
- Adnan, R. A. binti R., Mutalib, M. A., & Aziz, M. R. Ab. (2021). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73. <https://doi.org/10.1108/ijif-11-2019-0178>
- Afiff, S., & Mulyani, S. (2021). *Strategi Keuangan Berkelanjutan di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Afzil Ramadian, S. T., Tr, M. M., Wahyudin, Y., & Pi, S. (2025). Transformasi Digital dan Kepemimpinan Strategis: Membentuk Masa Depan Bisnis yang Resilience. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Aggarwal, R. K., & Yousef, T. (2000). Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(1), 93–120. <https://doi.org/10.2307/2601094>

- Ahidin, Udin, Implementasi Pemasaran Berkelanjutan Dalam Rangka mendukung Ekonomi Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan (Sebuah Tinjauan), Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 1 Januari-April 2019
- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2015). On the sustainable development goals and the role of Islamic finance. World Bank, Washington, DC.
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal Of Social Research*, 1(6), 507–512.
<https://doi.org/10.55324/Josr.V1i6.110>
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2017). **Islamic Capital Markets: Products and Strategies**. Palgrave Macmillan.
- Alam, N., Duygun, M., & Ariss, R. T. (2016). Green Sukuk: an innovation in Islamic capital markets. In A. Dorsman, O. Arslan-Ayaydin, & M. B. Karan (Eds.), *Energy and Finance: Sustainability in the Energy Industry* (1st ed., pp. 167-185). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32268-1_10
- Alami Sharia. (n.d.). Pentingnya ekonomi inklusif dalam pembangunan nasional. <https://www.alamisharia.co.id>
- Alfred Kuss, & Eisend, M. (2019). *Research Methodology in Marketing Theory Development, Empirical Approaches and Philosophy of Science Considerations*. Springer Nature Switzerland.
- Alhaddi, H. (2015). Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review. *Business and Management Studies*, 1(2)
- Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h.29. <https://doi.org/10.32664/mavis.v1i02.419>

- Ali, E. M. T. E., Nordin, N., Adam, F., & Halim, M. S. A. (2018). Waqf Assets Management: Harnessing Tool for Muslims' Welfare. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11).
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4907>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan strategi implementasi (Cetakan ke-2). Unpad Press.
- Alvesson, M., & Skoldberg, K. (2009). *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research* (2nd ed.). London: Sage.
- Amaliyah, A. R., Judijanto, L., Apriyanto, Rustam, A., Pardjono, N., Desi, D. E., & Risman, A. (2025). *Manajemen Keuangan : Teori Dan Praktik Dalam Mencapai Financial Freedom* (1st Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amiruddin, M. (2023). **Tren Investasi Syariah di Era Digital**. Jakarta: Zikrul Hakim.
- and Infrastructure during the COVID-19 Pandemic in Indonesia ,
 Jurnal Hubungan
- Andari, I. A. K. M. L., Darsana, I. W., & Asri, A. S. (2019). Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Portofolio Terhadap Hasil Belajar IPS. *International Journal of Elementary Education*, 3(4), 373.
<https://doi.org/10.23887/ijee.v3i4.21309>
- Anggrianto, C., Shaari, N., & Abdul Hamid, N. B. (2017). Pengelolaan Strategi Branding Apple Inc. Untuk Menciptakan Loyalitas Konsumen. *Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain Dan Periklanan (Demandia)*, 2 (02), 216–228.
<https://doi.org/10.25124/demandia.v2i02.936>

- Anwar, S, & Yenni, J. S., (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260.
<https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Archer, M. S. (1995). *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*. Cambridge University Press.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *ZISWAF Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2015). **Principles of Marketing** (6th ed.). Pearson Australia.
- Arora, R. U., & Sarker, T. (2022). Financing for sustainable development goals (sdgs) in the era of COVID-19 and beyond. *The European Journal of Development Research*, 35(1), 1–19. <https://doi.org/10.1057/s41287-022-00571-9>
- Ashish Kumar Jha, at.al, (2024). Finance Research and the UN Sustainable Development
- Aust, V., Morais, A. I., & Pinto, I. (2020). How does foreign direct investment contribute to Sustainable Development Goals? Evidence from African countries. *Journal of Cleaner Production*, 245, 118823
- Aziz, A., Candri, Falatehan, A. H., Wahyuningsih, N., Nurhendi, S., Novitasari, K., Fatmawati, P. N., Anwar, M., Windiani, R. E., Bustomi, Taqwa, B., Widagdo, R., Dahlan, A. Z., Putra, D. D., Ulfah, M., Faozi, M. M., & Hasyim. (2024). *Teori Dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*. CV Adanu Abimata.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (n.d.). *Ekonomi inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan*.
<https://sdgs.bappenas.go.id>

- Bagaskara, D, Y., Wahyuni, N., & Meldona. (2024). Mapping of Green Sukuk Research (2014-2023): With Vosviewer Bibliometric and Literature Review. In A. Global Financial Accounting Journal, Vol. 8 No. 1 (2024).
<https://doi.org/10.37253/gfa.v8i1.9148>
- Bappenas. (2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
<https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Bartlett, R.P. & Bubb, R. (2023). Corporate Social Responsibility through Shareholder Governance. ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper N° 682/2023 [July].
<https://ecgi.global/content/working-papers>
- Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Beik, I. S., Swandaru, R., & Rizkiningsih, P. (2021). Utilization of digital technology for zakat development. In *Islamic FinTech: Insights and Solutions* (pp. 231–248). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_13
- Bernini, F., La Rosa, F. (2024). Research in the greenwashing field: concepts, theories, and potential impacts on economic and social value. *J Manag Gov* 28, 405–444
<https://doi.org/10.1007/s10997-023-09686-5>

- Bhaskar, R. (2010). "Contexts of interdisciplinary: interdisciplinary and climate change," hlm. 1-24 dalam Bhaskar, R., Frank, C., Hoyer, K. G., Naess, P., Parker, J. (Penyunting), *Interdisciplinary and climate change: Transforming knowledge and practice for our global future*. London/NY: Routledge Taylor & Francis Group.
- Bhaskar, R., (1998 [1979], *The Possibility of Naturalism* (3rd edition), London: Routledge. ISBN 0-415-19874-7
- Bhaskar, R., (2008 [1975]) *A Realist Theory of Science*, New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library
- Bhattacharyya, R. (2021). Green finance for energy transition, climate action and sustainable development: overview of concepts, applications, implementation and challenges. *Green Finance*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.3934/gf.2022001>
- Blumberg, M., & Pringle, C. D. (1982). The missing opportunity in organizational research: Some implications for a theory of work performance. *Academy of Management Review*, 7(4), 560–569. <https://doi.org/10.5465/amr.1982.4285240>
- Boje, D.M., (2019). *Organizational Research: Storytelling in Action*, 1st Edition, (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), London, New York, Routledge.
- Bonnedahl, K. J., Heikkurinen, P., & Paavola, J. (2022). Strongly sustainable development goals: Overcoming distances constraining responsible action. *Environmental Science & Policy*, 129, 150–158. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.004>
- Boonmavichit, T., & Boossabong, P. (2022). Approaching Foresight through Critical Realism: Lessons Drawn from Thailand. *Journal of Futures Studies*, 26(4), 41-54. [https://doi.org/10.6531/JFS.202206_26\(4\).0005](https://doi.org/10.6531/JFS.202206_26(4).0005)

- Boubaker, S., & Le, T.-H. (2024). Green finance and sustainable development goals. *Transformations in Banking, Finance and Regulation*, 12(1), 1–464. <https://doi.org/10.1142/q0427>
- Brannan, M. J., Fleetwood, S., O'Mahoney, J., & Vincent, S. (2016). Critical Essay: Meta-analysis: A critical realist critique and alternative. *Human Relations*, 70(1), 11-39. <https://doi.org/10.1177/0018726716674063>
- Brunson, L., Lauzier-Jobin, F., Olson, B., & Côté, Louis-Philippe. (2025). Seven key insights from critical realism and their implications for ecological thinking and action in community psychology. *J Community Psychol*, 53, 1-21. <https://doi.org/10.1002/jcop.23054>
- Budiasa, I. W. (2020). Green financing for supporting sustainable agriculture in Indonesia. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 518(1), 12042. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/518/1/012042>
- Bunga Putri Nauli. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) 9: Industry, Innovation,
- Bygstad, B., Munkvold, B. E., & Volkoff, O. (2016). Identifying Generative Mechanisms through Affordances: A Framework for Critical Realist Data Analysis. *Journal of Information Technology*, 31(1), 83-96. <https://doi.org/10.1057/jit.2015.13>
- CAF. (2023, September 27). Case studies: Innovative finance for air quality. *Clean Air Fund*. <https://www.cleanairfund.org/innovative-finance-case-studies/>
- Cahyantini, Aryntika, Upaya Peningkatan Perekonomian petani dengan Penerapan Branding Green Agriculture di Kota Batu, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam El-Mal*, Vol 5 No 6 (2024) 3623 – 3635 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/elmal.v5i6.2936

- CBI. (2023, May 31). What is Green and Sustainable Finance? What Is Green and Sustainable Finance?; Chartered Banker Institute.
https://www.charteredbanker.com/resource_listing/knowledge-hub-listing/what-is-green-and-sustainable-finance.html
- CDP. (2021). Shaping a sustainable financial system, Future-proofing global finance for a net-zero, nature-positive world, Indonesia. CDP. https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/005/159/original/Sustainable_financial_system_Country_Profile_Indonesia_%28%29.pdf#:~:text=As%20of%202020%2C.%20Indonesia,201812.%201.%20Convention%20on
- Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system (Vol. 8). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Islamic Research and Training Institute (IRTI)
- Ching-Chi Hsu. (2022). The role of the core competence and core resource features of a sharing economy on the achievement of SDGs 2030, , Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Journal of Innovation & Knowledge. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)
- Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From financial materiality to ESG integration: A survey of professional investors. *Ecology and Society*, 20(1), 1-19.
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB). (2021). CDSB Framework for reporting environmental and climate change information. Retrieved from <https://www.cdsb.net/framework>

Cobs-Muñoz, V., & Westerholt, R. (2025). Proposing critical realism and second-generation environmental justice for advancing sacrifice zone analysis. *Progress in Environmental Geography*, 4(1), 44-68.

<https://doi.org/10.1177/27539687241307953>

Damayanti, L. (2023). **Literasi Keuangan Berkelanjutan dan Perilaku Konsumen Muslim**. Yogyakarta: Deepublish.

Damayanti, Vidya (2025), Strategi Pemasaran Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing PT. Sun Power Ceramics Di Era Digital : Pendekatan Inovatif dan Praktis, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 9 No. 1, 2025,

David, 2004, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Selemba Empat.

David, F. R. 2015. *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concept & Cases*. In *Strategic Management*.

Dawson, S. (2017, November 21). The role of financial services in helping to meet the UN Sustainable Development Goals. *Financial Services Thought Gallery*. <https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/un-sustainable-development-goals/>

Dempere J, Alamash, E. & Mattos P. (2024) Unveiling the truth: greenwashing in sustainable finance. *Front. Sustain.* 5:1362051. doi: 10.3389/frsus.2024.1362051. DOI: 10.1177/1035304 615569406

Dempere, J., Alamash, E., & Mattos, P. (2024). Unveiling the truth: greenwashing in sustainable finance. *Frontiers in Sustainability*, 5. <https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1362051>

- Deni, A., Thamrin, Hirbasari, I. A., Taryono, Iswahyudi, S., Syofya, H., Soeharjoto, Afrima, U., & Muafiqie, H. (2024). Pengantar Ekonomi Pembangunan. CV Rey Media Grafika.
- Departemen Ekonomi dan Bisnis UGM. (n.d.). Peran keuangan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. [https:// economics .feb.ugm.ac.id](https://economics.feb.ugm.ac.id)
- Diarta, I., Lestari, P., & Dewi, I. (2017). Strategi Branding Dalam Promosi Penjualan Produk Pertanian Olahan PT. Hatten Bali untuk Pasar Pariwisata Indonesia. *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*, 4(2), 170–187.
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>
- Djafar, F., & Ap, S. (2024). Teori administrasi publik pendekatan analisis dan penerapan. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- DJPPR. (2020). Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia. Kementerian Keuangan RI. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/INS-Kajian-Green-Sukuk-Ritel.pdf>
- DJPPR. (2024). 2024 Green Sukuk Allocation and Impact Report. Kementerian Keuangan RI. <https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/A99E2679-3F9D-4AA1-956C-D98CC2963BFD>
- Dorfleitner, G., & Utz, S. (2024). Green, green, it's green they say: a conceptual framework for measuring greenwashing on firm level. *Rev Manag Sci* 18, 3463–3486. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00718-w>

- Drucker, P. (1977). Is executive pay excessive? Wall Str. J. , 23, 20
- Dumitriu D, Militaru G, Deselnicu DC, Niculescu A, Popescu MA-M. A Perspective Over Modern SMEs: Managing Brand Equity, Growth and Sustainability Through Digital Marketing Tools and Techniques. Sustainability [Internet]. 2019;(09 April 2019). Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/su11072111>
- Edwards, T., & Kakavelakis, K. (2021). Problematizing people management practices: a critical realist study of knowledge sharing. *Journal of Critical Realism*, 21(1), 46–64. <https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1992734>
- Elda, Septia Wahyu, Eli Jamilah Miwardja, Prima Mulyasari Agustin, Strategi Branding Pariwisata Berkelanjutan Geosite Tabiang Takuruang Di Sumatera Barat, *Jurnal Ikraith-Humaniora* Vol. 8, No. 1 Maret 2024, <https://Doi.Org/10.37817/Ikraith-Humaniora.V8i1>
- Elitan, Lena & Lina Anatan. 2007, *Manajemen Operasi dalam Era Baru Manufaktur*, Bandung: Alfabeta.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Ellaway, R. H., L. O’Gorman, R. Strasser, D. C. Marsh, L. Graves, P. Fink & C. Cervin (2015): A critical hybrid realist-outcomes systematic review of relationships between medical education programmes and communities: BEME Guide No. 35, *Medical Teacher*, DOI: 10.3109/0142159X.2015.1112894
- Ellaway, R. H., Kehoe, A., & Illing, J. (2020). Critical Realism and Realist Inquiry in Medical Education, *Academic Medicine*, 95(7), 2984–988. doi: 10.1097/ACM.0000000000003232
- EU. (2024, July 1). Overview of sustainable finance. EU Economy and Finance. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en

- European Commission. (2018). Action plan: Financing sustainable growth. https://finance.ec.europa.eu/publications/action-plan-financing-sustainable-growth_en
- European Commission. (2021). Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). https://ec.europa.eu/info/publications/210324-sustainable-finance-disclosure-regulation_en
- European Commission. (n.d.). Sustainable finance: The EU's role in driving sustainability. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
- European Union. (n.d.). EU action on sustainable finance. https://europa.eu/european-union/topics/sustainable-finance_en
- Fachruddin, M. (2022). *Pembiayaan Berbasis Syariah untuk UMKM*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadhilah, T. (2023). *Pemasaran Digital Produk Perbankan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahrurrozi, M., SE, M. M., Amrullah, S. H., & Par, M. S. (2025). Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Fair, R.C. (1971) The optimal distribution of income. Q. J. Econ, 85, 551–579.
- Fairclough, Norman. (2005). Discourse analysis in organization studies: The case for critical realism. Organization Studies, 26(6), 915–939 ISSN 0170–8406. DOI: 10.1177/0170840605054610
- Faisal, Y. A., Gunawan, I., Cupian, Hayati, A., Apriliadi, A., & Fajri, M. (2023). Examining the Purchase Intentions of Indonesian Investors for Green Sukuk. Sustainability, 15(9), 7430. <https://doi.org/10.3390/su15097430>.

- Falcone, P. M. (2020). Environmental regulation and green investments: the role of green finance. *International Journal of Green Economics*, 14(2), 159.
<https://doi.org/10.1504/ijge.2020.109735>
- Filippini, M., Leippold, M., & Wekhof, T. (2024). Sustainable Finance Literacy and the Determinants of Sustainable Investing. *Journal of Banking & Finance* 163(1),107-167.
 DOI:10.1016/j.jbankfin.2024.107167
- Firdaus, R. (2023). *Fintech Halal dan Inklusi Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Firdaus, S. (2022). Al-Qurâan dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120-138.
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 8(1), 231.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231–240.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Fitrani, E. (2021). *Inovasi Keuangan Mikro dan Crowdfunding Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Fleetwood, S. (2005) The ontology of organisation and management studies: A critical realist approach. *Organization*, 12 (2), 197- 222. ISSN 1350-5084.
<http://dx.doi.org/10.1177/1350508405051188>
- Fletcher, A. J. (2017). Applying critical realism in qualitative research: Methodology meets method. *International Journal of Social Research Methodology: Theory & Practice*, 20(2), 181–194. <https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401>

- Fonseca, A., McAllister, M. L., & Fitzpatrick, P. (2014). Sustainability reporting among mining corporations: a constructive critique of the GRI approach. *Journal of cleaner production*, 84, 70-83.
- FRC. (2024). ESG and sustainable finance: A comprehensive guide. <http://www.financialregulationcourses.com/Financial-Regulation-Courses; Financial Regulation Course>. <https://www.financialregulationcourses.com/esg-and-sustainable-finance>
- Fred R Davi. 2011, *Manajemen Strategik*, Jakarta : Salemba Empat, buku 1, edisi 12
- Frederiksen & Kringelum (2021), Five potentials of critical realism in management and organization studies. *Journal of Critical Realism*, 20(1), 18-38. <https://doi.org/10.1080/14767430.2020.1846153>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- Gabriela Lucia Sabau, Abingdon. (2024). *Critical Realism and the Objective Value of Sustainability: Philosophical and Ethical Approaches*. New York, NY, Routledge. doi: 10.4324/9781003307587
- Gallup. *State of the Global Workplace: 2024 Report*
- Ghunashvili, T. (2024, March 7). Synchronizing sustainable finance and sdgs: A mandate for moving forward faster. *Journal*. <https://unglobalcompact.ge/sustainability-spotlight/en/mdgradi-finansebisa-da-mdgradi-ganvitarebis-miznebis-sinergia-swrafi-progresis-mandati/>
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., Rasbin, & Perman, S. H. (2019). *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Giovannoni, E., & Fabietti, G. (2013). What is sustainability? A review of the concept and its applications. *Integrated Reporting: Concepts and Cases That Redefine Corporate Accountability*, 21–40.
- Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. *Journal of Business Economics*, 92(3), 467–516.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021. Amsterdam: GRI. Retrieved from <https://www.globalreporting.org>
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). GRI Standards for sustainability reporting. Global Reporting Initiative. <https://www.globalreporting.org/>
- Goals, An analysis and forward look. *Research in International Business and Finance* 71 (2024) 102463, journal homepage: www.elsevier.com/locate/ribaf.
- Gopal, S., & Pitts, J. (2025). ESG Integration: Unveiling Risk and Driving Innovation in Sustainable Finance. In *The FinTech Revolution: Bridging Geospatial Data Science, AI, and Sustainability* (pp. 35–81). Springer.
- Granados-Sánchez, Jesús. (2023). Sustainable Global Citizenship: A Critical Realist Approach. *Social Sciences* 12 [171], 1-22. <https://doi.org/10.3390/socsci12030171>
- Greenhaus, J. H., & Allen, T. D. (2011). Work-family balance: A review and extension of the literature. *Journal of Management*, 37(1), 17–49. <https://doi.org/10.1177/0149206310382457>
- GRI. (2025). The global standards for sustainability impacts. GRI.

- Gul, I. (2024, September 17). Sustainable finance: Shaping the future of our global economy. Garanti BBVA International. <https://garantibank.eu/news-blogs/sustainable-finance-shaping-the-future-of-our-global-economy>
- Gunawan, I. (2023). Sukuk Hijau di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Praktik. Rajawali Pres, PT Rajagrafindo Persada.
- Gurendrawati, E., Ulupui, I. G. K. A., Hera Khairunnisa, S. E., Ak, M., Zairin, G. M., & SE, M. A. (2024). Akuntansi Sektor Publik. Bumi Aksara.
- Haas, R. D., & Popov, A. A. (2019). Finance and decarbonisation: why equity markets do it better. ETS Research Bulletin Series, 64(64). https://econpapers.repec.org/article/ecbecbrbu/2019_3a0064.htm
- Haji, Abdifatah Ahmed, Paul Coram, and Indrit Troshani. (2023). Consequences of CSR reporting regulations worldwide: a review and research agenda. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 36 (1), 177-208. DOI: 10.1108/AAAJ-05-2020-4571
- Handayani, N. (2021). *Sistem Keuangan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Hanic, A., & Smolo, E. (2023). Islamic approach to corporate social responsibility: an international model for Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(1), 175–191. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2021-0284>

- Harahap, Muhammad Ade Kurnia, Ana Fitriyatul Bilgies, Sisti Nurjanah, Syamsuri, Gatot Wijayanto, Pengembangan Branding Lokal Berkelanjutan: Mempromosikan Produk Unggulan dan Pariwisata Daerah melalui Pemasaran Berbasis Komunitas, *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal* Vol. 4 No. 2 Juni 2024, hlmn. 644-653
- Harsono, I., Mendrofa, S. A., Waruwu, R. M. P., Rela, I. Z., Anggraini, Y., Mirnayanti, S., Andriani, C., Isma, A., Nugraha, J. P., & Susanto, A. J. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Era Metaverse*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Hartwig, M. (2015). Obituary: Roy Bhaskar (1944-2014). *The Economic and Labour Relations Review*, 26(1), 162–163.
- Hassan, M. K., & Soumaré, I. (2015). Guarantees and profit-sharing contracts in project financing. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 231–249. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Widodo, T. (2021). **Islamic Finance and the Development of Financial Products: Theory and Practice**. Routledge.
- Hassani, B.K., dan Yacoub Bahini. 2022. The Relationship between ESG Disclosure and Economic Growth: A Critical Review. *Journal of Risk and Financial Management* 15: 538. <https://doi.org/10.3390/jrfm15110538>
- Henock, M. S. (2019). Financial sustainability and outreach performance of saving and credit cooperatives: The case of Eastern Ethiopia. *Asia Pacific Management Review*, 24(1), 1–9.
- Herbert, J. (2024, December 10). Financing the green transition in Indonesia: A challenge of global importance. *PositiveMoney*. <https://positivemoney.org/update/financing-the-green-transition-in-indonesia/>

- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hesketh, Anthony & Steve Fleetwood. (2006). Beyond Measuring the HRM–Organizational Performance Link. *Organization*, 13(5), 677–699. ISSN 1350–5084. DOI: 10.1177/1350508406067009
- Hidayat, R. (2023). **Marketing Hijau dan Digitalisasi Keuangan Islam**. Jakarta: Prenada Media.
- Hitt Michael, dkk, 1997, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Erlangga
- Hulu, H. B., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Analisis efektivitas Paris Agreement terhadap Indonesia sebagai anggota G20 dalam menangani climate change. *Jurnal Niara*, 17(2), 280–298.
- Hunt, S. D. (2011). Sustainable Marketing, Equity, and Economic Growth: A Resource-Advantage, Economic Freedom Approach. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(1), 7-20.
- Ibrahim, A., et al. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- IDB. (2020). Financing the sustainable development goals the contributions of the multilateral development banks. United Nations. <https://www.un.org/ohrrls/sites/www.un.org.ohrrls/files/mdb.pdf#:~:text=The%20SDGs%20commit%20to,their%20potential%20in%20dignity>

- IFC. (2022, March). Indonesia Country Progress Report March 2022. SBF Network. https://www.sbfnetwork.org/wp-content/uploads/pdfs/2021_Global_Progress_Report_Downloads/2021_Country_Progress_Report_Indonesia.pdf#:~:text=Consistent%20and%20authoritative%20data,in%20the%20banking%20sector.
- IFRS Foundation. (2022). ISSB and SASB: Consolidation and global sustainability standards development. Retrieved from <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>
- IFRS Foundation. (2023). IFRS Sustainability Disclosure Standards — ISSB. <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>
- Ikhsan, M., & Hasan, M. (2020). Analisis Dampak Penggunaan E-Commerce dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.26858/je3s.v1i1.41>
- Ilyas, M. (2017). Profesional nazhir wakaf dalam pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71-94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Inawati, W. A., & Rahmawati, R. (2023). Dampak Environmental, Social, Dan Governance (ESG) Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 225–241.
- Inclusive And Equitable Quality Education And Promote Lifelong Learning Opportunities For All “Memastikan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Adil Dan Mempromosikan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua” research gate, publication at: <https://www.researchgate.net/publication/352350720>.

- Indriastuti, M. (2024). Pendidikan dan Pelatihan Green Accounting. In *Green Accounting* (pp. 141–154). Minhaj Pustaka.
- Indriastuti, M., Ardin, G., & Wardana, A. B. (2025). The Contribution of Tax Incentives during Core Tax Administration System to Enhance ESG Performance in Indonesia. *Proceeding Conference on Applied Business and Accounting (CABA)*, 458–476.
- Internasional, E-ISSN: 2503-3883 I P-ISSN: 1829-5088, Vol. 10, No. 2 (2022).
- International evidence, *Modern Finance*. 2023, 1(1).
<https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.44>, www.mf-journal.com
- International Finance Corporation (IFC). (2012). IFC performance standards on environmental and social sustainability.
<https://www.ifc.org/performance-standards>
- International Finance Corporation (IFC). (2019). Operating principles for impact management.
<https://www.ifc.org/impactmanagement>
- International Finance Corporation (IFC). (n.d.). Sustainability framework: Integrating sustainability into investments.
<https://www.ifc.org/sustainabilityframework>
- International Monetary Fund (IMF). (2021). Climate change indicators dashboard. <https://climatedata.imf.org>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, N. Goritzki, E. L. Berger, S. Iturbide, M. Jobbins, A. Knorr, J. B. C. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, & B. Zhou, Eds.). Cambridge University Press.

- IRIS Carbon. (2023, June 21). The impact of sustainable finance disclosure regulation. Iris Carbon®.
<https://www.iriscarbon.com/enhancing-transparency-and-accountability-the-impact-of-sustainable-finance-disclosure-regulation/>
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam*, 2(1), 51-73.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Jamaa, L. (2011). Dimensi ilahi dan dimensi insani dalam maqashid al-syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i2.15>
- Jayne Mercier, Jackie Sanders, Robyn Munford. (2023). Fine Comp anions: Critical Realism and Framework Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1-22.
<https://doi.org/10.1177/16094069231220129>
- Jepsen, D. M., & Grob, S. (2015). Sustainability in recruitment and selection: building a framework of practices. *Journal of Education for Sustainable Development*, 9(2), 160–178.
- JSDGF. (2021, October 6). The Indonesian SDG bond: A leap towards financing the sdgs. The Indonesian SDG Bond: A Leap Towards Financing the SDGs | Joint SDG Fund; Joint SDG Fund. <https://www.jointsdgfund.org/article/indonesian-sdg-bond-leap-towards-financing-sdgs>
- Kapferer, J.-N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking (5th ed). Kogan Page.
- Kartajaya, H., & Sugiarto, R. (2019). *Marketing 4.0 untuk UMKM*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2004, Pemasaran Bank, Jakarta : Kencana

- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). Maqasid al-Shariah and sustainable development goals convergence: An assessment of global best practices. In *Islamic finance, fintech, and the road to sustainability: Reframing the approach in the post-pandemic era* (pp. 59–105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_4
- Kaswan. (2017). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Alfabeta: Bandung.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum 2025: Paviliun Indonesia untuk ekonomi inklusif dan berkelanjutan*. <https://ekon.go.id>
- Khairunnisa, F. (2024). **Ekosistem Digital Keuangan Syariah**. Surabaya: Laksana.
- Khairunnisa, S., Hafiar, H., & Bakti, I. (2018). Corporate Rebranding Framework Oleh CGV Cinemas. *EduTech*, 17(1). <https://doi.org/10.17509/e.v1i1.12249>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Khateeb, S. H., Ali, S. N., & Jumat, Z. H. (2023). Islamic finance, FinTech and the road to sustainability: reframing the approach in the Post-Pandemic era—an introduction. In *Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability: Reframing the Approach in the Post-Pandemic Era* (pp. 1–11). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_1
- Khodijah Ismail, at.al. (2021). *Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030 Goals 4 Ensure*

- Kirca Demirbaga, K. (2024). A paradigm shift in giftedness research: integrating critical realism's ontology, epistemology, and methodology. *Journal of Critical Realism*, 23(3), 292–312.
<https://doi.org/10.1080/14767430.2024.2366142>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). **Marketing Management** (15th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). **Marketing 5.0: Technology for Humanity**. Wiley.
- Kotsantonis, S., & Serafeim, G. (2019). Four things no one will tell you about ESG data. *Journal of Applied Corporate Finance*, 31(2), 50–58.
- Kramar, R. (2022), Sustainable human resource management: six defining characteristics. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 60: 146-170. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12321>
- Kringelum, L. B., & Brix, J. (2020). Critical Realism and Organizational Learning. *Learning Organization*, 28(1), 32–45. <https://doi.org/10.1108/TLO-03-2020-0035>
- Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Contradictions of Sustainable Finance: a Literature Reviw. *Jurnal Emba*, 10(2)
- Kumar, S., Sharma, D., Rao, S., Lim, W. M., & Mangla, S. K. (2022). Past, present, and future of sustainable finance: Insights from big data analytics through machine learning of scholarly research. *Annals of Operations Research*, 1–44.
<https://doi.org/10.1007/s10479-021-04410-8>

- Kurniawan, D. (2023). **Strategi Branding Produk Keuangan Syariah**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi, T. (2020). **Crypto Syariah dan Masa Depan Blockchain Halal**. Surabaya: Laksana.
- Lagoarde-Segot, Thomas & Wendy L. Currie. (2018). Financialization and information technology: A multi-paradigmatic view of IT and finance – Part II. *Journal of Information Technology*, 33, 1–8.
<https://doi.org/10.1057/s41265-017-0045-7>
- Lagoarde-Ségot, Thomas. (2019). Sustainable finance. A critical realist perspective. *Research in International Business and Finance*, 47, [January], 1-9.
<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.04.010>
- Lagoarde-Ségot, Thomas. (2024). Greenwashing and sustainable finance: an approach anchored in the philosophy of science, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 66, 101397, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101397>
- Lapinskienė, G., Gudaitis, T., & Martišienė, R. (2025). Green Loans: Expert Perspectives. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(4), 188.<https://doi.org/10.3390/jrfm18040188>
- Lawani, Ama. (2020). Critical realism: what you should know and how to apply it. *Qualitative Research Journal* 1443-9883. DOI 10.1108/QRJ-08-2020-0101
- Lawson, T. (1989). Abstraction, tendencies and stylised facts: a realist approach to economic analysis, *Cambridge Journal of Economics*, 13; 59-78.
- Lawson, T. (2023). The human person, the human social individual and community interactions, *Cambridge Journal of Economics*, 47(3), 475–506, <https://doi.org/10.1093/cje/bead016>

- Lestari, I. (2020). **Asuransi Syariah dan Pemberdayaan Sosial**. Jakarta: Prenada Media.
- Lestor, A., Puongsophol, K., & Haroen, R. (2023, July 18). Accelerating green and sustainable finance in Indonesia. Green Fiscal Policy Network. <https://greenfiscalspolicy.org/blog/accelerating-green-and-sustainable-finance-in-indonesia/>
- Levine, R. (2005). Finance And Growth: Theory And Evidence. In Handbook Of Economic Growth (Vol. 1, Issue SUPPL. PART A, Pp. 865–934). [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01012-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01012-9)
- Li W, Li W, Seppänen V, Koivumäki T (2023) Effects of greenwashing on financial performance: moderation through local environmental regulation and media coverage. *Bus Strategy Environ* 32, 820–841. <https://doi.org/10.1002/bse.3177>
- Li, C.-M., & Lee, J.-M. (2024). Determinants of the impact of ESG policy and corporate governance on employee rights. *E&M Economics and Management*, 27(1), 108–120. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2024-1-007>
- Liana, W., Putra, I. H., Kosadi, F., & Adrian. (2024). *Financial Technology (Fintech): Pengantar Dan Inovasi Teknologi Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Liang, W., Nguyen, D.N., Tran, Q.N., & Truong, Q.T. (2023). Employee welfare and firm financial performance revisited. *Managerial Finance*, 49(20), 248-269. DOI 10.1108/MF-02-2022-0095
- Lin D, Tang X, Li H, He G. (2023) An empirical research on employee welfare and internal control quality. *PLoS ONE* 18(8): e0290009. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290009>

- Litamahuputty, J. V., Patty, J. P., & Bakri, A. A. (2024). Fintech Dan Transformasi Manajemen Keuangan. Takaza Innovatix Labs.
- Liu, T., Lu, S., Wang, M., Wang, H., & Zhao, Z. (2024). Type of the Paper: Article. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4950065>
- Looy, Bart Van, Paul Gemmel and Roland Van Dierdonck. (2003). 2nd edition. Service Management. Prentice Hall
- Lubis, T. A., Yuliusman, Fazri, A., Yohanes, R. A., & Ningsih, M. (2024). Menggagas Masa Depan : Meningkatkan Nilai Perusahaan Dengan Keuangan Hijau Dan Kinerja Lingkungan (1st Ed.). PT. Adab Indonesia.
- Ma, Z., & Fei, Z. (2024). Research on the Mechanism of the Carbon Emission Reduction Effect of Green Finance. *Sustainability*, 16(7), 3087. <https://doi.org/10.3390/su16073087>
- Ma'ruf, A. (2022). *Sukuk Hijau dan Transformasi Pembiayaan Umat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madkhali, A., & Sithole, S. T. M. (2023). Exploring the Role of Information Technology in Supporting Sustainability Efforts in Saudi Arabia. *Sustainability*, 15 (16), 12375. <https://doi.org/10.3390/su151612375>
- Maftuchah, I., & Muliaman. (2015). Sustainable Financing. PT. Elex Media Komputindo.
- Mahmood, S., Sun, H., Iqbal, A., Alhussan, A. A., & El-kenawy, E.-S. M. (2024). Green finance, sustainable infrastructure, and green technology innovation: pathways to achieving sustainable development goals in the belt and road initiative. *Environmental Research Communications*, 6(10), 105036.

- Maiyarni, R., Utama, S., Djakman, C. D., & Mita, A. F. (2024). How does financial reporting quality mediate ESG performance to investment efficiency? *International Journal of Ethics and Systems*.
- Mansour, N. (2023). Green Technology Innovation and Financial Services System: Evidence from China. *Businesses*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.3390/businesses3010008>
- Martins, N.O. Inequality, sustainability and Piketty's capital. *Ecol. Econ.* 2015, 118, 287–291. [CrossRef]
- Masruro, U., Nasrulloh, U, F. (2022). Green Sukuk Investment: Student's Role and Interest in Realizing a Golden Indonesia 2045. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, Vol. 2, No. 1, June 2022.
- Mat, Nik Hazimah Nik & Barrett, Rowena. (2017). A Critical Realist View of the Human Resource Management Role Development in Malaysia. *Advanced Science Letters*, 23(6) 8771-8776. DOI: <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9968>
- Matthews, A. (2024, November 28). Aligning investment strategies and sustainable development goals – EN. BNPP AM USA Institutional Investor. <https://www.bnpparibas-am.com/en-us/portfolio-perspectives/aligning-investment-strategies-and-sustainable-development-goals/>
- Maulana, A. (2020). *Perbankan Syariah dan Teknologi Finansial*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Mauliyah, N., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 22
- Mavunga, G., (2019) #FeesMustFall Protests in South Africa: A Critical Realist Analysis of Selected Newspaper Articles *Journal of Student Affairs in Africa* 7(1), 81 99, DOI: 10.24085/jsaa.v7i1.3694

- Megawati, L. R. (2020). Integrated Assistance Model in The Framework of Strengthening The Foundation of MSMEs. *Business Review and Case Studies*, 1(1).
<https://doi.org/10.17358/brcs.1.1.24>
- Mello, R., Erro-Garcés, A., Dickmann, M., & Brewster, C. (2025). A potential paradigm shift in global mobility? The impact of the COVID-19 pandemic. *International Business Review*, 34(1), 102245.
- Mendizabal-Espinosa, R.M. (2017). A critical realist study of neonatal intensive care in Mexico. (PhD Thesis). London: UCL Institute of Education.
- Mercier, J., Sanders, J., & Munford, R. (2023). Fine Companions: Critical Realism and Framework Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1-12.
<https://doi.org/10.1177/16094069231220129>
- Meutia, I., Kartasari, S. F., Yaacob, Z., & Arunachalam, M. (2020). Mapping Sustainable Finance: A detailed analysis of banks in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(1), 13.
<https://doi.org/10.28992/ijsam.v4i1.110>
- Meylid, S. R. K., & Yuliani, D. P. (2024). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 12–23.
- Michael Brookes, at.al. (2024). Sustainable development goals and new approaches to HRM: Why HRM specialists will not reach the sustainable development goals and why it matters. *German Journal of Human Resource Management* 2024, Vol. 38(2) 183 –201 © The Author(s) 2024
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2018). **Financial Markets and Institutions** (9th ed.). Pearson.

- Moegiarso, S. (2023, July 28). Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA, Meningkatkan Likuiditas Valas Dalam Negeri dan Menjaga Ketahanan Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5279/pemerintah-berlakukan-pp-362023-tentang-devisa-hasil-ekspor-sda-meningkatkan-likuiditas-valas-dalam-negeri-dan-menjaga-ketahanan-ekonomi>
- Moore, L., & Gimber, H. (2024, September 13). Gauging the growth in green, social and sustainability bonds. J.P. Morgan Asset Management. <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/investment-themes/esg/gauging-the-growth-in-green-social-and-sustainability-bonds/>
- Mufid, Muhammad, 2005, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran Jakarta : Kencana
- Mufida, M. H. (2022). MENELAAH AL-QURAN DAN HADIST FILANTROPI ISLAM "Perbandingan Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an". Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4(02), 299-334. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v4i02.136>
- Mukhlisin, M., Tamanni, L., Azid, T., & Mustafida, R. (2020). Contribution of Islamic microfinance studies in achieving sustainable development goals. Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Volume I, 51–79. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1_4
- Mulyono, S. (2022). *Produk Inovatif Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musari, K., & Hidayat, S. E. (2023). The role of green sukuk in maqasid al-shariah and SDGs: Evidence from Indonesia. In Islamic finance, fintech, and the road to sustainability: Reframing the approach in the post-pandemic era (pp. 181–203). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_9

- Nagari, A., Maradidya, A., Ihsan, A. M. N., Chakim, M. H. R., Sangadah, H. A., Solihin, I., Sekarningtyas, H., Tirtosetianto, R. H., Jasmine, T. L., Simanullang, E. S., Saputro, B. P., & Borahima, B. (2024). *Manajemen Logistik Dan Rantai Pasokan*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Napisah, S., Judijanto, L., Apriyanto, A., & Sepriano, S. (2024). *Kepemimpinan Visioner: Membangun Masa Depan Organisasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nastain, M. (2017). Branding Dan Eksistensi Produk (Kajian Teoritik Konsep Branding Dan Tantangan Eksistensi Produk). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 14–26.
<https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6351>
- NBS. (2022, June 7). What is Sustainable Finance? Network for Business Sustainability (NBS). <https://nbs.net/sustainable-finance-meaning-and-examples-in-business/>
- Network for Greening the Financial System (NGFS). (2020). Guide for supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision.
<https://www.ngfs.net>
- Nik Mat, N. H. (2014). The HRM role of line managers: A Malaysian case study. Edith Cowan University. Retrieved from <https://ro.ecu.edu.au/theses/1087>
- Nisa, A. R., & Istiqomah, R. L. (2018). URGENCY OF PARTICIPATION OF PARENTS IN DEVELOPING POSITIVE CULTURE IN ELEMENTARY SCHOOLS. *Social Humanities and Educational Studies (SHES) Conference Series*, 1(1).
<https://doi.org/10.20961/shes.v1i1.23750>
- Noe, R. A. (2020). *Employee training and development* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

- Noor, J., Tunnufus, Z., Handrian, V. Y., & Yumhi, Y. (2023). Green human resources management practices, leadership style and employee engagement: Green banking context. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22473>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Nuraini, D. (2021). **Literasi Digital Konsumen Muslim**. Malang: Averroes Press.
- Nurtjahjadi, E. (2014). *Sustainable Marketing: Pemasaran Ramah Lingkungan dan Sosial Demi Generasi Mendatang*. Proseedings SNEB.
- Nurza, R. (2024). Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 454–467.
- OECD. (2020). *Developing sustainable finance definitions and taxonomies*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/environment/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies.pdf>
- OECD. (2020). *How Islamic Finance Contributes to Achieving the Sustainable Development Goals*.
- OECD. (2022). **Crypto-Assets: Key Developments, Regulatory Concerns and Responses**. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2024). *Sustainable finance*. Oecd. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/sustainable-finance.html>
- OJK, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, (2021), Penerbit OJK.

- Oka, N. K. D., & Hermawan, A. A. (2025). Evaluasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Studi Kasus pada Bank Sumsel Babel). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 623–639.
- Oktaviani, F. (2018). Strategi Branding Public Relations “Jendela Alam” dalam Mengembangkan Produk Agrowisata. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 203–213.
<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3950>
- Ongaro, E., & Yang, Y. (2024). Integrating philosophical perspectives into the study of public administration: The contribution of Critical Realism to understanding public value. *Public Policy and Administration*, 0(0).
<https://doi.org/10.1177/09520767241246654>
- Ongaro, E., & Yang, Y. (2024). Integrating philosophical perspectives into the study of public administration: The contribution of Critical Realism to understanding public value. *Public Policy and Administration*, 0(0), 1-20.
<https://doi.org/10.1177/09520767241246654>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-2021---2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Paroli, H., SE, M. M., Arifin, H., & SH, M. P. (2025). Kewirausahaan Membentuk Jiwa Enterpreneur dan Technopreneu. Takaza Innovatix Labs.
- Pasaribu, S. I., Vanclay, F., & Zhao, Y. (2020). Challenges to Implementing Socially- Sustainable Community Development in Oil Palm and Forestry Operations in Indonesia. *Land*, 9(3), 61. <https://doi.org/10.3390/land9030061>
- Peattie, K. (2001). Towards sustainability: The third age of green marketing. *The Marketing Review*, 2(2), 56–71. <https://doi.org/10.1362/1469347012569314>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia , Nomor 119/PMK.07 /2022 Tentang
- Pérez-Mesa, J. C., Piedra-Muñoz, L., Galdeano-Gómez, E., & Giagnocavo, C. (2021). Management Strategies and Collaborative Relationships for Sustainability in the Agrifood Supply Chain. *Sustainability*, 13(2), 749. <https://doi.org/10.3390/su13020749>
- Peterson K. Ozili. (2023). Sustainable Development Goals and bank profitability.
- Phiri, V. (2021). Sustainable finance. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/359270189_SUSTAINABLE_FINANCE
- Piao, X., Xie, J., Managi., S. (2022). Environmental, social, and corporate governance activities with employee psychological well-being improvement. *BMC Public Health* 22, 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12350-y>

- Piao, Xiang, Jun Xie dan Shunsuke Managi. (2022). Environmental, social, and corporate governance activities with employee psychological well-being improvement. *BMC Public Health* 22:22 <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12350-y>
- PII. (2024, September 27). Indonesia on the Road to the 2030 SDGs: Sustainable Development Challenges and Commitments (A. Amanda,Ed.). Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-on-the-road-to-the-2030-sdgs-sustainable-development-challenges-and-commitments?lang=2>
- PIMCO. (2025). Understanding green, social and sustainability bonds. Pacific Investment Management Company LLC. <https://www.pimco.com/gbl/en/resources/education/understanding-green-social-and-sustainability-bonds>
- Ping Xin Liew. at.al. (2023). The role of financial inclusion in achieving finance related sustainable development goals (SDGs): a cross country analysis, , *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 2023, Vol. 36, No. 3, 2212028, <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2212028>,
- Poirazi, E., Zournatzidou, G., Konteos, G., & Sariannidis, N. (2025). Analyzing the Interconnection Between Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria and Corporate Corruption: Revealing the Significant Impact of Greenwashing. *Administrative Sciences*, 15(3), 100. <https://doi.org/10.3390/admsci15030100>
- Principles for Responsible Investment (PRI). (2020). ESG integration in financial analysis: A guide for investors. <https://www.unpri.org>

- Purba MI, Simanjutak DCY, Malau YN, Sholihat W, Ahmadi EA. The effect of digital marketing and e- commerce on financial performance and business sustainability of MSMEs during COVID-19 pandemic in Indonesia. *Int j data netw sci* [Internet]. 2021;5(3):275–82. Available from: <http://dx.doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.6.006>
- Purnamasari, R., & Rismala. (2024). FINTECH Dan Akseptabilitasnya Terhadap UMKM. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 252–259. <https://doi.org/10.52005/Aktiva.V6i3.245>
- Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. (2022). *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief* (Vol. 02, Edisi 06, April 2022). ISSN 2775-7994.
- Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). REVITALIZATION OF WAQF MANAGEMENT FOR SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF EAST LUWU. *Al-Risalah*, 12(2), 297. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>
- PWC. (2025). How to measure your ESG performance. In <https://www.pwc.com/ca/en/today-s-issues/environmental-social-and-governance/measure-esg-performance.html>. PWC.
- Rachman, S. (2017). ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKTOR MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ad Ministrare*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2567>
- Rachman, T. (2024). *Peluang Pasar Sukuk Hijau di Asia Tenggara*. Jakarta: Gramedia.
- Rachmawati, Dwi, Udriyah, Nur Fitri Dewi. 2024, Analisis Strategi Green Branding Sebagai Usaha Menciptakan Sustainable Competitive Advantage Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Di Era Ekonomi Global Pada Brand Fashion Lokal

- Rahmawati, N. (2024). *Fintech Syariah dan Ekonomi Berkelanjutan di Asia Tenggara*. Yogyakarta: UII Press.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic sustainable finance support sustainable development goals to avert financial risk in the management of Islamic finance products? A critical literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236.
<https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Riananda, R., & Fasa, M. I. (2025). Peranandan Dampak Green Bankingdalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia. 2.
- Rifkin, J. (2011). The third industrial revolution: How lateral power is transforming energy, the economy, and the world. Palgrave Macmillan.
- Rind, A.A., Akbar, S., Boubaker, S., Jajili-Jarjir, S., & Mollah, S. (2022). The Role of Peer Effects in Corporate Employee Welfare. *PoliciesBritish Journal of Management*, 33, 1609–1631. DOI: 10.1111/1467-8551.12513
- Riyanti, Y. E., & Murwaningsari, E. (2023). Corporate Governance Role as Moderating Green Intellectual Capital and Green Accounting Influence on Sustainable Finance Implementation in IDX Listed Banks. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 4(8), 1593.
<https://doi.org/10.59188/devotion.v4i8.545>
- Rizzello, A., & Kabli, A. (2020). Sustainable financial partnerships for the sdgs: The case of social impact bonds. *Sustainability*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/su12135362>
- Robbins Stephen P, 2007, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa :Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 12(1). <https://doi.org/10.21107/djs.v12i1.21482>
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). **Bank Management & Financial Services** (9th ed.). McGraw-Hill.
- Rossolini, M., Pedrazzoli, A., & Ronconi, A. (2021). Greening crowdfunding campaigns: an investigation of message framing and effective communication strategies for funding success. *International Journal of Bank Marketing*, 39(7), 1395. <https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2021-0039>
- Sabdo, S., & Fajar, M. S. (2023). WAKAF PRODUKTIF DAN PENINGKATAN TARAF HIDUPUMAT (STUDI KASUS WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH METRO). *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.1.1-24>
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211.
- Sadat, A., & Samri, Y. J. . (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 1(5), 249-260. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Salgado, at.al. (2023). *Human Resource Management and Sustainability : Bridging the 2030. agenda*. Sonia Medina- Corporate Social Responsibility and Environmental Management published by ERP Environment and John Wiley & Sons Ltd.
- Salsabila, H. (2022). **Wakaf Produktif dan Digitalisasi Ekonomi Umat**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Samsonsens,V. & Heggdalsvik, I.K., (2024). Critical realism as a fruitful approach to social work research as illustrated by two studies from the field of child and family welfare, *Journal of Critical Realism*, 23:1, 18-32, DOI: 10.1080/14767430.2023.2251238
- Santi, I. N., Parawangsa, I., Parani, S. B., & Lamusa, F. (2024). Eksplorasi Faktor Penghambat Adopsi Digital Marketing pada UMKM di Kota Palu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(2), 207. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i2.15036>
- Santoso, D. B., & Hartanto, A. D. (2020). *Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. UB Press.
- Santoso, L., & Huda, M. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.222-249>
- Sari, D., & Prasetyo, B. (2021). **Pemasaran Strategis Produk Keuangan Inklusif**. Malang: UB Press.
- SASB Standards Boards. (2025). SASB Standards overview. <https://sasb.ifrs.org/standards/>
- Sayer, Andrew. (2000). *Realism and Social Science*. London, SAGE Publications.
- Scheichet, A. (2024, December 16). Is sustainable finance the solution to funding sustainable development goal 13: Climate action? American University. <https://kogod.american.edu/news/is-sustainable-finance-the-solution-to-funding-sustainable-development-goal-13-climate-action>
- SE for All. (2024, March 27). Powering the sustainable development goals. Sustainable Energy for All | SEforALL. <https://www.seforall.org/data-stories/powering-the-sustainable-development-goals>

- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi, Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Senadheera, S. S., Withana, P. A., Dissanayake, P. D., Sarkar, B., Chopra, S. S., Rhee, J. H., & Ok, Y. S. (2021). Scoring environment pillar in environmental, social, and governance (ESG) assessment. *Sustainable Environment*, 7(1), 1960097.
- Septiana, E., Gemala, D. (2022). Challenges and Opportunities for the Development of Green Sukuk in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol 5, No. 3 (2022). <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5835>
- Setyowati, A. B. (2020). Governing sustainable finance: Insights from Indonesia. *Climate Policy*, 23(1), 108–121. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1858741>
- Sheth, J. N. (2011). Impact of emerging markets on marketing: Rethinking existing perspectives and practices. *Journal of Marketing*, 75*(4), 166–182. <https://doi.org/10.1509/jmkg.75.4.166>
- Shirazi, N. S., Aysan, A. F., & Nanaeva, Z. (2023). Open banking for financial inclusion: challenges and opportunities in Muslim-Majority countries. *Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability: Reframing the Approach in the Post-Pandemic Era*, 259–282. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_12
- Shmatov, C., & Castelli, C. R. (2022). *Quantitative methods for ESG finance*. John Wiley & Sons.
- Silvia, A., Viverita, V., & Chalid, D. A. (2024). The effects of formal institutions and national culture on equity-based financing in Islamic banks. *Pacific-Basin Finance Journal*, 86, 102467. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102467>

- Sorensen, J. (2025, January 7). Sustainable finance: Integrating environmental and social factors into financial decision-making. Preferred CFO. <https://preferredcfo.com/insights/sustainable-finance-integrating-environmental-and-social-factors-into-financial-decision-making>. Sustainability Directory. (2024, December 21). What are core elements of sustainable finance transparency? → question. Sustainability Directory. <https://sustainability-directory.com/question/what-are-core-elements-of-sustainable-finance-transparency/>
- Spangenberg, J.H.; Omann, I.; Hinterberger, F. (2002). Sustainable growth criteria. Minimum benchmarks and scenarios for employment and the environment. *Ecol. Econ.* 42, 429–443.
- Sreenu, N., & Mishra, S. (2023). Impact of green finance and fintech on sustainable economic growth: Empirical evidence from India. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16301>
- Stafford-Smith, M., Griggs, D., Gaffney, O., Ullah, F., Reyers, B., Kanie, N., Stigson, B., Shrivastava, P., Leach, M., & O'Connell, D. (2017). Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 12, 911–919. <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>
- Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah. (2022). Kantor Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Stella Aririguzoh, et.al, (2022). Communication Competencies, Culture and SDGs: effective processes to cross-cultural communication. *Humanities And Social Sciences Communications*, <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01109-4>.
- Sukmono, Sigit dan Jalinas, Efektivitas Strategi Branding dalam

Meningkatkan Nilai Pasarproduk Makanan Di Indonesia: Studi Tentang Budaya Lokal, Keberlanjutan, Dan Preferensi Konsumen, Jurnal Jaman, Vol 4No. 3 Desember2024–pISSN: 2828-691X, eISSN: 2828-688X, Hal. 43-47.

Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0. La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 57-68.

Suripno. (2025). Sustainability Dan ESG, Strategi Implementasi Di Korporasi (1st Ed.). CV Detak Pustaka.

Susanti, E., Oskar, D. P., Putra, U., & Yptk, I. (2018). Strategi Branding Dalam Membangun Ekuitas Merek UMKM (Studi Kasus: Pusat Oleh-Oleh Kota Padang). Ikraith Ekonomika, 1(2), 116–130.

Susanto, Y. K., Rudyanto, A., & Rahayuningsih, D. A. (2022). Redefining the Concept of Local Wisdom-Based CSR and Its Practice. Sustainability, 14(19), 12069.
<https://doi.org/10.3390/su141912069>

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2021). About SASB. Retrieved from <https://www.sasb.org/about/>

Sustainable Finance Indonesia. (n.d.). Keuangan berkelanjutan di Indonesia: Kebijakan, regulasi, dan praktik terbaik. Diakses dari <https://www.sustainablefinanceid.org/>

Syamsuri, S., Putri, E. R., Zein, A. R., & Handayani, R. (2021). SUKUK WAQF FOR THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS. ISLAMICONOMIC Jurnal Ekonomi Islam, 12(1).
<https://doi.org/10.32678/ijeiv12i1.267>

- Sypniewska, B., Baran, M. & Kłos, M. (2023). Work engagement and employee satisfaction in the practice of sustainable human resource management – based on the study of Polish employees. *Int Entrep Manag J* 19, 1069–1100
<https://doi.org/10.1007/s11365-023-00834-9>
- Tarnovskaya, V., Hånell, S. M., & Tolstoy, D. (2022). Proactive Corporate Sustainability via Social Innovation—A Case Study of the Hennes & Mauritz Grand Challenge in Bangladesh. *Sustainability*, 14(2), 599. <https://doi.org/10.3390/su14020599>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). (2017). Final report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. <https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). (2017). Final report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. <https://www.fsb-tcfd.org>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2025). TCFD Recommendations.
- Terimajaya, I. W., Hildawati, H., Haryono, G., Judijanto, L., Munizu, M., Waty, E., Boari, Y., Prabowo, P. K., & Suharyanto, S. (2024). *PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN: Fondasi Kesuksesan Organisasi Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Theotokas, I. N., Lagoudis, I. N., & Raftopoulou, K. (2024). Challenges of maritime human resource management for the transition to shipping digitalization. *Journal of Shipping and Trade*, 9(1), 6.
- Tjiptono, Fandy, 2008. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Andi Offset, 2008

- Tolchah, Moch., & Mu'ammam, M. A. (2019). ISLAMIC EDUCATION IN THE GLOBALIZATION ERA; CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 1031. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74141>
- Torres, L., Daniel Ripa, Aditya Jain, dan Juan Herrero, Stavroula Leka. (2023) The potential of responsible business to promote sustainable work – An analysis of CSR/ESG instruments. *Safety Science*. 164, 1-10, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106151>
- Trimulato, T. (2022). The role Sharia non-bank financial institutions to support SDGS Program. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(1), 79–106. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.1.14668>
- Umam, N., & Mukhtar, N. (2024). Integrasi Nilai Al-Qur'ân dan SDGs dalam Edukasi Hijau untuk PAUD. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 1855–1865. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6452>
- UN. (2023, July 10). Energy. United Nations Sustainable Development. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/>
- UN. (2025, January 14). Sustainable finance explained: Why it matters and how your business can lead. UN Global Compact. <https://unglobalcompact.org/journal/sustainable-finance-explained-why-it-matters-and-how-your-business-can-lead>
- UNDP (United Nations Development Programme). (2009). Capacity Assessment Methodology: User's Guide. [Digunakan untuk rapid assessment kapasitas organisasi sebelum program baru]. Link

- UNDP. (2015). Sustainable development goals. United Nations Development Programme.
<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- UNEP Finance Initiative. (2021). *Rethinking Impact to Finance the SDGs: A Position Paper and Call to Action*. Retrieved from <https://www.unepfi.org>
- UNEPFI. (2022). Rethinking impact to finance the sdgs. United Nation Environmnet Program Finance Initiative.
<https://www.unepfi.org/impact/rethinking-impact/>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Financing sustainable development: Moving from momentum to transformation in a time of crisis. <https://www.unep.org>
- United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). (2021). Rethinking Impact to Finance the SDGs. Geneva: UNEP FI. Retrieved from <https://www.unepfi.org>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). The Paris Agreement.
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf

- United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- UPPC Magazine. (n.d.). Evaluasi India terhadap peran Bank Dunia dalam pembangunan dan keberlanjutan. <https://www.uppcmagazine.com>
- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 80-104.
- Vandayani, P., & Rohmana, J. (2023). Evaluasi Pelatihan UKM Naik Kelas Pada Rumah BUMN Bandung. *ATRBIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 9(1), 149. <https://doi.org/10.38204/atrbis.v9i1.1440>
- Vanharanta, M. & Wong, P. (2024). Dialectic critical realism in business marketing: dialectic customer portfolio management. *Journal of Business & Industrial Marketing* 39(3), 474–490. DOI 10.1108/JBIM-07-2022-0333
- Wardana, A. B., Indriastuti, M., & Safitra, D. A. (2022). Indonesian Carbon Tax: How Newborn Learn to Jump into The Next Step? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 34–45.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Pustaka Abadi.
- Weber, O. (2014). Environmental, social and governance risk management in financial institutions. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(5), 639-655.
- Wibowo, R., & Hartati, D. (2020). *Perilaku Konsumen Muslim Digital dan Etika Finansial*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Rajawali Pers: Jakarta.

- Williams, A., Haack, P., & Haanaes, K. (2023). Putting the SDGs Back on Track. *Stanford Social Innovation Review*, 21(3), 40–47. <https://doi.org/10.48558/ODPW-ZM76>
- Wilson, C. (2010). Why should sustainable finance be given priority? Lessons from pollution and biodiversity degradation. *Accounting Research Journal*, 23(3), 267-280. <https://doi.org/10.1108/10309611011092592>
- World Bank Group. (n.d.). International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd>
- World Bank Group. (n.d.). International Finance Corporation (IFC). <https://www.ifc.org>
- World Bank. (2020). Country Partnership Framework: What is it and how does it work? <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies>
- World Bank. (2020). Pioneering the Green Sukuk: Three Years On. © World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/34569>
License: CC BY 3.0 IGODJPPR (2020)
- World Bank. (2020). What you need to know about green bonds. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/10/what-you-need-to-know-about-green-bonds>
- World Bank. (2020). World Bank Group Climate Change Action Plan 2021-2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive Development. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799>
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank Group.

- World Bank. (n.d.). How the World Bank helps countries reduce poverty and improve development outcomes.
<https://www.worldbank.org>:
- World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020. World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>
- World Economic Forum. (2025). Annual Meeting 2025 – Programme and themes.
<https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2025>
- Wright, P., & Wendy R. Boswell. (2002). Desegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management Research. *Journal of Management*, 28(3), 247–276. doi:10.1016/s0149-2063(02)00128-9
- Wynn, Donald E. & Williams, Clay K., (2012). Principles for Conducting Critical Realist Case Study Research in Information Systems. *MIS Quarterly*, 36(3), 787-810.
- Wynn, Donald E., Jr. & Williams, Clay K. (2020) Recent Advances and Opportunities for Improving Critical Realism-Based Case Study Research in IS. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(1), 50-89. DOI: 10.17705/1jais.00592
- Xiao, Y., Lin, M., & Wang, L. (2024). Impact of green digital finance on sustainable development: Evidence from China's pilot zones. *Financial Innovation*, 10(1), 1–32.
<https://doi.org/10.1186/s40854-023-00552-9>
- Yadav, N., Pathania, A., & Kaushik, M. R. (2024). Green Finance and its Role in Achieving Sustainable Development Goals: A Bibliometric Analysis. *Journal of WTO and International Business*, 26(2), 64–82.
- Yunus, Eddy, 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : Andi Offse

- Yusran, M. (2021). **Ekonomi Hijau dan Investasi Syariah**. Bandung: Alfabeta.
- Zabolotnyy, S., & Wasilewski, M. (2019). The concept of financial sustainability measurement: A case of food companies from Northern Europe. *Sustainability*, 11(18), 5139.
- Zahra, S. (2020). **Crowdfunding Syariah Berbasis Komunitas**. Jakarta: Rajagrafindo.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.
- Zauro, N. A., Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>
- ZCT. (2024, August 7). Why Sustainable Finance is Essential for Businesses Going Green? Zero Circle. <https://blog.zerocircle.eco/en/why-sustainable-finance-is-essential-for-businesses-going-green>
- Zhan, J. X., & Santos-Paulino, A. U. (2021). Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, channeling, and impact. *Journal of International Business Policy*, 4(1), 166–183. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00093-3>
- Zhang, T.; Zhang, J.; Tu, S. (2024). An Empirical Study on Corporate ESG Behavior and Employee Satisfaction: A Moderating Mediation Model. *Behav. Sci.*, 14, 274. <https://doi.org/10.3390/bs14040274>
- Zhang, Tong. (2022): Critical Realism: A Critical Evaluation, Social Epistemology, DOI: 10.1080/02691728.2022.2080127

- Zhu, Chen; Liu, Xue Chen, Dong Yue, Yuanyuan. (2024). Executive Compensation and Corporate Sustainability: Evidence from ESG Ratings. *Heliyon* 10(18):e32943. DOI:10.1016/j.heliyon .2024.e32943
- Ziolo, M., Bak, I., & Cheba, K. (2020). The role of sustainable finance in achieving sustainable development goals: Does it work? *Technological and Economic Development of Economy*, 27(1), 45–70.
<https://doi.org/10.3846/tede.2020.13863>
- Zulkarnain, I. (2022). *Produk Keuangan Syariah dan Dinamika Pasar Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.